



# PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2024

TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
TAHUN 2025-2045



PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR

**RPJPD KAB. KOTIM  
TAHUN 2025-2045**



**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
NOMOR 3 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR  
TAHUN 2025-2045**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025-2045;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran-Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);  
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang

- Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
  19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 Nomor 5);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR**

**dan**

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN  
TIMUR TAHUN 2025-2045.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung

sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.

8. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
9. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
10. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil RPJMD.
11. Arah Kebijakan Pembangunan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

## **Pasal 2**

- (1) RPJPD tahun 2025-2045 memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka Panjang.
- (2) Visi RPJPD tahun 2025-2045 adalah Kotim Sejahtera, Bermartabat, Maju dan Berkelanjutan.
- (3) Misi RPJPD tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut :
  - a. Misi 1 : mewujudkan transformasi sosial untuk membangun SDM yang sehat, unggul, berdaya saing dan adaptif;
  - b. Misi 2 : mewujudkan transformasi ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan;
  - c. Misi 3 : mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan adaptif;
  - d. Misi 4 : mewujudkan stabilitas ekonomi dan ketertiban umum;
  - e. Misi 5 : mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi;
  - f. Misi 6 : mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan;
  - g. Misi 7 : mewujudkan penyediaan infrastruktur melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar yang ramah lingkungan; dan

- h. Misi 8 : mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan.
- (4) RPJPD tahun 2025-2045 disusun sesuai dengan kondisi umum, karakteristik dan potensi daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, RPJPD Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten.

## **BAB II**

### **SISTEMATIKA PENULISAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Sistematika RPJPD tahun 2025-2045 adalah sebagai berikut :
- a. Bab I Pendahuluan;
  - b. Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah;
  - c. Bab III Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
  - d. Bab IV Visi dan Misi Daerah;
  - e. Bab V Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok Daerah;
  - f. Bab VI Penutup.
- (2) RPJPD tahun 2025-2045 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB III**

### **PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

#### **Pasal 4**

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD;
- (2) Pengendalian dan Evaluasi terhadap hasil RPJPD mencakup sasaran pokok, arah kebijakan, dan penahapan untuk mencapai visi dan mewujudkan misi pembangunan jangka panjang daerah yang digunakan untuk mengetahui:
- a. realisasi antara sasaran pokok RPJPD kabupaten dengan capaian sasaran RPJMD kabupaten; dan
  - b. realisasi antara capaian sasaran pokok RPJPD kabupaten dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang nasional.

- (3) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana ayat (1) dilakukan untuk memastikan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang dapat tercapai, untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang nasional.
- (4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **BAB IV**

#### **PERUBAHAN RPJPD**

##### **Pasal 5**

- (1) Perubahan RPJPD tahun 2025-2045 dapat dilakukan apabila :
  - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
  - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Perubahan yang mendasar sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf c mencakup terjadinya bencana alam, guncangan/krisis politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional dan provinsi.
- (3) Perubahan RPJPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### **BAB V**

#### **KETENTUAN PERALIHAN**

##### **Pasal 6**

- (1) Masa berlakunya RPJPD tahun 2025-2045 sejak tanggal 1 Januari 2025
- (2) Ketentuan mengenai RPJMD yang telah ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

**BAB VI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Timur.

Ditetapkan di Sampit

pada tanggal **30 Agustus** 2024  
BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,



**HALIKINNOR**

Diundangkan di Sampit

pada tanggal **30 Agustus** 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR,



**HAJRUR RAHMAN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2024  
NOMOR **3**

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR, PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH : 02, 51 / 2024

## KATA PENGANTAR

Dalam rangka memajukan pembangunan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025-2045. Dokumen ini disusun dengan tujuan untuk memberikan arah dan strategi pembangunan daerah yang terpadu, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang sangat penting dalam memastikan keberhasilan pembangunan daerah.

Dokumen ini menyajikan berbagai informasi terkait dengan perencanaan pembangunan daerah, termasuk latar belakang, ruang lingkup, dan tujuan dari penyusunan RPJPD. Dokumen ini juga mencakup berbagai aspek penting seperti keamanan nasional, integritas wilayah, dan pengamanan kekayaan sumber daya alam nasional. Dalam penyusunan dokumen RPJPD ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur telah melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun dapat memberikan manfaat dan kontribusi yang besar bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan nasional. Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025-2045 ini disusun dengan berbagai pertimbangan dan analisis yang matang, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif mengenai arah dan strategi pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur.

Kami berharap dokumen ini dapat menjadi acuan yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam pembangunan daerah. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Sampit, 30 Agustus 2024

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**  
  
**HALIKINNOR**



## DAFTAR ISI

### SAMPUL

### PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2025-2045

### KATA PENGANTAR

|                     |          |
|---------------------|----------|
| DAFTAR ISI.....     | <b>i</b> |
| DAFTAR TABEL.....   | <b>V</b> |
| DAFTAR GAMBAR ..... | <b>X</b> |

|               |  |             |
|---------------|--|-------------|
| <b>BAB I</b>  | <b>PENDAHULUAN .....</b>   | <b>I-1</b>  |
| 1.1           | Latar Belakang .....   | I-1         |
| 1.2           | Dasar Hukum .....  | I-3         |
| 1.3           | Hubungan Antar Dokumen.....  | I-6         |
| 1.3.1         | Keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN).....                              | I-7         |
| 1.3.2         | Keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Tengah .....    | I-7         |
| 1.3.3         | Keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur ..... | I-8         |
| 1.3.4         | Keterkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kotawaringin Timur .....                  | I-8         |
| 1.3.5         | Keterkaitan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Kotawaringin Timur.....            | I-8         |
| 1.3.6         | Keterkaitan dengan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).....                                     | I-9         |
| 1.4           | Maksud Dan Tujuan.....   | I-10        |
| 1.4.1         | Maksud .....   | I-10        |
| 1.4.2         | Tujuan.....  | I-11        |
| 1.5           | Sistematika Penyusunan .....   | I-11        |
| <b>BAB II</b> | <b>GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH .....</b>  | <b>II-1</b> |
| 2.1           | Aspek Geografi.....  | II-1        |
| 2.1.1         | Luas Wilayah dan Batas Administrasi .....  | II-1        |
| 2.1.2         | Topografi dan Kelerengan .....   | II-4        |
| 2.1.3         | Klimatologi .....  | II-7        |
| 2.1.4         | Geologi dan Kondisi Tanah .....  | II-9        |
| 2.1.5         | Hidrologi.....   | II-13       |
| 2.1.6         | Penggunaan Lahan .....   | II-16       |
| 2.1.7         | Risiko dan Kerawanan Bencana .....   | II-20       |
| 2.2           | Aspek Demografi.....   | II-24       |
| 2.3           | Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....   | II-26       |
| 2.3.1         | Kesejahteraan Ekonomi.....   | II-27       |
| 2.3.1.1       | Pertumbuhan Ekonomi.....   | II-27       |
| 2.3.1.2       | Tingkat Pengangguran Terbuka .....   | II-29       |
| 2.3.1.3       | Inflasi .....  | II-31       |
| 2.3.1.4       | Indeks Gini.....   | II-32       |
| 2.3.1.5       | Kondisi Kemiskinan.....  | II-33       |
| 2.3.2         | Kesejahteraan Sosial.....  | II-35       |
| 2.3.2.1       | Angka Melek Huruf.....   | II-35       |



|          |  |        |
|----------|--|--------|
| 2.3.2.2  | Rata-rata Lama Sekolah .....   | II-36  |
| 2.3.2.3  | Harapan Lama Sekolah (HLS) .....   | II-36  |
| 2.3.2.4  | Usia Harapan Hidup .....   | II-37  |
| 2.3.2.5  | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....   | II-38  |
| 2.4      | Aspek Pelayanan Umum .....   | II-40  |
| 2.4.1    | Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan<br>Dengan Pelayanan Dasar ..... | II-40  |
| 2.4.1.1  | Pendidikan .....   | II-40  |
| 2.4.1.2  | Kesehatan.....   | II-42  |
| 2.4.1.3  | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....   | II-47  |
| 2.4.1.4  | Ketentraman dan Ketertiban Umum serta<br>Perlindungan Masyarakat.....          | II-52  |
| 2.4.1.5  | Sosial.....  | II-54  |
| 2.4.2    | Fokus Urusan Pemerintahan Wajib bukan<br>Pelayanan Dasar.....                  | II-55  |
| 2.4.2.1  | Tenaga Kerja.....  | II-55  |
| 2.4.2.2  | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.....                              | II-57  |
| 2.4.2.3  | Ketahanan Pangan .....   | II-63  |
| 2.4.2.4  | Pertanahan.....  | II-66  |
| 2.4.2.5  | Lingkungan Hidup.....  | II-66  |
| 2.4.2.6  | Kependudukan dan Pencatatan Sipil .....  | II-69  |
| 2.4.2.7  | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa .....   | II-72  |
| 2.4.2.8  | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ...                               | II-73  |
| 2.4.2.9  | Perhubungan.....   | II-79  |
| 2.4.2.10 | Komunikasi dan Informatika .....   | II-82  |
| 2.4.2.11 | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah .....                                       | II-84  |
| 2.4.2.12 | Penanaman Modal .....  | II-85  |
| 2.4.2.13 | Kepemudaan dan Olah Raga.....  | II-87  |
| 2.4.2.14 | Statistik.....   | II-89  |
| 2.4.2.15 | Persandian .....   | II-90  |
| 2.4.2.16 | Kebudayaan.....  | II-90  |
| 2.4.2.17 | Perpustakaan .....   | II-91  |
| 2.4.2.18 | Kearsipan .....  | II-93  |
| 2.4.3    | Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan .....  | II-94  |
| 2.4.3.1  | Perikanan .....  | II-94  |
| 2.4.3.2  | Pariwisata.....  | II-97  |
| 2.4.3.3  | Pertanian.....   | II-98  |
| 2.4.3.4  | Kehutanan.....   | II-102 |
| 2.4.3.5  | Energi.....  | II-102 |
| 2.4.3.6  | Perdagangan.....   | II-103 |
| 2.4.3.7  | Perindustrian.....   | II-105 |
| 2.4.3.8  | Transmigrasi .....   | II-106 |
| 2.4.4    | Fokus Urusan Penunjang .....   | II-106 |
| 2.4.4.1  | Perencanaan Pembangunan .....  | II-106 |
| 2.4.4.2  | Keuangan .....   | II-107 |
| 2.4.4.3  | Pendapatan Asli Daerah (PAD).....  | II-108 |
| 2.4.4.4  | Kepegawaian.....   | II-112 |
| 2.4.4.5  | Penelitian dan Pengembangan .....  | II-113 |
| 2.5      | Aspek Daya Saing Daerah.....   | II-114 |
| 2.5.1    | Daya Saing Ekonomi Daerah .....  | II-114 |
| 2.5.1.1  | Pertumbuhan PDRB .....   | II-114 |
| 2.5.1.2  | PDRB Per Kapita.....   | II-120 |
| 2.5.2    | Daya Saing Sumber Daya Manusia.....  | II-121 |
| 2.5.2.1  | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) .....   | II-121 |



|  |  |        |
|--|--|--------|
| 2.5.2.2  | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)....  | II-122 |
| 2.5.2.3  | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).....   | II-124 |
| 2.5.3  | Daya Saing Infastruktur .....  | II-125 |
| 2.5.4  | Daya Saing Iklim Investasi.....  | II-128 |
| 2.5.4.1  | Indeks Daya Saing Daerah.....  | II-128 |
| 2.5.4.2  | Penanggulangan Kriminalitas .....  | II-129 |
| 2.5.4.3  | Kemudahan Perizinan.....   | II-130 |
| 2.6  | Evaluasi Hasil RPJPD Tahun 2005-2025 .....   | II-131 |
| 2.7  | Trend Demografi Dan Kebutuhan Sarana Prasarana<br>Pelayanan Publik .....   | II-149 |
| 2.7.1  | Proyeksi Penduduk .....  | II-149 |
| 2.7.2  | Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana.....   | II-151 |
| 2.7.2.1  | Proyeksi Kebutuhan Hunian.....   | II-152 |
| 2.7.2.2  | Proyeksi Kebutuhan Air Bersih .....  | II-153 |
| 2.7.2.3  | Proyeksi Kebutuhan Ketanagalistrikan .....   | II-155 |
| 2.7.2.4  | Proyeksi Kebutuhan Persampahan .....   | II-155 |
| 2.7.2.5  | Proyeksi Kebutuhan Pelayanan Pendidikan .....  | II-156 |
| 2.7.2.6  | Proyeksi Kebutuhan Pelayanan Kesehatan .....   | II-161 |
| 2.8  | Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah.....  | II-162 |
| 2.8.1  | Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah<br>Provinsi Kalimantan Tengah .....   | II-162 |
| 2.8.2  | Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah<br>Klaster Sampit .....   | II-164 |
| 2.8.3  | Rencana Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah<br>Kabupaten Kotawaringin Timur .....   | II-177 |
| 2.8.3.1  | Tujuan Penataan Ruang .....  | II-177 |
| 2.8.3.2  | Rencana Sistem Pemukiman .....   | II-181 |
| 2.8.3.3  | Rencana Kawasan Strategis.....   | II-185 |
| 2.8.3.4  | Indikasi Program Pemanfaatan Ruang.....  | II-188 |
| 2.9  | Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).....   | II-188 |
| <b>BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH III-1</b> |  |        |
| 3.1  | Permasalahan.....  | III-1  |
| 3.1.1  | Bidang Ekonomi .....   | III-1  |
| 3.1.2  | Bidang Sosial.....   | III-2  |
| 3.1.3  | Bidang Tata Kelola.....  | III-3  |
| 3.1.4  | Bidang Ketahanan dan Ekologi.....  | III-5  |
| 3.2  | Isu Strategis .....  | III-6  |
| 3.2.1  | Tren Pembangunan Global .....  | III-6  |
| 3.2.2  | Isu Pembangunan Nasional .....   | III-9  |
| 3.2.3  | Isu Pembangunan Provinsi .....   | III-13 |
| 3.2.4  | Isu Pembangunan Perwilayahan .....   | III-14 |
| 3.2.5  | Isu Strategis Daerah .....   | III-17 |
| 3.2.5.1  | Ketidakmampuan dalam Membangun Kemandirian<br>Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan .....  | III-17 |
| 3.2.5.2  | Perubahan Sosial di Kabupaten Kotawaringin<br>Timur Menuju Masyarakat Sehat, Sejahtera dan<br>Mandiri.....   | III-19 |
| 3.2.5.3  | Kebutuhan Peningkatan Kompetensi SDM,<br>Pelayanan Publik dan Tata Kelola<br>Pemerintahan di Kabupaten Kotawaringin Timur<br>Menuju Pemerintahan yang Efektif,<br>Berkeadilan, dan Berkelanjutan ..... | III-21 |



|               |  |             |
|---------------|--|-------------|
| 3.2.5.4       | Perubahan Kualitas Lingkungan dan Iklim di Kabupaten Kotawaringin Timur Menuju Masa Depan yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan..... | III-25      |
| <b>BAB IV</b> | <b>VISI DAN MISI DAERAH .....</b>  | <b>IV-1</b> |
| 4.1           | Visi Daerah.....   | IV-1        |
| 4.1.1.        | Rumusan Visi Daerah.....   | IV-1        |
| 4.1.2.        | Sasaran Utama Visi .....   | IV-7        |
| 4.2           | Misi Daerah .....  | IV-12       |
| <b>BAB V</b>  | <b>ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK.....</b>   | <b>V-1</b>  |
| 5.1           | Arah Kebijakan .....   | V-1         |
| 5.2           | Sasaran Pokok.....   | V-7         |
| 5.2.1         | Arah Pembangunan Daerah.....   | V-14        |
| 5.2.2         | Indikator Utama Pembangunan Daerah.....  | V-16        |
| <b>BAB VI</b> | <b>PENUTUP .....</b>   | <b>VI-1</b> |
| 6.1           | Kaidah Pelaksanaan .....   | VI-1        |
| 6.2           | Kaidah Pembiayaan Pembangunan.....   | VI-2        |



## DAFTAR TABEL

|            |  |       |
|------------|--|-------|
| Tabel 2.1  | Luas Administratif Kabupaten Kotawaringin Timur.....   | II-1  |
| Tabel 2.2  | Jumlah Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur..  | II-2  |
| Tabel 2.3  | Nama Sungai menurut rata-rata kedalaman, lebar dan panjang di Kabupaten Kotawaringin Timur ...             | II-14 |
| Tabel 2.4  | DAS di Kabupaten Kotawaringin Timur .....  | II-14 |
| Tabel 2.5  | Penggunaan Lahan di Kabupaten Kotawaringin Timur.....  | II-17 |
| Tabel 2.6  | Resiko Bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur.....  | II-21 |
| Tabel 2.7  | Jumlah Penduduk di Kabupaten Kotawaringin Timur.....   | II-25 |
| Tabel 2.8  | Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019-2023..... | II-30 |
| Tabel 2.9  | Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2019-2023.....  | II-36 |
| Tabel 2.10 | Harapan Lama Sekolah Tahun 2019-2023.....  | II-36 |
| Tabel 2.11 | Usia Harapan Hidup Tahun 2019-2023 .....   | II-37 |
| Tabel 2.12 | Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2023 .....   | II-41 |
| Tabel 2.13 | Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Per Kecamatan Tahun 2023.....                                    | II-41 |
| Tabel 2.14 | Rasio Siswa dan Guru Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Kab. Kotim Tahun 2019-2023.....                 | II-42 |
| Tabel 2.15 | Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023.....            | II-44 |
| Tabel 2.16 | Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Kotawaringin Timur .....   | II-45 |
| Tabel 2.17 | Jumlah Tenaga Kesehatan dan Rasio di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019-2023 .....                    | II-45 |
| Tabel 2.18 | Jumlah, Panjang dan Kondisi Jembatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019-2023 .....                    | II-48 |
| Tabel 2.19 | Ketersediaan Irigasi dan jaringan Sumber Daya Air Kab. Kotawaringin Timur Tahun 2019-2023 .....            | II-48 |
| Tabel 2.20 | Luasan Permukiman Kumuh dan Permukiman Kumuh di Perkotaan Tahun 2018-2022.....                             | II-52 |
| Tabel 2.21 | Korban Bencana Tahun 2018-2022 .....   | II-53 |
| Tabel 2.22 | Persentase tenaga kerja yang ditempatkan Tahun 2019-2023 .....   | II-56 |
| Tabel 2.23 | Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023.....   | II-60 |
| Tabel 2.24 | Angka Partisipasi Murni (APM) dan Rasio APM Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten                        |       |



|            |  |        |
|------------|--|--------|
|            | Kotawaringin Timur Tahun 2022-2023 .....   | II-63  |
| Tabel 2.25 | Tanah Dengan Hak dan Izin Lokasi .....   | II-66  |
| Tabel 2.26 | Rata-rata Jumlah Anak dalam Keluarga Tahun<br>2018-2022 .....  | II-78  |
| Tabel 2.27 | Data Anggota BKB, BKR, dan BKL Tahun<br>2020-2022 .....  | II-79  |
| Tabel 2.28 | Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan<br>2019-2023 .....  | II-81  |
| Tabel 2.29 | Jumlah Angkutan Umum Tahun 2019-2023 .....   | II-82  |
| Tabel 2.30 | Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Tahun<br>2018-2022 .....   | II-82  |
| Tabel 2.31 | Capaian Kinerja Urusan Komunikasi<br>dan Informatika Pemerintah Daerah Kabupaten<br>Kotawaringin Timur Tahun 2019-2023 ..... | II-83  |
| Tabel 2.32 | Capaian Kinerja Urusan Penanaman<br>Modal Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun<br>2019-2023 .....                              | II-86  |
| Tabel 2.33 | Standar Waktu Pelayanan Perizinan di Kabupaten<br>Kotawaringin Timur .....   | II-87  |
| Tabel 2.34 | Perkembangan Organisasi dan Prasarana<br>Olah Raga Di Kabupaten Kotawaringin Timur<br>Tahun 2019-2023 .....                  | II-88  |
| Tabel 2.35 | Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan<br>Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun<br>2019-2023 .....                                   | II-89  |
| Tabel 2.36 | Daftar Budaya Benda di Kabupaten<br>Kotawaringin Timur Tahun 2019-2023 .....   | II-90  |
| Tabel 2.37 | Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan<br>dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin<br>Timur Tahun 2019-2023.....                    | II-93  |
| Tabel 2.38 | Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan<br>(ADHK) di Kabupaten Kotawaringin Timur<br>Tahun 2019-2023 .....                     | II-94  |
| Tabel 2.39 | Data Kelompok Nelayan Tahun 2018-2022.....   | II-97  |
| Tabel 2.40 | Jumlah Pengunjung Wisata Kabupaten<br>Kotawaringin Timur Tahun 2019-2023 .....   | II-98  |
| Tabel 2.41 | Distribusi Sektor Pertanian Kabupaten<br>Kotawaringin Timur Tahun 2019-2023 .....  | II-98  |
| Tabel 2.42 | Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Tanaman<br>Pangan.....   | II-99  |
| Tabel 2.43 | Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan.....  | II-99  |
| Tabel 2.44 | Capaian Kinerja Urusan Kehutanan<br>Kabupaten Kotawaringin Timur Periode<br>2019-2023 .....                                  | II-102 |
| Tabel 2.45 | Layanan Listrik di Kabupaten Kotawaringin<br>Timur.....  | II-103 |
| Tabel 2.46 | Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten<br>Kotawaringin Timur Atas Dasar Harga<br>Berlaku Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah).....     | II-104 |
| Tabel 2.47 | Data Kelompok Pedagang Tahun 2018-2022.....  | II-105 |



|            |  |        |
|------------|--|--------|
| Tabel 2.48 | Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB<br>Kategori Industri Pengolahan Kabupaten<br>Kotawaringin Timur Tahun 2019-2023 .....                          | II-106 |
| Tabel 2.49 | Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten<br>Kotawaringin Timur Menurut Jenis<br>Pendapatan Tahun 2021-2022.....                               | II-108 |
| Tabel 2.50 | Persentase Kontribusi Dana Perimbangan<br>Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten<br>Kotawaringin Timur Tahun 2017-2021 .....                     | II-109 |
| Tabel 2.51 | Persentase Kontribusi Lain-lain Pendapatan<br>Yang Sah Terhadap Pendapatan Daerah<br>Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun<br>2017-2021 (%) ..... | II-110 |
| Tabel 2.52 | Data Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin<br>Timur Tahun 2018-2022.....  | II-112 |
| Tabel 2.53 | Data Penelitian dan Pengembangan Kabupaten<br>Kotawaringin Timur Tahun 2019-2023 .....   | II-114 |
| Tabel 2.54 | Produk Domestik Regional Bruto Menurut<br>Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (Milyar) .....  | II-117 |
| Tabel 2.55 | Distribusi Per Kategori Lapangan Usaha<br>Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku,<br>2019-2023 (Persen).....                                   | II-119 |
| Tabel 2.56 | Kondisi Permukaan Jalan di Kabupaten<br>Kotawaringin Timur Tahun 2019-2023 .....   | II-126 |
| Tabel 2.57 | Angka Kriminalitas dan Tindak Pidana<br>di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun<br>2021-2023 .....   | II-129 |
| Tabel 2.58 | Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian<br>Resort di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun<br>2019-2023 .....                                     | II-130 |
| Tabel 2.59 | Standar Waktu Pelayanan Perizinan di<br>Kabupaten Kotawaringin Timur .....   | II-131 |
| Tabel 2.60 | Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat<br>Pencapaian Kinerja RPJPD Kabupaten<br>Kotawaringin Timur .....                                       | II-132 |
| Tabel 2.61 | Proyeksi Jumlah Penduduk di Kabupaten<br>Kotawaringin Timur .....  | II-149 |
| Tabel 2.62 | Kepadatan Rata-rata Penduduk di<br>Kabupaten Kotawaringin Timur .....  | II-150 |
| Tabel 2.63 | Proyeksi Kebutuhan Hunian Kabupaten<br>Kotawaringin Timur Tahun 2025-2045 .....  | II-152 |
| Tabel 2.64 | Proyeksi Kebutuhan Air Bersih .....  | II-154 |
| Tabel 2.65 | Proyeksi Kebutuhan Listrik.....  | II-155 |
| Tabel 2.66 | Proyeksi Kebutuhan Prasarana Persampahan.....  | II-155 |
| Tabel 2.67 | Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan<br>Taman Kanak-kanak/Raudatul Athfal .....  | II-157 |
| Tabel 2.68 | Proyeksi Kebutuhan Sarana<br>Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah .  | II-158 |
| Tabel 2.69 | Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan<br>Sekolah Menengah Pertama/Madrasah  |        |



|            |  |        |
|------------|--|--------|
|            | Tsanawiyah.....  | II-159 |
| Tabel 2.70 | Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah.....  | II-160 |
| Tabel 2.71 | Proyeksi Kebutuhan Unit Tempat Tidur Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025-2045.....   | II-161 |
| Tabel 2.72 | Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025-2045.....   | II-162 |
| Tabel 2.73 | Pembagian Zona dan Klaster di Kalimantan Tengah.....   | II-163 |
| Tabel 2.74 | Sasaran Program RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 di Kabupaten Kotawaringin Timur .....  | II-166 |
| Tabel 2.75 | Rencana Pola Ruang Kabupaten Kotawaringin Timur.....   | II-178 |
| Tabel 2.76 | Sistem Pusat Permukiman .....  | II-183 |
| Tabel 3.1  | Isu Strategis Nasional .....   | III-9  |
| Tabel 4.1  | Rumusan Pernyataan Visi Kabupaten Kotawaringin Timur 2045 .....  | IV-2   |
| Tabel 4.2  | Penjelasan Visi Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025-2045 .....   | IV-4   |
| Tabel 4.3  | Penyelarasan Visi RPJPD Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Visi RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah dan Visi RPJP Nasional.....                          | IV-6   |
| Tabel 4.4  | Padanan Visi RPJPD Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Visi RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah dan Visi RPJP Nasional.....                               | IV-6   |
| Tabel 4.5  | Padanan Visi RPJPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025-2045 dengan Visi Rekomendasi KLHS dan Tujuan RTRW Kabupaten Kotawaringin Timur .....        | IV-6   |
| Tabel 4.6  | Sasaran Utama Visi, Indikator dan Target Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025-2045 .....  | IV-8   |
| Tabel 4.7  | Penyelarasan Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Sasaran Visi RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah dan Sasaran Visi RPJP Nasional ..... | IV-10  |
| Tabel 4.8  | Penyelarasan Sasaran Misi RPJPD Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Sasaran Misi RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah dan Sasaran Misi RPJP Nasional ..... | IV-12  |
| Tabel 5.1  | Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025-2045 .....  | V-3    |
| Tabel 5.2  | Arah Kebijakan Pembangunan Klaster Sampit.....   | V-4    |
| Tabel 5.3  | Perumusan Sasaran Pokok Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025-2045 .....   | V-8    |



|           |  |      |
|-----------|--|------|
| Tabel 5.4 | Sasaran Pokok .....  | V-10 |
| Tabel 5.5 | Penyelarasan Arah Pembangunan RPJPD .....  |      |
|           | Kabupaten Kotawaringin Timur .....   | V-15 |
| Tabel 5.6 | Penyelarasan Indikator Utama Pembangunan Daerah RPJPD Kabupaten Kotawaringin Timur ... | V-17 |
| Tabel 5.7 | Indikator Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur .....                  | V-29 |

## DAFTAR GAMBAR

|             |  |       |
|-------------|--|-------|
| Gambar 1.1  | Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen lainnya..   | I-7   |
| Gambar 2.1  | Batas Administrasi Kabupaten Kotawaringin Timur .....  | II-3  |
| Gambar 2.2  | Peta Kelerengan Kabupaten Kotawaringin Timur .....   | II-6  |
| Gambar 2.3  | Peta Curah Hujan Kabupaten Kotawaringin Timur .....  | II-8  |
| Gambar 2.4  | Peta Geologi Kabupaten Kotawaringin Timur ...  | II-11 |
| Gambar 2.5  | Peta Jenis Tanah Kabupaten Kotawaringin Timur .....  | II-13 |
| Gambar 2.6  | Peta Hidrologi Kabupaten Kotawaringin Timur.   | II-16 |
| Gambar 2.7  | Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Kotawaringin Timur .....   | II-20 |
| Gambar 2.8  | Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Kotawaringin Timur .....  | II-22 |
| Gambar 2.9  | Risiko Bencana Kekeringan di Kab. Kotawaringin Timur .....   | II-23 |
| Gambar 2.10 | Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kotawaringin Timur .....   | II-24 |
| Gambar 2.11 | Komposisi Jenis Kelamin Penduduk Tahun 2023 .....  | II-25 |
| Gambar 2.12 | Piramida Penduduk Kotawaringin Timur Tahun 2023 .....  | II-26 |
| Gambar 2.13 | Trend Pertumbuhan Ekonomi Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023 .....                                   | II-28 |
| Gambar 2.14 | Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 .....  | II-29 |
| Gambar 2.15 | Perkembangan Tingkat Inflasi Kota Sampit, Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2023 (persen) .....                   | II-31 |
| Gambar 2.16 | Indeks Pemerataan Pendapatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019-2023 .....  | II-33 |
| Gambar 2.17 | Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalteng, dan nasional Tahun 2019-2023 ..... | II-34 |
| Gambar 2.18 | Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019-2023 (Persen) .....   | II-35 |
| Gambar 2.19 | Perkembangan IPM Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2023 .....                        | II-39 |
| Gambar 2.20 | Perkembangan Rasio Posyandu Terhadap Balita di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019-2023 .....                                    | II-43 |
| Gambar 2.21 | Perkembangan Jumlah Kasus Gizi Buruk   |       |

|             |  |       |
|-------------|--|-------|
|             | Tahun 2019-2023 .....  | II-47 |
| Gambar 2.22 | Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap Tahun 2019-2023.....  | II-47 |
| Gambar 2.23 | Rumah tangga dengan akses Air Minum Tahun 2018-2022 .....  | II-50 |
| Gambar 2.24 | Ketersediaan Rumah Layak Huni Tahun 2018-2022 .....  | II-51 |
| Gambar 2.25 | Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018-2022 .....   | II-52 |
| Gambar 2.26 | Tren Pelanggaran Terhadap Produk Hukum Daerah .....  | II-53 |
| Gambar 2.27 | Persentase Kejadian Kebakaran di WMK yang Tertangani dengan Tahun Sebelumnya .....   | II-54 |
| Gambar 2.28 | Jumlah Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019-2023 .....  | II-54 |
| Gambar 2.29 | Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial Tahun 2018-2022 .....   | II-55 |
| Gambar 2.30 | Rasio Kesempatan Kerja Tahun 2018-2022.....  | II-56 |
| Gambar 2.31 | Rasio Ketergantungan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019-2023 .....  | II-57 |
| Gambar 2.32 | Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kab. Kotawaringin Timur Tahun 2019-2023 .....  | II-58 |
| Gambar 2.33 | Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023 .....  | II-59 |
| Gambar 2.34 | Komposisi Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Menurut Periode dan Jenis Kelamin .....  | II-59 |
| Gambar 2.35 | Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum.....   | II-61 |
| Gambar 2.36 | Grafik Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus-Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Tahun 2018-2022 .....                                       | II-61 |
| Gambar 2.37 | Grafik Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Tahun 2018-2022 ..... | II-62 |
| Gambar 2.38 | Angkatan Kerja Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019-2023 .....  | II-62 |
| Gambar 2.39 | Ketersediaan Pangan Utama (Beras) Ton Kab. Kotawaringin Timur Tahun 2018-2022 ...  | II-64 |



|             |   |        |
|-------------|---|--------|
| Gambar 2.40 | Konsumsi Energi Perkapita Kab. Kotawaringin Timur Tahun 2019-2023 .....   | II-65  |
| Gambar 2.41 | Konsumsi Protein Perkapita Kab. Kotawaringin Timur Tahun 2019-2023 .....  | II-65  |
| Gambar 2.42 | Data Bayi Berakta Kelahiran Tahun 2018 - 2022 .....   | II-69  |
| Gambar 2.43 | Penerbitan Akte Kelahiran Tahun 2018 - 2022 .....   | II-70  |
| Gambar 2.44 | Penduduk ber-KTP per satuan penduduk Tahun 2018 - 2022 .....  | II-70  |
| Gambar 2.45 | Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Tahun 2018 - 2022 .....   | II-71  |
| Gambar 2.46 | Pasangan Berakta Nikah Tahun 2018 - 2022 ...  | II-71  |
| Gambar 2.47 | Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019-2023 .....  | II-74  |
| Gambar 2.48 | Pasangan Usia Subur (PUS) dan Peserta KB aktif di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018-2022 .....                                      | II-76  |
| Gambar 2.49 | Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Tahun 2018 - 2022 .....                        | II-77  |
| Gambar 2.50 | Pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49 Tahun, Tahun 2020-2022 .....  | II-78  |
| Gambar 2.51 | Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2018 - 2022 .....  | II-80  |
| Gambar 2.52 | Pemasangan Rambu-Rambu Tahun 2018 - 2022 .....  | II-81  |
| Gambar 2.53 | Jumlah Koperasi yang Aktif Kab. Kotawaringin Timur Tahun 2019 - 2023 .....  | II-85  |
| Gambar 2.54 | Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019- 2023 .....   | II-95  |
| Gambar 2.55 | Konsumsi Ikan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019-2023 .....  | II-96  |
| Gambar 2.56 | Produksi Perikanan Tangkap Kab. Kotawaringin Timur Tahun 2019- 2023 .....   | II-97  |
| Gambar 2.57 | Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB Tahun 2018-2022 .....   | II-100 |
| Gambar 2.58 | Produktivitas Padi Tahun 2018-2022 .....  | II-101 |
| Gambar 2.59 | Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2018-2022 .....  | II-102 |
| Gambar 2.60 | Rasio Ekspor dan Impor Terhadap PDRB Tahun 2018-2022 .....  | II-104 |
| Gambar 2.61 | Persentase Kontribusi Komponen Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017-2021 .....             | II-110 |
| Gambar 2.62 | Persentase Kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017 -2021 ..... | II-111 |



|             |  |        |
|-------------|--|--------|
| Gambar 2.63 | Perkembangan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019-2023 ..... | II-111 |
| Gambar 2.64 | ASN yang melakukan pelanggaran Tahun 2018-2022 .....   | II-113 |
| Gambar 2.65 | Perkembangan PDRB Per Kapita 2019-2023 (Juta Rupiah) .....   | II-121 |
| Gambar 2.66 | Rumus Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat .....   | II-123 |
| Gambar 2.67 | Perkembangan Ketenagakerjaan di Kab. Kotawaringin Timur Tahun 2019-2023 .....                              | II-125 |
| Gambar 2.68 | Perkembangan Kondisi Permukaan Jalan di Kab. Kotawaringin Timur Tahun 2019-2023 (Km) .....                 | II-127 |
| Gambar 2.69 | Proporsi Kondisi Jalan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 .....                                       | II-128 |
| Gambar 2.70 | Peta Pembagian Zona Wilayah di Kalimantan Tengah .....   | II-163 |
| Gambar 2.71 | Peta Pembagian Zona Wilayah Barat di Kalimantan Tengah .....   | II-164 |
| Gambar 2.72 | Peta Rencana Pola Ruang RTRW Kab. Kotawaringin Timur Tahun 2024-2043 .....                                 | II-180 |
| Gambar 2.73 | Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Pusat Permukiman di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024-2043 .....  | II-184 |
| Gambar 2.74 | Bahan Baku Smelter Bauksit di Cempaga Hulu.....  | II-185 |
| Gambar 2.75 | Kondisi KI Bagendang .....   | II-186 |
| Gambar 2.76 | Perkotaan Sampit Sebagai PKW Di Provisi Kalimantan Tengah.....   | II-186 |
| Gambar 2.77 | Peta Kawasan Strategis di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024-2043 .....                               | II-187 |
| Gambar 2.78 | Perumusan Indikasi Program Utama RTRW Kotawaringin Timur Tahun 2024-2044 .....                             | II-188 |
| Gambar 3.1  | Gambar Rencana Daerah Daerah Otonomi Baru (DOB) Pulau Kalimantan .....                                     | III-15 |
| Gambar 4.1  | Rumusan Visi Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025-2045 Berdasarkan Isu Strategis ...                    | IV-4   |
| Gambar 5.1  | Periodisasi Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur .....                                  | V-1    |



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 LATAR BELAKANG**

Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan Nasional. Dalam rangka untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran maka diperlukan perencanaan pembangunan Nasional. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Perencanaan Pembangunan Nasional terdiri atas perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh Kementerian/Lembaga dan perencanaan pembangunan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya. Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Ayat (3) menghasilkan: a. rencana pembangunan jangka panjang; b. rencana pembangunan jangka menengah; dan c. rencana pembangunan tahunan (UU No. 25 Tahun 2004).

Pada Tahun 2023 telah dilaksanakan evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025 untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan



Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 600.2.1/1570/SJ tentang Penyusunan Evaluasi Terhadap Hasil Pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025.

Dalam rangka memenuhi amanah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta menindaklanjuti rekomendasi dari hasil evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025, maka perlu disusun Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur yang berkesesuaian dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) memuat visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk periode 20 tahun, yang selanjutnya diterjemahkan oleh para calon Kepala Daerah ke dalam visi, misi, dan janji politik apabila terpilih, yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 5 tahunan. Adapun penyusunan rancangan RPJPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025-2045 didasarkan pada Instruksi Kemendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045. Instruksi Kemendagri (Inmendagri) Nomor 1 Tahun 2024 berperan sebagai pedoman penyusunan dokumen RPJPD 20 tahunan yang dibentuk dengan memperhatikan berbagai dokumen



perencanaan dan partisipatif melibatkan masyarakat pemangku kepentingan serta semangat mewujudkan pembangunan nasional dan daerah yang berkelanjutan Indonesia Emas 2045.

## 1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum dalam penyusunan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kotawaringin Timur 2025-2045 sebagai berikut:

1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor



- 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);
  10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6573);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



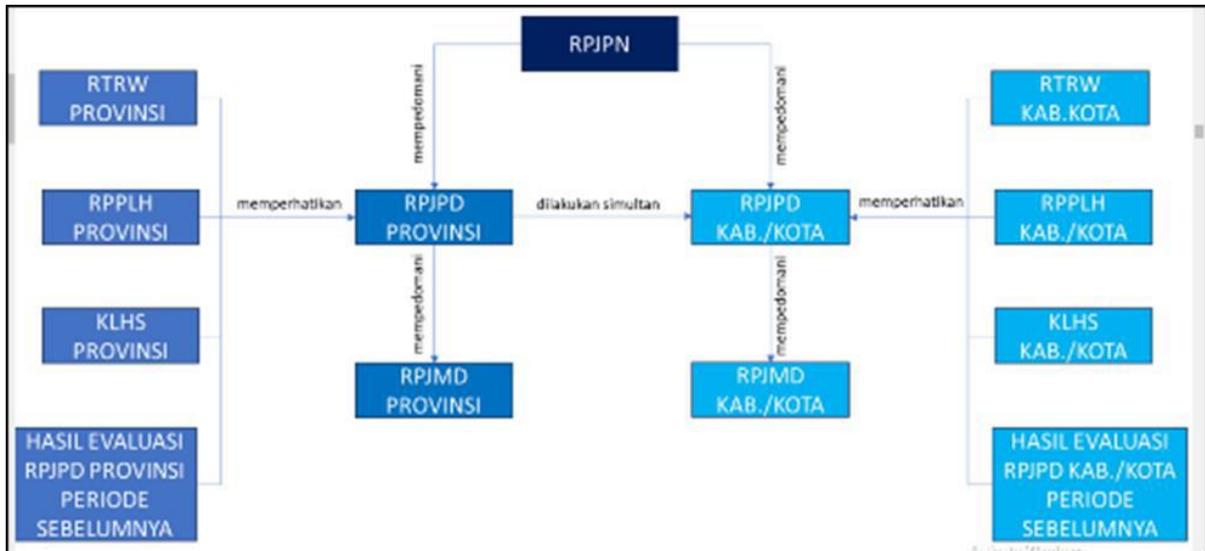
13. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2022-2050;



21. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015 Nomor 5);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 235); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 288);
23. Instruksi Kemendagri Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

### **1.3 HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN**

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai acuan pembangunan memiliki keterkaitan erat dengan dokumen-dokumen perencanaan lain, mulai dari Rencana Pembangunan. Hubungan antara RPJPD dengan dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada alur perencanaan sebagaimana berikut.



**Gambar 1.1 Keterkaitan RPJPD dengan Dokumen lainnya**

Sumber: Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045.

### 1.3.1 Keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang menjadi acuan bagi daerah dalam menyusun dokumen RPJPD Provinsi dan Kabupaten/Kota. RPJPD perlu diselaraskan RPJPN sebagai bentuk dukungan daerah terhadap pencapaian visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang nasional.

### 1.3.2 Keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Tengah

Mandat pembangunan RPJPN yang telah diregionalisasikan melalui RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah harus dapat diimplementasikan pada tataran Kabupaten Kotawaringin Timur. Untuk itu, RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah digunakan sebagai acuan dasar bagi penyusunan dokumen RPJPD Kabupaten Kotawaringin Timur yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Penyusunan RPJPD Kabupaten Kotawaringin Timur harus mengintegrasikan visi, misi, tujuan, target capaian, arah kebijakan dan sasaran strategis yang telah dirumuskan pada RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah.



### **1.3.3 Keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kotawaringin Timur**

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

### **1.3.4 Keterkaitan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kotawaringin Timur**

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). RTRW merupakan wujud susunan dari suatu tempat kedudukan yang berdimensi luas dan isi dengan memperhatikan struktur dan pola dari tempat tersebut. Tata ruang perlu memperhatikan struktur dan pola dari sebuah tempat berdasarkan sumber daya alam dan buatan yang tersedia, serta aspek administratif dan aspek fungsional. RPJPD dan RTRW saling terkait karena visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang dalam RPJPD harus selaras dengan pengaturan tata ruang yang diatur dalam RTRW. Keterkaitan ini membantu mengarahkan pembangunan fisik dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah agar selaras dan tidak bertentangan dengan rencana tata ruang daerah.

### **1.3.5 Keterkaitan dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten Kotawaringin Timur**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJPD. KLHS RPJPD merupakan Instrumen Pembangunan Berkelanjutan agar bisa dilaksanakan kedalam Dokumen Perencanaan Daerah. Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip Pembangunan Berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS RPJPD memadukan isu-isu Tujuan



Pembangunan Berkelanjutan, Daya Dukung Daya Tampung, dan Isu-isu daerah lainnya sebagai dasar dalam perumusan visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah.

### **1.3.6 Keterkaitan dengan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK)**

*Grand Design* Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022-2047 memiliki visi yaitu “Terwujudnya Penduduk yang Berkualitas Menuju Kabupaten Kotawaringin Timur Yang Mandiri, Maju, dan Sejahtera”. Dalam rangka mencapai visi tersebut, maka dalam Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022-2047 menetapkan misi sebagai berikut:

1. Menempatkan aspek kependudukan sebagai titik sentral pembangunan dan mengintegrasikan kebijakan kependudukan ke dalam kebijakan pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup, dalam rangka mewujudkan penduduk yang berkualitas menuju Kabupaten Kotawaringin Timur yang bermartabat, maju, berdaya saing, sejahtera dan mandiri.
2. Mendorong tercapainya jejaring (networking) kebijakan antar pemangku kepentingan di tingkat pusat maupun daerah dalam membangun tata kelola kependudukan untuk mendukung terciptanya pembangunan berkelanjutan.
3. Menciptakan sinkronisasi antar berbagai peraturan perundangan dan kebijakan pemerintah di tingkat pusat dan daerah tentang kependudukan.
4. Memfasilitasi perkembangan kependudukan ke arah yang seimbang antara jumlah, struktur, dan persebaran penduduk dengan lingkungan hidup, baik yang berupa daya dukung alam maupun daya tampung lingkungan serta kondisi perkembangan sosial dan budaya.
5. Mengintegrasikan kegiatan ekonomi secara sinergis antara wilayah pertumbuhan dengan wilayah perdesaan menjadi suatu sistem wilayah pengembangan ekonomi yang mampu menarik

- gerak keruangan penduduk yang aman, nyaman, cepat, dan terjangkau.
6. Membangun potensi dan sinergi aktor kependudukan, baik pada level individu, keluarga maupun masyarakat untuk meningkatkan kualitas penduduk yang mendukung pembangunan berkelanjutan.
  7. Membangun keluarga yang sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya keluarga dan jumlah anak yang ideal.
  8. Mewujudkan migrasi tenaga kerja lokal, nasional dan internasional secara terarah, tertib, teratur, dan terlindungi.
  9. Membuka peningkatan partisipasi masyarakat dan transparansi kebijakan dalam membangun tata kelola kependudukan yang berpusat pada manusia, termasuk membangun sistem informasi dan data kependudukan yang transparan dan akuntabel.
  10. Membangun kesadaran, sikap, dan kebijakan bagi kesamaan hak dan kewajiban antar kelompok, termasuk kesadaran gender bagi terciptanya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang demi tercapainya tujuantujuan pembangunan.

Secara umum, keterkaitan RPJPD dengan dokumen perencanaan di tingkat pusat yaitu adanya sinkronisasi, di mana perencanaan pembangunan daerah harus selaras dengan perencanaan pembangunan nasional, salah satunya antara lain dengan Surat Edaran Bersama (SEB). Sedangkan keterkaitan di tingkat daerah yaitu konsistensi, dimana sesuatu yang direncanakan dibuat anggarannya dan apa yang dianggarkan telah ada dasar perencanaannya.

## **1.4 MAKSUD DAN TUJUAN**

### **1.4.1 Maksud**

RPJPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025-2045 disusun dengan maksud untuk menjabarkan visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun dengan berpedoman pada RPJPN dan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah.



### 1.4.2 Tujuan

RPJPD Kabupaten Kotawaringin Timur 2025-2045 disusun dengan tujuan:

1. Menjaga arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur selama rentang tahun 2025-2045;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan pembangunan daerah jangka panjang antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Pemerintah Pusat;
3. Menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah lima tahunan yang dituangkan dalam RPJMD; dan
4. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan

### 1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. **BAB I PENDAHULUAN** Memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
2. **BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH** Memuat aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah, evaluasi hasil RPJPD tahun 2005-2025, tren demografi dan kebutuhan sarana dan prasana pelayanan publik dan pengembangan pusat pertumbuhan wilayah.
3. **BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS** Menguraikan permasalahan dan menjabarkan isu strategis dari akar permasalahan.
4. **BAB IV VISI DAN MISI DAERAH** Menjabarkan visi dan misi Kabupaten Kotawaringin Timur selama 20 tahun kedepan.
5. **BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK** Memuat arah kebijakan dan sasaran pokok melalui arah pembangunan daerah, arah kebijakan transformasi dan indikator utama pembangunan daerah.



6. **BAB VI PENUTUP** Memuat harapan pelaksanaan RPJPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025–2045 serta menggaris bawahi tentang pentingnya RPJPD bagi pembangunan daerah tahun 2025-2045.

## BAB II

### GAMBARAN UMUM DAN KONDISI DAERAH

#### 2.1 ASPEK GEOGRAFI

##### 2.1.1 Luas Wilayah dan Batas Administrasi

Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan salah satu wilayah di Kalimantan Tengah yang memiliki peran penting dalam perekonomian provinsi. Ibukota wilayah ini berada di Kota Sampit dan posisinya sangat strategis sebagai penyangga Ibu Kota Provinsi dengan jarak 227 Km dari Pusat Pemerintahan Provinsi Kalimantan Tengah.

Kabupaten Kotawaringin Timur terletak pada koordinat 112°7'29"-113°14'22" Bujur Timur dan 1°11'50"-3°18'51" Lintang Selatan dengan luas wilayah 16.796,00 Km<sup>2</sup>.

**Tabel 2.1 Luas Administratif Kabupaten Kotawaringin Timur**

| No. | Kecamatan             | Ibukota Kecamatan | Luas (Km <sup>2</sup> ) |
|-----|-----------------------|-------------------|-------------------------|
| 1   | Kota Besi             | Kota Besi         | 1.889,00                |
| 2   | Cempaga               | Cempaka Mulia     | 1.253,00                |
| 3   | Mentaya Hulu          | Kuala Kuayan      | 1.712,79                |
| 4   | Parenggean            | Parenggean        | 493,15                  |
| 5   | Baamang               | Baamang           | 639,00                  |
| 6   | Mentawa Baru Ketapang | Ketapang          | 726,00                  |
| 7   | Mentaya Hilir Utara   | Bagendang         | 725,00                  |
| 8   | Mentaya Hilir Selatan | Samuda            | 318,00                  |
| 9   | Pulau Hanaut          | Bapinang          | 620,00                  |
| 10  | Antang Kalang         | Tumbang Kalang    | 1.579,00                |
| 11  | Teluk Sampit          | Ujung Pandaran    | 610,00                  |
| 12  | Seranau               | Mentaya Seberang  | 548,00                  |
| 13  | Cempaga Hulu          | Pundu             | 1.183,00                |
| 14  | Telawang              | Sebabi            | 317,00                  |
| 15  | Bukit Santuai         | Tumbang Penyahuan | 1.636,00                |
| 16  | Tualan Hulu           | Luwuk Sampun      | 1.090,85                |
| 17  | Telaga Antang         | Tumbang Mangkup   | 1.456,21                |
|     | <b>Luas</b>           |                   | <b>16.796,00</b>        |

Sumber: Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002

Kabupaten Kotawaringin Timur terbagi menjadi 17 wilayah Kecamatan, 168 Desa dan 17 Kelurahan. Kecamatan yang memiliki wilayah paling luas yaitu Kecamatan Kota Besi dengan luas 1.889,00 km<sup>2</sup> atau 11,25% dari luas Kabupaten Kotawaringin Timur sedangkan kecamatan dengan luas wilayah paling kecil yaitu Kecamatan Telawang dengan luas wilayah hanya 317,00 km<sup>2</sup> atau 1,89% dari luas Kabupaten Kotawaringin Timur.

**Tabel 2.2 Jumlah Desa di Kabupaten Kotawaringin Timur**

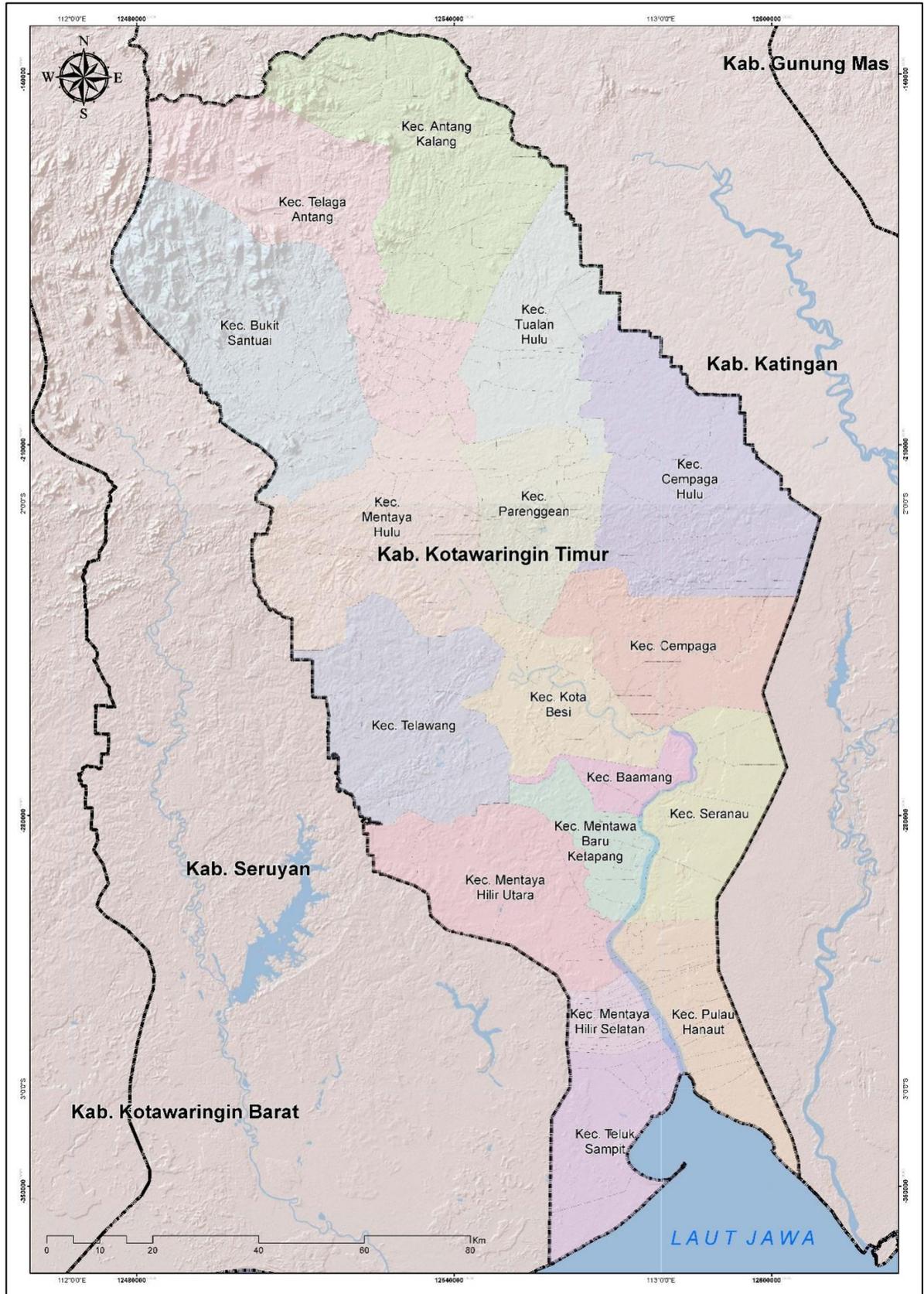
| Kecamatan             | Jumlah Kelurahan/Desa |      |      |      |      |
|-----------------------|-----------------------|------|------|------|------|
|                       | 2019                  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| Kota Besi             | 11                    | 11   | 11   | 11   | 11   |
| Cempaga               | 8                     | 8    | 8    | 8    | 8    |
| Mentaya Hulu          | 16                    | 16   | 16   | 16   | 16   |
| Parenggean            | 15                    | 15   | 15   | 15   | 15   |
| Baamang               | 6                     | 6    | 6    | 6    | 6    |
| Mentawa Baru Ketapang | 11                    | 11   | 11   | 11   | 11   |
| Mentaya Hilir Selatan | 10                    | 10   | 10   | 10   | 10   |
| Mentaya Hilir Utara   | 7                     | 7    | 7    | 7    | 7    |
| Pulau Hanaut          | 14                    | 14   | 14   | 14   | 14   |
| Antang Kalang         | 15                    | 15   | 15   | 15   | 15   |
| Teluk Sampit          | 6                     | 6    | 6    | 6    | 6    |
| Seranau               | 6                     | 6    | 6    | 6    | 6    |
| Cempaga Hulu          | 11                    | 11   | 11   | 11   | 11   |
| Telawang              | 6                     | 6    | 6    | 6    | 6    |
| Bukit Santuai         | 14                    | 14   | 14   | 14   | 14   |
| Tualan Hulu           | 11                    | 11   | 11   | 11   | 11   |
| Telaga Antang         | 18                    | 18   | 18   | 18   | 18   |
| Jumlah                | 185                   | 185  | 185  | 185  | 185  |

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka 2024

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur yang memiliki jumlah kelurahan/desa paling banyak adalah Kecamatan Telaga Antang, sedangkan Kecamatan Seranau merupakan wilayah dengan jumlah desa paling sedikit. Secara administratif, Kabupaten Kotawaringin Timur berbatasan dengan daerah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara dengan Kabupaten Katingan;
2. Sebelah Timur dengan Kabupaten Katingan;

3. Sebelah Selatan dengan Laut Jawa; dan
4. Sebelah Barat dengan Kabupaten Seruyan



**Gambar 2.1 Batas Administrasi Kabupaten Kotawaringin Timur**

Sumber: Draft RTRWP Provinsi Kalteng Tahun 2023,  
Delineasi batas administrasi oleh BIG tahun 2021, Hasil Analisa 2023

Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan salah satu wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah yang mempunyai letak strategis,

karena merupakan jalur perlintasan dari Ibukota Provinsi Kalimantan Tengah menuju Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kotawaringin Barat. Selain itu Kabupaten Kotawaringin Timur didukung dengan akses pelayaran karena berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Letak geografis Kabupaten Kotawaringin Timur berada di antara 112° 7' 29" sampai dengan 113° 14' 22" Bujur Timur dan 1° 11' 50" sampai dengan 3° 18' 51" Lintang Selatan.

### 2.1.2 Topografi dan Kelerengan

Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dibagi ke dalam beberapa wilayah fisiografis yang terdiri atas:

1. Dataran rendah, endapan pantai

Wilayah ini terdapat di tepi pantai, tepatnya pantai yang berbatasan dengan Laut Jawa, yang berjarak 2-5 km dari pantai. Dataran ini terbentuk dari hasil pengendapan pantai, yang berupa tanah kering atau sedikit tergenang dan memiliki tekstur kasar.

2. Dataran rendah, endapan sungai

Wilayah ini terdapat di tepian sungai yang berbelok-belok (meander) atau danau kecil. Letaknya agak tinggi, namun kadang-kadang tergenang dan banjir akibat limpahan air sungai. Dataran ini bertekstur tanah sedang sampai halus. Seluruh wilayah dataran rendah, baik yang berupa endapan sungai maupun endapan pantai, masih dipengaruhi oleh pasang surut air laut.

3. Lahan Gambut

Wilayah ini terletak di belakang wilayah endapan sungai (levee), yang terbentuk akibat hutan rawa monoton telah mencapai klomaks, sehingga terbentuk gambut yang cembung (*dome*).

4. Dataran rendah, batuan endapan pantai

Wilayah ini terletak agak ke hilir/tengah, terutama di sekitar Sungai Mentaya. Dataran ini membentang dari Pangkalan Bun sampai Palangkaraya terus ke timur. Pada wilayah ini air sulit mengalir keluar karena wilayah ini sangat datar, sehingga pada beberapa tempat drainase agak terhambat. Dataran ini memiliki tekstur tanah yang kasar.

5. Pegunungan/perbukitan batuan intrusi masam

Wilayah ini merupakan daerah patahan (*told*) dan lipatan (*fault*), terdapat di bagian hulu. Bentuk wilayah ini berbukit dan bergunung, yang didominasi oleh batuan endapan pasir dan liat dan diselingi dengan batuan intrusi yang umumnya masam.

6. Delta/Pulau

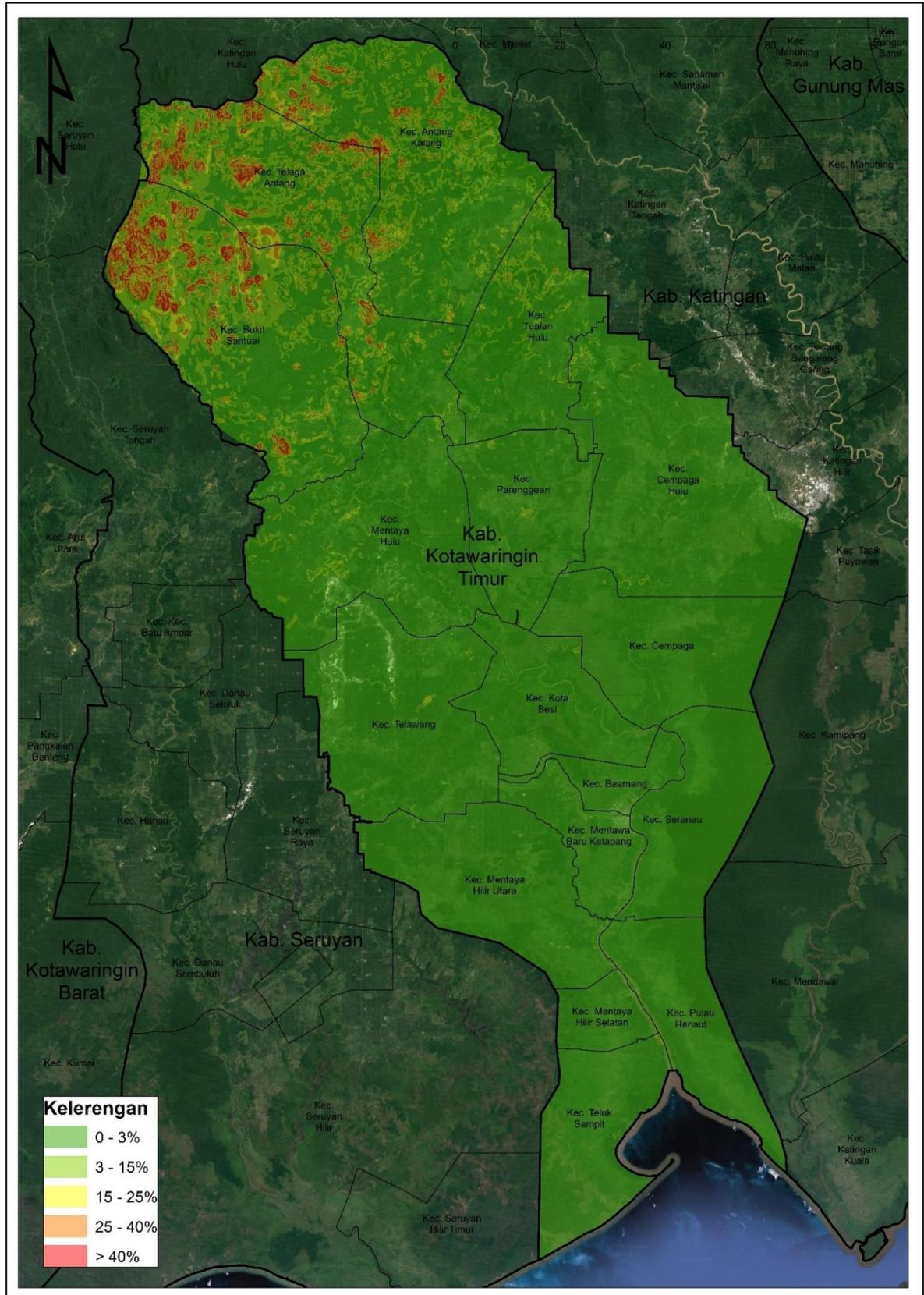
Merupakan daratan dengan luasan yang kecil di tengah laut maupun sungai.

7. Lain-Lain

Bagian yang termasuk lain-lain adalah tubuh air, diantaranya danau dan rawa, yaitu merupakan depresi atau cekungan yang airnya masih dalam. Pada daerah ini belum sempat terbentuk gambut.

Kabupaten Kotawaringin Timur didominasi oleh pegunungan/perbukitan intrusi masam dan dataran rendah batuan pantai. Pegunungan atau perbukitan terdapat pada bagian Utara wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. Pegunungan/perbukitan tersebut terdiri dari batuan intrusi dan endapan masam, sehingga memiliki kendala dalam pembudidayaan lahan.

Dataran rendah endapan pantai banyak ditemui pada bagian tengah dan pesisir Kabupaten Kotawaringin Timur. Selain dataran rendah dengan batuan pantai, pada bagian tengah Kabupaten Kotawaringin Timur juga memiliki kondisi fisiografis yang terdiri dari dome gambut, serta dataran rendah endapan sungai dan backswamps di sepanjang aliran sungai. Sedangkan pada bagian Selatan, fisiografis wilayahnya merupakan dome gambut dan dataran rendah endapan sungai. Pada bagian pesisir fisiografis wilayahnya terdiri dari dataran rendah endapan pantai. Kendala yang dihadapi Kabupaten Kotawaringin Timur terutama dalam membangun saluran air, dimana air sulit mengalir keluar serta kadang-kadang tergenang dan banjir. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.2.



**Gambar 2.2 Peta Kelerengan Kabupaten Kotawaringin Timur**

*Sumber : Hasil Analisa, 2023*

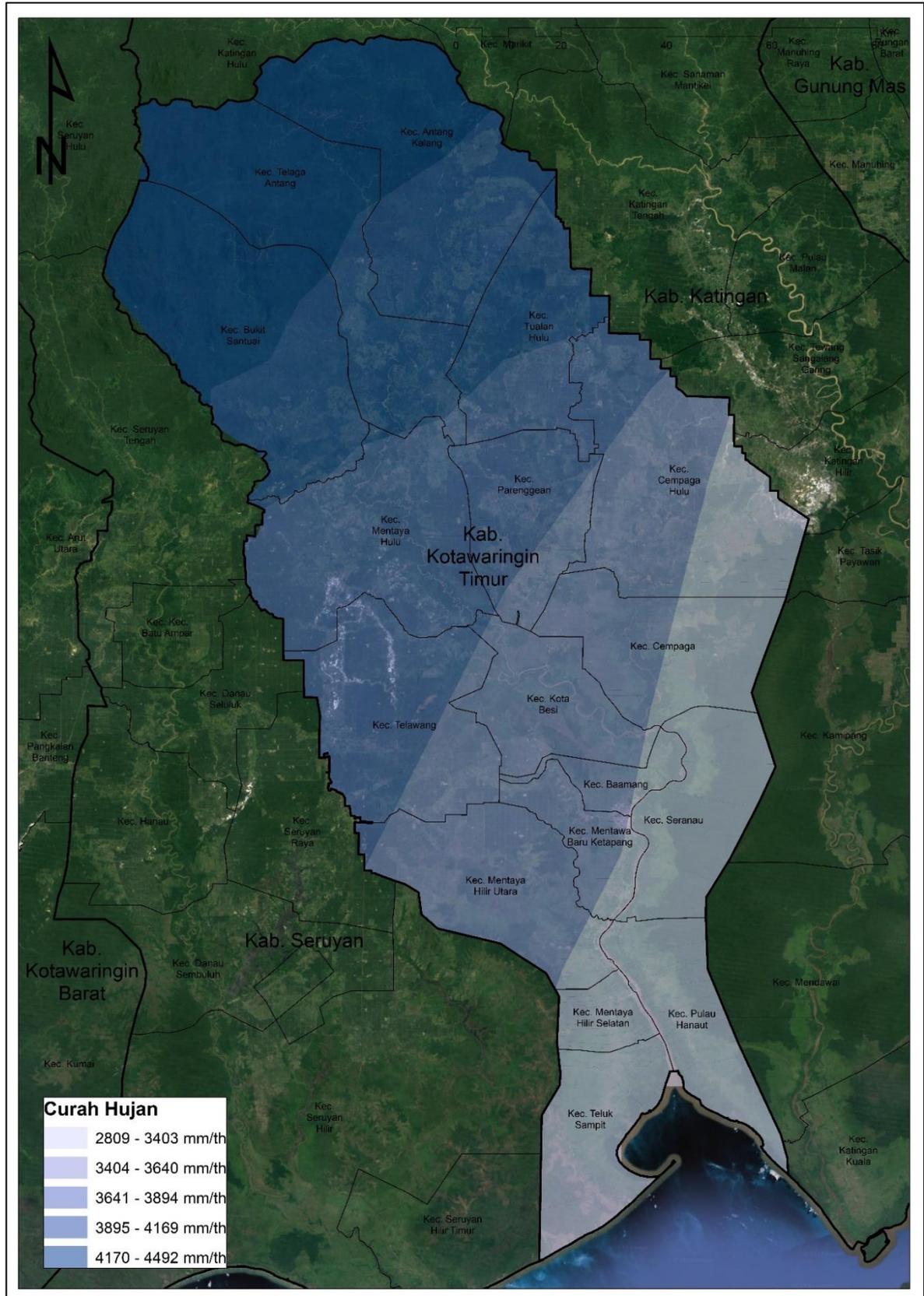


### 2.1.3 Klimatologi

Keadaan iklim di Kabupaten Kotawaringin Timur secara umum sama dengan wilayah lain di Indonesia yang termasuk iklim tropis, yaitu terdiri dari 2 musim, musim kemarau pada bulai Mei sampai bulan Oktober dan musim hujan pada bulan November sampai dengan bulan April. Keadaan ini berkaitan erat dengan arus angin yang bertiup di Indonesia. Pada bulan Juni sampai dengan September arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim kemarau di Indonesia.

Sebaliknya pada bulan Desember sampai dengan Maret arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudera Pasifik setelah melewati beberapa lautan, dan pada bulan-bulan tersebut biasanya terjadi musim hujan. Keadaan seperti ini berganti setiap setengah tahun setelah melewati masa peralihan pada bulan April-Mei dan Oktober-November. Data curah hujan Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada Gambar 2.3.

Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki Kelembaban udara terendah berada pada 44,00% dan maksimal 100,00%. Curah hujan berkisar antara 2000 – 4500 mm/tahun.



**Gambar 2.3 Peta Curah Hujan Kabupaten Kotawaringin Timur**

*Sumber : Hasil Analisa, 2023*

#### 2.1.4 Geologi dan Kondisi Tanah

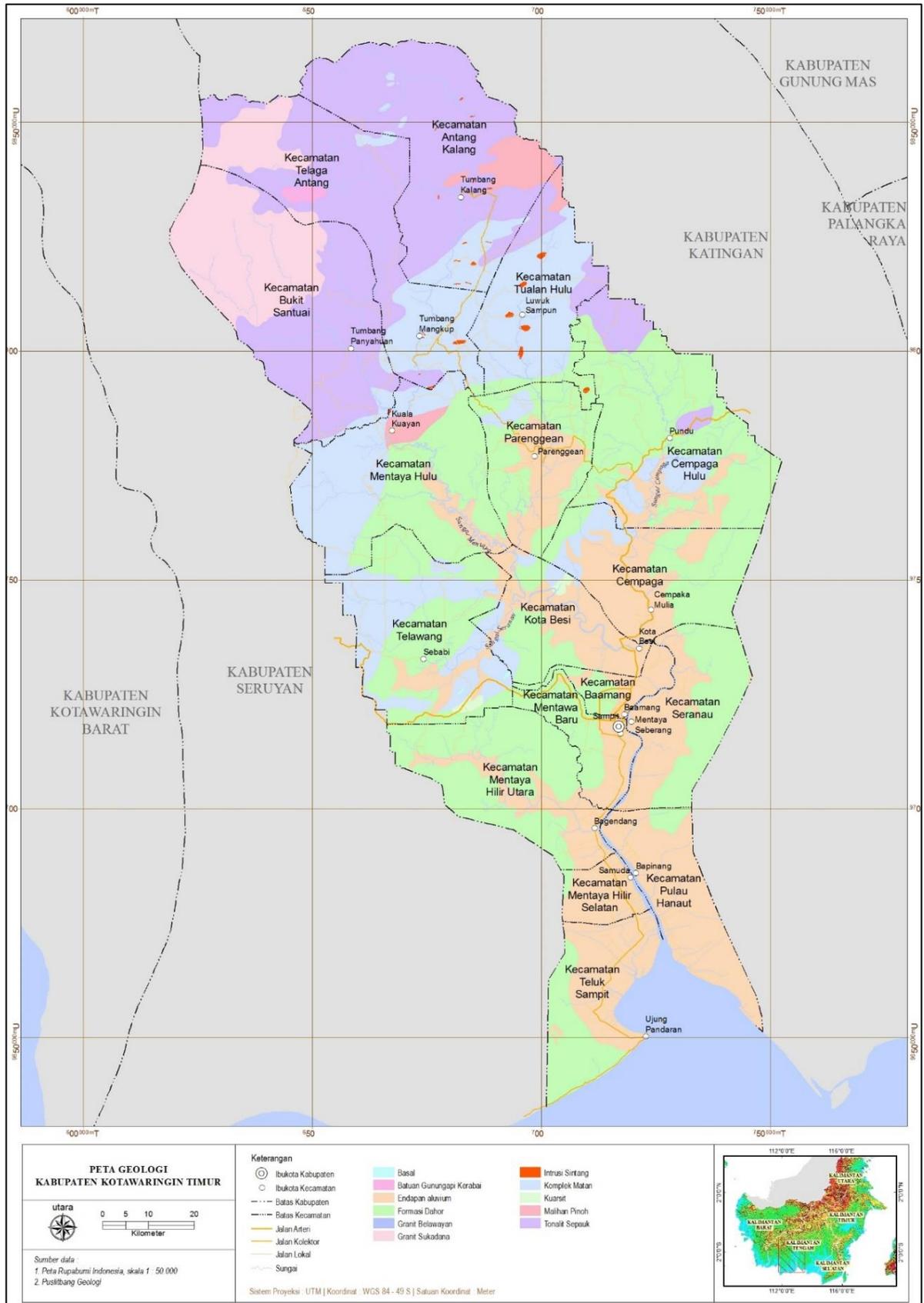
Geologi daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tersusun oleh lima jenis formasi yaitu Formasi Dahor, Formasi Kuayan, Formasi Mentaya, Formasi Pembuang dan endapan Aluvial. Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi masing- masing formasi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Formasi Dahor dapat ditemui di sebagian besar selatan wilayah kabupaten Kotawaringin Timur tepatnya pada bagian belakang disepanjang Daerah Aliran Sungai Mentaya. Satuan batuan (satuan litologi) penyusun formasi Dahor ini terdiri dari konglomerat dengan komponen fragmen kuarsif dan basal berselingan dengan batu pasir, batu lempung. Umur formasi ini diperkirakan Miosen Tengah sampai Pleistosen, berdasarkan korelasi dengan formasi Dahor dilembar Tewah (Sumintadipura, 1976). Tebal formasi ini diperkirakan 300 m yang diendapkan dilingkungan paralik.
2. Formasi Kuayan terletak di bagian tengah wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur tepatnya di Utara. Satuan batuan (satuan litologi) penyusun formasi Kuayan ini terdiri dari breksi dengan komposisi andesit dan basal, aliran lava, batu pasir tufaan dan tuf. Formasi ini tidak dapat ditentukan umurnya, tetapi di Kalimantan Barat, Van Emmichoven (1939) op. Cit. Margono U, dkk (1995) menemukan fosil di formasi ini berumur Trias.
3. Formasi Mentaya terletak disekitar Kota Kuala Kuayan. Satuan batuan (satuan litologi) penyusun Formasi Mentaya ini dibagian bawah didominasi oleh batu pasir sedangkan dibagian atas batu pasir arkosa berbutir halus-kasar, terdapat struktur silang siur (cross bedding) dan gelembur gelombang. Setempat terdapat sisipan konglomerat kuarsa dan batu lempung yang kadang-kadang mengandung batubara. Formasi ini diendapkan pada kala Eosen-Oligosen dalam lingkungan pengendapan litoral, setempat berupa rawa- rawa.
4. Formasi Pembuang terletak dibagian selatan wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur, terutama di sekitar Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Teluk Sampit dan Pulau Hanaut. Satuan batuan (satuan litologi) penyusun Formasi Pembuang ini terdiri dari batupasir

karbonan (carbonaceous sandstone), konglomerat (conglomerate), batu lanau (siltstone), batu lempung (claystone) dan gambut (peat).

5. Endapan aluvial, tersusun oleh endapan delta (deltaic deposit) dan endapan klastika tak terpisahkan (undifferentiated clastic deposit). Endapan delta terdiri dari pasir kasar-halus (coarse to fine grained sands), lanau (silt) dan lumpur (mud). Sedangkan endapan klastika tak terpisahkan terdiri dari pasir (sand), lanau (silt), lempung (clay) dan gambut (peat). Struktur geologi yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah struktur sesar/patahan (fault) dan kekar (join). Struktur patahan dapat memicu terjadinya bencana alam geologi. Daerah yang rawan terhadap bencana alam geologi ini antara lain Kecamatan Mentaya Hulu karena pada daerah ini terdapat struktur sesar/patahan. Potensi pertambangan bahan galian yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Timur antara lain batubara, bijih besi, emas primer (dengan asosiasi mineral perak dan atau mineral tembaga timah hitam atau seng), emas sekunder, kwarsa kristal (termasuk kecubung atau amethyst), bentonit, kaolin, pasir kwarsa, granit, basalt, gambut, dan tanah liat.

Kondisi geologi dapat dilihat pada Gambar 2.4 Kabupaten Kotawaringin Timur terdiri dari berbagai macam batuan, endapan, dan di beberapa bagian terdapat sesar. Struktur geologi tersebut mengakibatkan wilayah ini memiliki cukup banyak potensi bahan galian tambang yang dapat dimanfaatkan, baik bahan galian A, B, maupun C. Bahan-bahan galian yang banyak terdapat di wilayah ini meliputi batubara, air raksa, emas, kaolin, bijih besi, pasir kwarsa, granit, gambut, bauksit, dan lain-lain. Potensi bahan galian ini tersebar hampir di seluruh wilayah.



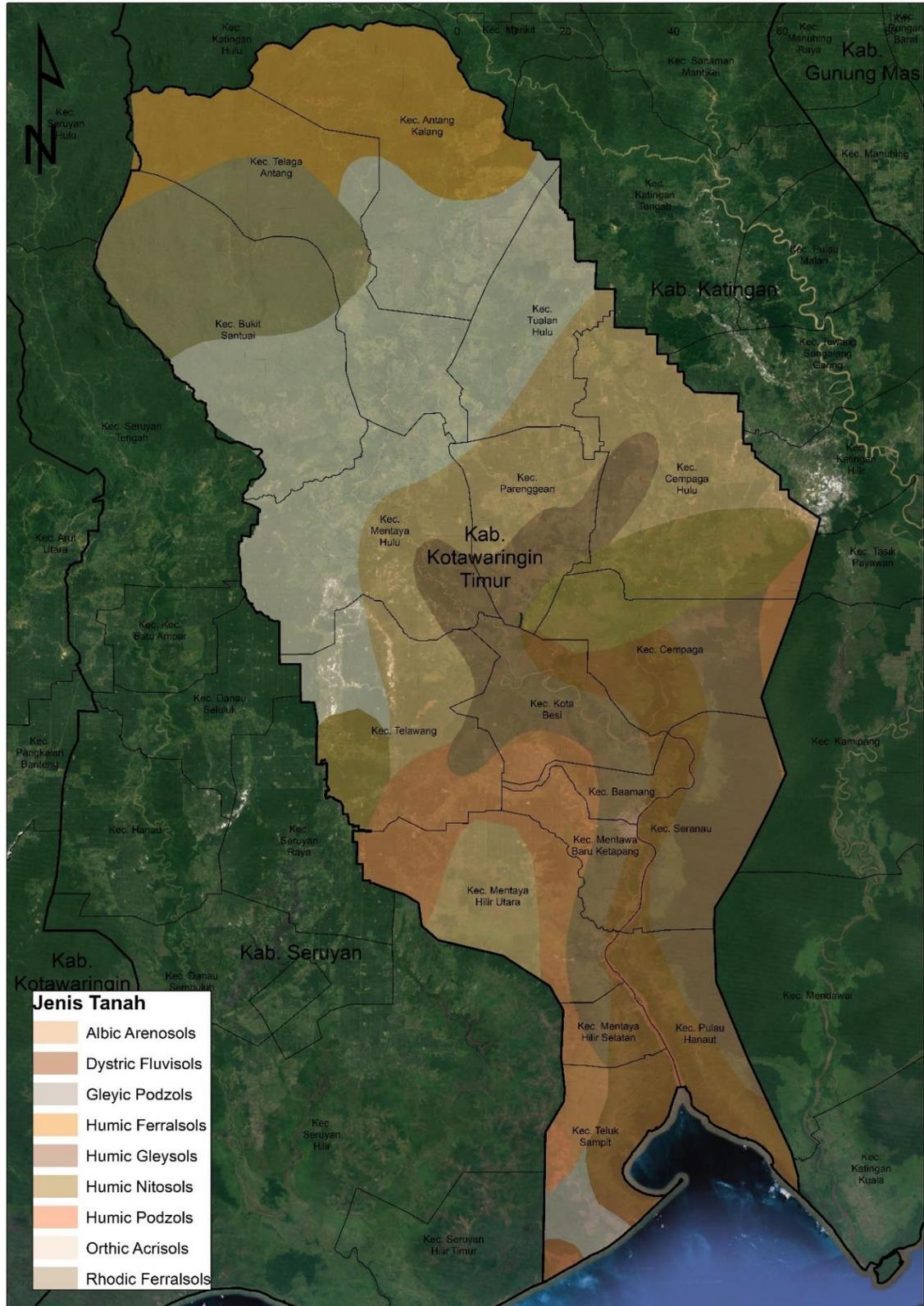
**Gambar 2.4 Peta Geologi Kabupaten Kotawaringin Timur**

Sumber : Peta Geologi P3G Tahun 1994, Hasil Analisa, 2023

Secara umum, kondisi tanah di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki tekstur halus yaitu meliputi tanah liat, berlempung, berpasir dan berdebu. Sedangkan 14,93% wilayah



lainnya memiliki tekstur sedang yaitu jenis lempung, berdebu, liat berpasir. Selanjutnya untuk 5,39% wilayah bertekstur kasar yaitu pasir berlempung dan pasir berdebu. Kedalaman efektif tanah di Kabupaten Kotawaringin Timur mayoritas lebih besar dari 90 cm yaitu sebanyak 66,45%, sementara kedalaman 60–90 cm sebanyak 18,77%, dan 30–60 cm hanya sebanyak 14,83%. Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur banyak ditemui jenis tanah yaitu tanah organosol, glei humus dengan bahan induk bahan aluvial dan fisiografi dataran. Selanjutnya terdapat jenis tanah kompleks podsolik merah kuning dan laterit dengan bahan induk batuan baku dengan fisiografi dataran. Terdapat pula jenis tanah latosol dengan bahan induk batuan beku dan fisiografi instruksi. Serta jenis tanah kompleks podsolik merah kuning, latosol dengan batu induk endapan dan metamorf (Gambar 2.5).



**Gambar 2.5 Peta Jenis Tanah Kabupaten Kotawaringin Timur**

Sumber : Peta Tanah Puslitbang Tanah Tahun 1988, Hasil Analisa, 2023

### 2.1.5 Hidrologi

Berdasarkan kondisi hidrologi, sebagian besar wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan daerah dataran rendah yang dilewati oleh beberapa sungai besar, sungai kecil, dan laut.

Beberapa sungai besar tersebut meliputi Sungai Mentaya, Sungai Cempaga, Sungai Sampit, Sungai Kuayan, Sungai Kalang, dan Sungai Seranau. Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur terdiri atas 4 Daerah Aliran Sungai (DAS) utama meliputi DAS Mentaya, DAS Katingan, DAS Seruyan, dan DAS Peang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.3 Tabel 2.4 dan Gambar 2.6 berikut ini.

**Tabel 2.3 Nama Sungai Menurut Rata-rata Kedalaman, Lebar dan Panjang di Kabupaten Kotawaringin Timur**

| No. | Nama Sungai | Panjang (Km) | Panjang yang dapat dilayari (Km) | Kedalaman Rata-Rata (m) | Lebar Rata-Rata (m) |
|-----|-------------|--------------|----------------------------------|-------------------------|---------------------|
| 1.  | Mentaya     | 400          | 270                              | 6                       | 400                 |
| 2.  | Cempaga     | 42           | 38                               | 6                       | 250                 |
| 3.  | Sampit      | 46           | 40                               | 6                       | 250                 |
| 4.  | Kuayan      | 48           | 40                               | 6                       | 200                 |
| 5.  | Kalang      | 18           | 18                               | 3                       | 200                 |
| 6.  | Seranau     | 21           | 21                               | 3                       | 200                 |

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka 2024

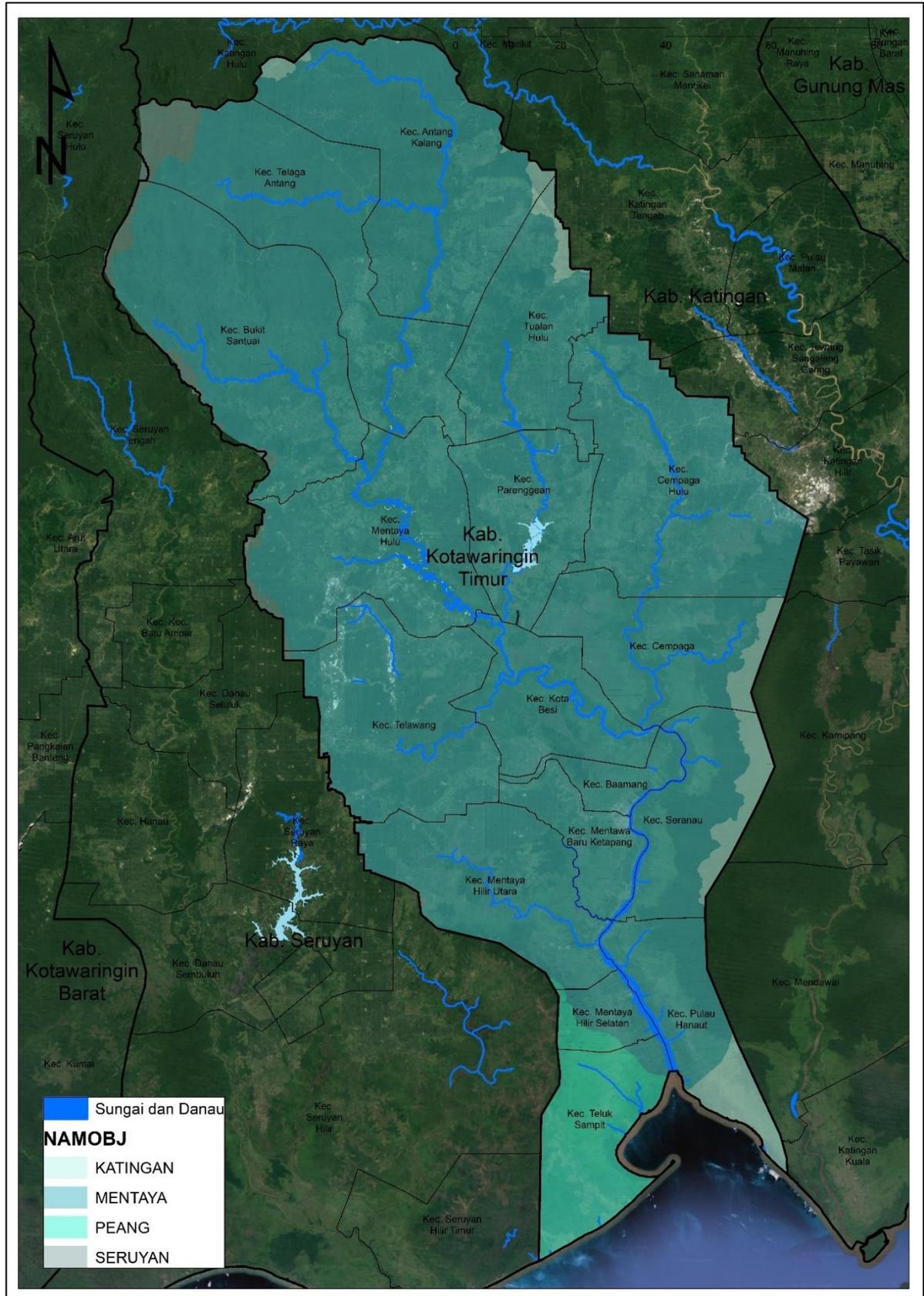
**Tabel 2.4 DAS di Kabupaten Kotawaringin Timur**

| No. | Nama DAS | Kecamatan             | Luas (Ha)  |
|-----|----------|-----------------------|------------|
| 1.  | KATINGAN | Antang Kalang         | 5.306,42   |
| 2.  |          | Cempaga               | 8.434,57   |
| 3.  |          | Cempaga Hulu          | 82,60      |
| 4.  |          | Pulau Hanaut          | 16.597,80  |
| 5.  |          | Seranau               | 15.183,34  |
| 6.  |          | Telaga Antang         | 136,76     |
| 7.  |          | Tualan Hulu           | 5436,48    |
| 8.  | MENTAYA  | Antang Kalang         | 155.211,56 |
| 9.  |          | Baamang               | 20.684,14  |
| 10. |          | Bukit Santuai         | 161.162,83 |
| 11. |          | Cempaga               | 77.967,40  |
| 12. |          | Cempaga Hulu          | 150.114,75 |
| 13. |          | Danau Seluluk         | 6,00       |
| 14. |          | Kota Besi             | 63.860,19  |
| 15. |          | Mentawa Baru Ketapang | 34.945,02  |
| 16. |          | Mentaya Hilir Selatan | 14.256,43  |
| 17. |          | Mentaya Hilir Utara   | 96.814,58  |
| 18. |          | Mentaya Hulu          | 127.758,15 |
| 19. |          | Parenggean            | 71.815,31  |
| 20. |          | Pulau Hanaut          | 45.890,68  |
| 21. |          | Seranau               | 55.676,94  |
| 22. |          | Seruyan Hilir         | 1,07       |
| 23. |          | Seruyan Raya          | 17,44      |



| No. | Nama DAS | Kecamatan             | Luas (Ha)  |
|-----|----------|-----------------------|------------|
| 24. |          | Seruyan Tengah        | 90,29      |
| 25. |          | Telaga Antang         | 133.217,85 |
| 26. |          | Telawang              | 116.472,64 |
| 27. |          | Teluk Sampit          | 4.160,23   |
| 28. |          | Tualan Hulu           | 79.168,36  |
| 29. | PEANG    | Mentaya Hilir Selatan | 6.667,13   |
| 30. |          | Mentaya Hilir Utara   | 305,22     |
| 31. |          | Seruyan Hilir         | 0,04       |
| 32. |          | Seruyan Hilir Timur   | 0,36       |
| 33. |          | Teluk Sampit          | 61.964,60  |
| 34. | SERUYAN  | Bukit Santuai         | 6.719,07   |
| 35. |          | Danau Seluluk         | 22,96      |
| 36. |          | Kec. Batu Ampar       | 4,78       |
| 37. |          | Mentaya Hilir Utara   | 228,25     |
| 38. |          | Mentaya Hulu          | 3.694,03   |
| 39. |          | Seruyan Hulu          | 547,84     |
| 40. |          | Seruyan Raya          | 7,85       |
| 41. |          | Seruyan Tengah        | 488,22     |
| 42. |          | Telaga Antang         | 12.353,62  |
| 43. |          | Telawang              | 645,50     |

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2023



**Gambar 2.6 Peta Hidrologi Kabupaten Kotawaringin Timur**

*Sumber : Pedoman Teknis Jasling KLHK Tahun 2022, Hasil Analisa, 2023*

### 2.1.6 Penggunaan Lahan

Data luas tutupan lahan di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2023 terdiri atas badan air, belukar, hutan lahan

kering sekunder, hutan mangrove sekunder, perkebunan, pertambangan, pertanian lahan kering, kebun campuran, rawa, padang rumput, sawah, dan tanah terbuka. Untuk lebih jelasnya tutupan lahan Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada Tabel 2.5 dan Gambar 2.7.

**Tabel 2.5 Penggunaan Lahan di Kabupaten Kotawaringin Timur**

| No. | Kecamatan      | Penggunaan Lahan               | Luas (Ha)  |
|-----|----------------|--------------------------------|------------|
| 1   | Kota Besi      | Danau/Situ                     | 12,49      |
| 2   |                | Perkebunan/Kebun               | 44.110,33  |
| 3   |                | Permukiman dan Tempat Kegiatan | 296,23     |
| 4   |                | Sawah                          | 280,06     |
| 5   |                | Semak Belukar                  | 14.878,89  |
| 6   |                | Sungai                         | 1.516,11   |
| 7   |                | Tanah Kosong/Gundul            | 48,36      |
| 8   |                | Tegalan/Ladang                 | 2.717,72   |
| 9   | Cempaga        | Perkebunan/Kebun               | 60.035,73  |
| 10  |                | Permukiman dan Tempat Kegiatan | 350,54     |
| 11  |                | Sawah                          | 552,38     |
| 12  |                | Semak Belukar                  | 19.775,27  |
| 13  |                | Sungai                         | 556,25     |
| 14  |                | Tegalan/Ladang                 | 5.131,80   |
| 15  | Mentaya Hulu   | Danau/Situ                     | 286,51     |
| 16  |                | Perkebunan/Kebun               | 117.343,55 |
| 17  |                | Permukiman dan Tempat Kegiatan | 244,1      |
| 18  |                | Semak Belukar                  | 8.346,36   |
| 19  |                | Sungai                         | 1.135,13   |
| 20  |                | Tanah Kosong/Gundul            | 1.501,83   |
| 21  | Tegalan/Ladang | 2.594,71                       |            |
| 22  | Parenggean     | Danau/Situ                     | 2.230,50   |
| 23  |                | Perkebunan/Kebun               | 50.121,15  |
| 24  |                | Permukiman dan Tempat Kegiatan | 575,94     |
| 25  |                | Semak Belukar                  | 14.797,99  |
| 26  |                | Sungai                         | 317,52     |
| 27  |                | Tanah Kosong/Gundul            | 68,27      |
| 28  |                | Tegalan/Ladang                 | 3.703,93   |
| 29  | Baamang        | Danau/Situ                     | 1,35       |
| 30  |                | Perkebunan/Kebun               | 7.063,60   |
| 31  |                | Permukiman dan Tempat Kegiatan | 797,61     |
| 32  |                | Sawah                          | 2.428,04   |
| 33  |                | Semak Belukar                  | 8.714,90   |
| 34  |                | Sungai                         | 448,75     |
| 35  |                | Tanah Kosong/Gundul            | 12,62      |
| 36  |                | Tegalan/Ladang                 | 1.211,86   |

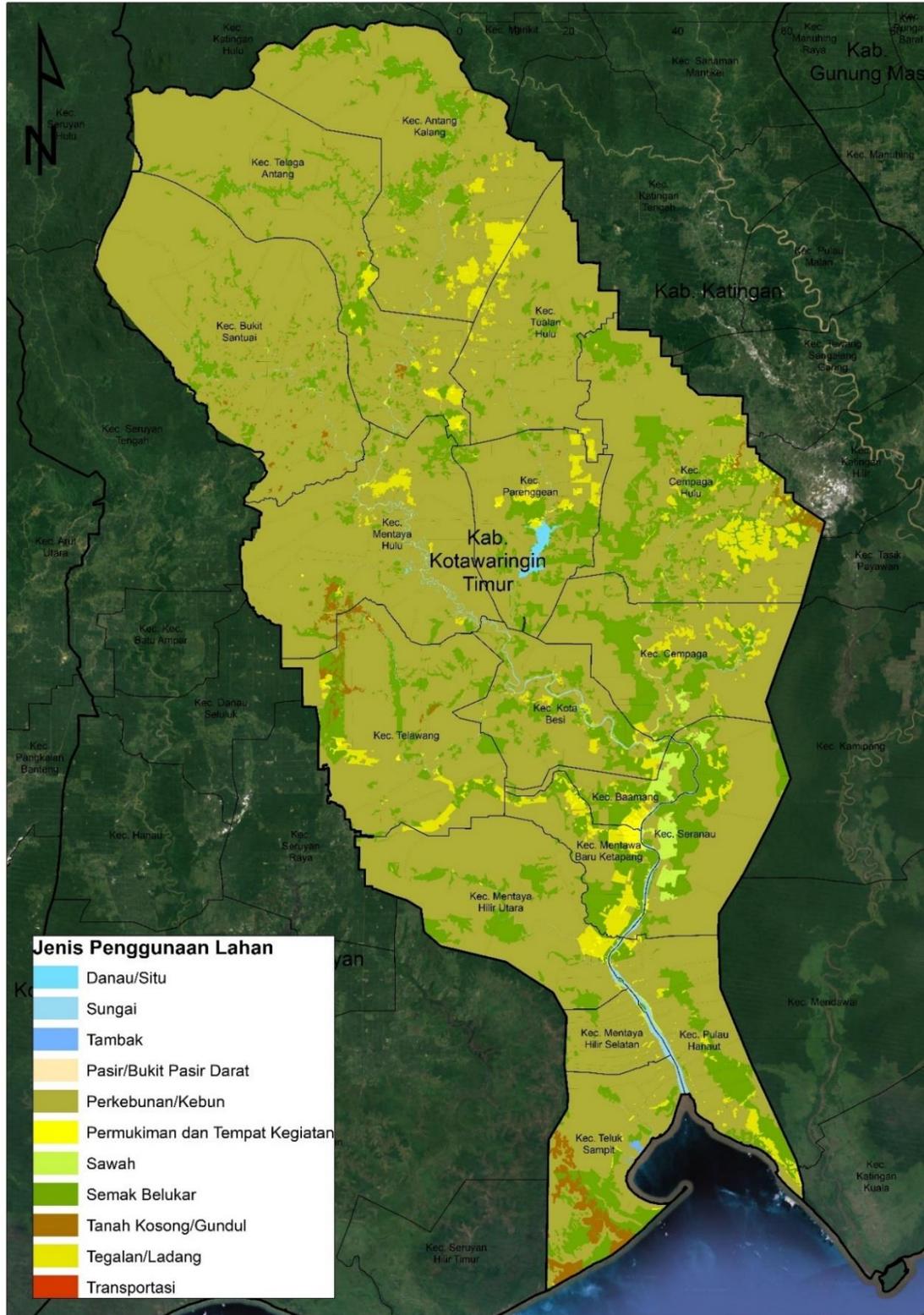


| No. | Kecamatan                      | Penggunaan Lahan               | Luas (Ha)               |
|-----|--------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 37  |                                | Transportasi                   | 5,42                    |
| 38  | Mentawa Baru<br>Ketapang       | Danau/Situ                     | 0,82                    |
| 39  |                                | Perkebunan/Kebun               | 13.195,20               |
| 40  |                                | Permukiman dan Tempat Kegiatan | 2.119,25                |
| 41  |                                | Semak Belukar                  | 12.595,83               |
| 42  |                                | Sungai                         | 748,59                  |
| 43  |                                | Tanah Kosong/Gundul            | 3,57                    |
| 44  |                                | Tegalan/Ladang                 | 6.281,78                |
| 45  |                                | Mentaya Hilir Utara            | Perkebunan/Kebun        |
| 46  | Permukiman dan Tempat Kegiatan |                                | 419,31                  |
| 47  | Semak Belukar                  |                                | 13.413,40               |
| 48  | Sungai                         |                                | 655,67                  |
| 49  | Tegalan/Ladang                 |                                | 2.269,19                |
| 50  | Mentaya Hilir Selatan          | Perkebunan/Kebun               | 19.069,76               |
| 51  |                                | Permukiman dan Tempat Kegiatan | 250,82                  |
| 52  |                                | Semak Belukar                  | 726,39                  |
| 53  |                                | Sungai                         | 876,58                  |
| 54  | Pulau Hanaut                   | Perkebunan/Kebun               | 41.669,40               |
| 55  |                                | Permukiman dan Tempat Kegiatan | 464,83                  |
| 56  |                                | Semak Belukar                  | 15.029,53               |
| 57  |                                | Sungai                         | 1.875,24                |
| 58  |                                | Tegalan/Ladang                 | 3.504,97                |
| 59  | Antang Kalang                  | Danau/Situ                     | 8,82                    |
| 60  |                                | Perkebunan/Kebun               | 131.235,84              |
| 61  |                                | Permukiman dan Tempat Kegiatan | 245,91                  |
| 62  |                                | Semak Belukar                  | 19.808,06               |
| 63  |                                | Sungai                         | 572,94                  |
| 64  |                                | Tanah Kosong/Gundul            | 125,57                  |
| 65  |                                | Tegalan/Ladang                 | 8.520,84                |
| 66  |                                | Teluk Sampit                   | Pasir/Bukit Pasir Darat |
| 67  | Perkebunan/Kebun               |                                | 0                       |
| 68  | Perkebunan/Kebun               |                                | 43.433,90               |
| 69  | Permukiman dan Tempat Kegiatan |                                | 207,19                  |
| 70  | Semak Belukar                  |                                | 13.494,98               |
| 71  | Sungai                         |                                | 518,54                  |
| 72  | Tambak                         |                                | 368,28                  |
| 73  | Tanah Kosong/Gundul            |                                | 8.034,52                |
| 74  | Tegalan/Ladang                 |                                | 218,8                   |
| 75  | Seranau                        |                                | Perkebunan/Kebun        |
| 76  |                                | Permukiman dan Tempat Kegiatan | 226,43                  |
| 77  |                                | Sawah                          | 4.511,78                |
| 78  |                                | Semak Belukar                  | 16.219,44               |
| 79  |                                | Sungai                         | 1.174,26                |
| 80  |                                | Tegalan/Ladang                 | 1.546,64                |
| 81  | Cempaga Hulu                   | Pasir/Bukit Pasir Darat        | 6,93                    |
| 82  |                                | Perkebunan/Kebun               | 99.486,34               |



| No. | Kecamatan     | Penggunaan Lahan               | Luas (Ha)  |
|-----|---------------|--------------------------------|------------|
| 83  |               | Permukiman dan Tempat Kegiatan | 197,56     |
| 84  |               | Semak Belukar                  | 36.414,38  |
| 85  |               | Sungai                         | 326,88     |
| 86  |               | Tanah Kosong/Gundul            | 2.149,29   |
| 87  |               | Tegalan/Ladang                 | 11.615,97  |
| 88  | Telawang      | Perkebunan/Kebun               | 91.757,53  |
| 89  |               | Permukiman dan Tempat Kegiatan | 337,98     |
| 90  |               | Semak Belukar                  | 17.598,44  |
| 91  |               | Sungai                         | 274,97     |
| 92  |               | Tanah Kosong/Gundul            | 2.821,28   |
| 93  |               | Tegalan/Ladang                 | 4.327,94   |
| 94  | Bukit Santuai | Danau/Situ                     | 8,72       |
| 95  |               | Perkebunan/Kebun               | 156.002,55 |
| 96  |               | Permukiman dan Tempat Kegiatan | 97,77      |
| 97  |               | Semak Belukar                  | 10.378,18  |
| 98  |               | Sungai                         | 467,89     |
| 99  |               | Tanah Kosong/Gundul            | 924,39     |
| 100 |               | Tegalan/Ladang                 | 2,39       |
| 101 | Tualan Hulu   | Danau/Situ                     | 0,68       |
| 102 |               | Perkebunan/Kebun               | 75.760,97  |
| 103 |               | Permukiman dan Tempat Kegiatan | 234,2      |
| 104 |               | Semak Belukar                  | 5.498,34   |
| 105 |               | Sungai                         | 90,13      |
| 106 |               | Tanah Kosong/Gundul            | 31,1       |
| 107 |               | Tegalan/Ladang                 | 2.989,42   |
| 108 | Telaga Antang | Danau/Situ                     | 26,61      |
| 109 |               | Perkebunan/Kebun               | 124.939,25 |
| 110 |               | Permukiman dan Tempat Kegiatan | 641,8      |
| 111 |               | Semak Belukar                  | 15.596,95  |
| 112 |               | Sungai                         | 488,32     |
| 113 |               | Tanah Kosong/Gundul            | 514,83     |
| 114 |               | Tegalan/Ladang                 | 3.500,47   |

Sumber: <https://tanahair.indonesia.go.id/portal-web>



**Gambar 2.7 Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Kotawaringin Timur**

Sumber : Peta RBI Tahun 2020, Hasil Analisa, 2023

### 2.1.7 Risiko dan Kerawanan Bencana

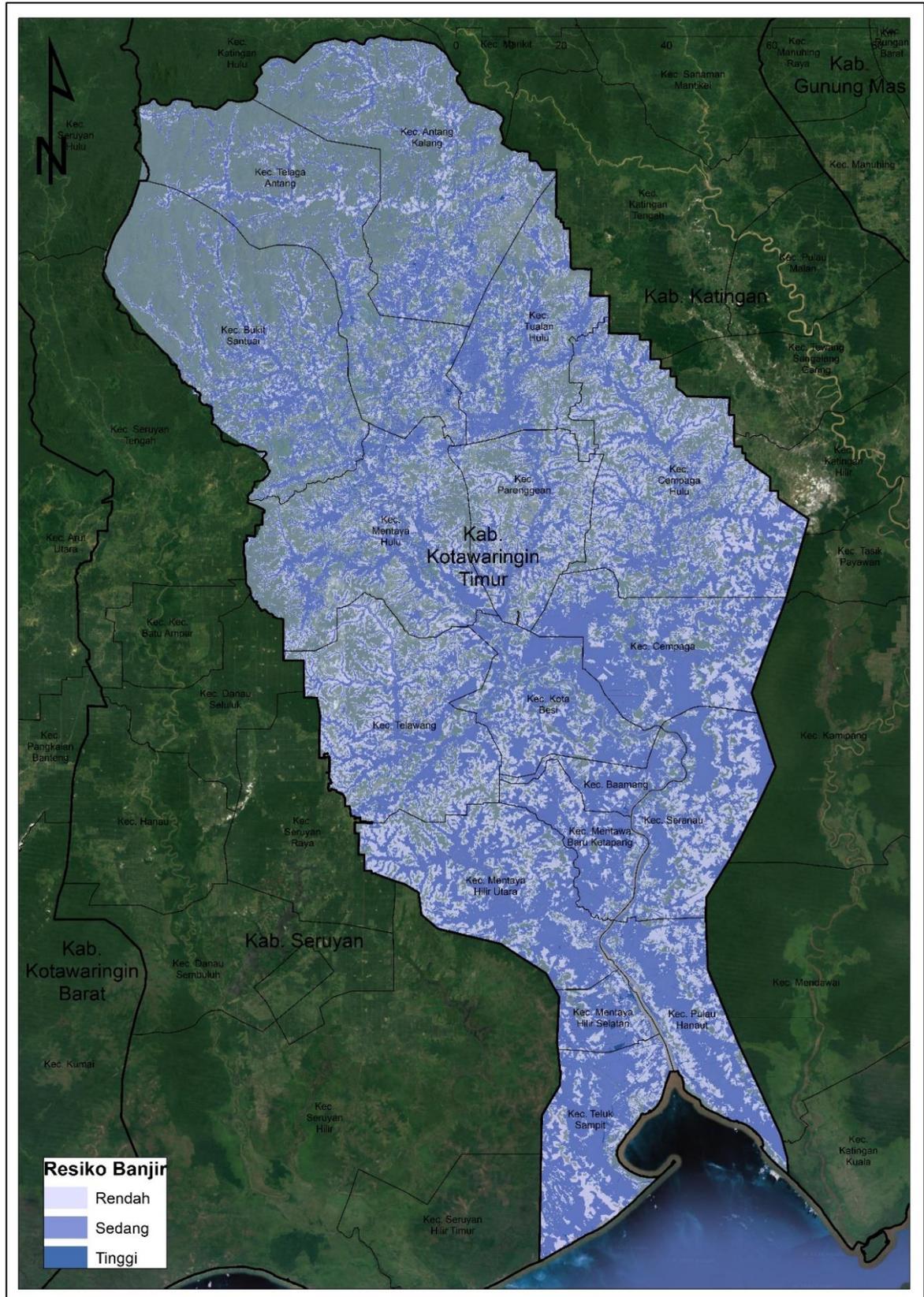
Risiko dan kerawanan bencana ini merupakan salah satu gambaran dampak dan/atau risiko dari bagian wilayah yang memiliki resiko dan kerawanan bencana yang mengacu pada InaRISK tahun 2023 ([inaRISK \(bnpb.go.id\)](http://inaRISK(bnpb.go.id))). Selanjutnya berdasarkan data tersebut

kemudian dilakukan analisis khusus untuk daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, dimana di wilayah ini memiliki potensi risiko bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan. Resiko kebencanaan dapat dilihat pada Tabel 2.6 dan Gambar 2.8 – Gambar 2.10.

**Tabel 2.6 Resiko Bencana di Kabupaten Kotawaringin Timur**

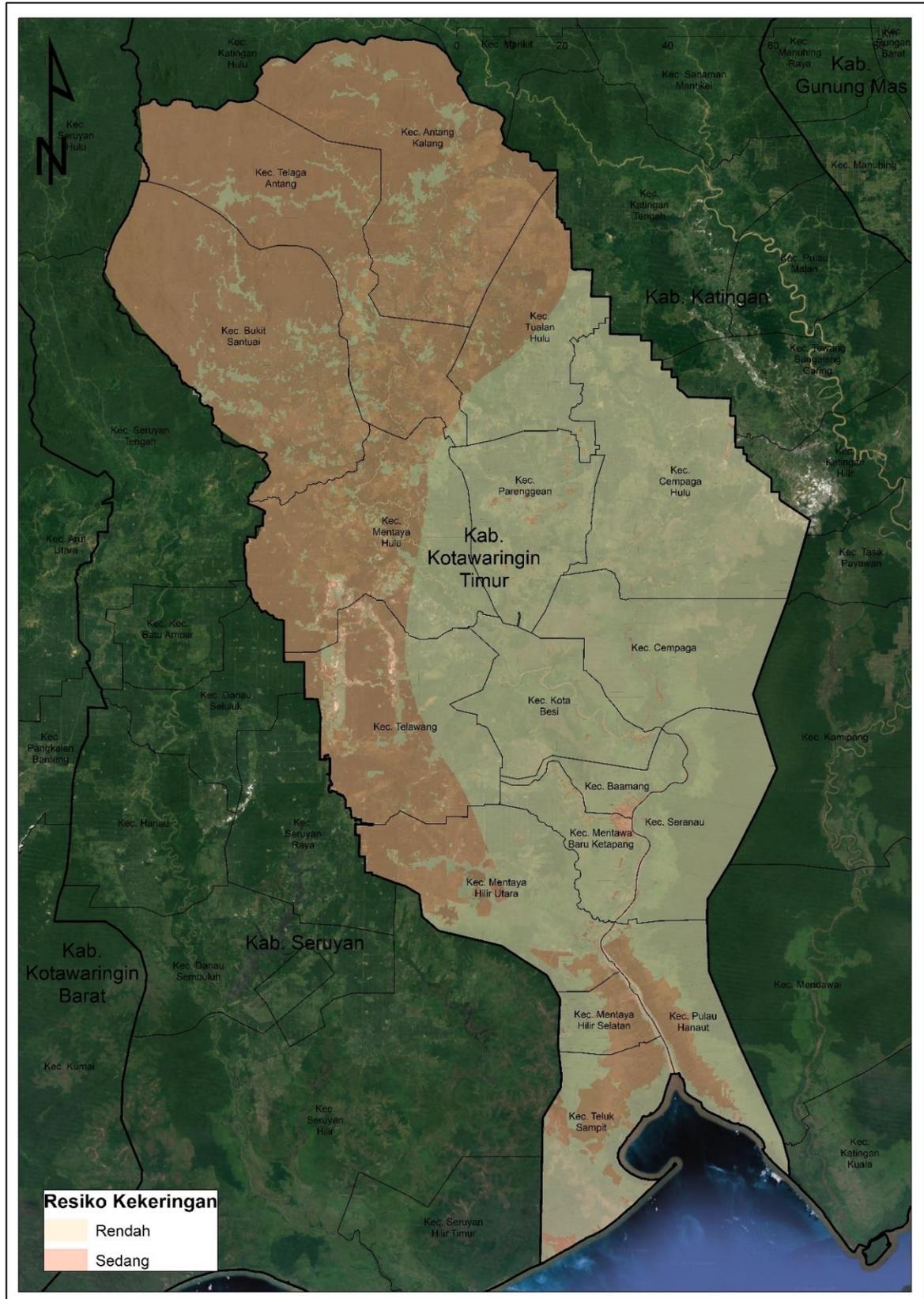
| <b>Banjir</b>                    |                      |                  |
|----------------------------------|----------------------|------------------|
| <b>No.</b>                       | <b>Indeks Resiko</b> | <b>Luas (Ha)</b> |
| 1.                               | Rendah               | 390.318,38       |
| 2.                               | Sedang               | 639.848,32       |
| 3.                               | Tinggi               | 2.591,48         |
| <b>Kekeringan</b>                |                      |                  |
| <b>No.</b>                       | <b>Indeks Resiko</b> | <b>Luas (Ha)</b> |
| 1.                               | Rendah               | 843.835,32       |
| 2.                               | Sedang               | 710.443,89       |
| <b>Kebakaran Hutan dan Lahan</b> |                      |                  |
| <b>No.</b>                       | <b>Indeks</b>        | <b>Luas (Ha)</b> |
| 1.                               | Rendah               | 1.151.668,97     |
| 2.                               | Sedang               | 223.863,29       |
| 3.                               | Tinggi               | 100.487,96       |

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2023



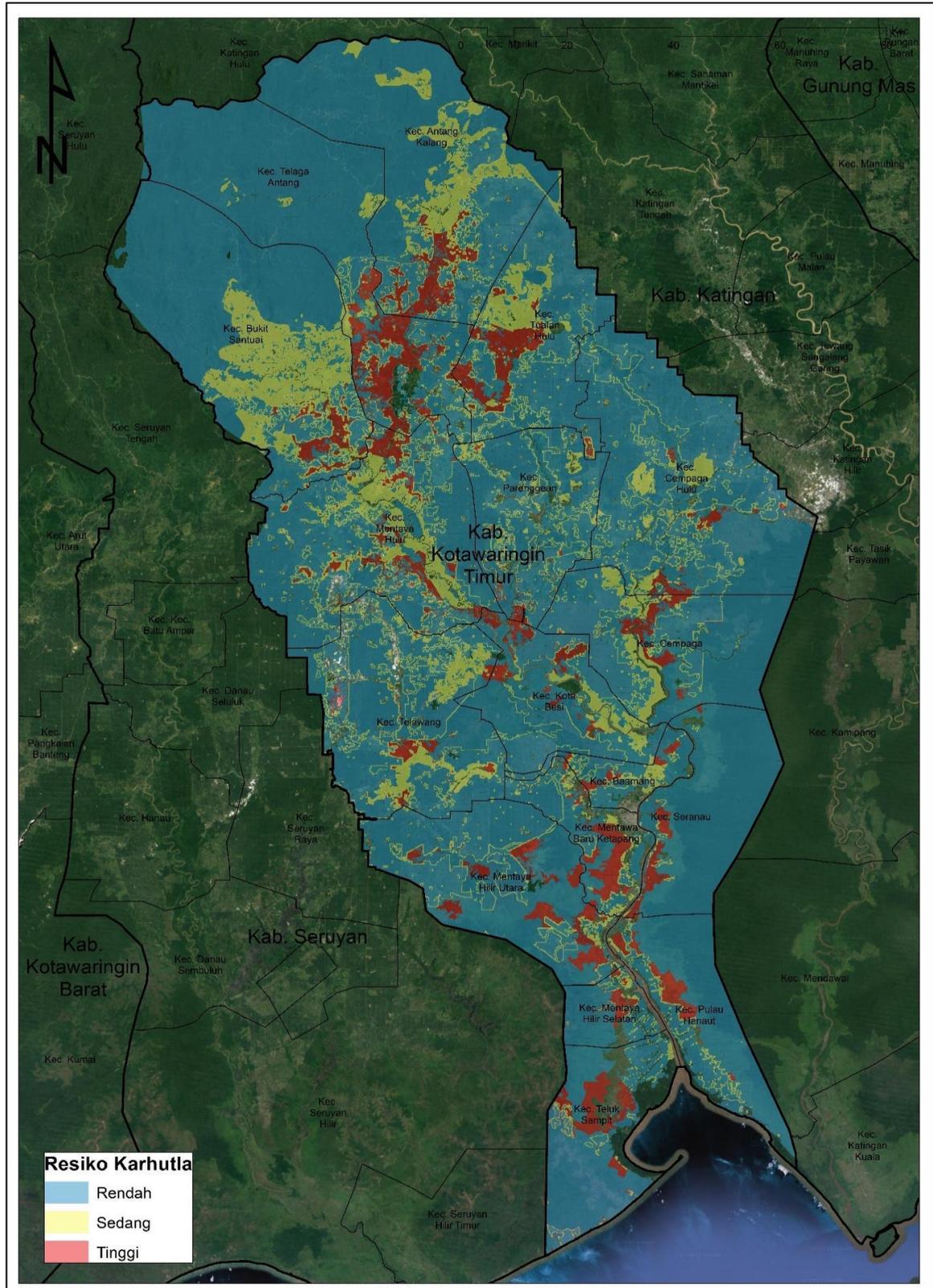
**Gambar 2.8 Risiko Bencana Banjir di Kabupaten Kotawaringin Timur**

Sumber : Peta InasRisk Tahun 2023, Hasil Analisa Tahun 2023



**Gambar 2.9 Risiko Bencana Kekeringan di Kabupaten Kotawaringin Timur**

Sumber : Peta InasRisk Tahun 2023, Hasil Analisa Tahun 2023



**Gambar 2.10 Risiko Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Kotawaringin Timur**

Sumber : Peta InasRisk Tahun 2023, Hasil Analisa Tahun 2023

## 2.2 ASPEK DEMOGRAFI

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dalam Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka 2024, jumlah penduduk di Kabupaten Kotawaringin Timur berjumlah 443.359 Jiwa.

**Tabel 2.7 Jumlah Penduduk di Kabupaten Kotawaringin Timur**

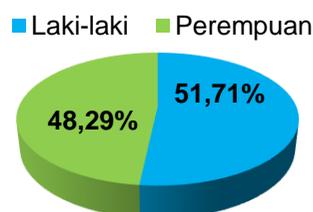
| No. | Kecamatan             | Jumlah Penduduk (Jiwa) |                |                |                |                |
|-----|-----------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|     |                       | 2019                   | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           |
| 1   | Kota Besi             | 20.843                 | 18.444         | 18.603         | 18.897         | 19.153         |
| 2   | Cempaga               | 28.366                 | 22.297         | 22.376         | 22.615         | 22.807         |
| 3   | Mentaya Hulu          | 29.795                 | 20.533         | 20.611         | 20.207         | 20.804         |
| 4   | Parenggean            | 30.155                 | 26.628         | 26.724         | 26.477         | 26.819         |
| 5   | Baamang               | 60.928                 | 69.714         | 70.956         | 72.737         | 74.397         |
| 6   | Mentawa Baru Ketapang | 89.285                 | 98.680         | 99.922         | 101.901        | 103.688        |
| 7   | Mentaya Hilir Utara   | 18.156                 | 18.780         | 18.835         | 19.101         | 19.289         |
| 8   | Mentaya Hilir Selatan | 25.083                 | 23.010         | 23.159         | 23.091         | 23.163         |
| 9   | Pulau Hanaut          | 18.658                 | 16.809         | 16.817         | 16.809         | 16.832         |
| 10  | Antang Kalang         | 16.823                 | 13.357         | 13.375         | 13.145         | 13.533         |
| 11  | Teluk Sampit          | 10.774                 | 10.562         | 10.568         | 10.736         | 10.839         |
| 12  | Seranau               | 11.124                 | 10.874         | 10.886         | 10.965         | 11.026         |
| 13  | Cempaga Hulu          | 34.591                 | 21.586         | 21.621         | 21.243         | 21.871         |
| 14  | Telawang              | 23.407                 | 20.518         | 20.649         | 20.983         | 21.248         |
| 15  | Bukit Santuai         | 14.220                 | 10.380         | 10.411         | 10.733         | 10.929         |
| 16  | Tualan Hulu           | 12.377                 | 7.766          | 7.786          | 7.643          | 7.868          |
| 17  | Telaga Antang         | 21.781                 | 18.957         | 18.984         | 18.796         | 19.093         |
|     | <b>Jumlah</b>         | <b>466.366</b>         | <b>428.895</b> | <b>432.283</b> | <b>436.079</b> | <b>443.359</b> |

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka 2024

Selanjutnya berdasarkan pada struktur kelompok umur dan jenis kelamin, dapat diketahui bahwa rasio jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan di Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar 107, yang berarti bahwa pada setiap 100 penduduk perempuan terdapat 107 penduduk laki-laki.

Jika dilihat dari proporsi jenis kelamin total, penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur lebih banyak didominasi oleh penduduk laki-laki dibanding dengan perempuan. Jumlah penduduk laki-laki di wilayah ini sebanyak 229.220 laki-laki atau 51,70 persen dan sisanya penduduk perempuan.

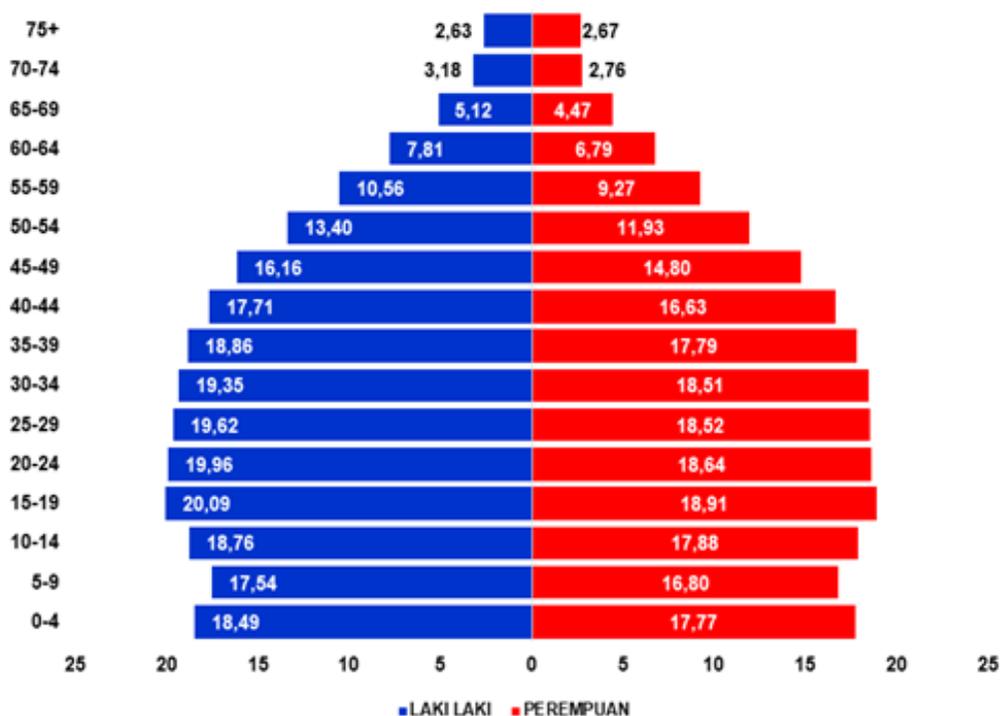
### Komposisi Jenis Kelamin



**Gambar 2.11 Komposisi Jenis Kelamin Penduduk Tahun 2023**

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka 2024

Hal yang cukup menarik dari komposisi penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur berdasarkan pada kelompok umur. Berdasarkan kelompok usia dengan rentang usia 0-64 tahun, didominasi oleh usia 15-19 tahun yang termasuk dalam kelompok usia muda hingga kelompok usia produktif. kelompok usia tua yaitu usia 64 tahun ke atas berjumlah lebih sedikit dari kelompok usia lain. Jumlah penduduk usia produktif di wilayah ini didominasi usia 15-64 tahun (usia produktif) sebesar 69,5 persen, sedangkan penduduk usia non produktif ( 0-14 tahun dan 65 tahun keatas) sebesar 30,5 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 2.12 Piramida Penduduk Kotawaringin Timur Tahun 2023**

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka 2024

### 2.3 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu pilar utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD). Melalui RPJPD, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk merancang kebijakan yang berfokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks ini, berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial harus saling terkait dan berkontribusi untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan. Masyarakat yang sejahtera adalah masyarakat yang memiliki akses



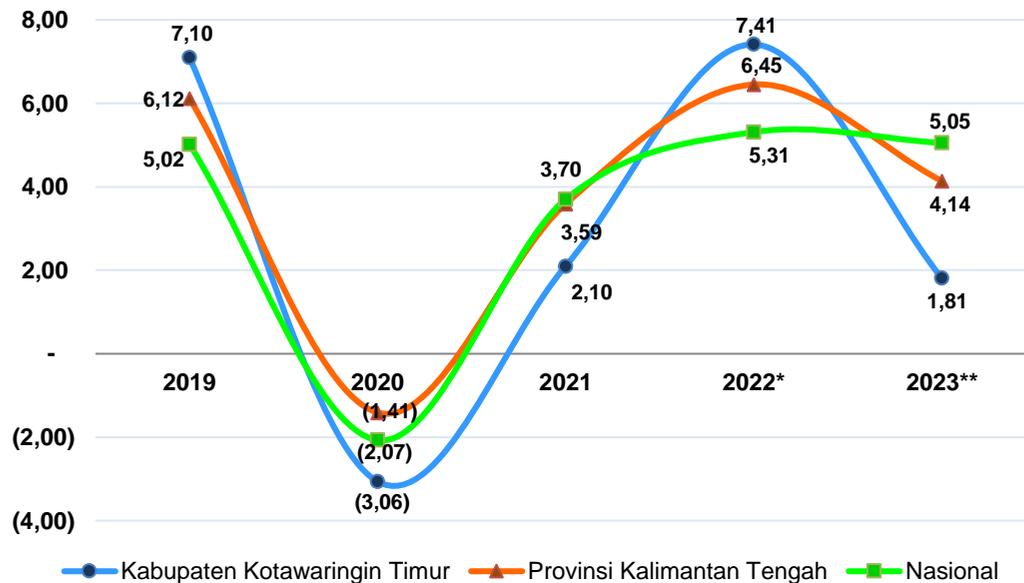
terhadap layanan pendidikan yang berkualitas, layanan kesehatan yang terjangkau, lapangan kerja yang layak, serta kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah.

Aspek kesejahteraan masyarakat mencakup bidang ekonomi dan sosial. Penjelasan gambaran kesejahteraan ekonomi memuat Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Inflasi, Indeks Gini dan dan Kondisi Kemiskinan, sedangkan kesejahteraan sosial memuat angka melek huruf, Rata-rata Lama Sekolah, Usia Harapan Hidup, Indeks Pembangunan Manusia.

### **2.3.1 Kesejahteraan Ekonomi**

#### **2.3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator ekonomi yang menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. *Trend* pertumbuhan ekonomi Kotawaringin Timur berfluktuatif dengan kecenderungan menurun selama periode 2019-2023, berbeda dengan pertumbuhan ekonomi nasional dan Kalimantan Tengah yang menunjukkan *trend* meningkat. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, pertumbuhan ekonomi Kotawaringin Timur tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan 3,07 persen. Meskipun sempat berkontraksi 3,06 persen pada Tahun 2020, ekonomi wilayah ini mampu tumbuh melaju hingga mencapai 7,41 persen pada Tahun 2022 dan tumbuh melambat sebesar 1,83 persen pada Tahun 2023 sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini. Perekonomian wilayah ini sangat berkontribusi besar terhadap perekonomian provinsi dan merupakan wilayah dengan PDRB terbesar se-Kalimantan Tengah.



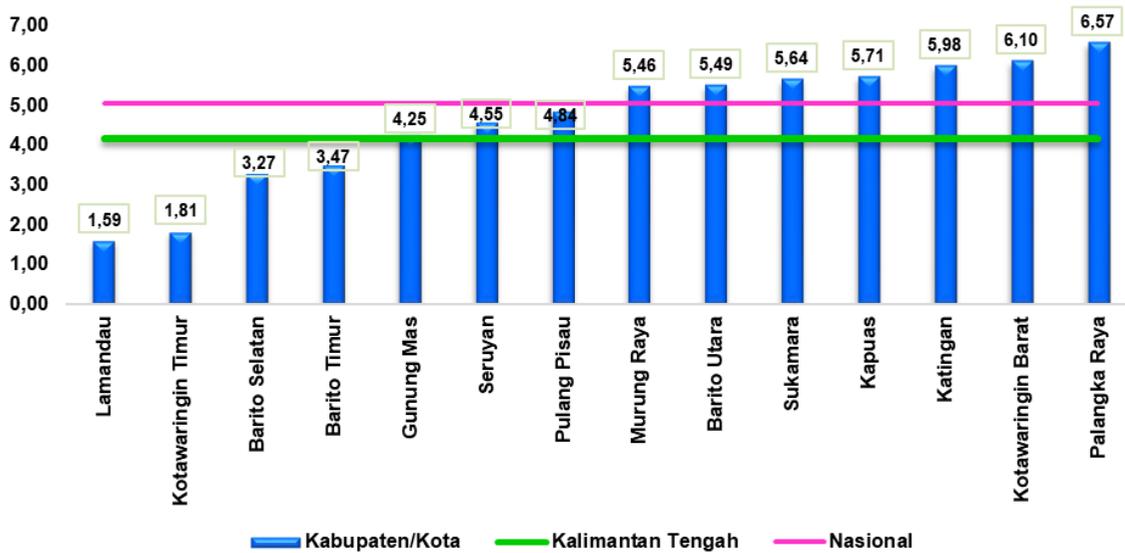
**Gambar 2.13 Trend Pertumbuhan Ekonomi Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, dan nasional Tahun 2019-2023**

Sumber: BPS Kabupaten Kotawaringin Timur (2024)

Keterangan:\*) Angka sementara\*\*) Angka sangat sementara

Jika melihat kondisi per tahun, terjadi fluktuasi yang cukup besar dalam laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Kotawaringin Timur, khususnya pada Tahun 2020. Hal ini berkaitan dengan fluktuasi produksi barang dan jasa khususnya dari sektor industri dan konstruksi yang mengalami kontraksi hebat dan menyebabkan tidak berjalannya investasi pada kedua sektor tersebut. Sementara itu, lima sektor lainnya juga mengalami penurunan akibat pembatasan aktivitas pergerakan manusia selama pandemi. Momentum pulihnya ekonomi nasional terjadi pada Tahun 2021 yang mana pertumbuhan ekonomi 14 kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah menunjukkan pencapaian yang positif dibanding tahun sebelumnya. Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan daerah yang memiliki LPE tertinggi diatas LPE Kalimantan Tengah dan nasional pada Tahun 2022, namun pertumbuhan ekonomi wilayah ini justru menurun drastis pada Tahun 2023. Kondisi tersebut disebabkan adanya kebijakan pemerintah tentang larangan ekspor biji bauksit yang diberlakukan pada Juni 2023 sehingga memicu penurunan potensi produksi bauksit di Kalimantan Tengah. Walaupun bauksit bukan merupakan komoditas utama di Kalimantan Tengah, akan tetapi peranan sektor pertambangan merupakan terbesar kedua bagi

perekonomian provinsi sehingga apabila sektor lainnya tumbuh, hal ini akan memengaruhi total pertumbuhan seluruh sektor. Adapun persebaran laju pertumbuhan ekonomi 14 wilayah di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 2.14 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023**

Sumber: BPS Kabupaten Kotawaringin Timur, 2024

### 2.3.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Indikator pengangguran terbuka baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah dalam membuka lapangan kerja baru dan bahan evaluasi keberhasilan pembangunan perekonomian daerah. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kotawaringin Timur selama periode 2019-2023 menunjukkan *trend* positif meningkat. Pengangguran terbuka di wilayah ini didominasi oleh tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 66,52 persen, diikuti lulusan Perguruan Tinggi. Sementara itu, ditinjau dari kelompok umur penduduk 15 tahun keatas yang bekerja, sebanyak 27.472 penduduk atau 13,58 persen kelompok umur 30-34 tahun yang paling banyak bekerja.

Penyelesaian perselisihan yang terjadi antara pekerja dan pihak perusahaan di Kotawaringin Timur telah terselesaikan dengan baik

selama kurun waktu lima tahun terakhir. Jumlah perselisihan antara pekerja dan perusahaan di wilayah ini mengalami penurunan 48,28 persen dari 29 kasus menjadi 15 kasus pada Tahun 2023 yang dijabarkan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.8 Capaian Kinerja Urusan Ketenagakerjaan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019-2023**

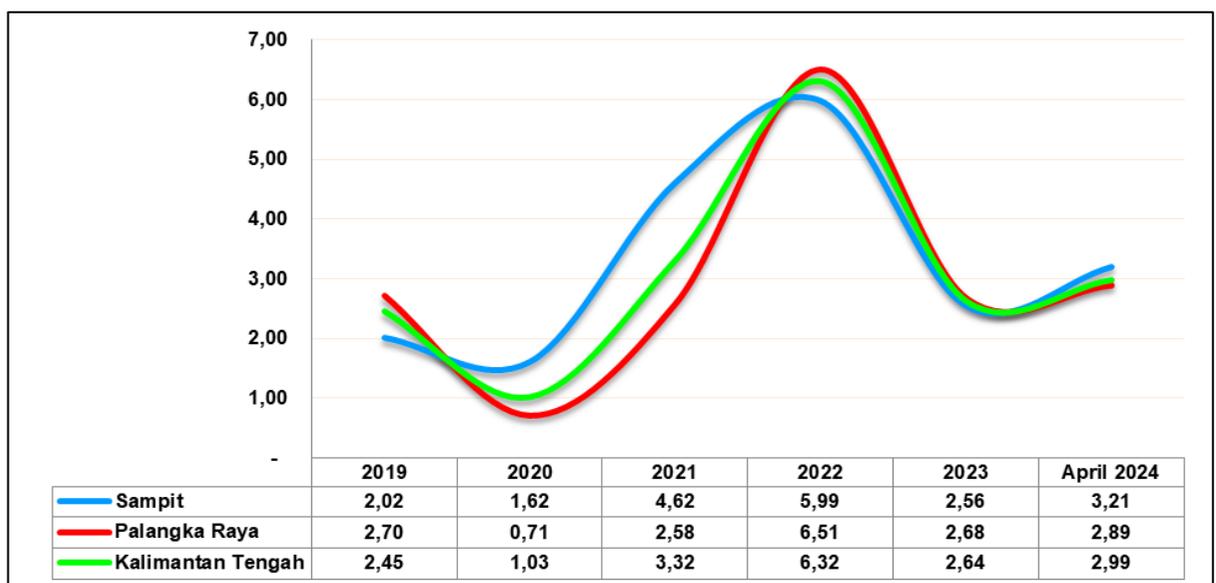
| No. | Indikator Kinerja  | Capaian Tahun |        |        |        |        |
|-----|--|---------------|--------|--------|--------|--------|
|     |  | 2019          | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
| 1.  | Jumlah pencari kerja (orang)   | NA            | NA     | 1.186  | 689    | 546    |
| 2.  | Jumlah pencari kerja terdaftar yang bekerja (orang)                                    | NA            | NA     | 650    | 1.093  | 673    |
| 3.  | Pencari kerja yang ditempatkan (orang)   | 1.042         | 518    | 157    | 78     | 3      |
| 4.  | Jumlah pengangguran  | 10.287        | 12.076 | 11.872 | 10.790 | 10.124 |
| 5.  | Jumlah pekerja yang di-PHK (orang)   | 92            | 70     | 15     | 7      | 22     |
| 6.  | Perselisihan buruh dan pengusaha terhadap kebijakan pemerintah daerah (kasus)          | 32            | 24     | 16     | 29     | 15     |
| 7.  | Persentase peserta pelatihan yang bersertifikat kompetensi                             | NA            | NA     | 53,57  | 75,90  | 91,67  |
| 8.  | Persentase kasus hubungan industrial yang diselesaikan (antara pekerja dan perusahaan) | 100           | 100    | 100    | 100    | 100    |
| 9.  | Persentase pelanggaran norma ketenagakerjaan   | 2             | 2      | 2      | 2      | 2      |

Sumber : BPS dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024

Kondisi ketenagakerjaan di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 menunjukkan bahwa terdapat 10.124 penduduk yang masih menganggur, terdiri dari 6.183 orang laki-laki dan 3.941 orang perempuan. Angka pengangguran di wilayah ini semakin menurun seiring dengan membaiknya keadaan ekonomi pasca pandemi.

### 2.3.1.3 Inflasi

Menurut Bank Indonesia (BI), inflasi adalah diartikan sebagai kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus menerus dalam jangka waktu tertentu. Perkembangan inflasi di Kota Sampit terkendali cukup baik dengan rata-rata di angka 1-6 persen sebagaimana ditunjukkan secara grafis pada gambar dibawah ini. Pada Tahun 2022 terjadi kenaikan laju inflasi di Kota Sampit dan Kota Palangkaraya masing-masing sebesar 5,99 persen dan 6,51 persen. Kenaikan inflasi tersebut juga dialami secara nasional sebagai akibat adanya gejolak ekonomi global, yaitu konflik geopolitik dan perang antara Ukraina dan Rusia. Keadaan tersebut menyebabkan gangguan dari sisi *supply* yang memicu lonjakan harga-harga komoditas global dan mendorong kenaikan inflasi di banyak Negara termasuk Indonesia. Jika hal tersebut tidak dapat diatasi maka risiko global akan menggiring kepada kondisi stagflasi, yaitu fenomena inflasi tinggi dan terjadinya resesi seperti yang pernah terjadi di Negara Amerika Serikat pada periode awal 1980-an dan 1990-an. Kondisi stagflasi akan memberikan imbas negatif luar biasa ke seluruh dunia terutama terhadap negara berkembang dan *emerging market*.



**Gambar 2.15 Perkembangan Tingkat Inflasi Kota Sampit, Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2019-2023 (persen)**

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka 2024

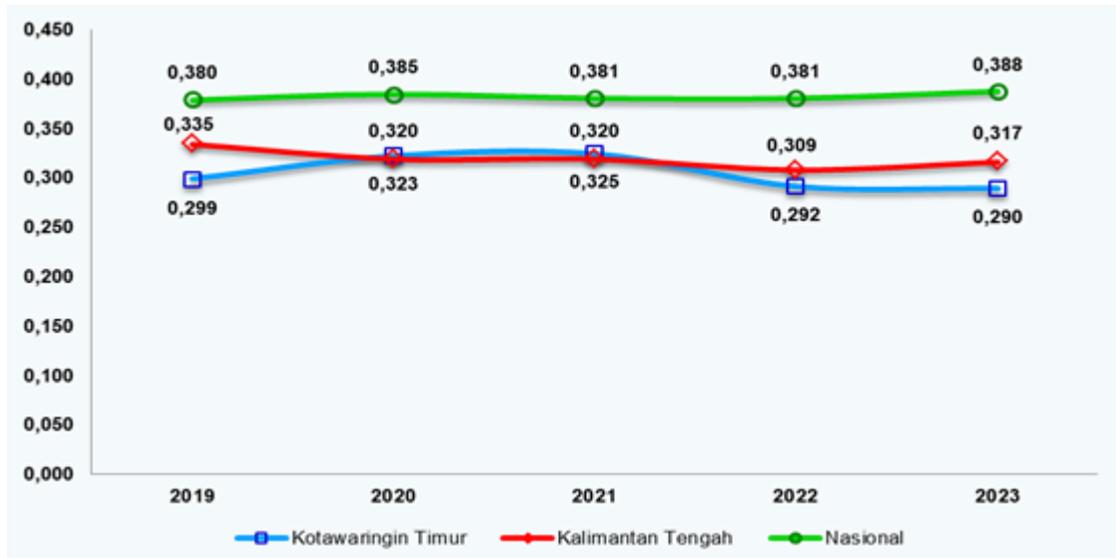
Kota Sampit merupakan salah satu wilayah dari 63 kota yang mengalami inflasi. Kondisi inflasi di wilayah ini sepanjang Tahun 2023 masih lebih baik dibandingkan dengan Kota Palangkaraya. Tingkat

inflasi di Kota Sampit tercatat sebesar 2,56 yang berarti bahwa terdapat kenaikan harga sebesar 2,56 persen untuk berbagai komoditas barang dan jasa selama satu tahun. Selama kurun waktu lima tahun terakhir, laju inflasi Kota Sampit berfluktuatif dengan rata-rata peningkatan 3,36 persen per tahun. Inflasi tertinggi dari tahun ke tahun terjadi pada bulan Februari 2023 sebesar 5,63 persen, bertepatan dengan momen Imlek yang mana permintaan masyarakat terhadap kebutuhan pokok terutama komoditas bahan cenderung meningkat. Inflasi tersebut disebabkan adanya peningkatan indeks harga pada beberapa kelompok pengeluaran, yaitu kelompok transportasi (14,53 persen), kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran (7,58 persen), kelompok makanan, minuman dan tembakau (6,20 persen), kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (5,81 persen), kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga (3,47 persen), kelompok pendidikan (3,27 persen), kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (3,03 persen), kelompok kesehatan (2,50 persen), kelompok pakaian dan alas kaki (1,81 persen), serta kelompok rekreasi, olahraga dan budaya (0,42 persen).

#### **2.3.1.4 Indeks Gini**

Indeks Gini adalah ukuran ketidakmerataan atau ketimpangan agregat (secara keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan yang sempurna). Kriteria koefisien Gini didasarkan atas 4 kriteria, yaitu:

- 0 < GR < 0,3 : Ketimpangan Rendah
- 0,3 ≤ GR ≤ 0,5 : Ketimpangan Sedang
- 0,5 < GR < 1 : Ketimpangan Tinggi
- GR = 1 : Ketimpangan Sempurna



**Gambar 2.16 Indeks Pemerataan Pendapatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019-2023**

Sumber Data BPS Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024

Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota di Kalimantan Tengah, capaian *Gini Ratio* Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 berada pada peringkat 7. Kondisi yang sama terjadi pada tahun sebelumnya yang mana berada pada peringkat 6 dari 17 kabupaten/kota se-Kalimantan Tengah. Keadaan tersebut menunjukkan adanya *gap* yang lebih kecil antara kelompok masyarakat berpendapatan tinggi dengan masyarakat berpendapatan rendah. Setelah kasus pandemi COVID-19 melandai pada Tahun 2023, *Gini Ratio* Kotawaringin Timur mengalami penurunan sebesar 0,002 poin. Hal ini disebabkan menurunnya angka penduduk miskin di Kalimantan Tengah karena perekonomian nasional mulai pulih. Dalam rangka mengurangi perbedaan tingkat pendapatan antar kelompok masyarakat dan meningkatkan pendapatan masyarakat khususnya masyarakat golongan menengah kebawah, diharapkan prioritas program pembangunan di Kotawaringin Timur kedepan lebih mengarah pada pengembangan ekonomi padat karya dan pembangunan infrastruktur.

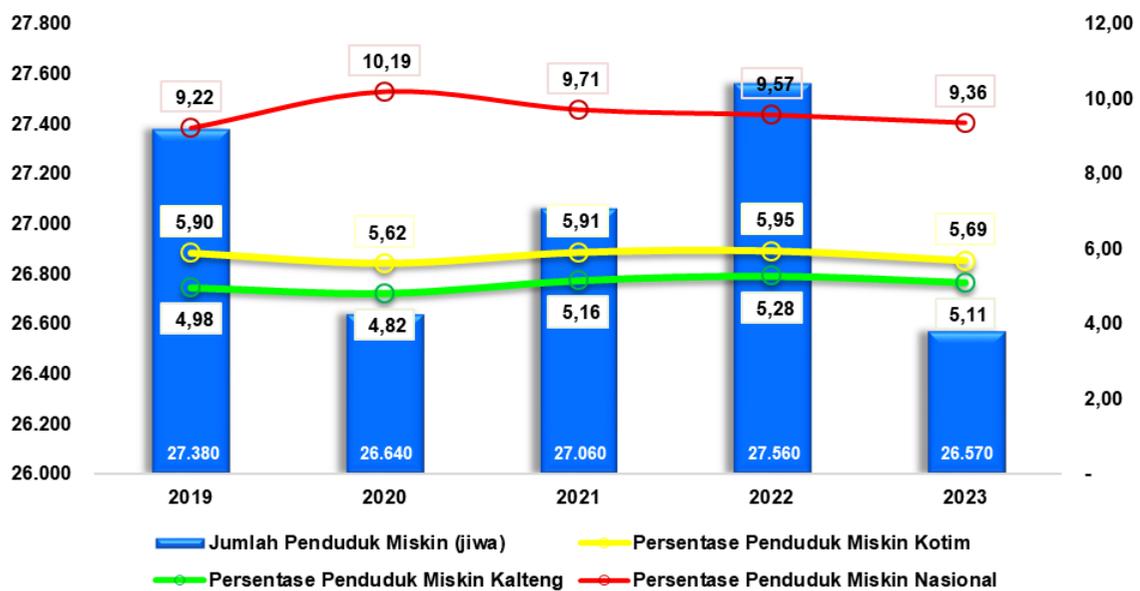
### 2.3.1.5 Kondisi Kemiskinan

Kemiskinan secara umum adalah keadaan ataupun kondisi dimana seseorang tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, entah itu sandang, pangan, maupun papan. Akan tetapi, kemiskinan tidak hanya dapat dilihat dari aspek ekonomi

saja, melainkan dapat dilihat dari aspek-aspek lainnya, seperti sosial dan budaya. Apabila kemiskinan tidak mendapat perhatian dari pemerintah, hal ini bisa menyebabkan lingkaran kemiskinan yang akan terus berlanjut ke generasi setelahnya.

### 1. Jumlah Penduduk Miskin

Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan, seperti terlihat pada gambar berikut.



**Gambar 2.17 Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin dan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalteng, dan Nasional Tahun 2019-2023**

Sumber : Data BPS Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024

Gambar diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kotawaringin Timur berfluktuatif. Jumlah penduduk miskin di wilayah ini pada Tahun sebanyak 27.380, sedangkan jumlah penduduk miskin pada Tahun 2023 mengalami penurunan hingga mencapai 26.570 orang.

Persentase penduduk miskin merupakan persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (GK). Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Kotawaringin Timur selama 5 tahun terakhir, yaitu dari tahun 2019-2023 menunjukkan angka yang fluktuatif.

### 2. Garis Kemiskinan

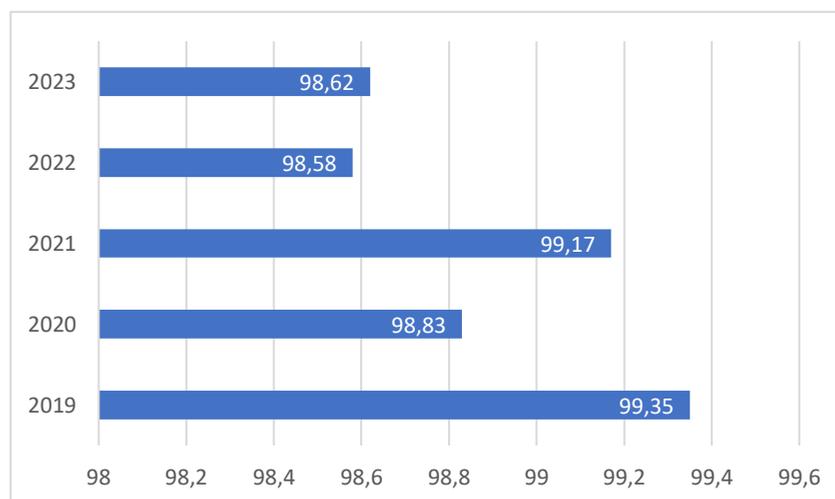
Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per

bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Timur dalam kurun waktu tahun 2019-2023 mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 sebesar 416.777 Rp/kapita/bulan meningkat menjadi 547.170 Rp/kapita/bulan pada tahun 2023. Artinya terjadi peningkatan pengeluaran dan peningkatan kesejahteraan penduduk miskin Kabupaten Kotawaringin Timur.

## 2.3.2 Kesejahteraan Sosial

### 2.3.2.1 Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf merupakan proporsi penduduk usia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin atau huruf arab atau huruf lainnya terhadap penduduk usia 15 tahun keatas. Indikator ini digunakan untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang melek huruf di suatu daerah. Seseorang dikatakan melek huruf apabila paling tidak orang tersebut dapat menggunakan kemampuan baca dan tulis dan memungkinkannya untuk melanjutkan pemanfaatan kecakapan membaca dan menulis untuk pengembangan diri dan masyarakat. Melek huruf sangat berkaitan erat dengan buta huruf. Semakin meningkatnya angka melek huruf menunjukkan semakin menurunnya angka buta huruf. Angka melek huruf dapat digunakan untuk melihat pencapaian keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf.



**Gambar 2.18 Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019-2023 (Persen)**

*Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka 2024*

Dilihat dari gambar di diatas, angka melek huruf di Kabupaten Kotawaringin Timur mengalami angka yang fluktuatif Tahun 2019 sempat menjadi tahun dengan angka melek huruf terbesar mencapai 99,35%. Pada Tahun 2020 dan Tahun 2022 menjadi tahun dengan angka melek huruf terendah dari 5 tahun terakhir.

### 2.3.2.2 Rata-rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah dipergunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah. Capaian rata-rata lama sekolah di Kabupaten Kotawaringin Timur menunjukkan kecenderungan meningkat. Dalam kurun waktu 2019-2023 capaian rata-rata lama sekolah meningkat dari 8,12 tahun pada Tahun 2019 menjadi 8,17 tahun pada Tahun 2023.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

**Tabel 2.9 Rata-Rata Lama Sekolah Tahun 2019-2023**

| Tahun | Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) |
|-------|--------------------------------|
| 2019  | 8,12                           |
| 2020  | 8,13                           |
| 2021  | 8,15                           |
| 2022  | 8,16                           |
| 2023  | 8,17                           |

Sumber : Data BPS Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024

### 2.3.2.3 Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (HLS) dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Harapan lama sekolah di Kabupaten Kotawaringin Timur dalam kurun waktu 2019-2023 menunjukkan kecenderungan meningkat. Dari sebesar 12,69 tahun pada Tahun 2019 mengalami kenaikan hingga menjadi 12,88 tahun pada tahun 2023. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.10 Harapan Lama Sekolah Tahun 2019-2023**

| Tahun | Harapan Lama Sekolah (Tahun) |
|-------|------------------------------|
| 2019  | 12,69                        |
| 2020  | 12,84                        |
| 2021  | 12,85                        |

| Tahun | Harapan Lama Sekolah (Tahun) |
|-------|------------------------------|
| 2022  | 12,86                        |
| 2023  | 12,88                        |

Sumber : Data BPS Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024

#### 2.3.2.4 Usia Harapan Hidup

Usia harapan hidup adalah perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola kematian menurut umur. Angka ini adalah angka pendekatan yang menunjukkan kemampuan untuk bertahan hidup lebih lama. Usia harapan hidup yang baik dipengaruhi oleh kesehatan fisik, pendapatan, dan keamanan lingkungan. Apabila kesehatan fisik tidak mendukung, akan berkontribusi timbulnya penyakit yang memicu pada kematian. Hal ini akan membuat penurunan usia harapan hidup, begitu juga sebaliknya. Besarnya usia harapan hidup menurut standar UNDP adalah  $20 < x < 85$ . Perkembangan usia harapan hidup di Kabupaten Kotawaringin Timur selama Tahun 2019 - 2023, menunjukkan tren yang baik yaitu mengalami peningkatan.

**Tabel 2.11 Usia Harapan Hidup Tahun 2019-2023**

| Tahun | Usia Harapan Hidup (Tahun) |
|-------|----------------------------|
| 2019  | 69,80                      |
| 2020  | 69,85                      |
| 2021  | 69,90                      |
| 2022  | 70,15                      |
| 2023  | 70,39                      |

Sumber : Data BPS Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024

Selama periode 2019-2023, Usia Harapan Hidup (UHH) penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur terus meningkat dengan rata-rata tumbuh 0,18 persen per tahun. Capaian UHH Kotawaringin Timur pada Tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan UHH provinsi namun masih dibawah angka nasional. Peningkatan UHH di Kotawaringin Timur tidak lepas dari adanya perbaikan status kesehatan masyarakat termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, perilaku hidup sehat masyarakat, dan semakin baik kondisi sosial ekonomi masyarakat yang didukung dengan meningkatnya kesehatan lingkungan. Oleh karena itu, program dan kegiatan kesehatan yang terkait untuk meningkatkan usia harapan di

wilayah ini terus dilaksanakan dan ditingkatkan karena sudah memberikan dampak positif terhadap peningkatan UHH di Kabupaten Kotawaringin Timur.

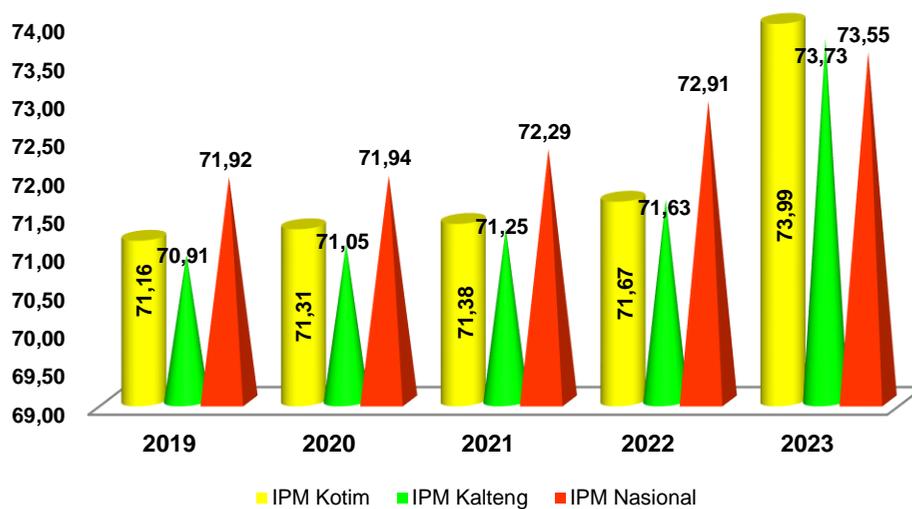
### **2.3.2.5 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat (UHH), pengetahuan (HLS dan RLS) dan standar hidup layak (pengeluaran per kapita). Peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya.

Perkembangan pembangunan manusia di Kabupaten Kotawaringin Timur menunjukkan *trend* meningkat dan tergolong dalam kategori tinggi. Capaian IPM wilayah ini mengalami peningkatan selama kurun waktu lima tahun terakhir, diatas provinsi namun masih berada di bawah nasional sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini. Secara absolut perkembangan IPM Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, dan nasional mengalami peningkatan, namun tidak demikian dengan pertumbuhan IPM yang hanya tumbuh dibawah 1 persen. Pembangunan manusia di Kotawaringin Timur Tahun 2023 menunjukkan peningkatan yang signifikan dan mengalami pertumbuhan yang positif dibanding tahun sebelumnya yang hanya tumbuh 0,41 persen atau meningkat sebesar 2,83 poin. Laju pertumbuhan IPM wilayah ini selama periode 2019-2023 masih lebih baik dibanding capaian provinsi dan nasional. Peningkatan pertumbuhan IPM di Kotawaringin Timur yang signifikan mengindikasikan bahwa pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19 telah berdampak positif terhadap pencapaian IPM.

Tinggi rendahnya nilai IPM tidak terlepas dari program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah. Peningkatan IPM tidak dapat terjadi secara instan namun melalui sebuah proses yang bertahap yang memerlukan waktu cukup panjang. Oleh karena itu, program pembangunan manusia perlu dilaksanakan secara berkesinambungan dan terus dipantau pelaksanaannya agar lebih

terarah. Upaya percepatan peningkatan IPM harus dilakukan melalui optimasi program terkait dengan indikator pembentuk IPM yaitu angka harapan hidup melalui kegiatan perbaikan kesehatan masyarakat, angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah melalui kegiatan perbaikan pendidikan masyarakat dan pengeluaran per kapita riil melalui kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat.



**Gambar 2.19 Perkembangan IPM Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dan Nasional Tahun 2019-2023**

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Tengah dan BPS, 2024

Dalam konstelasi regional, capaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten/kota Tahun 2023 mengindikasikan adanya disparitas pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan sumber daya manusia di Kota Palangkaraya lebih maju dibandingkan dengan wilayah lain sebagaimana terlihat dari capaian IPM  $\geq 80$ , yang berarti bahwa pembangunan sumber daya manusia di ibukota provinsi tersebut termasuk dalam kategori Sangat Tinggi. Sementara itu, capaian pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Kotawaringin Timur bersama tiga kabupaten lainnya masih tergolong dalam kategori Tinggi. Faktor penyebab adanya disparitas pembangunan manusia antar daerah adalah perbedaan kesempatan dalam mengakses pendidikan dan kesehatan. Kondisi tersebut masih menjadi kendala sekaligus tantangan dalam pembangunan daerah di Kotawaringin Timur. Dalam rangka menurunkan kesenjangan dan ketimpangan antar wilayah serta mewujudkan pemerataan pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Kalimantan Tengah,

Pemerintah Daerah perlu melakukan upaya akselerasi terutama pada daerah-daerah dengan IPM status sedang, seperti pembangunan infrastruktur transportasi guna meningkatkan konektivitas antar wilayah.

## **2.4 ASPEK PELAYANAN UMUM**

Aspek pelayanan umum dalam RPJPD menjelaskan kondisi tata kelola pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan umum baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penjelasan gambaran kondisi tata kelola pemerintahan ini dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Pelayanan Publik, Indeks Inovasi Daerah, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, dan indikator lainnya sesuai konteks daerah.

### **2.4.1 Fokus Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**

#### **2.4.1.1 Pendidikan**

Pendidikan merupakan bagian yang penting dalam upaya mewujudkan dan mencerdaskan kehidupan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Pendidikan merupakan hak dasar setiap penduduk dan pemenuhan atas hak ini menjadi kewajiban pemerintah. Dalam kaitan ini, Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab besar agar masyarakat memperoleh Pendidikan yang layak. Pembangunan sumber daya manusia terutama di sisi pendidikan memiliki peranan yang krusial dalam menciptakan sumber daya manusia yang baik.

#### **1. Fasilitas Sekolah**

Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan program penyelenggaraan pendidikan. Pencapaian pendidikan akan berjalan dengan baik apabila didukung oleh sarana dan prasarana serta peralatan yang cukup memadai dan berkualitas. Salah satu penyediaan sarana pendidikan yaitu ketersediaan sekolah dan kapasitas ruang kelas

yang dapat menampung siswa. Jumlah sekolah di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.12 Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2023**

| Tingkat Dasar |    | Tingkat Menengah |     | Tingkat Atas |     |    |
|---------------|----|------------------|-----|--------------|-----|----|
| SD            | MI | SMP              | MTS | SMA          | SMK | MA |
| 375           | 32 | 114              | 20  | 26           | 23  | 8  |

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka 2024

Jumlah sekolah di Kabupaten Kotawaringin Timur pada Tahun 2023 sebanyak 407 SD/MI, 134 SMP/MTs dan 57 SMA/SMK/MA. Kecamatan Mentawa Baru Ketapang mendominasi jumlah sekolah di semua jenjang pendidikan, yaitu sebanyak 51 SD/MI, 18 SMP/MTs, dan 14 SMA/SMK/MA. Ditemukan masih terdapat kecamatan yang tidak memiliki fasilitas SMA/SMK/MA yaitu di Kecamatan Tualan Hulu.

**Tabel 2.13 Jumlah Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan Per Kecamatan Tahun 2023**

| Kecamatan                 | Jumlah Fasilitas Pendidikan |            |            | Jumlah     |
|---------------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|
|                           | SD/MI                       | SMP/MTs    | SMA/SMK/MA |            |
| Kota Besi                 | 22                          | 7          | 2          | 31         |
| Cempaga                   | 26                          | 5          | 2          | 33         |
| Mentaya Hulu              | 35                          | 11         | 5          | 51         |
| Parenggean                | 24                          | 11         | 4          | 39         |
| Baamang                   | 29                          | 12         | 10         | 51         |
| Mentawa Baru Ketapang     | 51                          | 18         | 14         | 83         |
| Mentaya Hilir Utara       | 17                          | 5          | 2          | 24         |
| Mentaya Hilir Selatan     | 28                          | 7          | 6          | 41         |
| Pulau Hanaut              | 24                          | 7          | 2          | 33         |
| Antang Kalang             | 23                          | 8          | 2          | 33         |
| Teluk Sampit              | 11                          | 5          | 1          | 17         |
| Seranau                   | 14                          | 5          | 2          | 21         |
| Cempaga Hulu              | 27                          | 8          | 2          | 37         |
| Telawang                  | 19                          | 10         | 1          | 30         |
| Bukit Santuai             | 18                          | 4          | 1          | 23         |
| Tualan Hulu               | 17                          | 4          | 0          | 21         |
| Telaga Antang             | 22                          | 7          | 1          | 30         |
| <b>Kotawaringin Timur</b> | <b>407</b>                  | <b>134</b> | <b>57</b>  | <b>598</b> |

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka 2024

## 2. Rasio Guru terhadap Murid

Jumlah guru yang mampu memenuhi jumlah siswa dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Kotawaringin

Timur sangatlah penting. Selain untuk menunjang kualitas pendidikan, rasio guru terhadap murid juga sebagai bagian dari adanya sekolah yang mampu memenuhi jumlah murid di Kabupaten Kotawaringin Timur, maka, perlu pula dukungan akan tenaga pendidik, atau Guru yang terdapat di Kabupaten Kotawaringin Timur.

**Tabel 2.14 Rasio Siswa dan Guru Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah Kab. Kotim Tahun 2019-2023**

| Jenjang Pendidikan | Tahun  |        |        |        |        |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
|                    | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
| <b>SD/MI</b>       |        |        |        |        |        |
| Jumlah Guru        | 3.062  | 3.515  | 3.300  | 3.340  | 3.458  |
| Jumlah Murid       | 48.326 | 52.988 | 52.135 | 52.424 | 53.116 |
| Rasio              | 15,78  | 15,07  | 15,80  | 15,70  | 15,36  |
| <b>SMP/MTs</b>     |        |        |        |        |        |
| Jumlah Guru        | 1.127  | 1.383  | 1.219  | 1.251  | 1.257  |
| Jumlah Murid       | 18.774 | 19.151 | 19.631 | 19.499 | 19.523 |
| Rasio              | 16,66  | 13,85  | 16,10  | 15,59  | 15,53  |

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka 2024

Penyediaan sarana pendidikan erat kaitannya dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Seiring peningkatan jumlah penduduk hingga tahun 2023, dan diproyeksikan akan terus bertambah secara linier hingga akhir tahun perencanaan yaitu tahun 2045, maka diperlukan sarana dan prasarana Pendidikan yang memadai untuk mencapai kesejahteraan masyarakat melalui Pembangunan sektor pendidikan.

#### **2.4.1.2 Kesehatan**

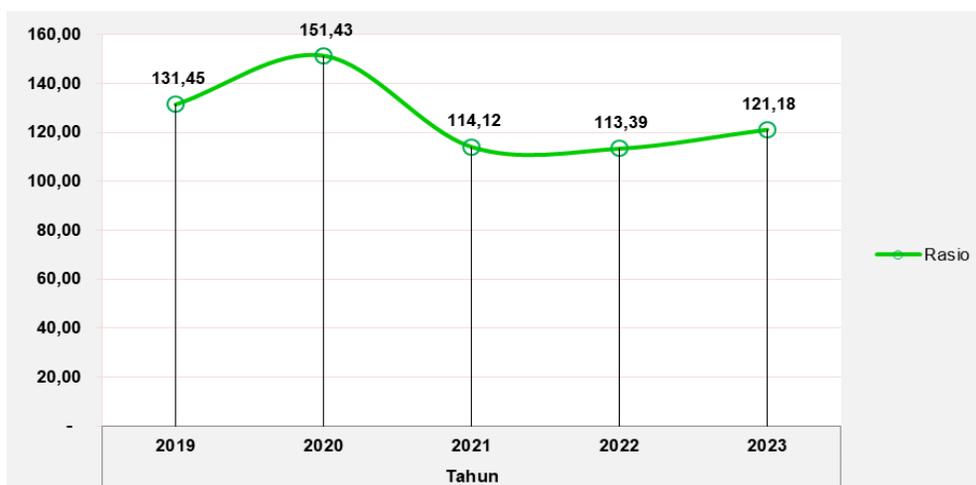
Kesehatan adalah salah satu unsur kesejahteraan masyarakat. Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus dalam pemerataan pelayanan kesehatan sehingga masyarakat mampu mengakses dan memenuhi kebutuhan kesehatan dengan adanya peningkatan kualitas pelayanan. Maka, harus ada pembangunan kesehatan dengan maksud untuk meningkatkan kemampuan, kesadaran, dan kemajuan hidup sehat bagi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur. Di sisi lain, adanya kualitas Sumber Daya manusia (SDM) yang mumpuni dalam bidang kesehatan juga dapat memberikan kemajuan terhadap kesehatan masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur. Dengan terjadinya kemajuan kesehatan, maka memberikan

peningkatan pula terhadap derajat kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

### 1. Posyandu

Perkembangan jumlah posyandu di Kabupaten Kotawaringin Timur selama kurun waktu lima tahun terakhir berfluktuatif. Jumlah posyandu yang dimiliki Kabupaten Kotawaringin Timur saat ini mencapai 316 posyandu atau turun 0,32 persen dibanding tahun sebelumnya. Jumlah posyandu yang menurun tersebut tidak diimbangi dengan jumlah balita yang justru semakin meningkat. Kondisi ini membuat posyandu mengalami peningkatan beban dari 113 balita setiap posyandu menjadi 121 balita setiap posyandu. Standar nasional rasio perbandingan antara jumlah posyandu dengan jumlah balita adalah 1:100 atau 1 posyandu melayani 100 balita, sementara rasio perbandingan Kotawaringin Timur Tahun 2023 berada diatas standar nasional. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah posyandu di Kotawaringin Timur belum mencukupi untuk melayani 38.293 balita. Oleh karena itu, dibutuhkan perhatian yang lebih serius dari Pemerintah Daerah khususnya dalam pemenuhan sarana dan prasarana posyandu, tenaga kesehatan dan kompetensi kader posyandu.

Rasio perkembangan jumlah posyandu di Kabupaten Kotawaringin Timur selama kurun waktu lima tahun terakhir terhadap balita dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 2.20 Perkembangan Rasio Posyandu Terhadap Balita di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019-2023**

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024 (diolah)

## 2. Puskesmas dan Puskesmas Pembantu

Jumlah pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Kotawaringin Timur saat ini mencapai 21 puskesmas, terdiri dari 8 puskesmas perawatan dan 13 puskesmas non perawatan. Keberadaan puskesmas tersebut telah tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur.

**Tabel 2.15 Jumlah Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (Pustu) di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023**

| Kecamatan             | Puskesmas | Puskesmas Pembantu |
|-----------------------|-----------|--------------------|
| Kota Besi             | 1         | 9                  |
| Cempaga               | 1         | 7                  |
| Mentaya Hulu          | 1         | 13                 |
| Parenggean            | 2         | 9                  |
| Baamang               | 2         | 7                  |
| Mentawa Baru Ketapang | 3         | 9                  |
| Mentaya Hilir Utara   | 1         | 7                  |
| Mentaya Hilir Selatan | 1         | 8                  |
| Pulau Hanaut          | 1         | 12                 |
| Antang Kalang         | 1         | 11                 |
| Teluk Sampit          | 1         | 4                  |
| Seranau               | 1         | 5                  |
| Cempaga Hulu          | 1         | 11                 |
| Telawang              | 1         | 6                  |
| Bukit Santuai         | 1         | 13                 |
| Tualan Hulu           | 1         | 10                 |
| Telaga Antang         | 1         | 13                 |
| <b>Jumlah</b>         | <b>21</b> | <b>154</b>         |

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Dalam Angka 2024

Berdasarkan data pada tabel diatas diketahui bahwa setiap kecamatan memiliki puskesmas dan puskesmas pembantu. Dilihat dari segi kuantitas, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang memiliki puskesmas terbanyak, yaitu 3 buah puskesmas dengan didukung 9 buah puskesmas pembantu.

## 3. Rumah Sakit

Jumlah rumah sakit di Kabupaten Kotawaringin Timur sebanyak 3 buah rumah sakit umum dengan kemampuan pelayanan gawat darurat (Gadar) Level I, yaitu RSUD dr. Murjani Sampit (tipe B), RSUD Pratama Parenggean (tipe D), dan Rumah Sakit Pratama Samuda (Tipe D).

**Tabel 2.16 Jumlah Rumah Sakit di Kabupaten Kotawaringin Timur**

| Kecamatan             | Ruah Sakit Umum | Rumah Bersalin |
|-----------------------|-----------------|----------------|
| Kota Besi             | -               | -              |
| Cempaga               | -               | -              |
| Mentaya Hulu          | -               | -              |
| Parenggean            | 1               | -              |
| Baamang               | -               | -              |
| Mentawa Baru Ketapang | 1               | 1              |
| Mentaya Hilir Utara   | -               | -              |
| Mentaya Hilir Selatan | 1               | -              |
| Pulau Hanaut          | -               | -              |
| Antang Kalang         | -               | -              |
| Teluk Sampit          | -               | -              |
| Seranau               | -               | -              |
| Cempaga Hulu          | -               | -              |
| Telawang              | -               | -              |
| Bukit Santuai         | -               | -              |
| Tualan Hulu           | -               | -              |
| Telaga Antang         | -               | -              |
| <b>Jumlah</b>         | <b>3</b>        | <b>1</b>       |

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Dalam Angka 2024

#### 4. Tenaga Kesehatan

Tenaga kesehatan meliputi dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, apoteker, ahli gizi, perawat, bidan ahli kesehatan masyarakat, tenaga sanitasi, tenaga teknisi medis. Rasio tenaga kesehatan per jumlah penduduk menunjukkan seberapa besar ketersediaan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada penduduk. Rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.17 Jumlah Tenaga Kesehatan dan Rasio di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019-2023**

| No. | Uraian                 | Capaian Tahun |         |         |         |         |
|-----|------------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|
|     |                        | 2019          | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
| 1.  | Jumlah Penduduk (jiwa) | 466.366       | 428.895 | 432.283 | 436.079 | 443.359 |
| 2.  | Jumlah Perawat (orang) | 577           | 825     | 835     | 843     | 811     |

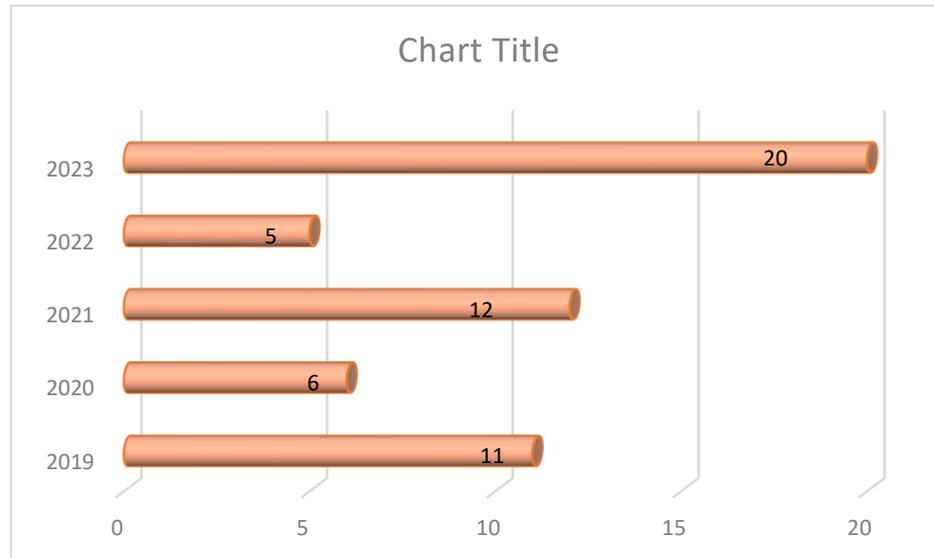
| No.   | Uraian                                     | Capaian Tahun |          |          |        |        |
|---|--|---------------|----------|----------|--------|--------|
|   |  | 2019          | 2020     | 2021     | 2022   | 2023   |
| 3.  | Jumlah Perawat Gigi (orang)                | 24            | 24       | 29       | 30     | 30     |
| 4.  | Jumlah Bidan (orang)                       | 314           | 406      | 418      | 463    | 464    |
| 5.  | Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat (orang) | 6             | 25       | 14       | 30     | 34     |
| 6.  | Jumlah Tenaga Kesehatan Lingkungan (orang) | 27            | 20       | 19       | 24     | 25     |
| 7.  | Jumlah Tenaga Gizi/Nutrisionis (orang)     | 41            | 40       | 37       | 49     | 50     |
| 8.  | Jumlah Tenaga Teknis Kefarmasian (orang)   | 31            | 55       | 46       | 65     | 59     |
| 9.  | Jumlah Apoteker (orang)                    | 32            | 31       | 35       | 41     | 43     |
| Rasio per penduduk (berdasarkan SPM nasional) |  |               |          |          |        |        |
| 10.   | Rasio Perawat                              | 775,98        | 505,18   | 500,33   | 499,52 | 527,18 |
| 11.   | Rasio Bidan                                | 1.485,24      | 1.056,39 | 1.034,17 | 941,86 | 955,52 |
| Rasio per 100.000 penduduk                    |  |               |          |          |        |        |
| 12.   | Rasio Tenaga Kesmas                        | 1,29          | 5,83     | 3,24     | 6,88   | 7,67   |
| 13.   | Rasio Tenaga Kesling                       | 5,79          | 4,66     | 4,40     | 5,50   | 5,64   |
| 14.   | Rasio Tenaga Gizi                          | 8,79          | 9,33     | 8,56     | 11,24  | 11,28  |
| 15.   | Rasio Tenaga Teknis Kefarmasian            | 6,65          | 12,82    | 10,64    | 14,91  | 13,31  |
| 16.   | Rasio Apoteker                             | 6,86          | 7,23     | 8,10     | 9,40   | 9,70   |

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur (2024) dan diolah

## 5. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat Perawatan

Kasus Balita Gizi Buruk adalah Balita dengan status gizi berdasarkan indeks berat badan (BB) menurut panjang badan (BB/PB) atau berat badan (BB) menurut tinggi badan (BB/TB) dengan *Z-score* < -3 SD (sangat kurus) dan/atau terdapat tanda- tanda klinis gizi buruk lainnya (marasmus, kwashiorkor, dan marasmuskwashiorkor).

Jumlah kasus gizi buruk yang dilaporkan di Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2022 menurun dibanding tahun sebelumnya yaitu menjadi 5 kasus dan semua mendapatkan perawatan. Jumlah kasus gizi buruk selama periode 2019-2023 dapat dilihat dari gambar berikut.



**Gambar 2.21 Perkembangan Jumlah Kasus Gizi Buruk Tahun 2019-2023**

Sumber : Data BPS Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024

### 2.4.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### 1. Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Baik

Indikator Kinerja berupa Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap yang mana indikator tersebut diampu oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Timur. Capaian kinerja untuk indikator kinerja persentase panjang jaringan jalan dalam kondisi mantap selama kurun waktu lima tahun terakhir terus mengalami kenaikan. Panjang jalan Kabupaten Kotawaringin Timur dalam kondisi mantap saat ini sepanjang 779,4874 Km atau 38,51 persen dari keseluruhan panjang jalan kabupaten.



**Gambar 2.22 Persentase Panjang Jaringan Jalan dalam Kondisi Mantap Tahun 2019-2023**

Sumber : Dinas SDABMBKPRKP Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024

## 2. Panjang Jembatan dalam Kondisi Baik

Kinerja bidang pekerjaan umum dan penataan ruang khususnya dalam pembangunan prasarana dan sarana infrastruktur dapat dilihat dari capaian kinerja beberapa indikator, salah satunya panjang dan kondisi jembatan kayu, beton, baja dalam kondisi baik, sedang dan rusak.

**Tabel 2.18 Jumlah, Panjang, dan Kondisi Jembatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019-2023**

| No. | Indikator Kinerja                   | Capaian Tahun |         |         |         |         |
|-----|-------------------------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|
|     |                                     | 2019          | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
| 1.  | Jenis Jembatan (buah)               |               |         |         |         |         |
|     | a. Jumlah jembatan kayu             | 153           | 153     | 153     | 152     | 150     |
|     | b. Jumlah jembatan beton            | 66            | 67      | 69      | 70      | 72      |
|     | c. Jumlah jembatan baja             | 12            | 12      | 12      | 12      | 12      |
| 2.  | Panjang Jembatan (meter)            |               |         |         |         |         |
|     | a. Jumlah jembatan kayu             | 3.612,5       | 3.612,5 | 3.562,5 | 3.542,5 | 3.502,5 |
|     | b. Jumlah jembatan beton            | 431,5         | 471,5   | 521,5   | 541,5   | 581,5   |
|     | c. Jumlah jembatan baja             | 750           | 750     | 750     | 750     | 750     |
| 3.  | Jembatan dalam kondisi baik (buah)  |               |         |         |         |         |
|     | a. Jumlah jembatan kayu             | 153           | 153     | 153     | 152     | 150     |
|     | b. Jumlah jembatan beton            | 66            | 67      | 69      | 70      | 70      |
|     | c. Jumlah jembatan baja             | 12            | 12      | 12      | 12      | 12      |
| 4.  | Jembatan dalam kondisi rusak (buah) |               |         |         |         |         |
|     | a. Jumlah jembatan kayu             | 54            | 54      | 52      | 52      | 50      |
|     | b. Jumlah jembatan beton            | -             | -       | -       | -       | -       |
|     | c. Jumlah jembatan baja             | -             | -       | -       | -       | -       |

Sumber : Dinas PUPRPRKP Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024

## 3. Konektivitas Wilayah Kabupaten

Persentase Konektivitas Wilayah Kabupaten merupakan persentase dari panjang jalan penghubung pusat-pusat kegiatan dan pusat produksi di Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. Konektivitas wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur dilihat dari panjang jaringan jalan semula 1.574,88 Km bertambah menjadi

2.024,06 Km, dikarenakan adanya peralihan status dari jalan provinsi menjadi jalan kabupaten.

#### 4. Ketersediaan Irigasi dan jaringan sumber daya air

Ketersediaan irigasi kabupaten dan jaringan sumber daya air adalah ukuran yang mengindikasikan sejauh mana sistem irigasi atau saluran air yang digunakan untuk menyuplai air kepada pertanian di suatu kabupaten berada dalam keadaan baik dan berfungsi secara efisien. Ini mencerminkan seberapa besar proporsi sistem irigasi yang tidak rusak atau tersumbat dan masih mampu mengalirkan air dengan baik ke lahan pertanian. Berikut adalah data ketersediaan irigasi dan jaringan sumber daya air di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019-2023.

**Tabel 2.19 Ketersediaan Irigasi Dan Jaringan Sumber Daya Air Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019-2023**

| <b>Ketersediaan</b>                           | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Daerah Irigasi (Ha)                           | 155.212     | 155.212     | 155.212     | 155.212     | 155.212     |
| Jaringan Sumber Daya Air (Km)                 | 2.232,02    | 2.232,02    | 2.237,47    | 2.243,94    | 2.243,94    |
| Bangunan Sumber Daya Air (Buah)               | 303         | 303         | 312         | 315         | 315         |
| Rasio Jaringan Irigasi dan Rawa (Ha)          | 1,32        | 1,32        | 1,02        | 0,68        | 0,37        |
| Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi Baik (%) | 24,03       | 24,03       | 24,13       | 24,35       | 24,90       |

Sumber : Dinas SDABMBKPRKP Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024

#### 5. Penduduk yang Mendapat Akses Air Minum

Air minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum. Penyediaan air minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Sistem penyediaan air minum dengan jaringan perpipaan yang selanjutnya disebut SPAM merupakan satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum yang unit distribusinya melalui perpipaan dan unit pelayanannya menggunakan sambungan rumah/sambungan pekarangan, hidran umum, dan hidran kebakaran.

Persentase penduduk yang mendapat akses air minum mengalami kenaikan setiap tahun. Cakupan pelayanan air bersih di

wilayah ini di Tahun 2022 sebesar 56,54 persen atau meningkat 4,34 persen dibanding Tahun 2018 sebesar 52,20. Kebutuhan masyarakat Kotawaringin Timur terhadap akses air minum kian meningkat setiap tahun seiring dengan penambahan jumlah penduduk. Walaupun cakupan akses air bersih baik untuk masyarakat cenderung meningkat setiap tahun.



**Gambar 2.23 Rumah Tangga dengan Akses Air Minum  
Tahun 2018-2022**

*Sumber : Dinas SDABMBKPRKP Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024*

#### 6. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau

Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar luas wilayah yang digunakan untuk ruang terbuka hijau (seperti taman, area berumput, hutan kota, dan sebagainya) dalam kaitannya dengan luas wilayah. Ini mencerminkan memberikan gambaran tentang sejauh mana suatu wilayah menjaga keberlanjutan lingkungan dan kualitas hidup dengan mempertahankan area ruang terbuka hijau dalam konteks perkembangan perkotaan atau pemukiman. Dalam periode 5 tahun terakhir dari tahun 2018 sampai dengan 2022 perkembangan RTH di Kabupaten Kotawaringin Timur terbilang rendah. Pada tahun 2018 luas RTH public mencapai 406,34 hektar, sedangkan di tahun 2022 bertambah sebanyak 0,04 yaitu menjadi 406,38 hektar.

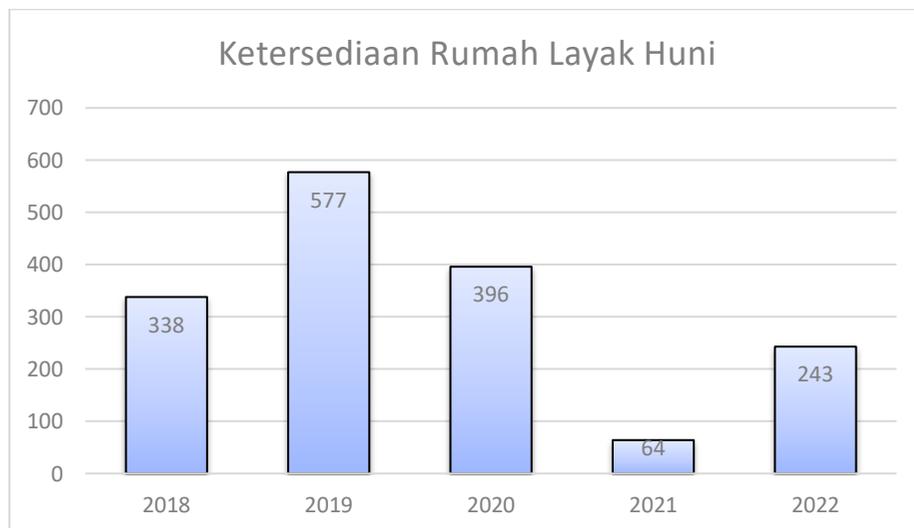
#### 7. Perumahan Rakyat dan Kawasan Perumahan

Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Kabupaten Kotawaringin Timur dilaksanakan melalui pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman

Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Kondisi Penyelenggaraan sektor Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Kotawaringin Timur pada bagian ini difokuskan pada substansi Kawasan Permukiman dan Persentase Rumah Layak Huni.

#### 8. Rumah Layak Huni

Rumah layak huni merupakan rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni. Adapun kriteria rumah layak huni meliputi, ketahanan bangunan, kecukupan luasan bangunan, akses sanitasi dan akses air minum. Jumlah Rumah Layak Huni di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021 mencapai 64 rumah dan meningkat sampai 238 rumah pada Tahun 2022.



**Gambar 2.24 Ketersediaan Rumah Layak Huni Tahun 2018-2022**

*Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023*

#### 9. Luasan Permukiman Kumuh

Luasan permukiman kumuh adalah ukuran yang menunjukkan seberapa besar bagian dari wilayah perkotaan yang terdiri dari permukiman yang tidak memenuhi standar kesehatan dan perumahan yang layak. Permukiman kumuh seringkali ditandai oleh kondisi bangunan yang buruk, sanitasi yang tidak memadai, serta akses terbatas terhadap layanan dasar seperti air bersih dan sanitasi. Semakin tinggi luasan permukiman kumuh, semakin besar tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan kualitas perumahan dan infrastruktur. Luasan permukiman kumuh dan data permukiman

kumuh di kawasan perkotaan Kabupaten Kotawaringin Timur dalam kurun waktu tahun 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.20 Luasan Permukiman Kumuh dan Permukiman Kumuh di Perkotaan Tahun 2018-2022**

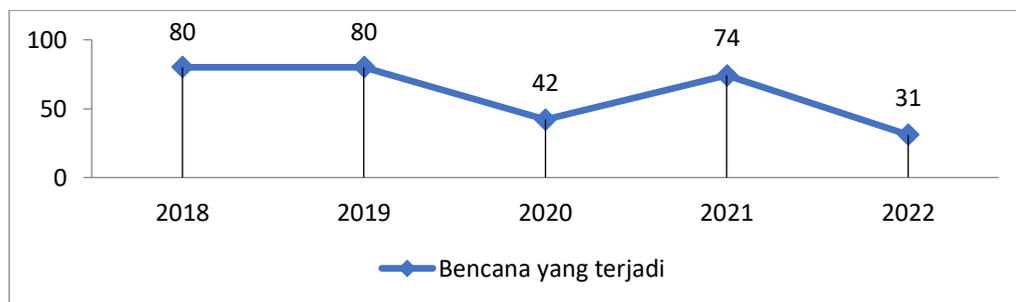
| Data   | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Luasan permukiman kumuh (Ha)                 | 49,44 | 49,44 | 49,44 | 75,87 | 75,87 |
| Permukiman kumuh di kawasan perkotaan (Unit) | 2.985 | 2.839 | 2.775 | 2.633 | 2.985 |

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, 2023

#### 2.4.1.4 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

##### 1. Persentase Bencana yang Ditanggulangi

Risiko bencana merupakan penilaian kemungkinan dari dampak yang diperkirakan apabila bahaya itu menjadi bencana. IRB dalam hal ini akan menjadi dasar untuk memahami ancaman bencana, kerentanan, dan kapasitas suatu daerah. IRB di Kabupaten Kotawaringin Timur selama kurun waktu 2018-2010 menurut informasi yang diperoleh dari LKJIP Kabupaten Kotawaringin Timur selalu berada pada posisi 80 Artinya bahwa tingkat ancaman bencana, kerentanan, dan kapasitas Kabupaten Kotawaringin Timur dalam menghadapi bencana memiliki nilai yang sama selama 2 tahun. Namun pada tahun 2020-2022 mengalami penurunan yang cukup signifikan. Yakni pada tahun 2022 indeks risiko bencana berada pada angka 31 yang berarti paling rendah apabila dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya.



**Gambar 2.25 Indeks Risiko Bencana Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018-2022**

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Timur dalam Angka 2023

Keberhasilan Pemerintah dalam menangani bencana adalah bagaimana Pemerintah mampu mengantisipasi saat sebelum terjadi

bencana, mampu mengatasi/ menanggulangi saat terjadi bencana dan mampu merevitalisasi berbagai bidang pasca terjadi bencana. Kemampuan Pemerintah dalam menanggulangi bencana merupakan hal yang penting mengingat semakin cepat dan tepat proses penanggulangan bencana maka semakin minim jumlah kerugian yang ditimbulkan akibat bencana. Data korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat dan Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap dapat dilihat pada tabel berikut ini.

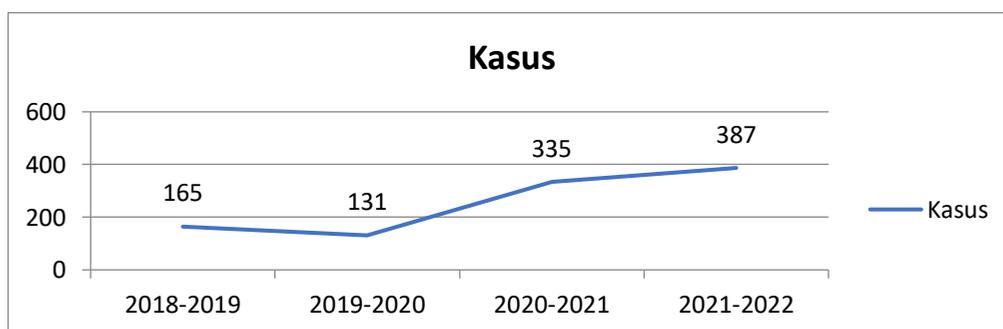
**Tabel 2.21 Korban Bencana Tahun 2018-2022**

| Data   | 2018  | 2019 | 2020   | 2021   | 2022   |
|--|-------|------|--------|--------|--------|
| Korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat (KK)                   | 2.608 | 325  | 19.047 | 25.642 | 16.636 |
| Korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap (%) | 100   | 100  | 78,50  | 96,20  | 60,07  |

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2023

## 2. Persentase Penurunan Kasus Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Berikut adalah gambar diagram kasus ketenteraman dan ketertiban yang terkait dengan pelanggaran Peraturan Daerah dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022. Dari 5 tahun terakhir kasus pelanggaran terus meningkat, pelanggaran yang paling banyak didapati adalah pada tahun 2021-2022. Pada tahun 2019-2020 sempat terjadi penurunan, hal ini dikarenakan dengan pembatasan aktifitas masyarakat pada awal pandemi Covid-19.

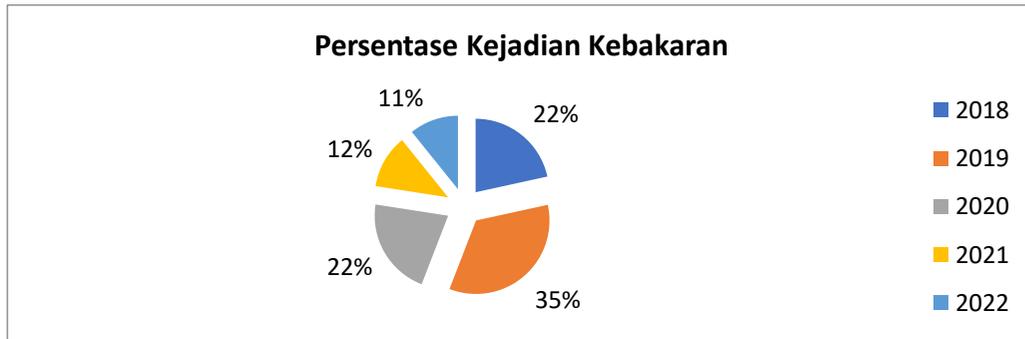


**Gambar 2.26 Tren Pelanggaran Terhadap Produk Hukum Daerah**

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka 2023

## 3. Persentase Kejadian Kebakaran di Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) yang Tertangani

Untuk tahun 2022 kejadian yang tertangani adalah sebesar 11%. Hasil ini merupakan hasil yang lebih rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Pencapaian indikator kinerja untuk kurun waktu 5 tahun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 adalah sebagai berikut :



**Gambar 2.27 Persentase Kejadian Kebakaran di WMK yang Tertangani dengan Tahun Sebelumnya**

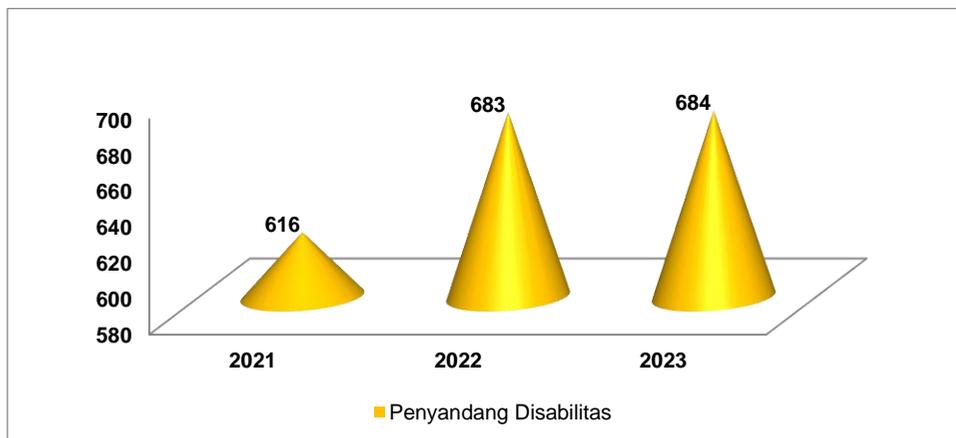
Sumber: Rencana Strategi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Kotawaringin Timur 2023

Dari gambar diagram di atas dapat dilihat bahwa sejak tahun 2018 hingga tahun 2022 penanganan kebakaran di wilayah manajemen kebakaran hampir seluruhnya belum dapat tertangani. Adapun kendala yang dihadapi untuk kejadian kebakaran yang tidak tertangani dikarenakan lokasi kebakaran susah dijangkau melalui angkutan darat.

#### 2.4.1.5 Sosial

##### 1. Penyandang Disabilitas

Jumlah penyandang disabilitas di Kabupaten Kotawaringin Timur pada Tahun 2023 meningkat 0,15 persen dari 683 orang menjadi 684 orang sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini.

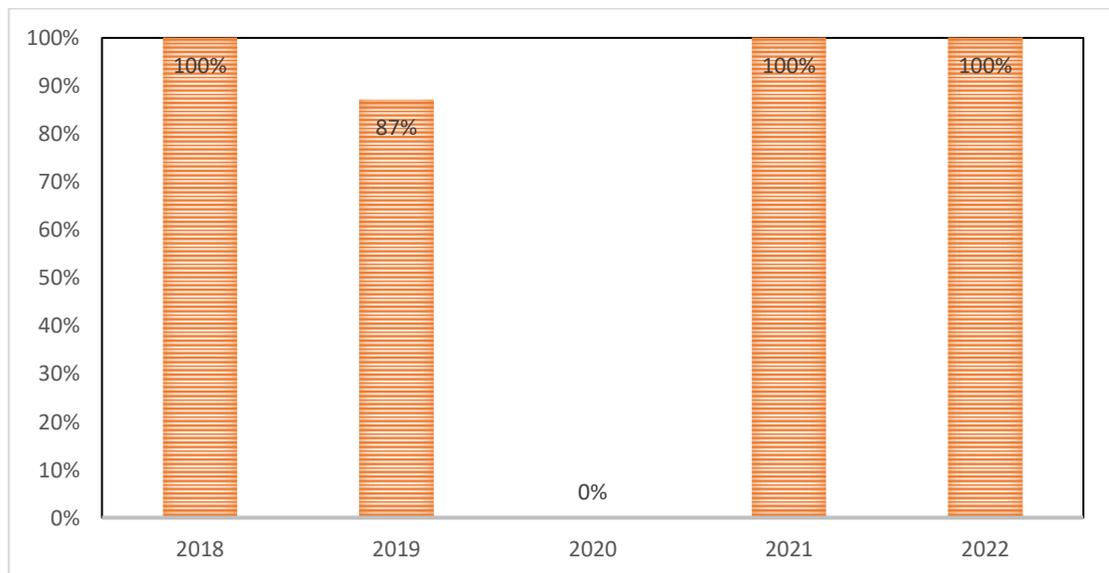


**Gambar 2.28 Jumlah Penyandang Disabilitas di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019-2023**

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka 2023

2. Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial

Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana persentase individu penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia menerima bantuan sosial yang ditujukan khusus untuk memenuhi kebutuhan mereka. Persentase penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial Kabupaten Kotawaringin Timur dalam kurun waktu tahun 2018-2022 dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar 2.29 Persentase Penyandang Cacat Fisik Dan Mental, Serta Lanjut Usia Tidak Potensial Yang Telah Menerima Jaminan Sosial Tahun 2018-2022**

*Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024*

## 2.4.2 Fokus Urusan Pemerintahan Wajib bukan Pelayanan Dasar

### 2.4.2.1 Tenaga Kerja

1. Penempatan Tenaga Kerja dan Rasio Kesempatan Kerja

Dalam rangka menurunkan angka pengangguran, Kabupaten Kotawaringin Timur menetapkan kinerja untuk meningkatkan kesempatan kerja/lapangan kerja, kinerja diukur dengan persentase peningkatan tenaga kerja yang ditempatkan. Selama kurun waktu lima tahun terakhir terus terjadi penurunan persentase tenaga kerja yang ditempatkan. Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan pada Tahun 2023 menurun 10,42 persen poin dibanding tahun

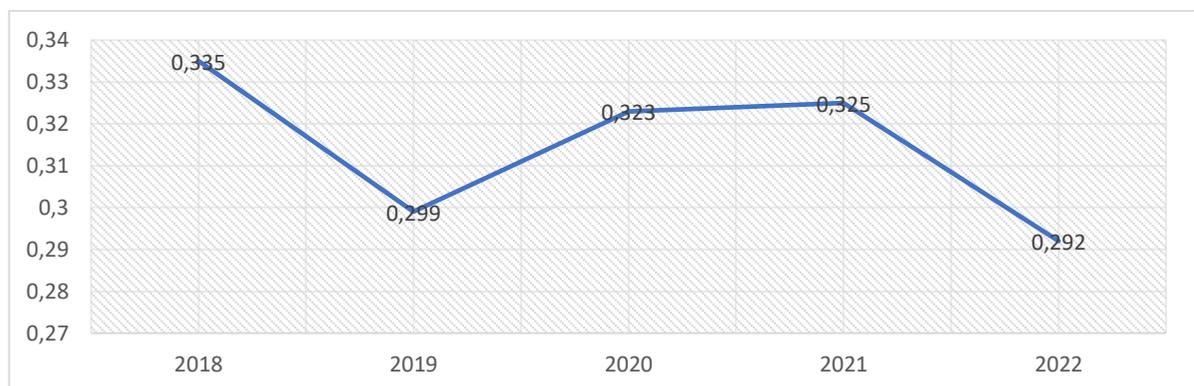
sebelumnya. Kondisi tersebut tidak terlepas dari dampak pandemi COVID-19 yang melanda diseluruh dunia pada Tahun 2020 sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.22 Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan  
Tahun 2019-2023**

| Uraian                 | Tahun |      |       |      |      |
|------------------------|-------|------|-------|------|------|
|                        | 2019  | 2020 | 2021  | 2022 | 2023 |
| Terdaftar              | 1.615 | 529  | 1.344 | 689  | 519  |
| Ditempatkan            | 611   | 207  | 141   | 78   | 3    |
| Persentase ditempatkan | 38    | 39   | 10    | 11   | 0,58 |

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Timur dalam Angka 2023

Penyebab diluar pandemi adalah dikarenakan masih rendahnya kualitas tenaga kerja, dan ketidaksesuaian kebutuhan antara tenaga kerja dengan dunia usaha dan industri serta laju pertumbuhan penduduk usia produktif yang siap bersaing mengisi peluang pasar kerja, yang cenderung terus meningkat namun pertumbuhan lapangan kerja baru masih belum memadai dengan kondisi tersebut. Sementara daerah sudah melakukan upaya dalam meningkatkan kinerja dimaksud, adapun beberapa upaya yang telah dilakukan adalah meningkatkan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja dengan Pelayanan Informasi Ketenagakerjaan melalui Penyebarluasan Informasi Tenaga Kerja serta pelatihan keterampilan tenaga kerja. Rasio kesempatan kerja Kabupaten Kotawaringin Timur dalam kurun waktu tahun 2018-2022 cenderung fluktuatif sebagaimana terjabar pada gambar dibawah ini.

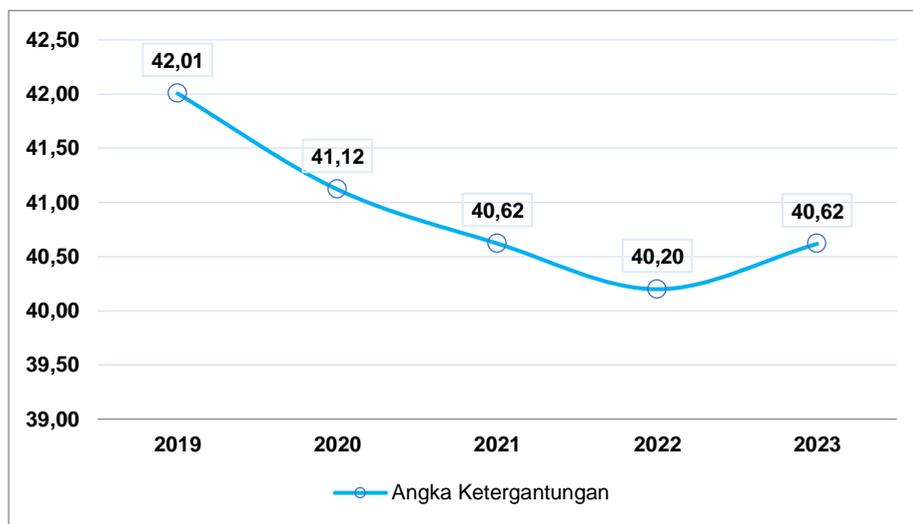


**Gambar 2.30 Rasio Kesempatan Kerja Tahun 2018-2022**

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Tahun 2023

## 2. Rasio Ketergantungan (*Dependancy Ratio*)

Rasio Ketergantungan atau *Dependancy Ratio* adalah perbandingan antara jumlah penduduk umur 0-14 tahun, ditambah dengan jumlah penduduk 65 tahun ke atas dibagi dengan jumlah penduduk usia 15-64 tahun (angkatan kerja). Rasio ketergantungan dapat digunakan sebagai indikator yang dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Berdasarkan komposisi penduduk menurut kelompok umur, rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 mengalami peningkatan sebagaimana tersaji pada gambar berikut.



**Gambar 2.31 Rasio Ketergantungan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019-2023**

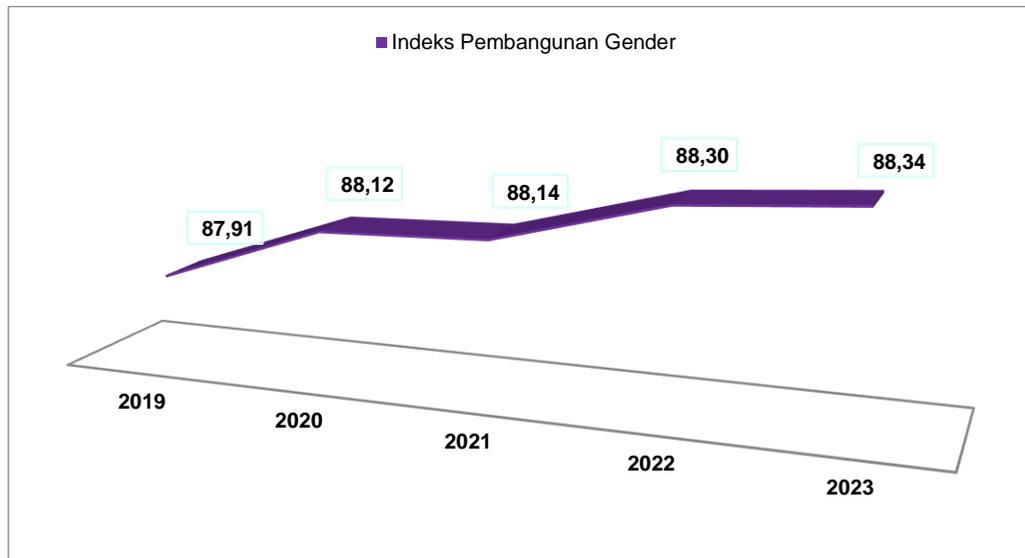
Sumber : Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka 2024

### 2.4.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

#### 1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Keberhasilan pembangunan perempuan dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender atau yang difokuskan kepada perempuan. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Perkembangan IPG Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, dan nasional dapat dilihat pada gambar berikut ini.

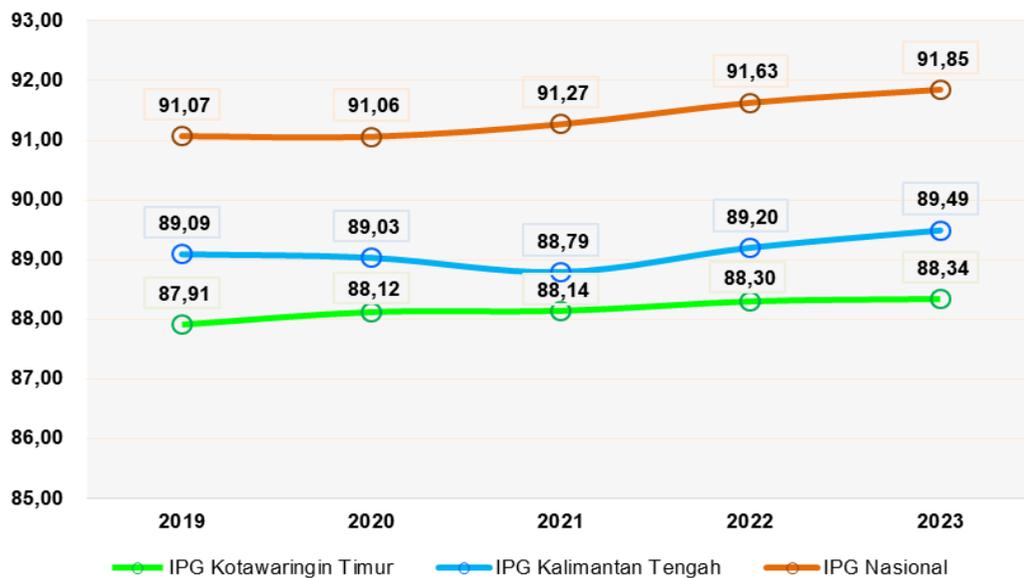
Capaian IPG Kotawaringin Timur selama kurun waktu lima tahun terakhir masih berada dibawah provinsi dan nasional dengan kecenderungan yang terus meningkat. Tercatat pada Tahun 2020, nilai IPG mengalami peningkatan tertinggi sebesar 0,24 persen dan terendah dicapai pada Tahun 2021 dengan peningkatan hanya 0,02 persen. Capaian tersebut mengindikasikan bahwa proses pembangunan gender yang terus dilakukan di Kotawaringin Timur semakin berdampak positif.



**Gambar 2.32 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019-2023**

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Timur dalam Angka 2023

Capaian IPG Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023 masih dibawah capaian nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini.

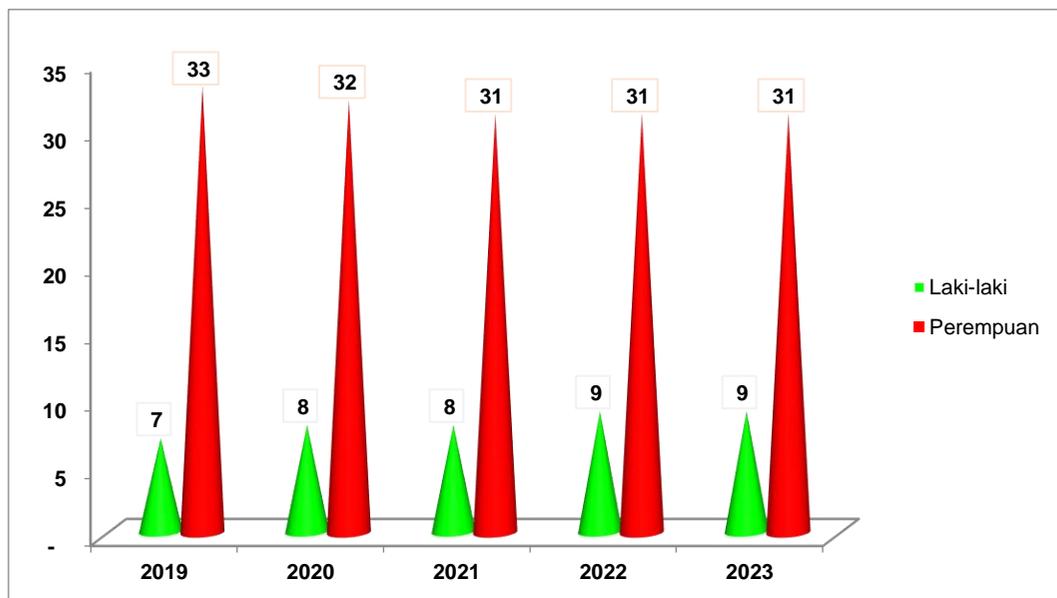


### Gambar 2.33 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG) Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional Tahun 2019-2023

Sumber : Data BPS Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024

#### 2. Keterwakilan Perempuan di Lembaga Legislatif

Keterwakilan perempuan di Lembaga legislatif di Kabupaten Kotawaringin Timur dalam 3 periode masih jauh dari apa yang diharapkan oleh Peraturan Perundangan-undangan, yaitu keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%. Pada periode 2019-2024, keterwakilan perempuan di legislatif menunjukkan hasil yang menggembirakan, dimana keanggotaan perempuan meningkat dari setiap tahunnya. Namun memang masih berada dibawah 30%. Untuk memenuhi angka minimum tersebut diperlukan 12 orang perempuan yang mewakili di lembaga legislatif.



### Gambar 2.34 Komposisi Anggota DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Menurut Periode dan Jenis Kelamin

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka 2024

#### 3. Keterwakilan Perempuan di Lembaga Eksekutif

Perempuan juga dapat berperan di Lembaga eksekutif seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas sebagai abdi masyarakat yang harus menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata kepada masyarakat.

**Tabel 2.23 Jumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023**

| Pangkat/Golongan/Ruang        |                         | Laki-Laki    | Perempuan    | Jumlah       |
|-------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| I/A                           | Juru muda               | 1            | -            | 1            |
| I/B                           | Juru muda tingkat I     | 3            | 1            | 4            |
| I/C                           | Juru                    | 12           | 1            | 13           |
| I/D                           | Juru Tingkat I          | 26           | 3            | 29           |
| <b>Golongan I/Range I</b>     |                         | <b>42</b>    | <b>5</b>     | <b>47</b>    |
| II/A                          | Pengatur muda           | 23           | 8            | 31           |
| II/B                          | Pengatur muda tingkat I | 86           | 37           | 123          |
| II/C                          | Pengatur                | 194          | 167          | 361          |
| II/D                          | Pengatur tingkat I      | 153          | 128          | 281          |
| <b>Golongan II/Range II</b>   |                         | <b>456</b>   | <b>340</b>   | <b>769</b>   |
| III/A                         | Penata muda             | 326          | 582          | 908          |
| III/B                         | Penata muda tingkat I   | 305          | 464          | 769          |
| III/C                         | Penata                  | 286          | 458          | 744          |
| III/D                         | Penata tingkat I        | 357          | 351          | 708          |
| <b>Golongan III/Range III</b> |                         | <b>1.274</b> | <b>1.855</b> | <b>3.129</b> |
| IV/A                          | Pembina                 | 331          | 253          | 584          |
| IV/B                          | Pembina tingkat I       | 298          | 502          | 800          |
| IV/C                          | Pembina utama muda      | 24           | 8            | 32           |
| IV/D                          | Pembina utama madya     | 1            | -            | 1            |
| IV/E                          | Pembina utama           | 1            | -            | 1            |
| <b>Golongan IV/Range IV</b>   |                         | <b>655</b>   | <b>763</b>   | <b>1.418</b> |
| <b>Kotawaringin Timur</b>     |                         | <b>2.427</b> | <b>2.963</b> | <b>5.390</b> |

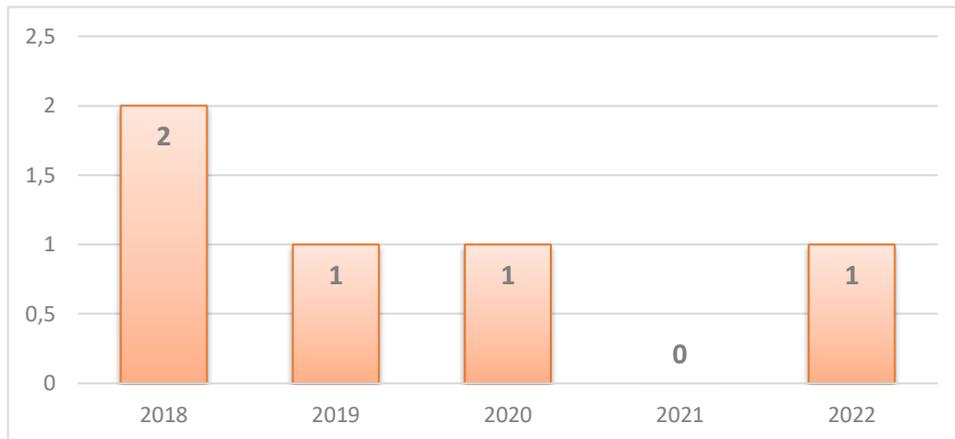
Sumber : Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka 2023

Dilihat dari Tabel di atas, secara umum pegawai perempuan lebih banyak daripada laki-laki. Hal ini memberikan gambaran bahwa di Kabupaten Kotawaringin Timur dalam hal penerimaan dan penempatan pegawai, perempuan mendapat kesempatan yang sama dengan laki-laki dalam mengembangkan kariernya.

#### 4. Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah setiap tindakan yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan pada perempuan dan anak secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau di dalam lingkungan kehidupan pribadi. Dalam kurun

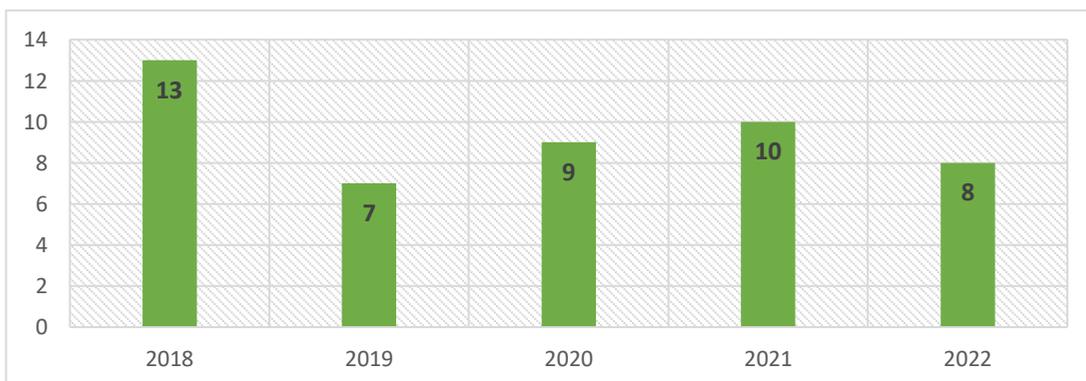
waktu Tahun 2018-2022 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mendapatkan layanan bantuan hukum terus menurun.



**Gambar 2.35 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum**

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2023

Sedangkan untuk data penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus- kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilihat sebagai berikut.

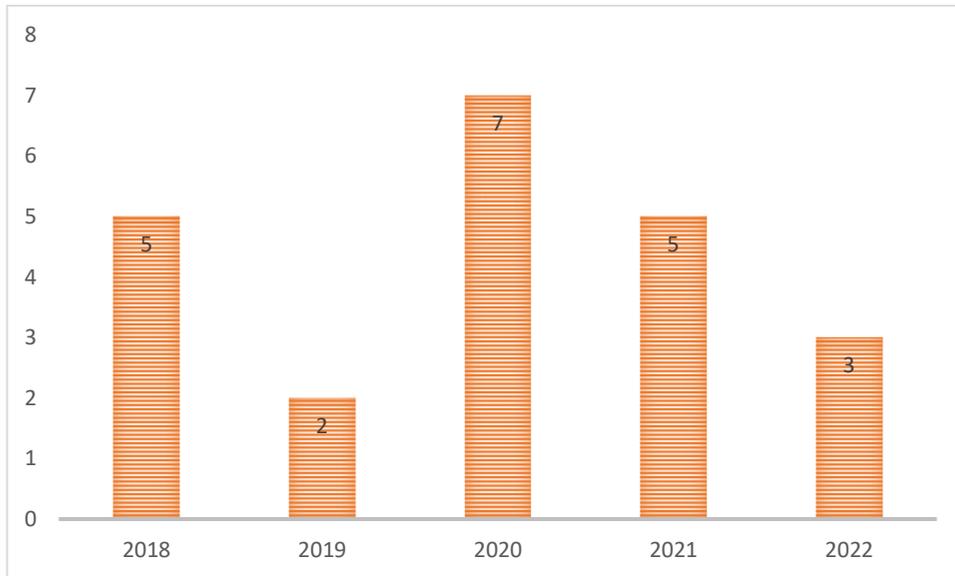


**Gambar 2.36 Grafik Penegakan Hukum Dari Tingkat Penyidikan Sampai Dengan Putusan Pengadilan Atas Kasus- Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Tahun 2018-2022**

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, 2023

#### 5. Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan

Data perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit dapat dilihat sebagai berikut.

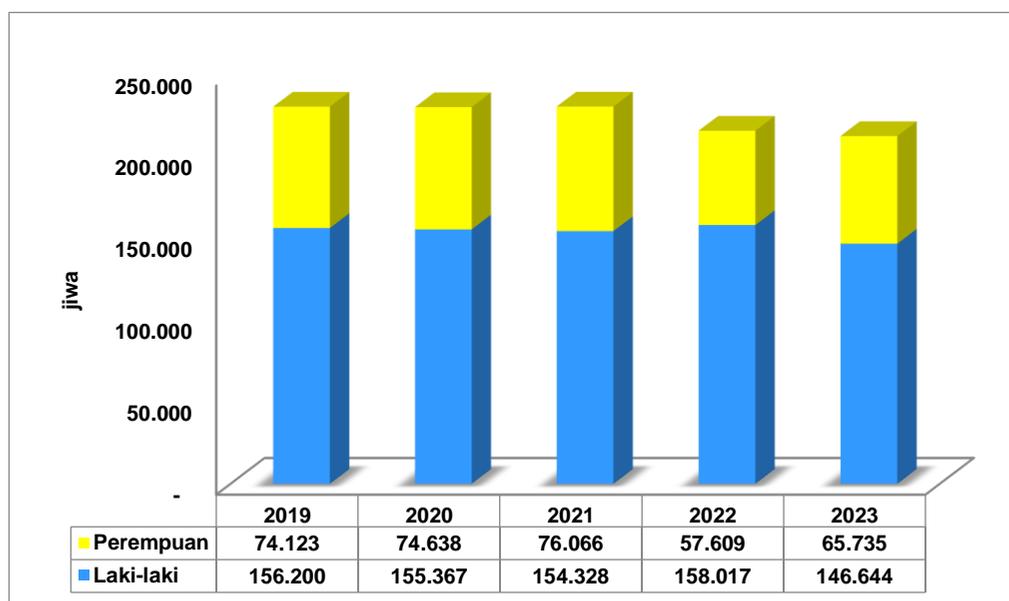


**Gambar 2.37 Grafik Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Oleh Tenaga Kesehatan Terlatih Di Puskesmas Mampu Tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit Tahun 2018-2022**

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Tahun 2023

#### 6. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat partisipasi angkatan kerja merupakan ukuran yang menggambarkan jumlah angkatan kerja untuk setiap 100 tenaga kerja, serta menggambarkan besarnya keterlibatan penduduk secara aktif dalam kegiatan ekonomi. Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada gambar di bawah ini :



**Gambar 2.38 Angkatan Kerja Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019-2023**

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka 2024

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan masih berada di bawah 50% dari Angkatan kerja laki-laki. Selain itu setiap tahun tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan terus mengalami penurunan.

#### 7. Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA

Rasio jenis kelamin APM merupakan salah satu indikator untuk melihat kesetaraan gender di bidang Pendidikan. Rasio ini merupakan persentase dengan membandingkan APM Perempuan dibandingkan dengan APM Laki- laki. Rasio jenis kelamin yang ideal adalah apabila sama dengan 100 artinya telah terjadi kesetaraan gender di bidang Pendidikan.

**Tabel 2.24 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Rasio APM Menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022-2023 (Persen)**

| Jenjang Pendidikan   | Angka Partisipasi Murni (APM) |       | Angka Partisipasi Kasar (APK) |       |
|----------------------|-------------------------------|-------|-------------------------------|-------|
|                      | 2022                          | 2023  | 2022                          | 2023  |
| SD/MI/Sederajat      | 96,6                          | 98,85 | 105,6                         | 103,4 |
| SMP/MTs/Sederajat    | 76,8                          | 83,75 | 99,00                         | 103,4 |
| SMA/SMK/MA/Sederajat | 49,48                         | 50,74 | 73,93                         | 73,31 |

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024

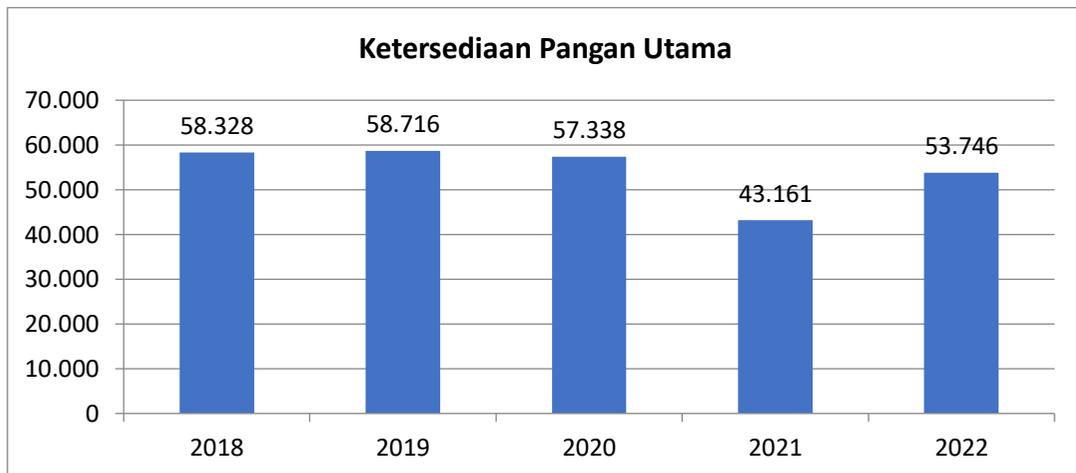
Dari Tabel di atas dapat dilihat rasio jenis kelamin Angka Partisipasi Murni (APM) di Kabupaten Kotawaringin Timur cukup fluktuatif. APM jenjang SD/MI hampir mendekati 100, sedangkan untuk jenjang SMA/MA tidak mencapai 60 persen yang mana hal ini menunjukkan bahwa pendidikan yang tepat waktu di Kabupaten Kotawaringin Timur pada dasarnya mengindikasikan ketidakseimbangan, khususnya jenjang SMA/MA.

#### 2.4.2.3 Ketahanan Pangan

##### 1. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan adalah kemampuan memiliki sejumlah pangan yang cukup untuk kebutuhan dasar. Kebutuhan pangan pokok perlu diupayakan ketersediaannya dalam jumlah yang cukup, mutu yang baik, aman dikonsumsi, dan mudah diperoleh dengan

harga yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Saat ini laju peningkatan kebutuhan pangan lebih cepat dibandingkan dengan laju kemampuan produksinya, disamping produktivitas tanaman di tingkat petani yang relatif stagnan, juga disebabkan karena terbatasnya kapasitas produksi, penurunan kapasitas kelembagaan petani, serta penurunan kualitas penyuluhan. Hal ini merupakan tantangan pembangunan ketahanan pangan ke depan. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar 2.39 Ketersediaan Pangan Utama (Beras) Ton Kab. Kotawaringin Timur Tahun 2018-2022**

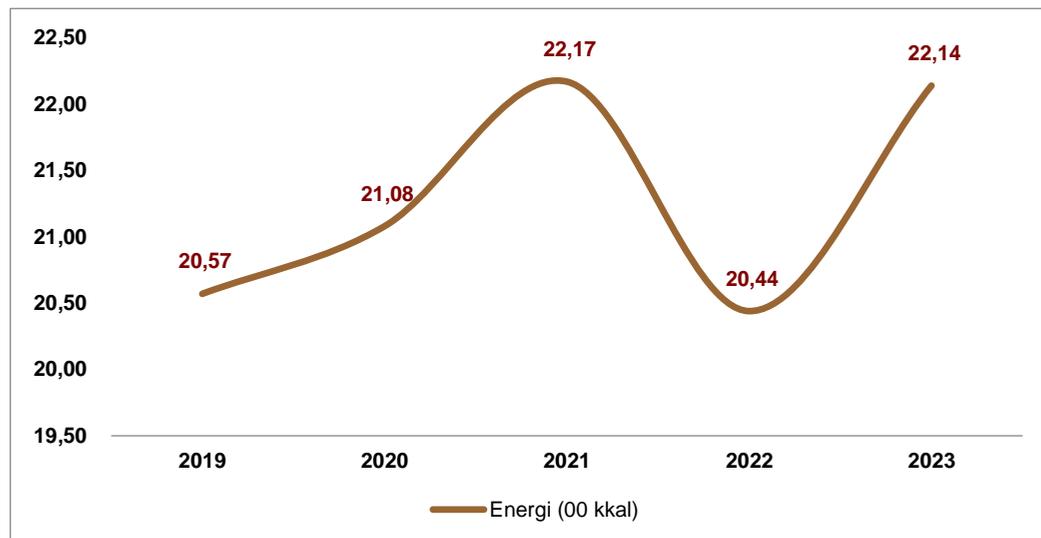
*Sumber : Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka 2023*

Dilihat dari data diatas Ketersediaan Pangan Utama (beras) ton Kab. Kotawaringin Timur 2018 dapat diketahui Kabupaten Kotawaringin Timur sampai dengan tahun 2022 terus meningkat mencapai 53.746 ton. Namun hal ini masih lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu pada tahun 2018-2020.

## 2. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita

Semua makhluk hidup memerlukan energi/ tenaga untuk tumbuh, bergerak dan berfikir sesuai golongan umur, berat badan dan aktifitas untuk mempertahankan kehidupan. Energi/ tenaga yang diperlukan, diperoleh dari konsumsi makanan yang mengandung zat gizi, karbohidrat, protein dan lemak. Data kecukupan energi dan zat-zat gizi akan digunakan ketika akan menyusun menu seimbang bagi individu dan kelompok umur dalam keadaan sehat. Angka Kecukupan gizil (AKG) adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan

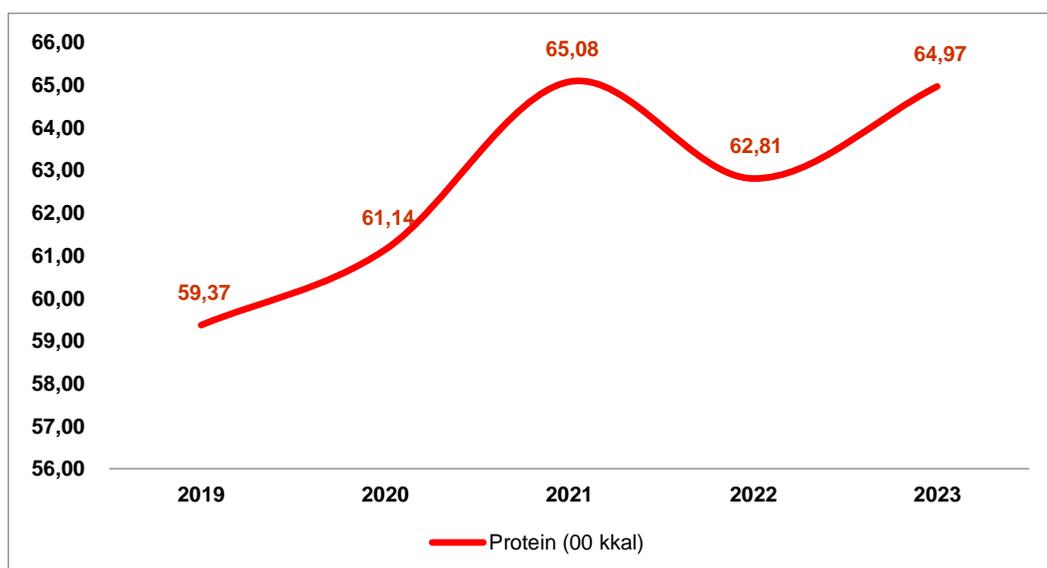
umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh dan kondisi fisiologis khusus untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Angka Kecukupan Energi (AKE) berguna untuk mengetahui kecukupan energi dan zat-zat gizi individu maupun kelompok. Data ketersediaan energi dan protein perkapita Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



**Gambar 2.40 Konsumsi Energi Perkapita Kab. Kotawaringin Timur Tahun 2019-2023**

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kotawaringin Timur 2023

Dapat dilihat ketersediaan energi di Kabupaten Kotawaringin Timur terus mengalami fluktuasi dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Tahun 2022 menjadi tahun dengan ketersediaan energi paling rendah.



**Gambar 2.41 Konsumsi Protein Perkapita Kab. Kotawaringin Timur Tahun 2019-2023**

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Kotawaringin Timur 2023

Begitupula dengan ketersediaan protein di Kabupaten Kotawaringin Timur juga terus mengalami fluktuasi, tahun 2021 menjadi tahun dengan ketersediaan protein terbanyak dan Tahun 2022 mengalami penurunan, namun masih lebih besar dari tahun 2018-2020.

#### 2.4.2.4 Pertanian

Sektor Pertanian merupakan salah satu sektor penting dan khusial, salah satunya di Kabupaten Kotawaringin Timur. Kondisi sektor pertanian di Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat melalui data-data luas lahan bersertifikat, penyelesaian kasus tanah Negara, dan penyelesaian izin lokasi dalam kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

**Tabel 2.25 Tanah Dengan Hak dan Izin Lokasi**

| Data                                    | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 |
|---|-------|-------|-------|-------|------|
| Persentase luas lahan bersertifikat (%) | 35,15 | 36,04 | 36,21 | 36,58 | 37,2 |
| Penyelesaian kasus tanah Negara         | 14    | 11    | 16    | 15    | 11   |
| Penyelesaian izin lokasi                | 3     | 10    | 20    | 14    | 19   |

Sumber : Kantor Pertanian, 2023

#### 2.4.2.5 Lingkungan Hidup

##### 1. RPPLH Kabupaten

RPPLH atau Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu yang menjadi masukan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang & Menengah (RPJP/M) dan merupakan bagian yang integral dalam pembangunan ekonomi. Kabupaten Kotawaringin Timur pada Tahun 2020 melalui Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan penyusunan Dokumen RPPLH sedangkan proses legislasi perda RPPLH dilaksanakan pada tahun 2021.

Tahapan ideal dalam penyusunan perencanaan lingkungan hidup dimulai dari penyusunan RPPLH, KLHS, RPJMD, sampai pada



kebijakan/program. Di Provinsi Kalimantan Tengah, untuk dokumen RPPLH baru Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

## 2. Dokumen KLHS

Pada penyusunan KLHS ini yang menjadi leading sektor adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Timur. KLHS RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026 disusun pada tahun 2020 sebagai acuan/rambu dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2026.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tersebut disebutkan bahwa KLHS RPJMD adalah Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat KLHS RPJMD adalah analisis sistematis, menyeluruh, dan partisipatif yang menjadi dasar untuk mengintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB ke dalam dokumen RPJMD).

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) merupakan agenda internasional yang menjadi kelanjutan dari Tujuan Pembangunan Milenium atau *Millennium Development Goals* (MDGs). SDGs/TPB disusun oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan melibatkan 194 negara, *civil society*, dan berbagai pelaku ekonomi dari seluruh penjuru dunia. Agenda ini dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan, dan perubahan iklim dalam bentuk aksi nyata.

## 3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup yang digunakan untuk mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Surat Edaran Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor

S.318/PPKL/SRT/REN.0/12/2020 Tanggal 04 Desember 2020 tentang Metode Perhitungan IKLH 2020-2024, terdapat perubahan metode perhitungan IKLH menjadi 4 komponen, yaitu Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL): Indeks Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas Ekosistem Gambut (IKEG), serta Indeks Kualitas Air Laut (IKAL).

Perhitungan IKLH meliputi Indeks Kualitas Air (IKA) dengan bobot 30 persen, Indeks Kualitas Udara (IKU) dengan bobot 30 persen, dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dengan bobot 40 persen. Adapun klasifikasi IKLH menurut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah:

1. Sangat baik :  $IKLH > 80$ ;
2. Baik :  $70 < IKLH \leq 80$ ;
3. Cukup :  $60 < IKLH \leq 70$ ;
4. Kurang :  $50 < IKLH \leq 60$ ;
5. Sangat Kurang :  $40 < IKLH \leq 50$ ;
6. Waspada :  $30 < IKLH \leq 40$ .

Perkembangan IKLH Kabupaten Kotawaringin Timur selama kurun waktu tiga tahun terakhir berada pada kategori Sangat Baik (lihat tabel diatas) dengan kecenderungan meningkat. Tidak jauh berbeda dengan capaian Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Air (IKA) Kabupaten Kotawaringin Timur yang juga cenderung meningkat selama periode 2019-2023. Keadaan tersebut menunjukkan adanya perbaikan kinerja Pemerintah Daerah khususnya dalam urusan lingkungan.

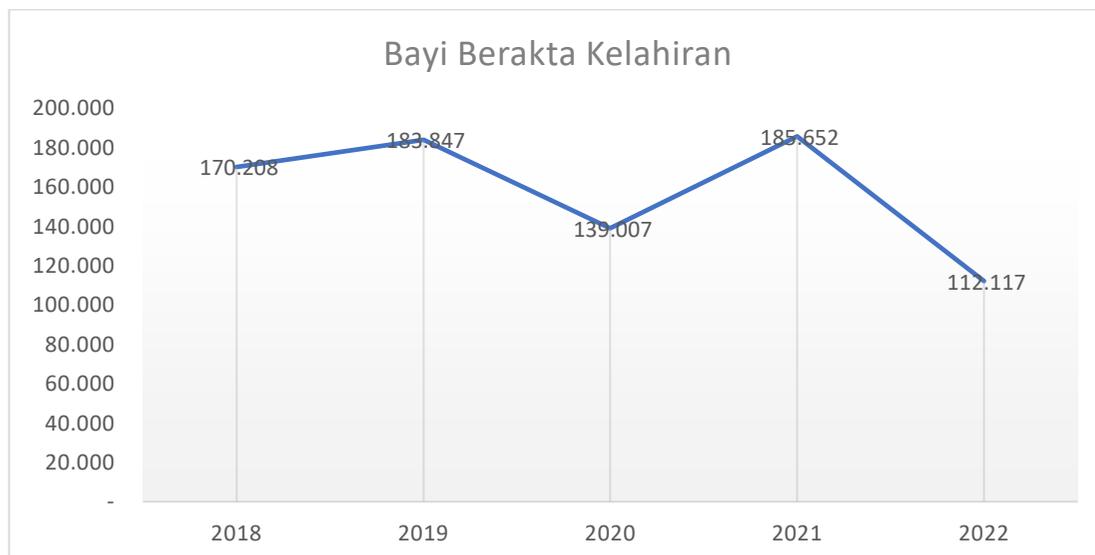
#### 4. Penanganan Sampah

Pengelolaan sampah di Kotawaringin Timur masih terpusat pada kawasan perkotaan. Adapun persentase timbulan sampah yang telah tertangani di wilayah ini pada Tahun 2023 mencapai 72.555 M<sup>3</sup> atau meningkat 5,12 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara persentase jumlah sampah yang berkurang melalui proses 3R (*Reuse*, *Reduce*, dan *Recycle*) pada tahun yang sama justru mengalami penurunan sebesar 11,7 persen poin.

## 2.4.2.6 Kependudukan dan Pencatatan Sipil

### 1. Kepemilikan Akta Kelahiran

Data bayi berakta kelahiran di Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2018, adalah sebesar 170.208 akta terbit dan terus meningkat hingga tahun 2019. Untuk tahun 2020, capaian Data bayi berakta kelahiran di Kabupaten Kotawaringin Timur mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 139.007 akta terbit. Pada tahun selanjutnya mengalami peningkatan kembali, namun pada tahun 2022 terjadi penurunan hanya sebesar 112.117 akta terbit.



**Gambar 2.42 Data Bayi Berakta Kelahiran Tahun 2018-2022**

Sumber : Sumber: Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, 2023

Penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2018, adalah sebesar 170.208 akta terbit dan terus meningkat hingga tahun 2020. Untuk tahun 2021, capaian penerbitan akta kelahiran di Kabupaten Kotawaringin Timur mengalami penurunan yaitu menjadi sebesar 185.652 akta terbit. Angka ini terus menurun hingga tahun 2022 menjadi 180.483 akta terbit.

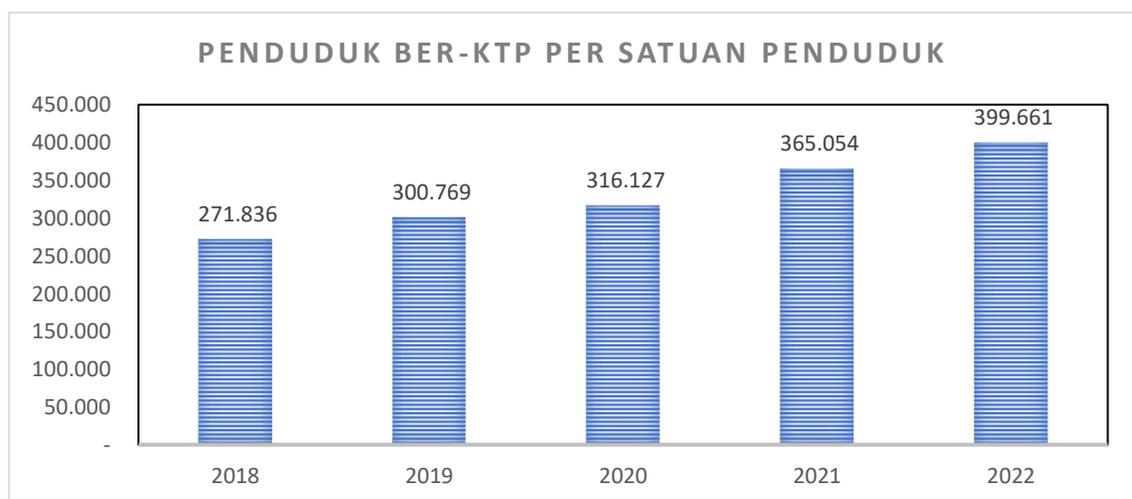


**Gambar 2.43 Penerbitan Akte Kelahiran Tahun 2018-2022**

Sumber : Sumber: Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, 2023

## 2. Kepemilikan KTP Elektronik

Data penduduk ber-KTP per satuan penduduk di Kabupaten Kotawaringin Timur kurun waktu 2018 -2022, tersaji pada gambar diagram di bawah ini.

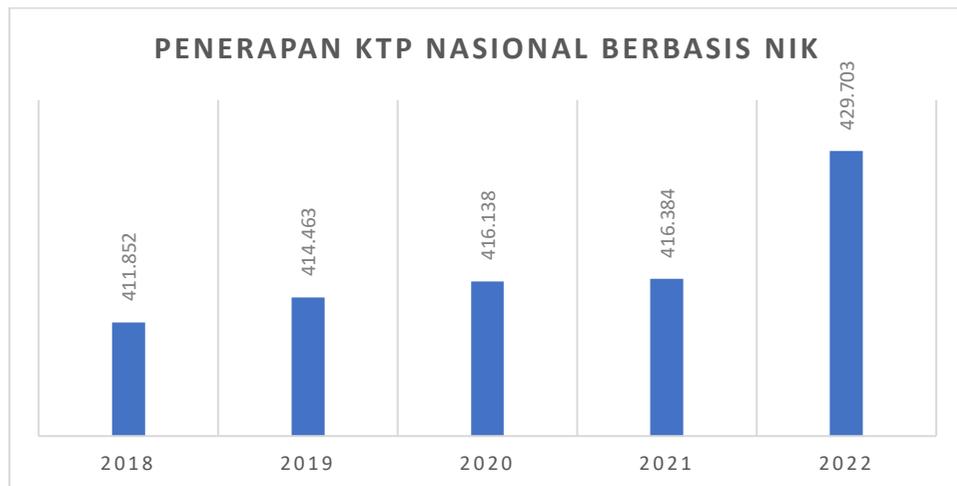


**Gambar 2.44 Penduduk ber-KTP per satuan penduduk Tahun 2018 - 2022**

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2023

Gambar di atas menunjukkan bahwa mulai tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 data kepemilikan KTP-el terus meningkat. Pada tahun 2018, besaran persentase untuk kepemilikan KTP-el sebanyak 300.769 pemilik. Tahun 2022 capaian kepemilikan KTP-el kembali meningkat menjadi 399.661 pemilik. Peningkatan cakupan kepemilikan ini tentunya tidak terlepas dari peran Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, dalam hal ini Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam memberikan pelayanan terkait kepemilikan

dokumen kependudukan salah satunya dengan sistem pelayanan jemput bola ke Kecamatan- Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur. Sedangkan untuk data penerapan KTP Nasional berbasis NIK terus meningkat setiap tahunnya yang dapat dilihat sebagai berikut.



**Gambar 2.45 Penerapan KTP Nasional berbasis NIK Tahun 2018-2022**

Sumber: Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, 2023

### 3. Kepemilikan Akta Nikah

Cakupan kepemilikan Akta Nikah tahun 2018 hingga tahun 2022, tersaji pada gambar diagram batang berikut ini.



**Gambar 2.46 Pasangan Berakta Nikah Tahun 2018 - 2022**

Sumber: Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, 2023

Gambar di atas menunjukkan bahwa besaran Pasangan Berakta Nikah terus meningkat mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2022. Tahun 2018 Pasangan Berakte Nikah adalah sebesar 43.386 pemiliki, selanjutnya pada tahun 2019 dan 2020 terus meningkat.



Tahun 2022, angka tersebut kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar 103.386 pemilik.

#### **2.4.2.7 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

##### **1. Status Perkembangan Desa**

Perkembangan desa mengarahkan ketepatan dalam kebijakan dengan pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial. Terdapat beberapa status kemajuan dan kemandirian desa, salah satunya adalah desa swasembada. Jumlah desa swasembada di Kabupaten Kotawaringin Timur terus meningkat. Pada tahun 2019 dan 2020 terdapat 1 desa swasembada. Tahun 2021 terjadi peningkatan menjadi 2 desa. Pada tahun 2022 telah terdapat 4 desa swasembada di Kabupaten Kotawaringin Timur.

##### **2. Persentase LSM Aktif**

Persentase LSM aktif mengacu pada persentase organisasi non-pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang beroperasi dan terlibat dalam berbagai kegiatan atau inisiatif sosial, lingkungan, atau kemanusiaan. Persentase LSM aktif dihitung dengan membandingkan jumlah LSM yang sedang menjalankan proyek atau program, melakukan advokasi, atau terlibat dalam kegiatan sosial dengan jumlah LSM yang ada di suatu wilayah, negara, atau komunitas tertentu. Persentase LSM aktif Kabupaten Kotawaringin Timur dalam kurun waktu tahun 2018-2022 yaitu mencapai 100% atau keseluruhan LSM berperan aktif.

##### **3. Persentase PKK Aktif**

PKK adalah organisasi yang berfokus pada pengembangan dan pemberdayaan keluarga dan masyarakat, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan peran perempuan dalam pembangunan. Persentase PKK aktif dihitung dengan membandingkan jumlah anggota atau komunitas yang secara rutin terlibat dalam program dan kegiatan PKK dengan jumlah total anggota atau komunitas yang terdaftar dalam organisasi PKK. Ini



mencerminkan tingkat partisipasi dan kontribusi mereka dalam upaya-upaya pemberdayaan masyarakat. Persentase PKK aktif Kabupaten Kotawaringin Timur dalam kurun waktu tahun 2018-2022 yaitu mencapai 100% atau keseluruhan PKK berperan aktif.

#### 4. Persentase Posyandu Aktif

Posyandu adalah pusat pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia yang berfokus pada pemberian layanan kesehatan dasar, khususnya kepada ibu hamil, balita, dan anak-anak. Persentase Posyandu aktif dihitung dengan membandingkan jumlah Posyandu yang terus menerus memberikan layanan kesehatan dengan jumlah total Posyandu yang ada dalam suatu wilayah. Hal ini mencerminkan tingkat keterlibatan dan keberlanjutan operasional Posyandu dalam memberikan layanan kesehatan kepada komunitas. Persentase Posyandu aktif Kabupaten Kotawaringin Timur dalam kurun waktu tahun 2018-2022 yaitu mencapai 100% atau keseluruhan Posyandu berperan aktif.

#### 5. Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat

Swadaya Masyarakat terhadap Program Pemberdayaan Masyarakat adalah konsep yang mencerminkan partisipasi, dukungan, dan kontribusi sukarela dari masyarakat atau komunitas dalam merencanakan, melaksanakan, dan memelihara program atau inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemampuan masyarakat. Program pemberdayaan masyarakat ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, lingkungan, dan perkembangan sosial. Setiap tahun terdapat 5 kegiatan pemeliharaan (*follow-up*) pasca program pemberdayaan masyarakat dalam kurun waktu tahun 2018-2022.

##### **2.4.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

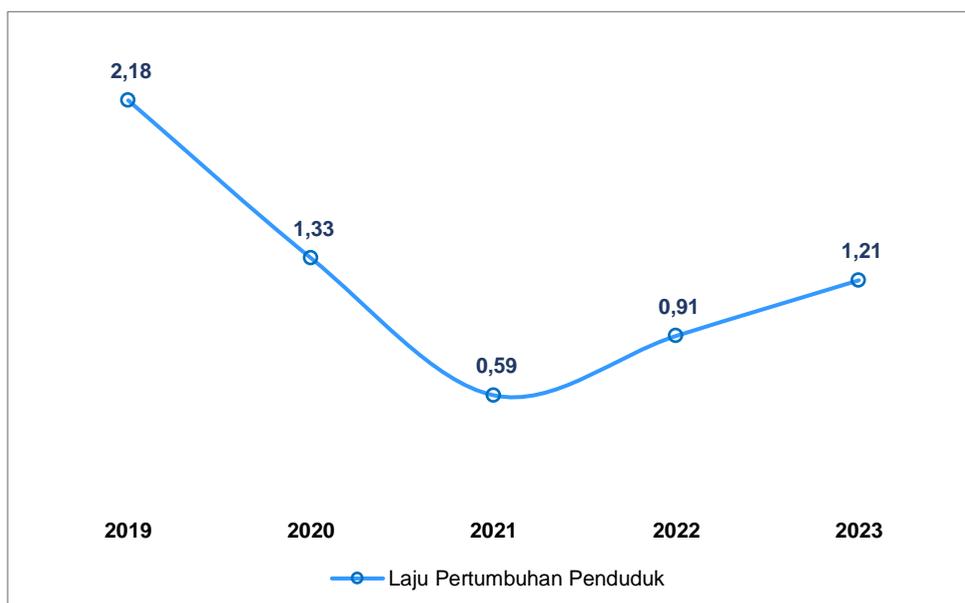
Pertumbuhan penduduk adalah peningkatan atau penurunan jumlah penduduk suatu daerah dari waktu ke waktu. Pertumbuhan penduduk selalu dikaitkan dengan tingkat kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk atau imigrasi baik perpindahan ke luar

maupun dari luar. Beberapa indikator untuk menggambarkan pengendalian penduduk dan keluarga berencana antara lain sebagai berikut.

#### 1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju Pertumbuhan Penduduk adalah angka yang menunjukkan tingkat penambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu. Angka ini dinyatakan sebagai persentase dari penduduk dasar. Laju pertumbuhan penduduk dapat dihitung menggunakan tiga metode, yaitu aritmatik, geometrik, dan eksponensial. Metode yang paling sering digunakan di BPS adalah metode geometrik.

Penduduk adalah modal dasar pembangunan, juga merupakan titik sentral dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Jumlah penduduk ideal sesuai dengan daya dukung lingkungan, laju pertumbuhan terkendali diikuti dengan kualitas tinggi adalah modal bagi keberhasilan pembangunan. Sebaliknya keberhasilan pembangunan dapat menjadi dasar bagi terkendalnya jumlah, laju pertumbuhan dan kualitas penduduk. Berbagai bukti empiris menunjukkan bahwa kemajuan suatu daerah sebagian besar. Laju pertumbuhan penduduk selama kurun waktu lima tahun menunjukkan tren menurun sebagaimana terlihat pada gambar berikut.



**Gambar 2.47 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019-2023**

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Timur dalam Angka 2024



## 2. Pembangunan Daerah melalui Kampung KB

Program Kampung KB menjadi ikon Program Kependudukan, KB dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung. Kampung KB sebagai wahana pemberdayaan masyarakat adalah sebuah program dari BKKBN untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung atau yang setara melalui program KKBPK serta pembangunan sektor terkait lainnya dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. BKKBN menargetkan membangun sekitar 21.000 kampung KB di seluruh Indonesia sampai pada akhir tahun 2018. Jumlah tersebut telah mencakup target 1.000 desa di 100 Kabupaten dan Kota pada tahun 2018 dan 600 desa di 60 Kabupaten dan kota pada tahun 2019. Dalam kurun waktu tahun 2018-2022 perangkat daerah yang berperan aktif dalam pembangunan daerah melalui kampung KB setiap tahun tidak berubah, yaitu sebanyak 5 perangkat daerah.

## 3. Jumlah Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk

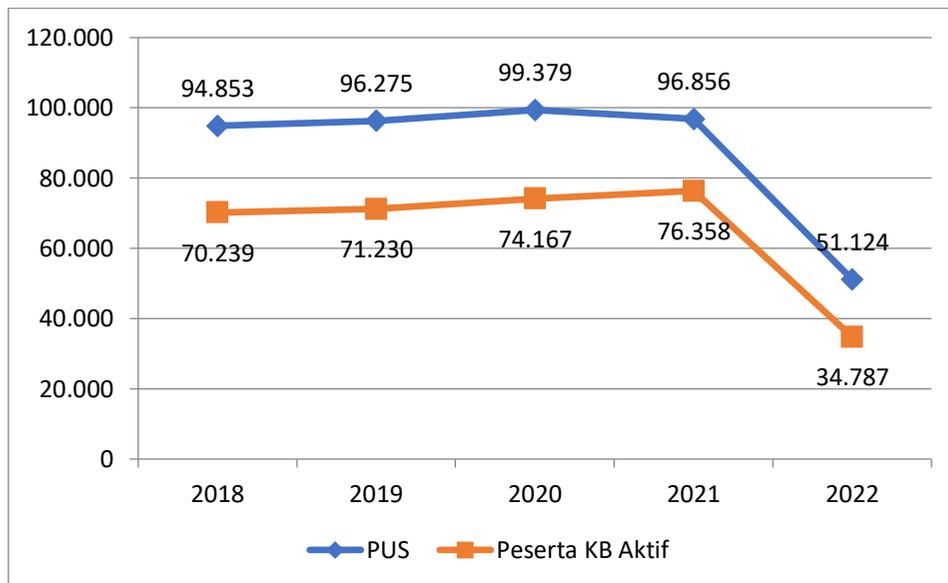
Jumlah perangkat daerah (dinas/badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur berkisar dari tahun 2021 dan tahun 2022. Dalam kurun waktu tersebut hanya 2 perangkat daerah (dinas/badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk.

## 4. Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk

Kebijakan berupa peraturan daerah/peraturan kepala daerah yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk di Kabupaten Kotawaringin Timur telah ada sebanyak 3 kebijakan dalam kurun waktu tahun 2021 dan tahun 2022.

## 5. Pasangan Usia Subur (PUS) dan KB Aktif

Pasangan usia subur (PUS) berkisar antara usia 20-45 tahun dimana pasangan (laki-laki dan perempuan) sudah cukup matang dalam segala hal terlebih organ reproduksinya sudah berfungsi dengan baik. Dalam menjalani kehidupan keluarga, PUS sangat mudah dalam memperoleh keturunan di karenakan keadaan kedua pasangan tersebut normal, hal ini yang menjadi masalah bagi PUS yaitu perlunya pengaturan fertilisasi (kesuburan), perawatan kehamilan dan persalinan aman. Dalam penyelesaian masalah tersebut di perlukan tindakan dari tenaga kesehatan dalam penyampaian penggunaan alat kontrasepsi rasional untuk menekan angka kelahiran dan mengatur kesuburan dari pasangan tersebut. Promosi kesehatan yang sangat penting bagi PUS adalah program KB untuk menekan angka kelahiran. Macam-macam alat kontrasepsi yang bisa digunakan : IUD, pil, kondom, suntikan, MOP, MOW.



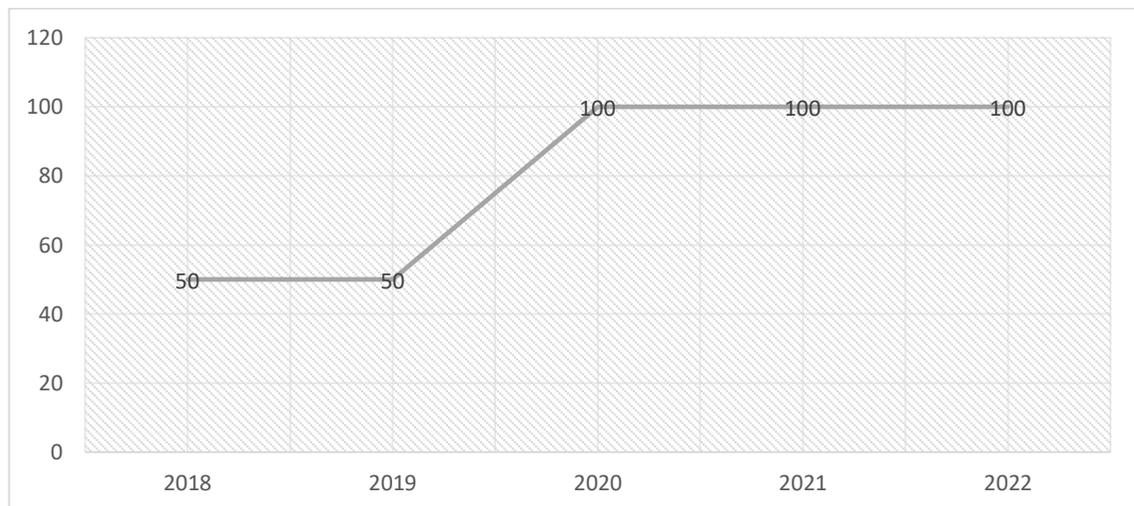
**Gambar 2.48 Pasangan Usia Subur (PUS) dan Peserta KB aktif di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2018-2022**

*Sumber : Kabupaten Kotawaringin Timur dalam Angka 2023*

Selain pasangan usia subur (PUS) yang aktif ber-KB, terdapat pula pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber-KB tapi tidak terpenuhi. Data menunjukkan dalam kurun waktu tahun 2020-2022 angka pasangan usia subur (PUS) yang ingin ber-KB tapi tidak terpenuhi cenderung fluktuatif. Tahun 2020 terdapat 11,7% pasangan,

kemudian pada tahun 2021 turun menjadi 10,8%. Namun angka tersebut kembali naik pada tahun 2022 menjadi 11,3% pasangan.

Dilihat berdasarkan data pasangan usia subur (PUS) berkisar antara usia 20-45 tahun tentu berpengaruh terhadap ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat. Dalam kurun waktu tahun 2018-2022 ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat terus meningkat. Tahun 2018 dan tahun 2019 ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat sebanyak 50%. Sedangkan pada tahun 2020-2022 mencapai 100%. Sedangkan untuk rasio akseptor KB terdapat data di tahun 2021 sejumlah 75,96 dan tahun 2022 dengan rasio 76.



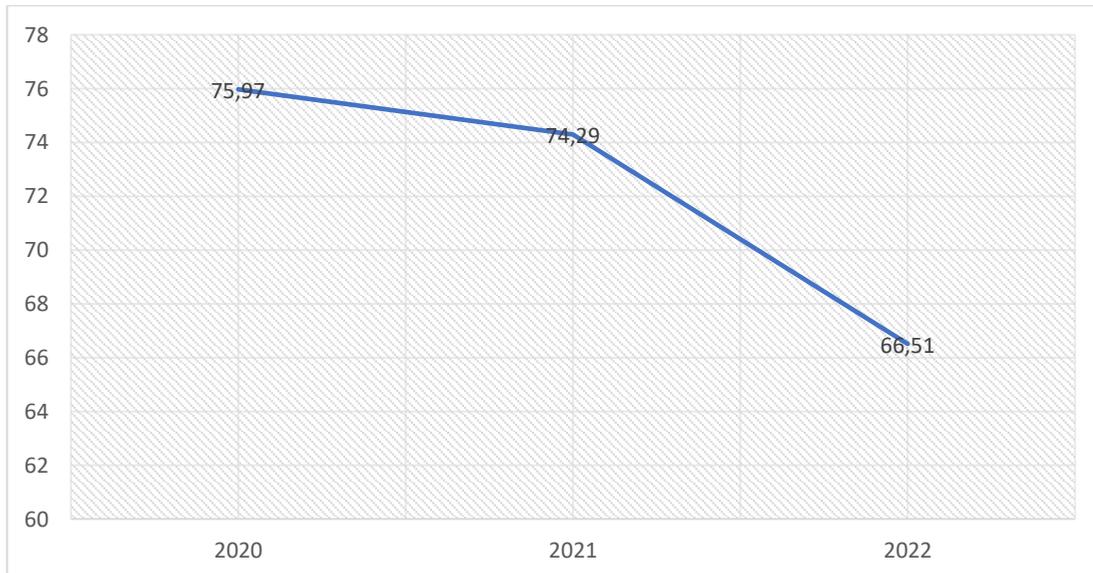
**Gambar 2.49 Ketersediaan dan Distribusi Alat dan Obat Kontrasepsi untuk Memenuhi Permintaan Masyarakat Tahun 2018 - 2022**

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, 2023

Selain penggunaan alat dan obat kontrasepsi, terdapat pula masyarakat menggunakan kontrasepsi jangka panjang. Berdasarkan data pada tahun 2021 dan tahun 2022 kontrasepsi jangka panjang terus meningkat. Tahun 2021 penggunaan kontrasepsi jangka panjang mencapai 75,97 persen dan Tahun 2022 penggunaan kontrasepsi jangka panjang mencapai 77 persen.

Berdasarkan data pasangan usia subur (PUS) berkisar antara usia 20-45 tahun tentu berpengaruh pada pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 tahun.

Pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49 tahun di Kabupaten Kotawaringin Timur terus dalam kurun waktu tahun 3 tahun terakhir yaitu tahun 2020-2022 terus menurun. Selain itu terdapat pula perempuan yang masuk dalam pasangan usia subur (PUS) namun berusia dibawah 20 tahun. Dalam kurun waktu tahun 2021 dan 2022 data tersebut terus menurun, semula 780 orang menjadi 613 orang.



**Gambar 2.50 Pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15–49 Tahun, Tahun 2020-2022**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, 2023

Berdasarkan data pasangan usia subur (PUS) berkisar antara usia 20-45 tahun tentu berpengaruh pada jumlah anak pada setiap keluarga. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya data pasangan usia subur (PUS) di Kabupaten Kotawaringin Timur terus menurun dalam kurun waktu tahun 2018-2022. Hal tersebut mempengaruhi rata-rata jumlah anak dalam keluarga yang juga terus menurun setiap tahunnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.26 Rata-rata Jumlah Anak dalam Keluarga Tahun 2018-2022**

| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------|------|------|------|------|
| 3    | 3    | 2,8  | 2,7  | 2,5  |

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, 2023

## 6. Keanggotaan Bina Keluarga

Terdapat 3 data bina keluarga di Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL). Bina Keluarga Balita (BKB) adalah kegiatan khusus yang mengelola tentang pembinaan tumbuh kembang anak melalui pola asuh yang benar berdasarkan kelompok umur yang dilakukan oleh sejumlah kader, BKB ini merupakan upaya peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran ibu serta anggota keluarga lain dalam membina tumbuh kembang balitanya. Bina Keluarga Remaja (BKR) merupakan wadah yang tepat untuk melaksanakan bimbingan, pembinaan, dan memberikan pengetahuan kepada keluarga yang mempunyai remaja berusia 10 – 24 tahun. Bina Keluarga Lansia (BKL) merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara berkelompok dengan tujuan meningkatkan pengetahuan serta keterampilan bagi keluarga yang mempunyai orang tua atau lanjut usia. Untuk lebih jelasnya anggota kegiatan tersebut dalam kurun waktu 2020-2022 dapat dilihat sebagai berikut.

**Tabel 2.27 Data Anggota BKB, BKR, dan BKL Tahun 2020-2022**

| Data   | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|------|------|------|
| Data anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB | 10   | 10   | 19   |
| Data anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB | 9    | 9    | 9    |
| Data anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB | 10   | 10   | 10   |

Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana, 2023

## 7. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan

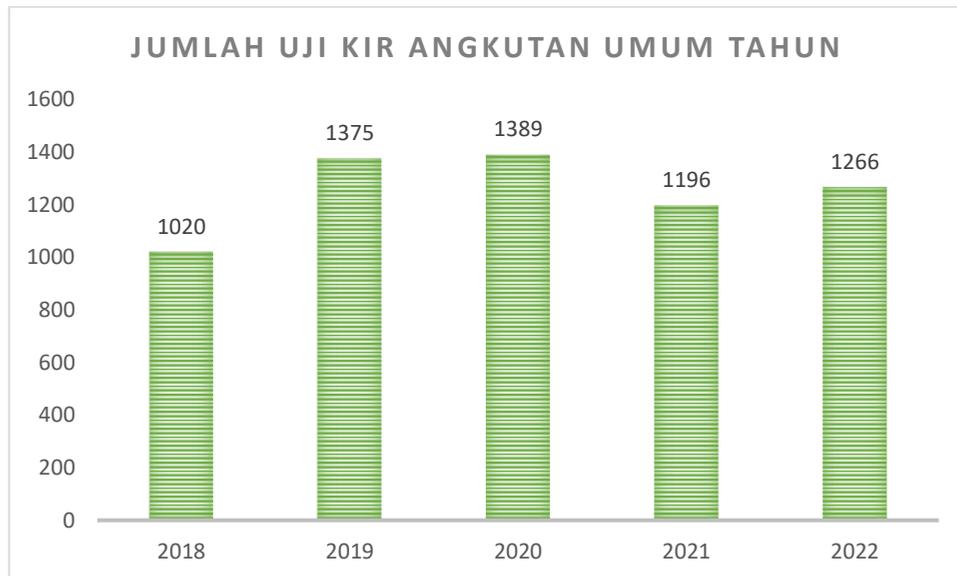
Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan dalam kurun waktu tahun 2018-2022 terdapat 14 Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan.

Jumlah pasangan usia subur peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 sejumlah 1.085 PUS.

### 2.4.2.9 Perhubungan

#### 1. Uji Kir Angkutan Umum

Uji kir bertujuan untuk menilai tingkat kelayakan pakai demi memberikan keamanan dan kenyamanan para pengguna. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur memberlakukan uji kir bagi angkutan umum yang beroperasi di wilayahnya administrasi Kabupaten Kotawaringin Timur. Jumlah uji kir angkutan umum terbanyak terjadi pada tahun 2020 sejumlah 1.389, sedangkan untuk tahun 2022 mencapai 1.266. Berikut adalah jumlah uji kir angkutan umum dalam kurun waktu 2018-2022.

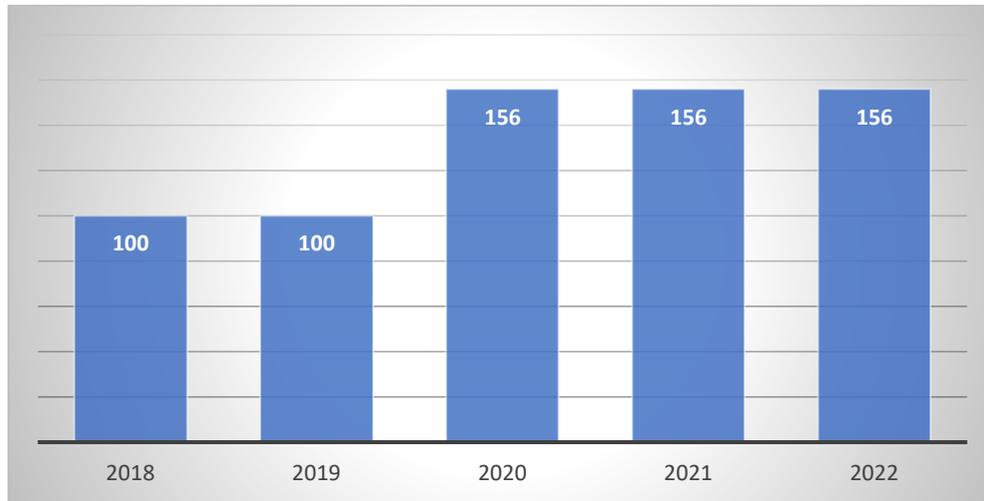


**Gambar 2.51 Jumlah Uji Kir Angkutan Umum Tahun 2018-2022**

*Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur, 2023*

## 2. Pemasangan Rambu-Rambu

Pemasangan rambu-rambu menjadi salah satu urusan bidang perhubungan, di Kabupaten Kotawaringin Timur. Dalam setiap tahun, terdapat pergantian atau pembaharuan untuk rambu-rambu yang terpasang di sepanjang jalan di Wilayah administrasi Kabupaten Kotawaringin Timur. Hal ini akan berbeda jumlah pemasangannya di setiap tahun dengan melihat kondisi dan keadaan serta kesesuaian antara rambu-rambu dengan kondisi jalan di tahun tersebut. Berikut adalah data pemasangan rambu-rambu dalam kurun waktu 2018-2022.



**Gambar 2.52 Pemasangan Rambu-Rambu Tahun 2018 – 2022**

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur, 2023

### 3. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Angkutan Umum

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah panjang jalan yang berbanding jumlah angkutan umum di Kabupaten Kotawaringin Timur. Tahun 2022 Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah 153 kendaraan/Km<sup>2</sup>. Untuk data rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kabupaten Kotawaringin Timur dalam kurun waktu 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.28 Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan Tahun 2019-2023**

| 2019            | 2020            | 2021            | 2022            | 2023            |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 135<br>Kend/Jam | 144<br>Kend/Jam | 152<br>Kend/Jam | 153<br>Kend/Jam | 155<br>Kend/Jam |

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur, 2024

### 4. Angkutan Umum yang Beroperasi

Kecenderungan naiknya minat masyarakat terhadap penggunaan angkutan umum di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang cukup signifikan, kondisi ini juga terjadi di Kabupaten Kotawaringin Timur. Hal ini juga mempengaruhi jumlah dari angkutan umum baik angkutan sungai, darat, maupun udara. Untuk lebih jelasnya dapat jumlah angkutan umum di Kabupaten Kotawaringin Timur dalam kurun waktu 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.29 Jumlah Angkutan Umum Tahun 2019-2023**

| Data                           | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
|--------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Angkutan Sungai (Unit Kapal)   | 21.744 | 23.433 | 25.899 | 26.654 | 26.036 |
| Angkutan Umum (Unit Kendaraan) | 9.840  | 6.624  | 7.624  | 10.708 | NA     |
| Angkutan Udara (Unit Pesawat)  | 4.158  | 1.824  | 1.234  | 1.942  | 972    |

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur, 2024

5. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum

Data jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum merupakan jumlah penumpang rata-rata dengan jumlah armada yang aktif adalah satu tahun. Data terakhir tahun 2022 didapat 751.116 orang/barang yang terangkut menggunakan angkutan umum. Selain itu didapatkan pula orang/barang yang terangkut melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun sebanyak 1.001.929 barang/orang.

**Tabel 2.30 Jumlah Orang/Barang Yang Terangkut Tahun 2018-2022**

| Data  | 2018      | 2019      | 2020    | 2021    | 2022      |
|---|-----------|-----------|---------|---------|-----------|
| Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum               | 783.228   | 624.839   | 484.961 | 611.748 | 751.116   |
| Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/ terminal per tahun | 3.102.000 | 1.144.441 | 919.055 | 478.423 | 1.001.929 |

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Timur, 2023

#### 2.4.2.10 Komunikasi dan Informatika

Kebutuhan jaringan komunikasi di Kabupaten Kotawaringin Timur didasarkan kepada kebutuhan sambungan rumah, sambungan fasilitas, dan kebutuhan untuk telepon umum. Perkembangan wilayah yang pesat dari tahun ke tahun menyebabkan kebutuhan jaringan komunikasi akan terus meningkat. Selain itu, untuk memperluas cakupan layanan informasi, perlu dilakukan pembangunan *Base Transceiver Station (BTS)* yang merupakan infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara piranti komunikasi dan jaringan operator. BTS berfungsi mengirimkan dan menerima sinyal radio ke perangkat komunikasi seperti telepon seluler, telepon rumah dan sejenis gawai lainnya, kemudian sinyal radio tersebut akan diubah menjadi sinyal digital yang selanjutnya dikirim ke terminal lainnya menjadi sebuah pesan

atau data. Menurut data Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur, tercatat sebanyak 16 kecamatan yang sudah memiliki BTS, kecuali Kecamatan Tualan Hulu yang belum memiliki BTS.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah berhasil meningkatkan kinerja indikator-indikator bidang Komunikasi dan Informatika dengan capaian tersaji dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2.31 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019-2023**

| No. | Indikator Kinerja  | Capaian Tahun      |                    |                    |                   |             |
|-----|--|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
|     |  | 2019               | 2020               | 2021               | 2022              | 2023        |
| 1.  | Indeks SPBE  |                    |                    | 1,66               | 2,38              | 3,11        |
| 2.  | Keterbukaan informasi publik (informatif/menjuju informatif)             | Menuju Informatika | Menuju Informatika | Menuju Informatika | Cukup Informatika | Informatika |
| 3.  | Jumlah Desa Blankspot  | 25                 | 25                 | 25                 | 25                | 28          |
| 4.  | Persentase SDM yg mengikuti pelatihan di bidang Komunikasi dan Informasi | 98,58              | 99,94              | 33,33              | 17,39             | 52,17       |
| 5.  | Persentase berita yg diupload di website resmi Pemkab Kotim              | 80                 | 80                 | 13,76              | 9,11              | 77,13       |
| 6.  | Jumlah layanan media cetak   | -                  | -                  | 2                  | 4                 | 4           |
| 7.  | Jumlah kerjasama media cetak   | -                  | -                  | 2                  | 4                 | 4           |
| 8.  | Jumlah layanan media online  | -                  | -                  | 8                  | 17                | 33          |
| 9.  | Jumlah kerjasama media online  | -                  | -                  | 8                  | 17                | 33          |
| 10. | Jumlah layanan media televisi  | -                  | -                  | 2                  | 4                 | 4           |
| 11. | Jumlah kerjasama media televisi  | -                  | -                  | 2                  | 4                 | 4           |
| 12. | Jumlah pembinaan terhadap OPD (kegiatan)                                 | -                  | -                  | -                  | 5                 | 3           |
| 13. | Persentase jaringan kabel dan nirkabel yang terbangun                    | 67,3               | 69,2               | 10,20              | 5,00              | 85,71       |
| 14. | Jumlah server (unit)   |                    |                    | 4                  | 7                 | 8           |
| 15. | Jumlah bandwidth (Mbps)  |                    |                    | 43                 | 1.100             | 450         |

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kotawaringin Timur (2024)

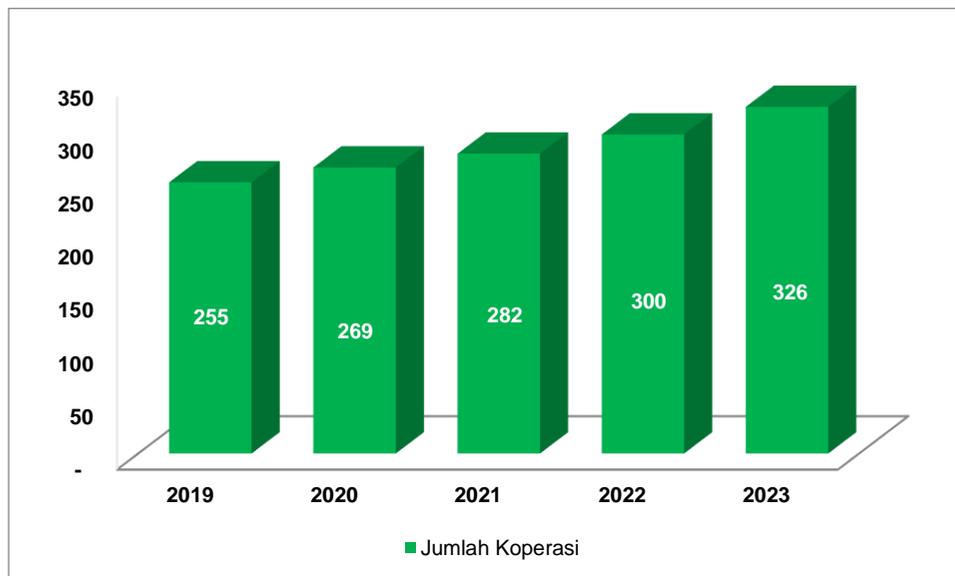
Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang terpercaya dan berkualitas, dibutuhkan adanya perubahan karakter,

mentalitas atau pola pikir dikalangan pemerintahan dan badan publik. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Pusat dan Daerah menerapkan indikator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam penyelenggaraan pembangunan daerah. Indeks SPBE menjadi tolok ukur yang sangat penting bagi Pemerintah Daerah dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pelayanan kepada masyarakat. Pemantauan dan evaluasi indeks SPBE berpedoman pada Permenpan RI Nomor 59 Tahun 2020 yang mana terdiri dari 4 domain, 8 aspek dan 47 indikator.

Penerapan SPBE di Kabupaten Kotawaringin Timur berjalan dengan baik yang diperkuat dengan terbitnya Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Capaian nilai Indeks SPBE di wilayah ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari yang awalnya berpredikat Cukup menjadi Baik pada Tahun 2023. Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023, Kabupaten Kotawaringin Timur mendapatkan nilai indeks sebesar 3,11 dengan predikat Baik. Capaian ini menunjukkan bahwa masyarakat Kotawaringin Timur semakin terhubung dengan pemerintahan melalui berbagai layanan digital yang disediakan. Diharapkan kedepan, pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur dapat semakin responsif, transparan, dan efisien.

#### **2.4.2.11 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

Jumlah koperasi yang aktif dalam setiap tahun mengalami kenaikan secara terus menerus. Pada kurun waktu 5 tahun dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 semula jumlah koperasi yaitu 250 dan meningkat hingga 300 koperasi.



**Gambar 2.53 Jumlah Koperasi yang Aktif Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019–2023**

Sumber : Dinas KopUKMPerindag Kabupaten Kotawaringin Timur, 2024

#### 2.4.2.12 Penanaman Modal

##### 1. Penanaman Modal

Pengertian Penanaman Modal menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA) untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Penanaman modal dapat dicapai tujuan seperti mengembangkan industri substitusi impor untuk menghemat devisa, mendorong ekspor non migas untuk menghasilkan devisa, alih teknologi, membangun prasarana, dan pengembangan daerah tertinggal.

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur terus berupaya untuk menarik investasi, baik investasi yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) di Kabupaten Kotawaringin Timur selama kurun waktu lima tahun terakhir cenderung meningkat hingga mencapai 303 investor pada Tahun 2023. Kondisi yang sama terjadi dengan jumlah nilai investasi berskala nasional yang juga mengalami peningkatan hingga mencapai 5,757 triliun rupiah sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.32 Capaian Kinerja Urusan Penanaman Modal Kabupaten  
Kotawaringin Timur Tahun 2019-2023**

| No. | Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                    | Capaian Tahun |                     |                     |                     |                     |
|-----|---|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|     |   | 2019          | 2020                | 2021                | 2022                | 2023                |
| 1.  | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) (orang)                    | NA            | 242                 | 300                 | 303                 | 303                 |
| 2.  | Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) (Rp)                       | NA            | 1.361.321.555.333,- | 1.077.872.129.195,- | 4.953.973.008.856   | 5.757.257.581.101,- |
|     | a. PMDN   | NA            | NA                  | 727.618.100.00,-    | 1.046.984.500.000,- | 1.312.329.700.000,- |
|     | b. PMA  | NA            | NA                  | 350.254.029.195,-   | 3.906.988.508.856,- | 4.444.927.881.101,- |
| 3.  | Jumlah penanaman modal (PMDN/PMA) mengajukan Nomor Induk Berusaha (NIB) | NA            | NA                  | 3.720               | 2.990               | 4.417               |
| 4.  | Jumlah pelaku usaha mengajukan Nomor Induk Berusaha (NIB)               | NA            | NA                  | 3.720               | 2.990               | 4.417               |

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur (2024)

## 2. Proses Perijinan

Pengurusan proses perizinan menjadi salah satu faktor utama dalam iklim investasi di Indonesia secara umum. Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait perizinan, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mengambil suatu kebijakan membentuk Unit Pelayanan Satu Atap melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur, terdapat 152 jenis izin dan 15 jenis nonperizinan yang menjadi kewenangan Dinas PMPTSP Kabupaten Kotawaringin Timur. Sementara itu, sesuai dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Mekanisme Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) standar waktu pelayanan perizinan ditentukan sebagai berikut.

**Tabel 2.33 Standar Waktu Pelayanan Perizinan di Kabupaten  
Kotawaringin Timur**

| No. | Jenis Izin                        | Standar Waktu<br>(dalam hari kerja) |              |
|-----|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------|
|     |                                   | Baru                                | Perpanjangan |
| 1.  | Izin Gangguan (IG/HO)             | -                                   | -            |
| 2.  | Tanda Daftar Perusahaan (TDP)     | NIB                                 | -            |
| 3.  | Tanda Daftar Gudang (TDG)         | OSS                                 | -            |
| 4.  | Tanda Daftar Industri (TDI)       | OSS                                 | -            |
| 5.  | Izin Usaha Perdagangan (IUP/SIUP) | OSS                                 | -            |
| 6.  | Izin Usaha Industri (IUI)         | OSS                                 | -            |
| 7.  | Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) | OSS                                 | -            |
| 8.  | Izin Mendirikan Bangunan (IMB)    | -                                   | -            |
| 9.  | Izin Reklame                      | 5 Hari                              | 5 Hari       |
| 10. | Izin Usaha Angkutan (IUA)         | OSS                                 | OSS          |

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Kotim (2024)

#### **2.4.2.13 Kepemudaan dan Olah Raga**

Pembangunan olahraga adalah suatu proses yang membuat manusia memiliki banyak akses untuk melakukan aktivitas fisik guna peningkatan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Oleh karena itu, ketersediaan sarana dan prasarana olah raga yang layak dan memadai menjadi salah satu perhatian penting pemerintah. Beberapa permasalahan pembangunan olahraga di Kotawaringin Timur adalah: 1) Kurangnya ketersediaan dana dalam pemeliharaan sarana dan prsarana olahraga; 2) Kurangnya promosi yang dilakukan kepada masyarakat tentang pentingnya berolahraga; dan 3) Kurangnya koordinasi antara Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dan OPD teknis.

Prestasi olahraga dihasilkan dari pembinaan yang berkelanjutan dan pembibitan atlit dari jenjang sekolah dasar sampai menengah keatas guna menghasilkan prestasi olahraga di tingkat nasional. Permasalahan peningkatan prestasi olahraga di Kotawaringin Timur disebabkan belum optimalnya peran sentra keolahragaan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi, terbatasnya jumlah dan kualitas pembina dan tenaga keolahragaan, masih rendahnya

apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan, serta terbatasnya jumlah dan kualitas sentra pembinaan olahraga yang memenuhi standar nasional dan internasional. Permasalahan tersebut membuat prestasi olahraga Kotawaringin Timur di tingkat nasional belum maksimal.

Jumlah organisasi olahraga di Kabupaten Kotawaringin Timur mengalami kenaikan dari 24 organisasi menjadi 28 organisasi. Sementara jumlah kegiatan olahraga pada Tahun 2020 menurun drastis akibat pandemi COVID-19 yang mana diberlakukan protokol kesehatan secara ketat, seperti peraturan menjaga jarak dan pembatasan sosial berskala besar. Capaian indikator kinerja daerah terhadap penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga meliputi jumlah organisasi pemuda, jumlah organisasi olahraga, jumlah kegiatan kepemudaan, dan jumlah kegiatan olahraga sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2.34 Perkembangan Organisasi dan Prasarana Olah Raga Di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019-2023**

| No. | Indikator Kinerja  | Capaian Tahun |      |      |      |       |
|-----|--|---------------|------|------|------|-------|
|     |  | 2019          | 2020 | 2021 | 2022 | 2023  |
| 1.  | Jumlah organisasi olahraga   | NA            | NA   | 2    | 3    | 3     |
| 2.  | Jumlah kegiatan olahraga   | NA            | NA   | NA   | 3    | 3     |
| 3.  | Persentase pembinaan olahraga  | NA            | NA   | 34   | 50   | 50    |
| 4.  | Persentase pelatih yang bersertifikasi                               | NA            | NA   | 52   | 60   | 70,83 |
| 5.  | Persentase pembinaan atlet muda                                      | NA            | NA   | 15   | 20   | 27,63 |
| 6.  | Jumlah atlet yang berprestasi  | 21            | 21   | 18   | 92   | 438   |
| 7.  | Jumlah prestasi olahraga   | NA            | NA   | 24   | 24   | 29    |
| 8.  | Persentase kecamatan yang memiliki sarana dan prasarana keolahragaan | 100           | 100  | 100  | 100  | 100   |
| 9.  | Jumlah lapangan olahraga   | NA            | NA   | 280  | 280  | 256   |
| 10. | Jumlah gedung serbaguna  | NA            | NA   | 6    | 6    | 6     |

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur (2024)

**Tabel 2.35 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019-2023**

| No. | Indikator Kinerja                         | Capaian Tahun |      |      |       |       |
|-----|---|---------------|------|------|-------|-------|
|     |   | 2019          | 2020 | 2021 | 2022  | 2023  |
| 1.  | Jumlah organisasi pemuda                  | 20            | 20   | 20   | NA    | NA    |
| 2.  | Jumlah kegiatan kepemudaan                | 9             | 2    | 6    | NA    | NA    |
| 3.  | Persentase organisasi pemuda aktif        | NA            | NA   | 59   | 68,75 | 72,22 |
| 4.  | Persentase organisasi pramuka yang dibina | 100           | 100  | 100  | 100   | 100   |

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur (2024)

Jumlah organisasi pemuda aktif di Kabupaten Kotawaringin Timur mengalami peningkatan selama tiga tahun terakhir. Keadaan tersebut didukung dengan meningkatnya kegiatan kepemudaan seperti kegiatan Pelatihan Digital Marketing bagi pemuda pada Tahun 2022, yang diikuti 50 orang peserta dari KNPI, Karang Taruna, pelaku UMKM, HIPMI, dan mahasiswa. Hal ini mengindikasikan bahwa minat pemuda untuk terlibat dalam organisasi dan pembangunan semakin meningkat selama pasca pandemi COVID-19. Sementara itu, dalam kegiatan keolahragaan, pemerintah terus berupaya meningkatkan dan mengoptimalkan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Kotawaringin Timur mengingat jumlah lapangan olahraga yang dimiliki saat ini justru semakin menurun. Diharapkan Pemerintah Daerah menambah jumlah dan mengoptimalkan lapangan olahraga di setiap wilayah/kecamatan dengan penambahan jumlah yang sangat signifikan.

#### **2.4.2.14 Statistik**

Untuk menggambarkan urusan statistik diukur dari indikator: 1) Tersedianya sistem data dan statistik yang terintegrasi, 2) Buku Kabupaten Dalam Angka, 3) Buku PDRB. Dari ketiga indikator tersebut semuanya terpenuhi/ada. Penyusunan Buku Kabupaten Dalam Angka dan Buku PDRB dilaksanakan dengan kerja sama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur. Buku-buku ini sangat berguna dalam penyusunan dokumen perencanaan

pembangunan terutama sebagai bahan data/informasi analisis pembangunan.

#### 2.4.2.15 Persandian

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, penyelenggaraan urusan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian di Kabupaten Kotawaringin Timur telah dilaksanakan secara optimal oleh Pemerintah Daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik khususnya pelayanan perizinan, sejak Tahun 2013 Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur telah menerapkan sistem informasi pelayanan perijinan yang diselenggarakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan pelayanan perijinan secara online dan pusat pelayanan satu pintu yang terdapat di Mall Pelayanan Publik (MPP).

#### 2.4.2.16 Kebudayaan

Urusan kebudayaan antara lain digambarkan dengan sasaran budaya yang terkelola dengan baik, budaya yang dilestarikan merupakan Jumlah unsur budaya tak benda dan jumlah budaya benda yang dikelola dibagi unsur budaya tak benda dan budaya benda yang telah diinventarisir. Setiap tahun inventarisasi budaya benda terus meningkat, untuk lebih jelasnya secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.36 Daftar Budaya Benda di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019-2023**

| Uraian         | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|----------------|------|------|------|------|------|
| Tugu/Monumen   | 20   | 20   | 20   | 27   | 27   |
| Batang         | 37   | 37   | 37   | 74   | 70   |
| Sandung        | 231  | 231  | 310  | 323  | 330  |
| Sapundu        | 255  | 255  | 475  | 575  | 582  |
| Makam          | 14   | 14   | 14   | 75   | 81   |
| Alam/Pemukiman | 16   | 16   | 16   | 25   | 25   |
| Masjid         | 21   | 21   | 21   | 45   | 50   |
| Gereja         | 23   | 23   | 23   | 37   | 37   |
| Tiang Pantar   | -    | -    | 210  | 377  | 380  |
| Lain-lain      | 4    | 4    | 4    | 15   | 15   |

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka 2024

Adapun even-even kesenian dan festival budaya yang terselenggara dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2024 terus menurun.

#### **2.4.2.17 Perpustakaan**

Berdasarkan Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 7 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Tahun 2020- 2024 menyatakan bahwa dalam upaya untuk membangun kualitas manusia, budaya literasi perlu dijadikan patokan yang kokoh bagi terwujudnya masyarakat yang berkualitas dan sejahtera. Menurut Alberta, literasi adalah kemampuan membaca dan menulis, menambah pengetahuan dan keterampilan, berpikir kritis dalam memecahkan masalah, serta mampu berkomunikasi secara efektif. Literasi membaca adalah kemampuan seseorang dalam memahami bacaan maupun tulisan guna mendapatkan informasi dan mentransformasikan informasi. Perpustakaan hadir sebagai media penghubung antara sumber informasi dan masyarakat yang ingin mengembangkan ilmu pengetahuan. Perpustakaan harus mendukung peningkatan permintaan membaca di bidang pengembangan kapasitas sumber daya manusia serta transfer pengetahuan kepada masyarakat.

Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka. Perpustakaan umum merupakan perpustakaan yang bertugas mengumpulkan, mengolah, menyimpan, melestarikan, dan menyebarluaskan bahan pustaka untuk masyarakat umum. Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan perpustakaan berupaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses informasi dan pengetahuan, melalui pelayanan perpustakaan yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Timur. Adapun capaian kinerja urusan perpustakaan di Kabupaten Kotawaringin Timur selama periode 2019-2023 terlihat pada tabel 2.37 berikut.

### 1. Jumlah Perpustakaan

Saat ini Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki 219 buah perpustakaan yang tersebar di 17 kecamatan. Jumlah perpustakaan di wilayah ini mengalami peningkatan pada Tahun 2023 yang mana hal ini mencerminkan antusiasme dan minat masyarakat Kotawaringin akan pengetahuan dan informasi. Perpustakaan tidak hanya sekadar tempat tumpukan buku namun menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk mendapatkan solusi untuk kebutuhan hidup.

### 2. Jumlah Pengunjung Perpustakaan

Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Kotawaringin Timur pada Tahun 2023 meningkat sangat signifikan sebesar 93,55 persen dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan minat masyarakat Kotawaringin Timur dalam membaca. Dengan tercapainya kondisi demikian diharapkan akan semakin menumbuhkan serta meningkatkan minat dan budaya membaca masyarakat Kotawaringin Timur sehingga akan menghasilkan sumberdaya manusia yang berkualitas, handal dan berdaya saing.

### 3. Jumlah Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan

Jumlah perpustakaan dihitung berdasarkan jumlah perpustakaan umum yang dapat diakses secara langsung oleh masyarakat dan beroperasi di wilayah pemerintah daerah. Oleh karena itu, fasilitas perpustakaan terutama buku baik menyangkut keragaman koleksi maupun jumlah koleksi buku harus menjadi perhatian disamping fasilitas lainnya. Hal ini karena masing-masing pengunjung mempunyai kepentingan referensi yang berbeda dengan buku yang ingin dicari dan memanfaatkan fasilitas peminjaman buku. Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan Kabupaten Kotawaringin Timur selama tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Penambahan jumlah koleksi buku diharapkan dapat meningkatkan minat baca dan literasi masyarakat.

**Tabel 2.37 Capaian Kinerja Urusan Perpustakaan dan Kearsipan  
Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019-2023**

| No. | Indikator Kinerja  | Capaian Tahun |        |        |        |        |
|-----|--|---------------|--------|--------|--------|--------|
|     |  | 2019          | 2020   | 2021   | 2022   | 2023   |
| 1.  | Jumlah perpustakaan (buah)                               | NA            | NA     | 215    | 219    | 219    |
| 2.  | Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun (orang)         | 12.061        | 954    | 2.509  | 6.185  | 11.971 |
| 3.  | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah (buku) | 17.331        | 17.331 | 17.331 | 17.800 | 19.250 |
| 4.  | Jumlah pembinaan lembaga perpustakaan (unit)             | NA            | NA     | 5      | 10     | 17     |
| 5.  | Jumlah pembinaan SDM pengelola perpustakaan              | NA            | NA     | 2      | 4      | 4      |

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Timur (2024)

#### 2.4.2.18 Kearsipan

Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, peran dan fungsi arsip sebagai bahan utama untuk akuntabilitas kinerja pemerintah. Ketersediaan arsip yang autentik dapat memberikan kepastian hukum dalam rangka penciptaan tata kelola pemerintahan yang bersih dan transparan karena arsip merupakan alat bukti yang sah. Sedangkan dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat terdapat berbagai kegiatan atau peristiwa yang terjadi yang memiliki nilai kesejarahan apabila terekam informasinya (*recorded of information*) dalam bentuk dan format sesuai dengan perkembangan TIK. Arsip-arsip yang bernilai kesejarahan tersebut harus diselamatkan, dilestarikan, dibuka akses penggunaan dan pemanfaatannya untuk kepentingan publik. Keberadaan arsip-arsip

kesejarahan atau arsip statis tersebut akan menjadi memori kolektif bangsa yang sangat berguna bangsa dan negara.

### 2.4.3 Fokus Urusan Pemerintahan Pilihan

#### 2.4.3.1 Perikanan

##### 1. Pertumbuhan Sektor Perikanan

Pertumbuhan Produksi Perikanan yang terdiri dari produksi perikanan budidaya dan produksi perikanan tangkap. Pertumbuhan Produksi Perikanan Budidaya adalah jumlah keseluruhan hasil budidaya selama satu tahun yang dilakukan pada wadah budidaya yang terdiri dari kolam, karamba, karamba jaring apung, dan wadah budidaya lainnya sesuai dengan peraturan perundangan perikanan yang berlaku. Sedangkan Pertumbuhan Produksi Perikanan Tangkap adalah jumlah keseluruhan hasil penangkapan selama satu tahun yang dilakukan oleh nelayan perairan umum dan laut dengan alat tangkap yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk melihat perkembangan sub sektor tanaman perikanan, dapat dilihat dari pertumbuhannya. Pertumbuhan PDRB Sub sektor perikanan dari tahun ke tahun begitu fluktuatif. Pada tahun 2018, pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan sebesar 20,79%, pada tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 19,73%. Tahun 2020 dan 2021 pertumbuhan sub sektor perikanan mengalami kenaikan yang signifikan. Akan tetapi, pada tahun 2022, pertumbuhan PDRB sub sektor perikanan kembali menurun menjadi 21,56%. PDRB sub sektor perikanan tersaji dalam gambar berikut.

**Tabel 2.38 Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan (ADHK) di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019-2023**

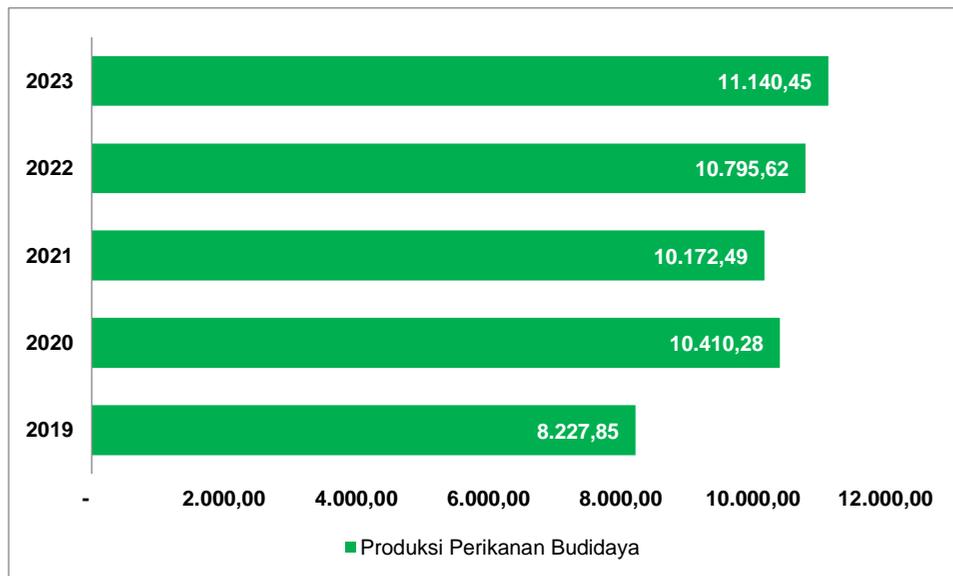
| Laju pertumbuhan | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023 |
|------------------|-------|-------|-------|-------|------|
| %                | 19,73 | 21,47 | 22,40 | 21,56 | NA   |

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka 2024

##### 2. Produksi Perikanan

Produksi perikanan disini terdiri dari produksi perikanan budidaya. Dimana budidaya ikan semakin gencar dilakukan para pembudidaya ikan. Karena kebutuhan akan konsumsi ikan semakin meningkat setiap tahun. Produksi perikanan budidaya adalah jumlah

keseluruhan hasil budidaya selama satu tahun yang dilakukan pada wadah budidaya yang terdiri dari kolam, karamba, dan wadah budidaya lainnya sesuai dengan peraturan perundangan perikanan yang berlaku. Jumlah produksi perikanan budidaya dari tahun 2019-2023 umumnya terus meningkat. Hanya terjadi penurunan pada tahun 2021, namun kembali meningkat pada tahun 2022 dan 2023 sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 2.54 Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019- 2023**

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur, 2024

### 3. Konsumsi Ikan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan konsumsi ikan beberapa diantaranya mengkampanyekan Gerakan Gemar Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan) dan mendorong upaya penangkapan ikan dan budidaya. Gemarikan ini juga dilaksanakan oleh Kabupaten Kotawaringin Timur sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang. Beberapa kegiatan Gemarikan diantaranya pameran produk perikanan di Kabupaten Kotawaringin Timur, lomba masak serba ikan, kampanye terbuka dengan dilakukannya *talkshow* di radio serta stasion Televisi lokal di Kalimantan Tengah.

Pada periode 2020-2024, KKP Menargetkan peningkatan angka konsumsi ikan nasional dari 56,39 Kg/Kapita/Tahun. Data konsumsi ikan nasional yang dihitung KKP merupakan jumlah kilogram ikan yang dikonsumsi masyarakat Indonesia selama satu tahun yang

dikonversi setara ikan utuh segar. Peningkatan angka konsumsi ikan nasional ini menggambarkan masyarakat Indonesia mulai terbiasa makan ikan dan diharapkan menjadi transformasi budaya pola makan dikeluarga. Data konsumsi ikan di Kabupaten Kotawaringin Timur dari tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut.



**Gambar 2.55 Konsumsi Ikan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019-2023**

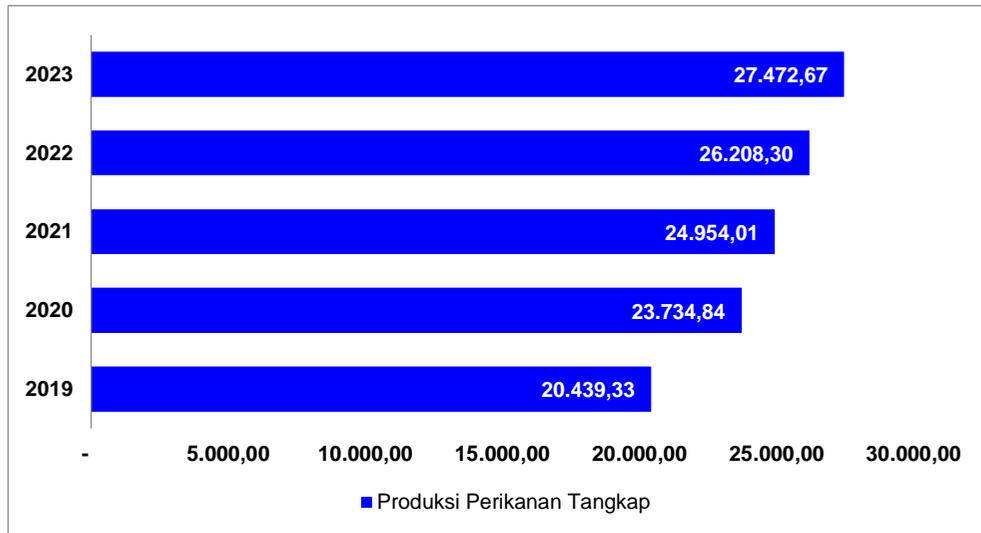
*Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur, 2024*

#### 4. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Produksi Perikanan Kelompok nelayan disini adalah memperhitungkan hasil produksi perikanan tangkap oleh kelompok nelayan. Perikanan tangkap adalah usaha penangkapan ikan dan organisme air lainnya di alam liar (laut, sungai, danau, dan badan air lainnya). Kehidupan organisme air di alam liar dan faktor-faktornya (biotik dan abiotik) tidak dikendalikan secara sengaja oleh manusia. Sedangkan Produksi Perikanan Tangkap adalah jumlah keseluruhan hasil penangkapan selama satu tahun yang dilakukan oleh nelayan perairan umum dan laut dengan alat tangkap yang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Salah satu permasalahan perikanan tangkap adalah kerusakan lingkungan dan menurunnya stok ikan yang diakibatkan oleh penggunaan sarana produksi yang dilarang seperti bahan peledak, bahan kimia beracun, hilangnya alat tangkap pada saat operasi, dan penggunaan alat tangkap tidak selektif. Peningkatan produksi perikanan tangkap dapat tercapai dengan keadaan dimana adanya faktor perikanan tangkap berbasis pemberdayaan dan kemandirian

usaha nelayan, di dukung dengan peningkatan kelestarian sumber daya ikan dan keamanan/ ketahanan pangan melalui pengawasan terhadap sumber daya perikanan dan kelautan. Jumlah produksi perikanan tangkap dari tahun 2019-2023 terus meningkat sebagaimana terlihat pada gambar dan tabel di bawah ini.



**Gambar 2.56 Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019-2023**

Sumber: Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur, 2024

**Tabel 2.39 Data Kelompok Nelayan Tahun 2018-2022**

| Data   | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--|------|------|------|------|------|
| Data kelompok nelayan                                | 11   | 93   | 90   | 56   | 48   |
| Data kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda | 10   | 35   | 121  | 20   | 40   |

Sumber : Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Timur, 2023

#### 2.4.3.2 Pariwisata

Kunjungan wisata ke Kabupaten Kotawaringin Timur menjadi barometer keberhasilan pariwisata bagi wilayah ini. Jumlah wisatawan yang datang ke Kotawaringin Timur selama kurun waktu lima tahun terakhir berfluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Menurut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, jumlah wisatawan domestik dan manca Negara yang berkunjung ke Kotawaringin Timur mengalami peningkatan masing-masing sebesar 22,37 persen dan 33,59 persen pada tahun 2023 sebagaimana dijabarkan dalam tabel 2.40. Pemerintah Daerah terus melakukan berbagai upaya untuk mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki untuk kepentingan promosi pariwisata seperti meningkatkan frekuensi promosi, menjalin

kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan kepariwisataan, peningkatan kerjasama dengan *stakeholder* pariwisata baik di dalam maupun luar negeri serta dukungan *event* pariwisata.

**Tabel 2.40 Jumlah Pengunjung Wisata Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019-2023**

| No. | Indikator Kinerja       | Capaian Tahun |         |         |         |         |
|-----|-------------------------|---------------|---------|---------|---------|---------|
|     |                         | 2019          | 2020    | 2021    | 2022    | 2023    |
| 1.  | Jumlah kunjungan wisata | 241.718       | 214.370 | 238.702 | 494.169 | 604.769 |
|     | - Wisatawan domestik    | 240.392       | 214.146 | 238.557 | 493.785 | 604.256 |
|     | - Wisatawan mancanegara | 1.326         | 224     | 145     | 384     | 513     |
| 2.  | Jumlah Desa Wisata      | -             | -       | -       | 4       | 4       |

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Timur, 2024

### 2.4.3.3 Pertanian

Seperti yang sudah di uraikan pada sub. Bagian potensi pengembangan wilayah yang di tinjau dari persentase penduduk berdasarkan sektor pekerjaan yang diminati, kondisi geografis dan PDRB Kabupaten Kotawaringin Timur sektor pertanian dalam arti luas yang mencakup kegiatan pertanian (tanaman pangan dan hortikultura), perkebunan, peternakan dan perikanan menjadi kontribusi utama laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kotawaringin Timur.

Sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan kontribusi terbesar dalam perekonomian Kabupaten Kotawaringin Timur dengan capaian sebagai berikut.

**Tabel 2.41 Distribusi Sektor Pertanian Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019-2023**

| Kontribusi | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| %          | 19,73 | 21,47 | 22,40 | 21,56 | 22,36 |

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka 2024

#### 1. Tanaman Pangan

Tanaman pangan merupakan sektor penting dalam bidang pertanian karena kelompok tanaman ini yang menghasilkan bahan pangan sebagai sumber energi untuk menopang kehidupan manusia.

Untuk melihat perkembangan sub sektor tanaman pangan, dapat dilihat dari pertumbuhannya. Pertumbuhan PDRB Sub sektor tanaman pangan dari tahun ke tahun begitu fluktuatif. Lebih jelas, pertumbuhan PDRB sub sektor tanaman pangan tersaji dalam gambar berikut.

**Tabel 2.42 Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan**

| Laju pertumbuhan | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| Miliar Rupiah    | 320,70 | 344,80 | 335,90 | 349,30 | 376,90 |

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Timur dalam Angka 2023

## 2. Perkebunan

Sektor tanaman perkebunan yang diprioritaskan dibudidayakan di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah karet dan kopi. Dimana tanaman perkebunan ini bernilai ekonomis tinggi karena menjadi kebutuhan industri-industri besar. Selain itu, lahan budidaya tanaman-tanaman juga tergolong luas dan dapat dilakukan dalam jangka waktu Panjang. Untuk melihat perkembangan sub sektor tanaman perkebunan, dapat dilihat dari pertumbuhannya. Pertumbuhan PDRB Sub sektor perkebunan dari tahun ke tahun terus meningkat stabil. Pada tahun 2018, pertumbuhan PDRB sub sektor perkebunan semula 5.108 triliun pada tahun 2022 terjadi kenaikan menjadi 7.213 triliun. Lebih jelas, pertumbuhan PDRB sub sektor perkebunan tersaji dalam gambar berikut.

**Tabel 2.43 Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan**

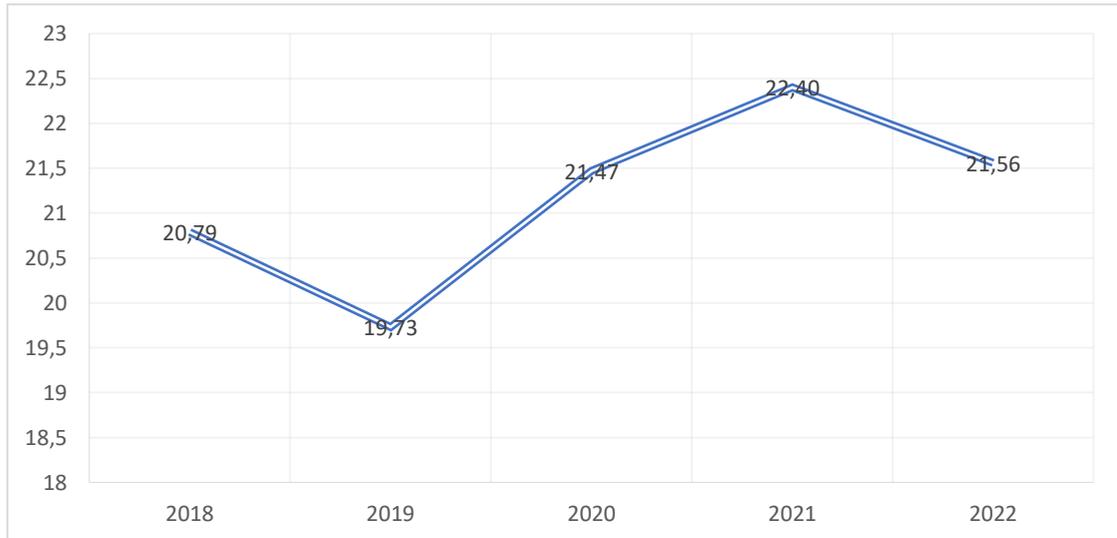
| Laju pertumbuhan | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Miliar Rupiah    | 5.108 | 5.289 | 5.794 | 6.646 | 7.213 |

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Timur dalam Angka 2023

## 3. Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB

Tanaman pangan yang di produksi petani pada dasarnya merupakan tumbuhan yang dapat dimanfaatkan dan diolah untuk memenuhi kebutuhan makanan bagi manusia dan mampu menghasilkan produksi yang mengandung karbohidrat dan protein utama sebagai sumber makanan pokok bagi manusia. Tanaman pangan yang dominan di produksi di Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu padi. Besar kecilnya produksi padi sawah tergantung pada faktor-faktor produksi yang digunakan, antara lain luas lahan, pupuk,

tenaga kerja, benih dan pestisida. Kontribusi kelompok petani terhadap PDRB dapat dilihat pada gambar di bawah ini :

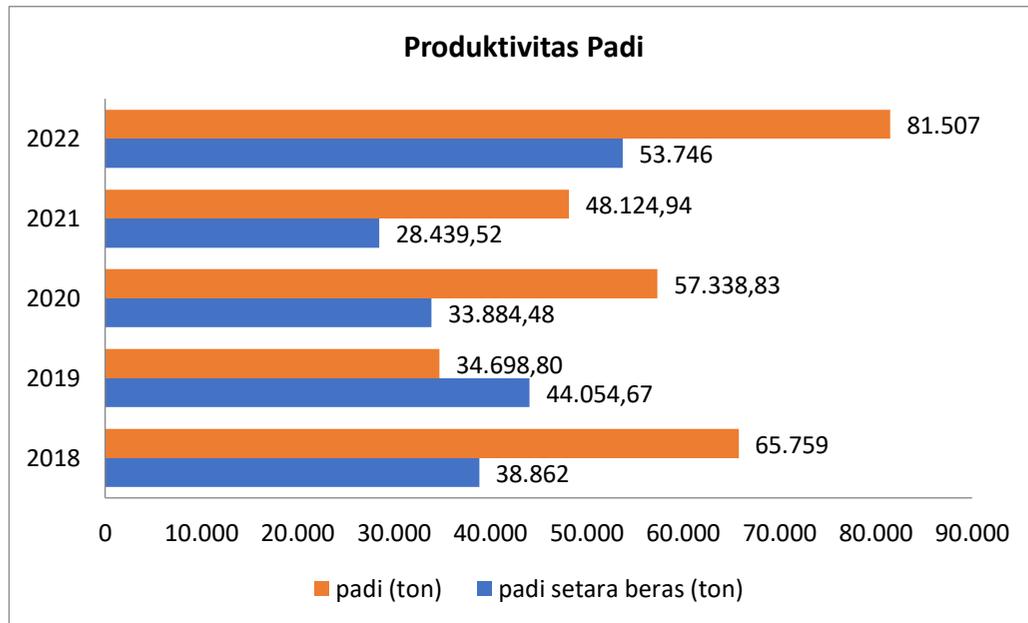


**Gambar 2.57 Kontribusi Produksi Kelompok Petani terhadap PDRB Tahun 2018-2022**

*Sumber : Dinas Pertanian, 2023*

#### 4. Produktivitas Padi

Padi merupakan tanaman pangan utama bagi penduduk Indonesia. Kebutuhan akan pangan (padi) ini akan terus meningkat sejalan dengan pertumbuhan penduduk dan peningkatan konsumsi per kapita akibat peningkatan pendapatan. Namun dilain pihak, upaya peningkatan produksi padi saat ini terganjal oleh banyak kendala, seperti konversi lahan yang menurunkan luas panen dan penyimpangan iklim yang dapat menyebabkan penurunan produktivitas. Data produktivitas padi dapat di lihat pada gambar di bawah ini:



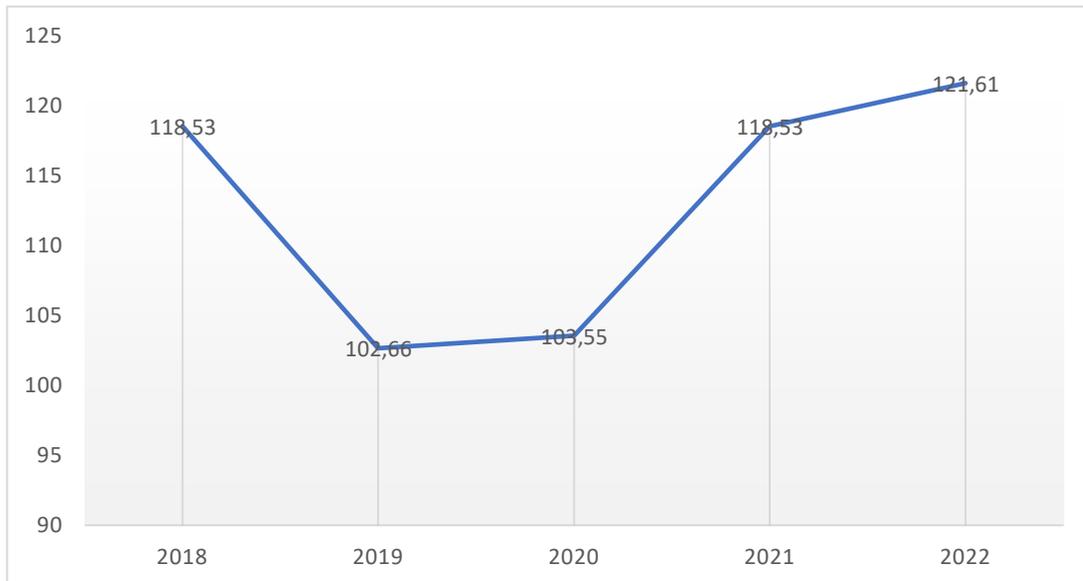
**Gambar 2.58 Produktivitas Padi Tahun 2018-2022**

*Sumber: kabupaten Kotawaringin Timur dalam Angka 2023*

#### 5. Nilai Tukar Petani (NTP)

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat perkembangan kesejahteraan petani adalah nilai tukar petani (NTP). Sampai dengan tahun 2022, BPS baru bisa menyajikan indikator NTP sampai dengan tingkat provinsi, dengan asumsi kondisi NTP provinsi akan mewakili kondisi NTP di kabupaten dalam provinsi tersebut.

NTP > 100, berarti petani mengalami surplus. Harga produksi naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya. NTP = 100, berarti petani mengalami impas. Kenaikan/penurunan harga produksinya sama dengan persentase kenaikan/penurunan harga barang konsumsi. Pendapatan petani sama dengan pengeluarannya. NTP < 100, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya. NTP Kabupaten Kotawaringin Timur dalam kurun waktu tahun 2018-2022 berada diatas 100 yang berarti petani mengalami surplus.



**Gambar 2.59 Nilai Tukar Petani (NTP) Tahun 2018-2022**

Sumber : Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Tengah, 2023

#### 2.4.3.4 Kehutanan

Kinerja bidang kehutanan didasarkan pada indikator kontribusi sektor dengan capaian kinerja tersaji pada tabel dibawah ini. Urusan kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur telah menjadi kewenangan Provinsi Kalimantan Tengah sejak Tahun 2017.

**Tabel 2.44 Capaian Kinerja Urusan Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur Periode 2019-2023**

| No. | Indikator Kinerja                             | Capaian Tahun |      |      |      |      |
|-----|---|---------------|------|------|------|------|
|     |   | 2019          | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1.  | Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB (%) | 0,36          | 0,23 | 0,25 | 0,22 | NA   |

Sumber: BPS Kabupaten Kotawaringin Timur (2024)

#### 2.4.3.5 Energi

##### 1. Jumlah Pengguna Listrik

Jumlah pengguna listrik di Kabupaten Kotawaringin Timur dilihat rasio elektrifikasi (RE) Kabupaten Kotawaringin Timur berada pada angka 99,42%, ini lebih tinggi dari nilai Rasio elektrifikasi (RE) Kalimantan Tengah yang mencapai 94,53%. Rasio elektrifikasi (RE) adalah perbandingan jumlah pelanggan rumah tangga yang memiliki sumber penerangan baik dari listrik Perusahaan Listrik Negara (PLN) maupun listrik non-PLN dengan jumlah rumah tangga. Hal ini menunjukkan 99,42% rumah tangga di Kabupaten Kotawaringin Timur telah menggunakan dan terlayani listrik PLN.

## 2. Ketersediaan Daya Listrik

Ketersediaan daya listrik di Kabupaten Kotawaringin Timur dilihat dari jumlah desa yang telah mendapat layanan listrik dari PLN pada setiap kecamatan yang terlayani. Dapat dilihat pada data masih terdapat 31 desa yang menggunakan listrik non PLN dan 2 desa berlistrik LTSHE. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada data berikut ini.

**Tabel 2.45 Layanan Listrik di Kabupaten Kotawaringin Timur**

| Kecamatan             | Berlistrik PLN | Listrik Non PLN | Berlistrik LTSHE |
|-----------------------|----------------|-----------------|------------------|
| Kota Besi             | 10             | 1               | -                |
| Cempaga               | 8              | -               | -                |
| Mentaya Hulu          | 14             | 1               | -                |
| Parenggean            | 14             | -               | -                |
| Baamang               | 6              | -               | -                |
| Mentawa Baru Ketapang | 11             | -               | -                |
| Mentaya Hilir Utara   | 7              | -               | -                |
| Mentaya Hilir Selatan | 10             | -               | -                |
| Pulau Hanaut          | 6              | -               | -                |
| Antang Kalang         | 6              | 9               | -                |
| Teluk Sampit          | 6              | -               | -                |
| Seranau               | 14             | 2               | 2                |
| Cempaga Hulu          | 9              | 2               | -                |
| Telawang              | 6              | -               | -                |
| Bukit Santuai         | 2              | 12              | -                |
| Tualan Hulu           | 7              | 4               | -                |
| Telaga Antang         | 6              | -               | -                |

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Timur dalam Angka 2023

### 2.4.3.6 Perdagangan

#### 1. Ekspor Bersih Perdagangan

Kinerja perekonomian di Kabupaten Kotawaringin Timur dari sisi pengeluaran pada umumnya dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan juga faktor eksternal. Faktor internal yang dimaksud adalah perilaku pasar domestik yang tercermin dari komponen yang ada pada pengeluaran akhir. Peran pasar domestik merupakan kekuatan daya dorong domestik terhadap perkembangan ekonomi regional, sementara faktor eksternal adalah perubahan teknologi struktur perdagangan global sebagai akibat peningkatan perdagangan internasional. Peran domestik Kabupaten Kotawaringin

Timur cukup bagus dalam mendorong kinerja ekonomi regional, meski demikian ketergantungan terhadap *supply* barang dan jasa dari luar daerah cukup besar, akibatnya ketergantungan terhadap daerah lain cukup tinggi. Jika tidak diimbangi dengan kemampuan untuk menjual barang dan jasa dari Kabupaten Kotawaringin Timur ke luar daerah, maka akan berpengaruh tidak baik terhadap perekonomian Kabupaten Kotawaringin Timur. Sebagai gambaran perbandingan antara ekspor dan impor barang jasa di Kabupaten Kotawaringin Timur dalam kurun waktu 2018-2022 dapat dilihat pada tabel berikut.

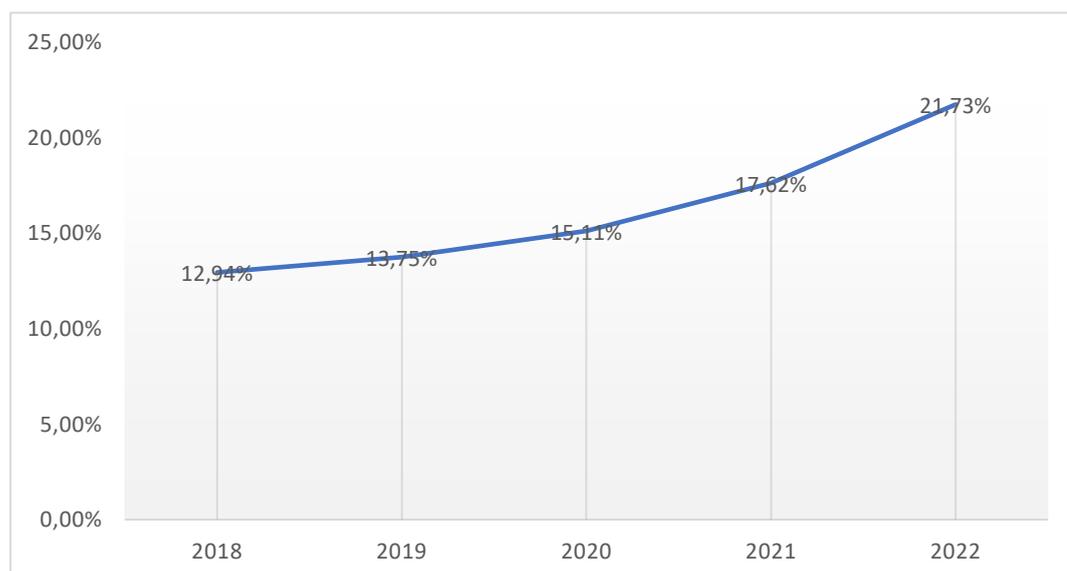
**Tabel 2.46 Ekspor Bersih Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2018-2022 (Juta Rupiah)**

| Laju pertumbuhan | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Juta Rupiah      | 2.970 | 3.249 | 3.039 | 3.190 | 3.343 |

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Timur dalam Angka 2023

## 2. Rasio Ekspor dan Impor Terhadap PDRB

Selama periode 2018 – 2022, posisi rasio ekspor dan impor Kabupaten Kotawaringin Timur dengan luar negeri terhadap PDRB terus bertambah. Hal ini menunjukkan neraca perdagangan barang dan jasa Kabupaten Kotawaringin Timur selalu dalam posisi naik. Semula pada tahun 2018 12,94%, pada tahun 2022 mencapai 21,73%.



**Gambar 2.60 Rasio Ekspor dan Impor Terhadap PDRB  
Tahun 2018-2022**

Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian, 2023

### 3. Kelompok Pedagang/Usaha Informal

Perekonomian di Kabupaten Kotawaringin Timur tidak terlepas dari kegiatan perdagangan yang berasal kelompok pedagang/usaha informal. Kelompok pedagang/usaha informal dalam kurun waktu tahun 2018-2022 juga telah mendapatkan bantuan binaan dari pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur. Selain itu telah dibentuk pula bina kelompok pedagang/usaha informal.

**Tabel 2.47 Data Kelompok Pedagang Tahun 2018-2022**

| Data   | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kelompok pedagang/usaha informal                                       | 2.934 | 2.934 | 2.934 | 2.934 | 2.934 |
| Kelompok pedagang/usaha informal yang mendapatkan bantuan binaan pemda | 3     | 3     | 4     | 5     | 6     |
| Bina kelompok pedagang/usaha informal                                  | 21    | 39    | 44    | 129   | 242   |

Sumber : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kotawaringin Timur, 2023

#### 2.4.3.7 Perindustrian

Pelayanan umum urusan Industri pengolahan kinerjanya dapat diketahui dari Kategori Industri Pengolahan pada PDRB, kategori ini pada tahun 2022 memberikan kontribusi terhadap PDRB atas dasar harga berlaku sebesar sebesar 22,01 persen. Kontribusi ini selama 5 tahun terakhir cenderung fluktuatif. pada tahun 2018 kategori ini menyumbang 22,95 persen dari PDRB Kabupaten Kotawaringin Timur namun pada tahun 2019 dan 2020 mengalami penurunan kontribusi. Penurunan yang terjadi disebabkan adanya penurunan nilai produksi akibat dampak covid 19 yaitu banyak usah industri kecil dan mikro yang terpaksa harus gulung tikar atau sementara tutup dan merumahkan tenaga kerjanya. Meskipun pemerintah pusat telah memberikan dana insentif tambahan untuk membantu pelaku usaha industri mikro, namun besarnya pukulan ekonomi akibat dampak pandemi covid 19 tidak bisa terhindarkan. Kemudian pada tahun 2021 pertumbuhan kategori industri pengolahan kembali tumbuh meningkat menjadi 22,92.

**Tabel 2.48 Kontribusi dan Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019-2023 (Persen)**

| Uraian           | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Kontribusi       | 21,47 | 21,63 | 22,92 | 22,09 | 22,52 |
| Laju Pertumbuhan | 4,90  | -2,79 | 2,73  | 1,51  | 7,08  |

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Timur dalam Angka 2023

#### **2.4.3.8 Transmigrasi**

Transmigrasi adalah program pemindahan dan penyebaran penduduk dengan maksud untuk dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan, serta membentuk pusat pengembangan wilayah baru. Jumlah Transmigran merujuk pada total individu atau keluarga yang telah melakukan migrasi atau perpindahan tempat tinggal dari satu wilayah ke wilayah lain, baik dalam satu negara atau lintas negara. Istilah ini umumnya digunakan dalam konteks transmigrasi, yaitu program yang didukung atau diawasi oleh pemerintah atau lembaga terkait dengan tujuan mengalokasikan penduduk atau tenaga kerja ke wilayah-wilayah tertentu untuk tujuan pengembangan, redistribusi penduduk, atau manajemen sumber daya. Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki 34 UPT wilayah transmigrasi, yang terdiri dari 40.134 orang atau 10.237 kepala keluarga.

#### **2.4.4 Fokus Urusan Penunjang**

##### **2.4.4.1 Perencanaan Pembangunan**

Indikator untuk mengukur perencanaan pembangunan daerah antara lain adalah tersedianya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Pembangunan Daerah (RPJPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda), tersedianya dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah, tersedianya dokumen perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah, tersedianya dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Kabupaten Kotawaringin Timur sampai dengan tahun 2022 telah memiliki :



1. Dokumen RPJPD Periode 2005-2025 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2008, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025.
2. Dokumen RPJMD periode 2016-2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 20 Tahun 2016, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016–2021.
3. Dokumen RKPD 2021 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2020, Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021.
4. Dokumen RTRWK Periode 2015-2035 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2015-2035.

#### **2.4.4.2 Keuangan**

Beberapa indikator untuk menggambarkan penunjang urusan keuangan, antara lain adalah :

##### **1. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan**

Selama kurun waktu tahun 2018-2023, Badan Pemeriksa Keuangan telah mengeluarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019 yang memuat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini WTP tersebut dapat dicapai karena Kabupaten Kotawaringin Timur dinilai berhasil menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual, memenuhi kecukupan pengungkapan dalam Laporan Keuangan, memiliki kepatuhan terhadap perundang-undangan dan efektif dalam sistem pengendalian intern terhadap keberadaan aset serta kelengkapan bukti dan nilai aset. Ada beberapa faktor pendorong keberhasilan dalam pencapaian Opini BPK WTP untuk Kabupaten Kotawaringin Timur ini yaitu sebagai berikut:

1. Kabupaten Kotawaringin Timur telah melakukan pengembangan Sistem Informasi Laporan Keuangan Manajemen Aset yang

- terintegrasi seluruh SKPD sebagai Pengelolaan Data yang akurat efektif dan dapat dipercaya untuk mendukung Laporan Keuangan.
2. Melakukan monitoring dan memperkuat fungsi pejabat penatausahaan keuangan SKPD dalam mengawal pelaksanaan kegiatan SKPD.
  3. Melakukan pembinaan dan bimbingan teknis serta sosialisasi untuk memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual.

#### 2.4.4.3 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2022 yang diperoleh dari PAD, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah meningkat 3,97 persen dibanding tahun sebelumnya. Kondisi yang sama terjadi pada nilai PAD yang juga mengalami peningkatan 2,36 persen, namun tidak dengan nilai dana perimbangan yang justru menurun 5,13 persen sebagaimana tersaji dalam tabel berikut ini.

**Tabel 2.49 Realisasi Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Menurut Jenis Pendapatan Tahun 2021-2022**

| No. | Jenis Pendapatan  | Tahun                |                      |
|-----|---|----------------------|----------------------|
|     |   | 2021                 | 2022                 |
| 1.  | Pendapatan Asli Daerah (PAD)  | 295.889.683.554,86   | 302.877.567.739,92   |
| 1.1 | Pajak Daerah  | 65.511.075.606,00    | 97.429.028.779,01    |
| 1.2 | Retribusi Daerah  | 12.075.078.816,00    | 11.326.288.439,00    |
| 1.3 | Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan | 12.188.994.863,00    | 12.809.375.699,00    |
| 1.4 | Lain-lain PAD yang Sah  | 206.114.534.269,86   | 181.312.874.822,91   |
| 2.  | Dana Perimbangan  | 1.486.261.140.024,51 | 1.409.991.686.512,00 |
| 2.1 | Bagi Hasil Pajak  | 114.999.210.569,51   | 255.155.489.918,00   |
| 2.2 | Bagi Hasil Bukan Pajak  | 233.393.814.027,00   | 0                    |
| 2.3 | Dana Alokasi Umum   | 760.946.119.000,00   | 759.503.614.000,00   |
| 2.4 | Dana Alokasi Khusus   | 214.710.155.244,00   | 228.631.200.594,00   |
| 2.5 | Dana Desa   | 162.211.841.184,00   | 144.196.324.000,00   |

| No. | Jenis Pendapatan  | Tahun                       |                             |
|-----|---|-----------------------------|-----------------------------|
|     |   | 2021                        | 2022                        |
| 2.6 | Dana Insentif Daerah (DID)  | 0                           | 22.505.058.000,00           |
| 3   | Lain-lain Pendapatan yang Sah                                     | 44.156.805.158,40           | 185.889.831.895,23          |
| 3.1 | Pendapatan  | 1.937.868.311,40            | 1.635.967.486,00            |
| 3.2 | Dana Darurat  | 0                           | 0                           |
| 3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya | 0                           | 163.916.761.691,23          |
| 3.4 | Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah                               | 0                           | 0                           |
| 3.5 | Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya     | 0                           | 20.150.000.000,00           |
| 3.6 | Lainnya   | 42.218.936.847,00           | 182.102.718,00              |
|     | <b>Total</b>  | <b>1.826.307.628.737,77</b> | <b>1.898.759.086.147,15</b> |

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, 2023

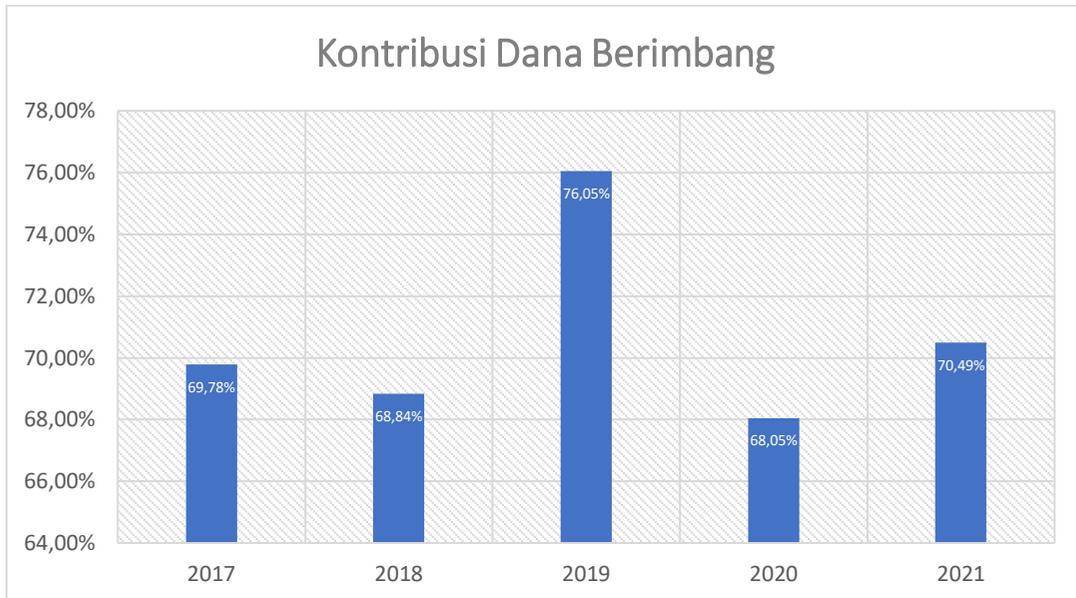
#### 1. Dana Perimbangan

Kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah masih menjadi komponen utama. Selama 5 (lima) tahun (2018-2022), rata-rata kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah terus meningkat. Dilihat dari pertumbuhannya setiap tahun kontribusi dana perimbangan terhadap pendapatan daerah cenderung mengalami peningkatan, peningkatan tersebut tentu berpengaruh terhadap pendapatan daerah. Adapun kontribusi komponen dana perimbangan terhadap pendapatan daerah dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini.

**Tabel 2.50 Persentase Kontribusi Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017-2021**

| Tahun | Persentase (%) |
|-------|----------------|
| 2017  | 69,78%         |
| 2018  | 68,84%         |
| 2019  | 76,05%         |
| 2020  | 68,05%         |
| 2021  | 70,49%         |

sumber: data statistik Kotawaringin Timur 2017-2021



**Gambar 2.61 Persentase Kontribusi Komponen Dana Perimbangan Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017-2021**

Sumber : data statistik Kotawaringin Timur 2017-2021

Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa tingkat ketergantungan keuangan pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur terhadap anggaran dari pemerintah pusat masih cukup tinggi. Kondisi ini perlu diwaspadai karena komponen data perimbangan ini tergantung dari kondisi APBN, apabila kondisi APBN tidak baik maka keadaan keuangan daerah akan ikut terpengaruh.

## 2. Komponen Lain-lain Pendapatan Daerah

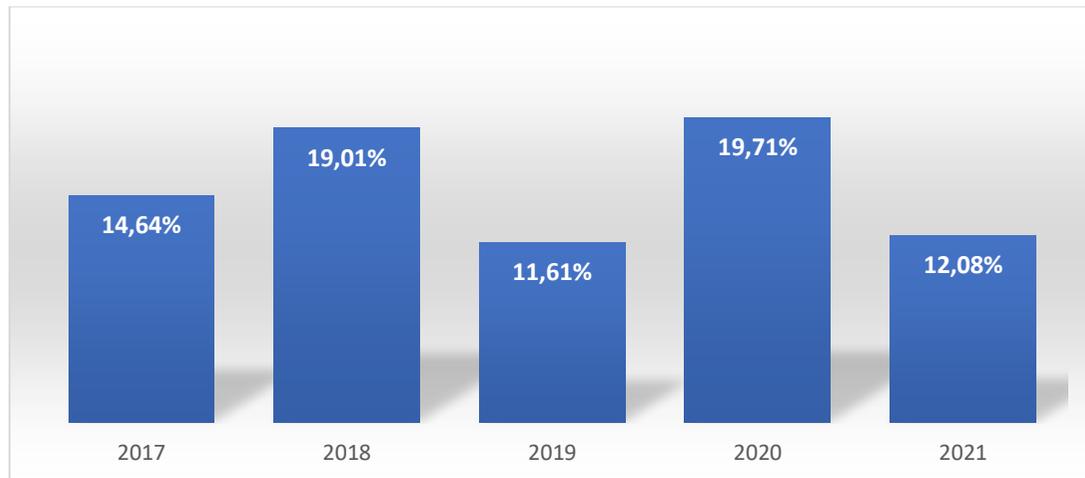
Dari tahun 2018 hingga 2022 rata-rata pertumbuhan lain-lain pendapatan daerah yang sah adalah sebesar 15,41 %. Dilihat dari tren peningkatan per tahun, lain-lain pendapatan daerah yang sah mengalami fluktuasi yang beragam. Pertumbuhan terendah ada pada tahun 2019 dan Tahun 2022. Berikut ini tabel dan grafik kontribusi komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah terhadap total lain-lain pendapatan daerah yang sah.

**Tabel 2.51 Persentase Kontribusi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017-2021 (%)**

| Tahun | Persentase (%) |
|-------|----------------|
| 2017  | 14,64%         |
| 2018  | 19,01%         |
| 2019  | 11,61%         |

| Tahun | Persentase (%) |
|-------|----------------|
| 2020  | 19,71%         |
| 2021  | 12,08%         |

Sumber : data statistik Kotawaringin Timur 2017-2021



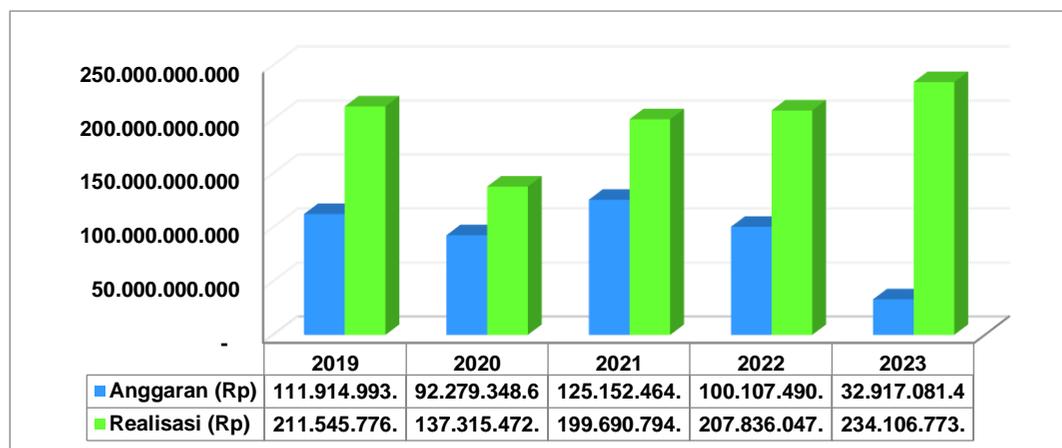
**Gambar 2.62 Persentase Kontribusi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017-2021**

Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Timur 2017-2021

Secara keseluruhan berikut adalah grafik kontribusi masing-masing sumber pendapatan daerah terhadap pendapatan daerah tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.

### 3. Perkembangan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)

Perkembangan SiLPA di Kabupaten Kotawaringin Timur selama kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada gambar berikut :



**Gambar 2.63 Perkembangan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019-2023**

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, 2024

#### 2.4.4.4 Kepegawaian

Kinerja urusan kepegawaian diukur melalui tingkat Profesionalitas ASN diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin. Setiap dimensi dalam Standar Profesionalitas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup bobot, deskripsi, dan indikator sebagai satu kesatuan dari Standar Profesionalitas ASN.

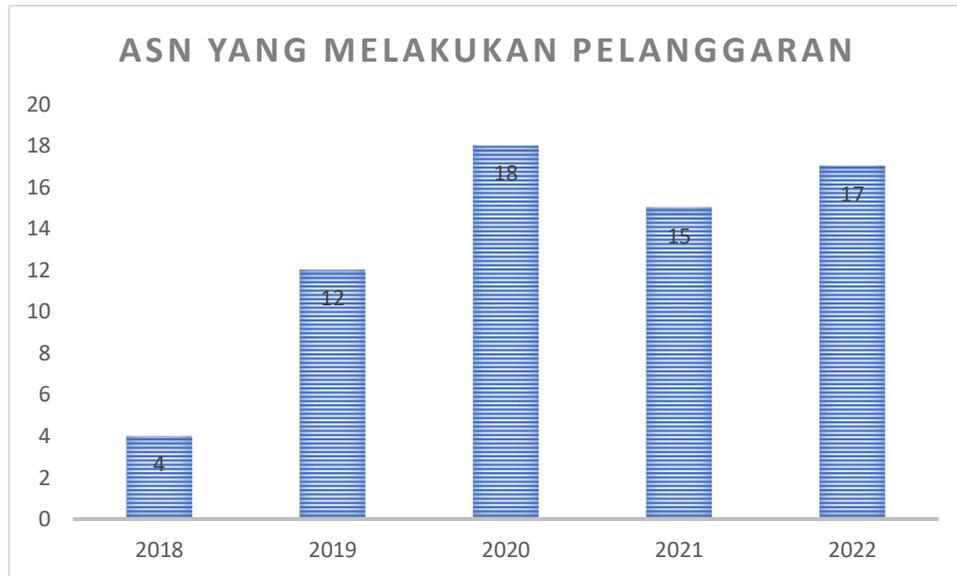
Sasaran terwujudnya sumber daya aparatur yang profesional dan handal merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk upaya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur untuk mewujudkan perbaikan/peningkatan tata kelola pemerintahan. Berikut adalah data-data kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Timur dalam kurun waktu tahun 2018-2022.

**Tabel 2.52 Data Kepegawaian Kabupaten Kotawaringin Timur  
Tahun 2018-2022**

| Data  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|------|------|------|------|------|
| ASN mendapatkan pendidikan dan pelatihan formal (Jam Pembelajaran)              | 99   | 45   | -    | 50   | 56   |
| Rasio ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal dan yang belum         | 0,9  | 2,2  | 1,8  | 0,58 | 1,68 |
| Persentase pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural | 6,20 | 3,97 | -    | 3,14 | 8,22 |
| Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah                         | 43   | 39   | 39   | 38   | 38   |
| Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah                            | 908  | 907  | 920  | 897  | 564  |
| Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah            | 3380 | 3232 | 3691 | 4615 | 4087 |

Sumber : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2023

Indikator lainnya yang dapat digunakan untuk mengukur Urusan Pengawasan, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah Persentase Pelanggaran Pegawai, dengan Formulasi Jumlah ASN Yang Mendapat Hukuman Disiplin dibagi Jumlah Seluruh ASN dikali 100%. Jumlah ASN yang melakukan pelanggaran untuk kurun waktu tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 terus meningkat. Pada tahun 2018 Jumlah ASN yang melakukan pelanggaran sebanyak 4 orang, angka tersebut terus meningkat hingga tahun 2022 mencapai 17 orang.



**Gambar 2.64 ASN yang melakukan pelanggaran Tahun 2018-2022**

*Sumber : Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, 2023*

#### **2.4.4.5 Penelitian dan Pengembangan**

Kegiatan penelitian dan pengembangan antara Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur dengan berbagai lembaga telah dimulai pada tahun 2017. Seluruh perangkat daerah/unit kerja yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur yang terdiri dari Dinas/Badan/Kantor/Kecamatan, ditambah dengan seluruh UPT Puskesmas dan Kelurahan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Timur serta Unit Kerja/Bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, seluruhnya difasilitasi dalam hal penerapan inovasi daerah.

Implementasi rencana penelitian dan pengembangan, pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan, perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah, kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah jumlahnya terus meningkat selama 5 tahun terakhir. Hal ini menunjukkan minat dan kemampuan berinovasi serta berkembang dalam bidang penelitian dan pengembangan di Kabupaten Kotawaringin Timur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.53 Data Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019-2023**

| Data   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|--|------|------|------|------|------|
| Implementasi rencana penelitian dan pengembangan.                  | 4    | 5    | 9    | 22   | 28   |
| Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan.                     | 4    | 5    | 9    | 22   | 28   |
| Perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. | 4    | 5    | 9    | 22   | 28   |
| Kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah.                       | 4    | 5    | 9    | 22   | 28   |

Sumber : Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah, 2023

## 2.5 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Pada gambaran umum daya saing RPJPD, terdapat 4 bidang daya saing yaitu daya saing ekonomi daerah, daya saing sumber daya manusia, daya saing infrastruktur dan daya saing investasi. Daya saing ekonomi daerah menjelaskan sektor unggulan daerah yang menjadi penopang perekonomian dan sektor lainnya yang potensial untuk dikembangkan yang dilengkapi dengan indikator-indikator seperti PDRB, dan PDRB Per Kapita. Daya saing Sumber Daya Manusia (SDM) menjelaskan kondisi SDM sebagai salah satu faktor penggerak perekonomian daerah yang dilengkapi dengan indikator angka literasi/numerasi, tingkat partisipasi angkatan kerja. Adapun daya saing fasilitas/infrastruktur wilayah menjelaskan kondisi fasilitas/infrastruktur daerah. Adapun daya saing iklim investasi menjelaskan kondisi iklim investasi di daerah dari aspek kemudahan berinvestasi dan situasi politik serta keamanan dan ketertiban daerah yang dilengkapi dengan indikator-indikator seperti Indeks Rasa Aman, Indeks Kemudahan Berusaha, dan Indeks Daya Saing Daerah.

### 2.5.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

#### 2.5.1.1 Pertumbuhan PDRB

Pembangunan ekonomi merupakan rangkaian usaha dengan berbagai alternatif kebijakan yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kondisi perekonomian (taraf hidup masyarakat). Indikator keberhasilan dalam pembangunan ekonomi salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dimaknai sebagai adanya perubahan kondisi dimasyarakat yaitu peningkatan pendapatan masyarakat suatu daerah, memiliki kaitan yang erat



dengan penciptaan lapangan kerja, pengurangan angka kemiskinan dan aktivitas produksi barang dan jasa pada wilayah tertentu.

Parameter untuk mengukur keberhasilan pembangunan dibidang ekonomi adalah pertumbuhan PDRB. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang timbul dari semua unit usaha di dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi suatu wilayah.

PDRB dibagi menjadi dua, yaitu PDRB dihitung atas dasar harga berlaku dan PDRB dihitung atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar berlaku digunakan untuk melihat struktur perekonomian suatu wilayah dalam tiap sektornya serta gambaran perekonomian pada tahun berjalan. Sedangkan PDRB atas dasar konstan digunakan untuk melihat pertumbuhan perekonomian suatu wilayah secara keseluruhan dan juga secara sektoral. Selain digunakan untuk mengetahui pertumbuhan perekonomian suatu wilayah, fungsi lain PDRB dapat berupa sebagai bahan evaluasi pembangunan di masa lalu secara keseluruhan, sebagai *feedback* terhadap perancangan pembangunan yang telah dilaksanakan sebelumnya, sebagai dasar untuk proyeksi perkembangan perekonomian di masa mendatang, untuk mengetahui peranan masing-masing sektor perekonomian dalam suatu wilayah, dan yang terakhir PDRB dapat digunakan sebagai bahan perencanaan investasi untuk masa yang akan datang.

Selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2019-2023), Kabupaten Kotawaringin Timur berkontribusi 16,73 persen terhadap perekonomian provinsi pada Tahun 2023 dan merupakan wilayah dengan PDRB terbesar se-Kalimantan Tengah. Nilai PDRB harga berlaku dan konstan pada setiap sektor produksi di Kabupaten Kotawaringin Timur rata-rata mengalami peningkatan. Nilai PDRB harga berlaku wilayah ini selama periode 2019-2023 mengalami peningkatan dengan rata-rata tumbuh 7,38 persen per tahun. Sektor industri pengolahan memberikan nilai produksi barang dan jasa tertinggi pada Tahun 2018 senilai Rp. 5.637.513 juta dan terus meningkat pada Tahun 2022 menjadi Rp. 7.867.389,6 juta dengan rata-rata pertumbuhan 7,03 persen per tahun. Sedangkan sektor yang



memberikan nilai terendah pada Tahun 2018 adalah sektor jasa perusahaan dengan nilai Rp. 8.439,6 juta dan terus meningkat hingga mencapai 8.730,1 juta pada Tahun 2023 dengan pertumbuhan 1,83 persen per tahun, yang berarti terjadi kenaikan dalam 5 tahun terakhir.



**Tabel 2.54 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (Milyar)**

| Lapangan Usaha   | Tahun   |         |         |         |         |         |         |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|  | 2019    |         | 2020    |         | 2021    |         | 2022*   |         | 2023**  |         |
|  | ADHB    | ADHK    |
| Pertanian, kehutanan, dan perikanan                            | 5.289,3 | 3.948,0 | 5.794,8 | 3.823,0 | 6.646,6 | 3.962,3 | 7.191,5 | 3.988,1 | 7.812,4 | 4.278,4 |
| Pertambangan dan penggalian                                    | 1.071,4 | 1.268,3 | 1.364,9 | 1.476,3 | 1.301,5 | 1.180,8 | 2.294,1 | 2.005,5 | 1.071,8 | 1.018,0 |
| Industri pengolahan  | 5.775,3 | 4.271,3 | 5.840,3 | 4.152,3 | 6.802,2 | 4.265,8 | 7.369,3 | 4.330,4 | 7.867,4 | 4.637,2 |
| Pengadaan listrik dan gas                                      | 15,0    | 10,9    | 17,7    | 12,1    | 19,1    | 12,9    | 21,1    | 13,9    | 23,7    | 15,2    |
| Pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang        | 32,3    | 19,4    | 39,6    | 22,2    | 44,5    | 22,8    | 46,9    | 23,1    | 49,7    | 24,0    |
| Konstruksi   | 2.605,3 | 1.631,1 | 1.918,3 | 1.174,6 | 2.111,9 | 1.244,3 | 2.386,4 | 1.340,9 | 2.618,9 | 1.443,8 |
| Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor  | 5.413,4 | 3.249,7 | 5.117,5 | 3.093,0 | 5.457,0 | 3.190,8 | 6.107,5 | 3.343,1 | 6.949,1 | 3.786,1 |
| Transportasi dan pergudangan                                   | 2.990,2 | 1.778,9 | 3.107,9 | 1.840,3 | 3.193,1 | 1.894,8 | 3.534,0 | 2.001,5 | 3.682,4 | 1.999,5 |
| Penyediaan akomodasi dan makan minum                           | 344,8   | 203,9   | 335,9   | 197,2   | 349,3   | 201,5   | 376,9   | 208,4   | 439,3   | 239,7   |
| Informasi dan komunikasi                                       | 159,4   | 136,5   | 173,0   | 146,7   | 198,9   | 165,4   | 213,1   | 173,4   | 228,1   | 181,5   |
| Jasa keuangan dan asuransi                                     | 970,5   | 644,3   | 1.039,6 | 684,1   | 1.121,4 | 724,0   | 1.210,4 | 743,5   | 1.306,5 | 786,9   |
| <i>Real Estate</i>   | 410,5   | 249,8   | 426,9   | 251,9   | 470,3   | 266,0   | 496,0   | 271,2   | 542,0   | 287,1   |
| Jasa perusahaan  | 8,9     | 5,8     | 6,6     | 4,2     | 7,0     | 4,3     | 7,6     | 4,5     | 8,7     | 5,0     |
| Administrasi pemerintahan, pertanahan dan jaminan sosial wajib | 502,5   | 318,0   | 499,0   | 314,6   | 518,1   | 333,6   | 572,3   | 357,5   | 676,5   | 407,7   |



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2025-2045



| Lapangan Usaha                        | Tahun           |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |
|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                       | 2019            |                 | 2020            |                 | 2021            |                 | 2022*           |                 | 2023**          |                 |
|                                       | ADHB            | ADHK            |
| Jasa pendidikan                       | 777,8           | 447,8           | 851,7           | 488,1           | 898,7           | 501,6           | 945,9           | 508,3           | 1.006,9         | 528,4           |
| Jasa kesehatan dan kegiatan sosial    | 274,9           | 162,6           | 288,4           | 164,9           | 344,2           | 188,9           | 373,4           | 195,3           | 425,0           | 214,4           |
| Jasa lainnya                          | 187,9           | 110,9           | 174,2           | 101,4           | 194,4           | 110,0           | 211,6           | 114,3           | 233,3           | 124,4           |
| <b>Produk Domestik Regional Bruto</b> | <b>26.809,5</b> | <b>18.457,4</b> | <b>26.996,3</b> | <b>17.893,1</b> | <b>29.678,2</b> | <b>18.269,7</b> | <b>33.357,9</b> | <b>19.622,9</b> | <b>34.941,8</b> | <b>19.977,2</b> |

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka Tahun 2024 - Keterangan: \*) Angka sementara\*\*) Angka sangat sementara

Struktur perekonomian suatu daerah dapat menggambarkan kecenderungan tipe ekonomi suatu daerah. Pada dasarnya struktur ekonomi suatu wilayah tidak akan berubah dalam waktu yang relatif singkat. Apalagi pada beberapa wilayah yang sudah mapan, perubahan struktur ekonomi hanya terjadi bila ada suatu perubahan yang drastis dari kegiatan ekonomi, misalnya penanaman modal secara besar-besaran pada suatu sektor tertentu atau perubahan dalam mengimplementasikan teknologi baru.

Struktur PDRB Kotawaringin Timur dari sisi pengeluaran tidak mengalami perubahan selama kurun waktu lima tahun terakhir. Komponen ekspor merupakan komponen yang memiliki kontribusi terbesar terhadap perekonomian Kotawaringin Timur, yaitu 92,16 persen pada Tahun 2023 (lihat gambar di bawah ini). Hal ini cukup beralasan mengingat keberadaan Pelabuhan Sampit dan Pelabuhan Bagendang yang dimiliki Kotawaringin Timur membuat wilayah ini sebagai salah satu pintu gerbang perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, letak wilayah yang strategis dan merupakan pusat perekonomian yang mana kegiatan perdagangan dan perindustrian banyak terpusat di kabupaten ini seperti industri CPO. Hal tersebut menyebabkan ekspor impor memiliki andil besar dalam perekonomian Kabupaten Kotawaringin Timur. Di sisi lain, komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Konsumsi Rumah Tangga memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian wilayah ini, masing-masing mencapai 37,30 persen dan 34,48 persen. Lebih lanjut mengenai Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Kotawaringin Timur Menurut Lapangan Usaha 2018-2022 (Persen) dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

**Tabel 2.55 Distribusi Per Kategori Lapangan Usaha Terhadap PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, 2019-2023 (Persen)**

| Lapangan Usaha |   | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|----------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| A              | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                           | 19,73 | 21,47 | 22,40 | 21,56 | 22,36 |
| B              | Pertambangan dan Penggalian                                   | 4,00  | 5,06  | 4,39  | 6,88  | 3,07  |
| C              | Industri Pengolahan   | 21,47 | 21,63 | 22,92 | 22,09 | 22,52 |
| D              | Pengadaan Listrik dan Gas                                     | 0,06  | 0,07  | 0,06  | 0,06  | 0,07  |
| E              | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang     | 0,12  | 0,15  | 0,15  | 0,14  | 0,14  |
| F              | Konstruksi  | 9,72  | 7,11  | 7,12  | 7,15  | 7,49  |
| G              | Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 20,19 | 18,96 | 18,39 | 18,31 | 19,89 |

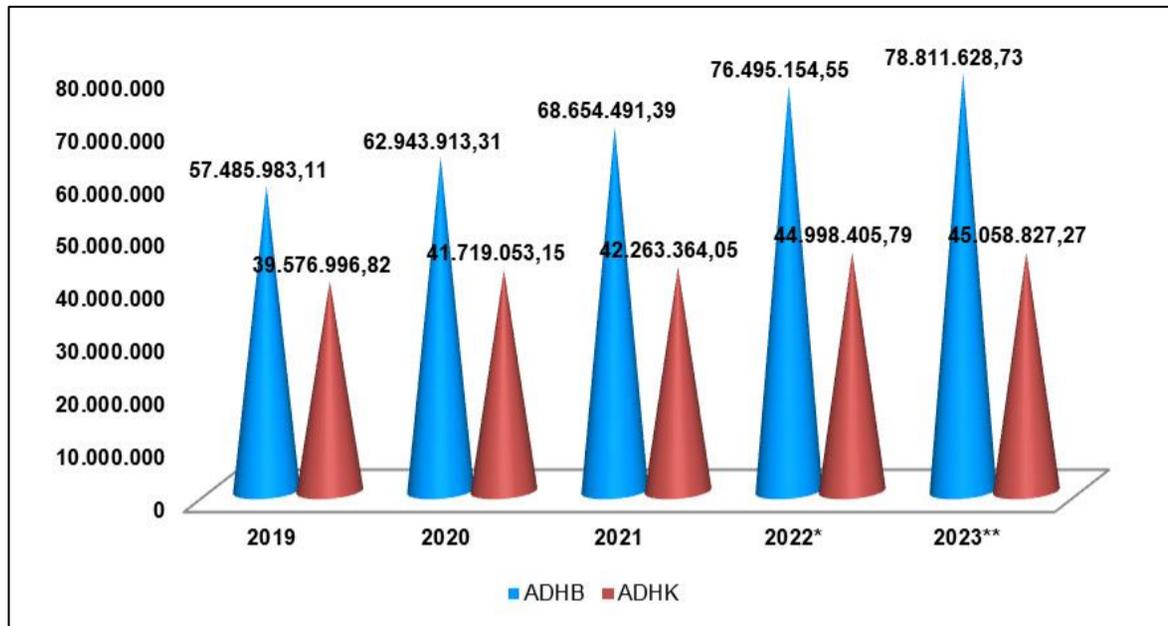
| Lapangan Usaha |   | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
|----------------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| H              | Transportasi dan Pergudangan                                    | 11,15         | 11,15         | 10,76         | 10,59         | 10,54         |
| I              | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                            | 1,29          | 1,24          | 1,18          | 1,13          | 1,26          |
| J              | Informasi dan Komunikasi  | 0,59          | 0,64          | 0,67          | 0,64          | 0,65          |
| K              | Jasa keuangan dan Asuransi                                      | 3,62          | 3,85          | 3,78          | 3,63          | 3,74          |
| L              | Real Estat  | 1,53          | 1,58          | 1,58          | 1,49          | 1,55          |
| M,N            | Jasa Perusahaan   | 0,03          | 0,02          | 0,02          | 0,02          | 0,02          |
| O              | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib | 1,87          | 1,85          | 1,75          | 1,72          | 1,94          |
| P              | Jasa pendidikan   | 2,90          | 3,16          | 3,03          | 2,84          | 2,88          |
| Q              | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                              | 1,03          | 1,07          | 1,16          | 1,12          | 1,22          |
| R,S,<br>T,U    | Jasa Lainnya  | 0,70          | 0,65          | 0,66          | 0,63          | 0,67          |
| <b>PDRB</b>    |   | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> | <b>100,00</b> |

Sumber : Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka 2024

Pada tabel di atas terlihat bahwa pada kategori lapangan usaha pertambangan menjadi penyumbang PDRB terbesar kedua adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kontribusi PDRB terbesar ketiga dalam perekonomian di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah kategori perdagangan sebesar 18,25 persen pada tahun 2022. Hal ini dipengaruhi keberadaan alur pelayaran yang melintasi pelabuhan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

### 2.5.1.2 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita merupakan gambaran dan rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. PDRB per kapita ini bisa diperoleh dari hasil bagi antara PDRB dengan jumlah penduduk dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Data ini dipergunakan sebagai salah satu indikator yang dapat mengukur tingkat kemakmuran/kesejahteraan suatu wilayah/provinsi. Semakin tinggi, PDRB per kapita suatu wilayah maka semakin tinggi pula tingkat kesejahteraan penduduk wilayah tersebut pun demikian sebaliknya.



**Gambar 2.65 Perkembangan PDRB Per Kapita 2019-2023 (Juta Rupiah)**

Sumber : BPS Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024

Selama kurun waktu lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita ADHB dan ADHK Kabupaten Kotawaringin Timur menunjukkan tren meningkat. PDRB per kapita ADHB Tahun 2023 mencapai Rp. 78.811.628,73,- atau meningkat 3,03 persen dibanding tahun sebelumnya. Perkembangan PDRB ADHK juga menunjukkan perkembangan yang signifikan disebabkan oleh adanya perubahan dalam volume produksi barang dan jasa yang dihasilkan serta perubahan tingkat harganya. Hasil penghitungan atas dasar harga konstan tersebut dapat digunakan untuk perencanaan ekonomi, proyeksi dan untuk menilai pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan maupun sektoral. Nilai PDRB per kapita ADHK Tahun 2023 juga mengalami peningkatan sebesar 0,13 persen dari Rp. 44.998.405,79 menjadi Rp. 45.058.827,27,-. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kotawaringin Timur semakin membaik.

## 2.5.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia

### 2.5.2.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan modal utama dalam pembangunan suatu wilayah. Manusia berperan sebagai pelaku sekaligus sasaran dalam proses pembangunan. Pembangunan SDM diperlukan untuk meningkatkan kualitas, baik secara fisik, mental, maupun pengetahuan. Semakin tinggi kualitas SDM dapat berdampak positif dalam proses pembangunan sehingga meningkatkan laju pembangunan di suatu daerah. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

bisa dilihat menggunakan indeks pembangunan manusia (IPM). Pengukuran IPM menggunakan tiga dimensi dasar, meliputi bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Nilai IPM Kalimantan Tengah menunjukkan peningkatan setiap tahunnya, artinya kualitas SDM juga semakin baik. Akan tetapi, nilai ini masih di bawah nilai IPM Nasional. Pada tahun 2022 IPM Kabupaten Kotawaringin Timur 71,67 IPM Kalimantan Tengah mencapai 71,63 sedangkan IPM Nasional sebesar 72,91.

Indikator lainnya untuk melihat pembangunan SDM adalah tingkat ketergantungan penduduk. Melalui angka ketergantungan penduduk, dapat dilihat rasio penduduk non produktif yang ditanggung penduduk usia produktif. Berdasarkan data dari BPS, angka ketergantungan di Kalimantan Tengah mengalami penurunan. Pada tahun 2010, angka ketergantungan sebesar 50,4 menurun menjadi 46,2 pada tahun 2015 dan menurun menjadi 43,3 pada tahun 2020. Diproyeksikan akan tetap menurun hingga mencapai 41,4 ditahun 2025. Penurunan ini mengindikasikan semakin sedikitnya jumlah penduduk usia non produktif dan bertambahnya penduduk usia produktif. Pada tahun 2022, jumlah penduduk usia produktif sebesar 1.936.100 jiwa sedangkan jumlah penduduk non produktif sebesar 804.900. Jumlah produktif yang tinggi menunjukkan bahwa Kalimantan Tengah mengalami bonus demografi. Bonus demografi akan berdampak positif dan optimal apabila dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Sebaliknya, apabila bonus demografi tidak dikelola dengan baik, akan memunculkan masalah kependudukan ke depannya.

#### **2.5.2.2 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)**

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat. Literasi dan numerasi adalah kemampuan dasar yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Literasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, dan memahami teks tertulis, sementara numerasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, dan memanipulasi angka.

Perumusan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat telah disusun oleh pihak P3MB Perpustnas RI sejak tahun 2018 yang melibatkan dua unsur/aspek utama yaitu:

1. Aspek Masyarakat (AM): Jumlah Penduduk Wilayah Setempat sesuai dengan data BPS.
2. Unsur Pembangunan Literasi Masyarakat (UPLM), terdiri dari 7 komponen yaitu: Pemerataan Layanan Perpustakaan, Ketercukupan Koleksi, Ketercukupan Tenaga Perpustakaan, Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari, Jumlah Perpustakaan ber-SNP, Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi, dan Anggota Perpustakaan.

Kajian pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat telah berjalan dalam beberapa tahun sebelumnya, sehingga faktor-faktor pembentuk indeks sudah baku teruji validitasnya. Penghitungan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat akan mengikuti formula yang telah baku dan dipakai sejak tahun 2018 tersebut sebagai berikut:

$$\text{Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat} = \sum_i \frac{UPLM_i}{AM} \times 100$$

Keterangan:

UPLM<sub>i</sub> = variabel komponen pembentuk indeks dari unsur pembangunan literasi masyarakat

AM = jumlah penduduk wilayah setempat.

### **Gambar 2.66 Rumus Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat**

*Sumber : Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Perpustnas Tahun 2020*

Adapun rumus perhitungan yang digunakan pada masing-masing komponen penyusun Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat adalah sebagai berikut:

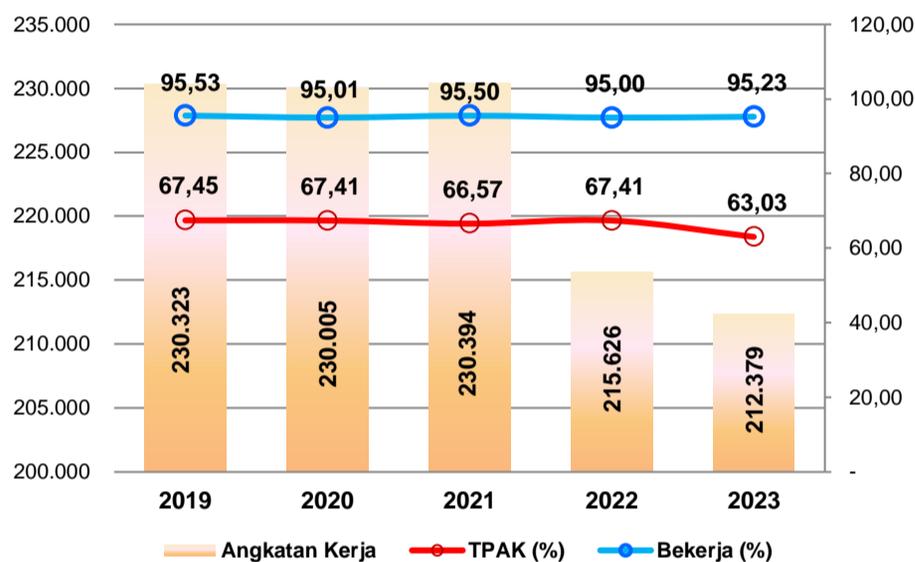
1. Rasio ketersediaan perpustakaan umum, adalah jumlah perpustakaan umum dibagi dengan jumlah penduduk.
2. Rasio ketersediaan perpustakaan sekolah, adalah jumlah perpustakaan sekolah dibagi dengan jumlah penduduk usia sekolah.

3. Rasio ketersediaan perpustakaan perguruan tinggi, adalah jumlah perpustakaan perguruan tinggi dibagi dengan jumlah penduduk usia perguruan tinggi.
4. Rasio Jumlah Koleksi Berdasarkan IFLA/ UNESCO, adalah jumlah koleksi dibagi 2.
5. (dua kali) jumlah, penduduk, dikatakan jumlah koleksi memenuhi jika diperoleh nilai rasio  $\geq 2$  (dua).
6. Kekurangan jumlah koleksi menurut IFLA/UNESCO, adalah 2x (dua kali) jumlah penduduk dikurangi total jumlah koleksi perpustakaan yang ada.
7. Persentase koleksi buku yang dipinjam, adalah rata-rata jumlah buku yang dipinjam dibagi dengan total jumlah koleksi perpustakaan.
8. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan umum, adalah (jumlah penduduk/jumlah tenaga perpustakaan), dengan nilai rasio ketercukupan tenaga perpustakaan umum Standard IFLA tahun 2006, yakni 1 : 2.500 (standar nilai  $< 2.500$ ).
9. Persentase tenaga perpustakaan yang memiliki SK Fungsional, adalah jumlah
10. pustakawan yang mempunyai SK Fungsional dibagi dengan total jumlah tenaga perpustakaan dikali 100%
11. Persentase tenaga perpustakaan yang memiliki kualifikasi bidang ilmu perpustakaan, informasi, dan dokumentasi, adalah jumlah tenaga perpustakaan yang memiliki kualifikasi bidang ilmu perpustakaan, informasi dan dokumentasi dibagi dengan total jumlah tenaga perpustakaan x 100%.
12. Tingkat pemanfaatan perpustakaan, adalah jumlah kunjungan per hari dibagi dengan jumlah penduduk x 100%, tingkat pemanfaatan perpustakaan dikatakan ideal jika nilai rasionya  $\geq 2\%$ .
13. Tingkat keterlibatan terhadap perpustakaan, adalah jumlah anggota dibagi dengan jumlah penduduk x 100%.

### **2.5.2.3 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)**

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah ukuran persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Tinggi rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja sangat dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin dan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan. Dilihat dari sisi usia, TPAK penduduk usia muda biasanya rendah karena pada masa-masa tersebut umumnya mereka banyak yang

masih menjalani proses pendidikan dan merasa belum memiliki kewajiban untuk mencari nafkah. TPAK yang rendah juga akan ditemuipada kelompok penduduk usia kerja wanita. Keadaan ini erat kaitannya dengan sistem nilai yang dianut oleh masyarakat, namun dengan makin tingginya tingkat pendidikan masyarakat, sistem nilai yang dianut, Partisipasi Angkatan Kerja juga akan mulai berubah sehingga angka TPAK ini juga cenderung untuk meningkat. Perkembangan capaian tingkat partisipasi angkatan kerja di Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2019-2023 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 2.67 Perkembangan Ketenagakerjaan di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019-2023**

Sumber : Data BPS Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024

### 2.5.3 Daya Saing Infrastruktur

Ketersediaan infrastruktur yang layak dan memadai merupakan aspek dasar yang diperlukan dalam proses pembangunan. Untuk memperlancar laju dan pergerakan distribusi manusia, barang, dan jasa antar wilayah, antara satu wilayah dengan wilayah lain dihubungkan oleh jalur-jalur transportasi sehingga membentuk pola jaringan transportasi yang diperlukan. Tingkat kompleksitas jaringan yang menghubungkan berbagai wilayah merupakan salah satu indikasi kuatnya arus interaksi. Definisi jalan menurut UU RI No. 38 Tahun 2004 adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukkan bagi lalu lintas, berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Penyediaan jaringan infrastruktur di bidang jalan, jembatan,

dan irigasi mutlak harus dilaksanakan oleh setiap pemerintah daerah guna mendorong percepatan dan kelancaran arus distribusi barang/jasa dari suatu daerah ke daerah lain sehingga meningkatkan dan menggerakkan roda perekonomian daerah.

Salah satu infrastruktur di bidang jalan, yaitu jalan darat memiliki peran dan fungsi sebagai sarana penghubung antar daerah dalam rangka peningkatan kegiatan perekonomian daerah dan memperlancar distribusi perdagangan barang dan jasa angkutan darat, serta orang/penumpang. Mengingat pentingnya jalan darat tersebut, perlu diketahui proporsi panjang jalan baik dalam kondisi baik, sedang, dan rusak sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.56 Kondisi Permukaan Jalan di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019-2023**

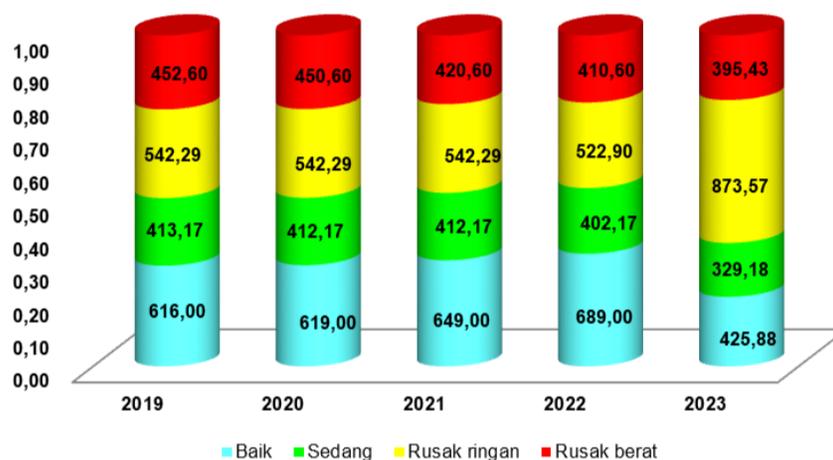
| No. | Kondisi      | 2019         |       | 2020         |       | 2021         |       | 2022         |       | 2023         |       |
|-----|--------------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|--------------|-------|
|     |              | Panjang (Km) | %     |
| 1.  | Baik         | 616,00       | 30,43 | 619,00       | 30,58 | 649,00       | 32,06 | 689,00       | 34,04 | 425,88       | 21,04 |
| 2.  | Sedang       | 413,17       | 20,41 | 412,17       | 20,36 | 412,17       | 20,36 | 402,170      | 19,87 | 329,18       | 16,26 |
| 3.  | Rusak ringan | 542,29       | 26,79 | 542,29       | 26,79 | 542,29       | 26,79 | 522,90       | 25,80 | 873,57       | 43,16 |
| 4.  | Rusak berat  | 452,60       | 22,36 | 450,60       | 22,26 | 420,60       | 20,78 | 410,60       | 20,29 | 395,43       | 19,54 |
|     | Total        | 2.024,06     | 100   | 2.024,06     | 100   | 2.024,06     | 100   | 2.024,06     | 100   | 2.024,06     | 100   |

Sumber: Dinas SDABMBRPRKP Kabupaten Kotawaringin Timur, 2023

Berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 188.45/541/HUK-DPU/2014 tentang Penetapan Status Ruas-ruas Jalan di Desa/Kelurahan/Kecamatan di Kabupaten Kotawaringin Timur, yang mana panjang jaringan jalan semula 1.574,88 Km menjadi 2.024,06 Km, dikarenakan adanya peralihan status dari jalan provinsi menjadi jalan kabupaten. Untuk mengidentifikasi kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan, digunakan proporsi panjang jalan dengan kondisi baik. Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik diperoleh dari panjang jalan dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan baik Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik di Kabupaten Kotawaringin Timur mengalami penurunan selama lima tahun terakhir dengan rata-rata tumbuh 4,46 persen per tahun. Panjang

jalan dalam kondisi baik saat ini mencapai 428,887 Km atau 21,04 persen dari keseluruhan panjang jalan kabupaten. Sementara kondisi jalan rusak berat terus menurun dengan rata-rata penurunan 2,56 persen per tahun hingga mencapai 395,431 Km atau 19,54 persen panjang keseluruhan kabupaten. Keadaan tersebut memerlukan perhatian serius dari pemerintah daerah mengingat kondisi jalan sangat berpengaruh terhadap kelancaran arus barang dan jasa yang mendorong stabilitas dan mengurangi disparitas harga antar daerah, serta peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah akan terus berupaya memperbaiki jalan rusak menggunakan dana APBD Kabupaten dan APBD Provinsi.



**Gambar 2.68 Perkembangan Kondisi Permukaan Jalan Di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019-2023 (Km)**

Sumber: Dinas PUPRRKP Kabupaten Kotawaringin Timur 2024

Sebagian besar jalan di Kabupaten Kotawaringin Timur merupakan jalan tanah dengan panjang 1.389,7 Km atau 68,66 persen dari keseluruhan panjang jalan, diikuti jalan aspal 422,44 Km (20,87 persen), dan jalan pengerasan 211,93 Km atau 10,47 persen. Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dan rusak berat mengalami penurunan masing-masing sebesar 38,19 persen dan 3,69 persen, sedangkan proporsi panjang jalan dalam kondisi rusak ringan justru mengalami peningkatan sebesar 67,06 persen. Diharapkan pemerintah daerah dapat terus meningkatkan pencapaian target untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi sistem konektivitas secara global. Adapun capaian target yang diharapkan adalah meningkatkan kelancaran arus barang, jasa, dan informasi, menurunkan biaya logistik, mengurangi ekonomi biaya tinggi, mewujudkan akses yang merata di seluruh wilayah, dan mewujudkan sinergi antara pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.



**Gambar 2.69 Proporsi Kondisi Jalan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2023**

*Sumber: Dinas SDABMBKPRKP Kabupaten Kotawaringin Timur 2024*

Target dan capaian kinerja bidang pekerjaan umum dan penataan ruang terutama pada konektivitas wilayah dari desa ke kecamatan sudah hampir mencapai 100 persen. Namun masih ada beberapa desa yang masih diupayakan pemerintah daerah untuk terhubung setidaknya dengan kecamatan, yaitu Desa Tumbang Ramei, Desa Kuluk Telawang, Desa Buntut Nusa, Desa Tumbang Saluang dan Desa Ganepo.

#### **2.5.4 Daya Saing Iklim Investasi**

Fokus ini membahas mengenai kondisi iklim investasi yang sesuai di suatu daerah. Dalam berinvestasi, tentu dibutuhkan iklim kondusif yang memberikan rasa aman dan nyaman untuk melangsungkan kegiatan ekonomi. Hal ini turut menjadi pertimbangan bagi para investor selain faktor lain seperti sarana dan prasarana wilayah. Untuk mengukur kondisi iklim investasi yang aman bisa menggunakan data kriminalitas dan demonstrasi yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah. Semakin tinggi angka kriminalitas atau jumlah kejahatan, menunjukkan semakin rendahnya rasa aman yang dirasakan masyarakat termasuk investor di wilayah tersebut.

##### **2.5.4.1 Indeks Daya Saing Daerah**

Nilai Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) diukur melalui 12 pilar yang terbagi 4 komponen yaitu lingkungan pendukung, pasar, sumber daya manusia dan ekosistem inovasi. Kabupaten Kotawaringin Timur

Tahun 2022 menunjukkan tren yang positif. Nilai tertinggi IDSD Kabupaten Kotawaringin Timur yaitu pada tahun 2023 sebesar 3,06 yang termasuk dalam kategori tinggi.

#### 2.5.4.2 Penanggulangan Kriminalitas

Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu aspek strategis yang perlu dijaga untuk mewujudkan stabilitas daerah. Iklim investasi, salah satunya dipengaruhi oleh tingkat keamanan dan ketertiban yang ada. Jumlah kejadian kriminalitas di Kabupaten Kotawaringin Timur selama kurun waktu tiga tahun terakhir cenderung meningkat dengan jumlah kejadian tertinggi terjadi pada Tahun 2023. Sementara itu, jumlah tindak pidana menurut Kepolisian Resort Kotawaringin Timur meningkat 58,66 persen pada tahun 2023 dengan jumlah kasus tertinggi berada di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Kecamatan Seranau. Untuk mengantisipasi peningkatan angka kriminalitas di Kabupaten Kotawaringin Timur, masyarakat melakukan penjagaan keamanan secara spontan dalam bentuk pembatasan dan pengawasan akses ke kawasan-kawasan permukiman, selain kegiatan ronda sebagai wujud penjagaan keamanan komunitas.

**Tabel 2.57 Angka Kriminalitas dan Tindak Pidana di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2021-2023**

| No. | Uraian                               | 2021 | 2022 | 2023 |
|-----|--------------------------------------|------|------|------|
| 1.  | Jumlah kejadian kriminalitas (kasus) | 215  | 239  | 294  |
| 2.  | Jenis kriminalitas                   |      |      |      |
|     | a. Curat                             | 67   | 47   | 63   |
|     | b. Penggelapan                       | 29   | 35   | 48   |
|     | c. Curanmor R2/R4/R6                 | 17   | 16   | 20   |
|     | d. Narkoba                           | 121  | 148  | 190  |
| 3.  | Jumlah demonstrasi (kasus)           | -    | 9    | 6    |
| 4.  | Jumlah lakalantas                    | 90   | 146  | 219  |

Sumber: Polres Kotawaringin Timur 2024

**Tabel 2.58 Jumlah Tindak Pidana Menurut Kepolisian Resort di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2019-2023**

| No.                       | Kepolisian Resort                    | 2019       | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       |
|---------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1                         | Polres Kotim                         | 211        | 241        | 209        | 194        | 401        |
| 2                         | Mentaya Hilir Selatan & Teluk Sampit | 2          | 8          | 9          | 12         | 13         |
| 3                         | Pulau Hanaut                         | 1          | 1          | -          | -          | -          |
| 4                         | Mentawa Baru Ketapang & Seranau      | 20         | 21         | 32         | 27         | 36         |
| 5                         | Mentaya Hilir Utara                  | 4          | 3          | 1          | 1          | -          |
| 6                         | Kota Besi & Telawang                 | 12         | 13         | 15         | 31         | 27         |
| 7                         | Baamang                              | 21         | 25         | 20         | 23         | 25         |
| 8                         | Cempaga                              | 1          | 3          | 4          | 11         | 10         |
| 9                         | Cempaga Hulu                         | 5          | 14         | 13         | 20         | 40         |
| 10                        | Parenggean & Tualan Hulu             | 8          | 3          | 12         | 22         | 19         |
| 11                        | Mentaya Hulu & Bukit Santuai         | 10         | 11         | 15         | 26         | 15         |
| 12                        | Antang Kalang & Telaga Antang        | 9          | 8          | 5          | 20         | 28         |
| <b>Kotawaringin Timur</b> |                                      | <b>304</b> | <b>351</b> | <b>335</b> | <b>387</b> | <b>614</b> |

Sumber: BPS Kabupaten Kotawaringin Timur 2024

#### 2.5.4.3 Kemudahan Perizinan

Pengurusan proses perizinan menjadi salah satu faktor utama dalam iklim investasi di Indonesia secara umum. Dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait perizinan, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mengambil suatu kebijakan membentuk Unit Pelayanan Satu Atap melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Berdasarkan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 31 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur, terdapat 152 jenis izin dan 15 jenis non perizinan yang menjadi kewenangan Dinas PMPTSP Kabupaten Kotawaringin Timur. Sementara itu, sesuai dengan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 63 Tahun 2013 Tentang Mekanisme Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) standar waktu pelayanan perizinan ditentukan sebagai berikut:

**Tabel 2.59 Standar Waktu Pelayanan Perizinan di Kabupaten Kotawaringin Timur**

| No. | Jenis Izin                        | Standar Waktu (dalam hari kerja) |              |
|-----|-----------------------------------|----------------------------------|--------------|
|     |                                   | Baru                             | Perpanjangan |
| 1.  | Tanda Daftar Perusahaan (TDP)     | OSS                              | OSS          |
| 2.  | Tanda Daftar Gudang (TDG)         | OSS                              | OSS          |
| 3.  | Tanda Daftar Industri (TDI)       | OSS                              | OSS          |
| 4.  | Izin Usaha Perdagangan (IUP/SIUP) | OSS                              | OSS          |
| 5.  | Izin Usaha Industri (IUI)         | OSS                              | OSS          |
| 6.  | Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) | OSS                              | OSS          |
| 7.  | Izin Usaha Angkutan (IUA)         | OSS                              | OSS          |
| 8.  | Izin Mendirikan Bangunan (IMB)    | 28 hari                          | 28 hari      |
| 9.  | Izin Reklame                      | 14 Hari                          | 12 Hari      |

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Timur 2024

## 2.6 EVALUASI HASIL RPJPD TAHUN 2005-2025

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur disusun dengan memperhatikan hasil Evaluasi Pencapaian RPJPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025. Secara umum, rata-rata capaian kinerja Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2005-2025 mencapai angka 84,33% atau dengan peringkat kinerja “Tinggi”. Hasil tersebut diperoleh dengan membandingkan antara target capaian pada akhir tahun perencanaan dengan realisasi akhir periode keberhasilan capaian kinerja tersebut antara lain dapat dilihat dari adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, infrastruktur, ekonomi, lingkungan hidup dan tata kelola pemerintahan. Namun masih banyak terdapat beberapa tantangan dan hambatan yang perlu diatasi, seperti ketimpangan sosial, kemiskinan, pengangguran, kualitas sumber daya manusia dan perubahan iklim.

Faktor-faktor pendorong dan penghambat pencapaian kinerja Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2005-2025 dapat dilihat pada Tebel 2.60.



**Tabel 2.60 Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat Pencapaian Kinerja RPJPD  
Kabupaten Kotawaringin Timur**

| <b>Misi</b>  | <b>Sasaran Pokok</b>   | <b>Faktor Pendorong</b>   | <b>Faktor Penghambat</b>  |
|--|--|---|---|
| 1. Terwujudnya Kabupaten Kotawaringin Timur yang Asri dan Lestari. | 1.1 Terjaganya kawasan lindung dan konservasi dengan kelestarian flora dan faunanya sebagai daerah penyangga, penyerapan air, dan fungsi lingkungan hidup lainnya. | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tersedianya Sumber Daya Manusia, Sarana dan Prasarana yang mendukung.</li><li>2. Tersedianya potensi luasan lahan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya</li><li>3. Tersedianya potensi luasan keanekaragaman hayati.</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum optimalnya dalam melaksanakan cek kualitas air, tanah dan udara.</li><li>2. Kurangnya kepedulian para pemangku kepentingan dalam melakukan inventarisasi luasan lahan konservasi SDA hayati dan ekosistemnya.</li><li>3. Kurangnya kepedulian para pemangku kepentingan dalam pengelolaan keanekaragaman hayati.</li></ol> |
|  | 1.2 Terpeliharanya Situs Budaya dan Situs Bersejarah.  | Dukungan Masyarakat dan Dukungan Pemerintah Pusat dalam melestarikan situs budaya bersejarah  | Belum terdata secara komprehensif dan menyeluruh terkait situs budaya bersejarah di Kabupaten Kotawaringin Timur, sehingga menyulitkan untuk pelestarian  |
|  | 1.3 Mendorong Partisipasi Masyarakat dalam Menjaga Kelestarian Budaya Setempat   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian budaya setempat sebagai warisan dan identitas budaya.</li><li>2. Peran aktif dan partisipasi komunitas lokal dalam menjaga kelestarian budaya setempat.</li></ol>                | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perubahan sosial dan modernisasi dapat mengancam kelestarian budaya setempat.</li><li>2. Kurangnya dukungan pemerintah dalam hal kebijakan, sumber daya, atau infrastruktur dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian budaya setempat.</li></ol>   |



| Misi   | Sasaran Pokok   | Faktor Pendorong   | Faktor Penghambat  |
|--|---|--|--|
|  | 1.4 Berkurangnya lahan kritis Kotawaringin Timur menjadi 15%.   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tersedianya sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk inventarisasi data kualitas tutupan lahan.</li><li>2. Tersedianya sumber daya manusia dan peraturan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha.</li></ol>               | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum optimalnya data kualitas tutupan lahan.</li><li>2. Kurangnya ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ kota.</li></ol> |
|  | 1.5 Membaiknya pengelolaan dan pendayagunaan Sumber Daya Alam.  | Adanya regulasi dan kebijakan yang jelas dan diterapkan secara konsisten dapat memberikan dorongan bagi individu dan organisasi untuk memperbaiki pengelolaan sumber daya alam. Kebijakan yang mendorong penggunaan yang berkelanjutan dan mengatur eksploitasi yang berlebihan dapat mendorong perubahan positif. | Kurangnya dana dan sumber daya yang memadai dapat menjadi penghambat dalam meningkatkan pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya alam.  |
|  | 1.6 Meningkatnya kesadaran dan perilaku masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup.                        | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Tersedianya sumber daya manusia, sarana dan prasarana guna memilah sampah dari rumah.</li><li>2. Tersedianya sumber daya manusia, sarana dan prasarana guna pelaksanaan pelestarian lingkungan hidup.</li></ol>   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam memilah sampah dari rumah.</li><li>2. Kurang aktifnya peran serta masyarakat dalam mengikuti kegiatan dalam pelestarian lingkungan hidup.</li></ol>  |
| 2. Meningkatnya Kualitas Sumber Daya Manusia | 2.1 Penduduk yang sarjana S1 ataupun D4 lebih kurang 20% dari jumlah penduduk di Kabupaten Kotawaringin Timur | Dukungan terhadap pengembangan pendidikan tinggi dalam pemenuhan sumber daya manusia yang berkualitas  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kompetensi dan relevansi serta daya saing lulusan satuan pendidikan masih perlu ditingkatkan.</li></ol>   |



| Misi | Sasaran Pokok   | Faktor Pendorong  | Faktor Penghambat  |
|------|---|---|--|
|      | 2.2 Jumlah penduduk yang terampil bekerja di sektor industri 40% dari jumlah penduduk yang ada. | Perkembangan teknologi dalam industri 4.0, seperti kecerdasan buatan, <i>Internet of Things</i> (IoT), dan <i>automasi</i> , menciptakan permintaan yang lebih besar untuk tenaga kerja yang terampil di sektor industri. | 2. Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana Pendidikan.<br>Kesenjangan antara pendidikan yang tersedia dan keterampilan yang dibutuhkan di sektor industri dapat menjadi penghambat dalam mencapai target jumlah penduduk yang terampil bekerja di sektor industri. |
|      | 2.3 Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.  | Kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan kualitas hidup yang baik dapat menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan derajat kesehatan secara keseluruhan.  | Kurangnya fasilitas kesehatan, kurangnya tenaga medis yang berkualitas, dan ketidakmerataan distribusi layanan kesehatan dapat menghambat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang memadai   |
|      | 3. Berkembangnya Industri Pengolahan  | 3.1 Tumbuhnya industri kecil di tingkat kecamatan baik industri hilir maupun industri hulu.   | Infrastruktur Jalan dan Perhubungan yang telah terintegrasi sehingga mudahnya dalam perkembangan sektor Industri   |



| Misi | Sasaran Pokok   | Faktor Pendorong   | Faktor Penghambat   |
|------|---|--|---|
|      | 3.2 Tumbuhnya industri sedang dan menengah, baik industri hilir maupun industri hulu di kawasan industri. | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pengembangan teknologi baru dan inovasi dapat mendorong pertumbuhan industri sedang dan menengah.</li><li>2. Perkembangan teknologi dapat memungkinkan efisiensi produksi yang lebih tinggi, peningkatan kualitas produk, dan pengembangan produk baru.</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kesulitan dalam mendapatkan modal usaha dan pembiayaan untuk investasi dapat menghambat pertumbuhan industri di kawasan industri.</li><li>2. Kurangnya tenaga kerja terampil dapat mempengaruhi produktivitas dan kualitas produksi.</li></ol> |
|      | 3.3 Tumbuhnya sektor-sektor jasa dan perdagangan seiring dengan sektor industri                           | Kebijakan dan regulasi yang mendukung pertumbuhan sektor jasa dan perdagangan, seperti kemudahan berusaha, deregulasi, insentif fiskal, dan perlindungan hukum, dapat menjadi faktor pendorong bagi perkembangan sektor tersebut.  | Ketidakpastian ekonomi dapat menghambat pertumbuhan sektor jasa dan perdagangan. Ketika kondisi ekonomi tidak stabil, konsumen dan perusahaan cenderung mengurangi pengeluaran untuk layanan dan perdagangan.   |
|      | 3.4 Kontribusi sektor industri terhadap PDRB menjadi sekitar 35%.   | Investasi yang signifikan dalam sektor industri, baik oleh pemerintah maupun sektor swasta, dapat mendorong pertumbuhan dan peningkatan kontribusi sektor tersebut terhadap PDRB.  | Keterbatasan sumber daya, seperti bahan baku, energi, dan infrastruktur yang memadai, dapat menghambat pertumbuhan sektor industri dan kontribusinya terhadap PDRB.   |
|      | 3.5 Berkembangnya sektor perhubungan dan telekomunikasi   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perkembangan gaya hidup dan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks mendorong permintaan akan layanan perhubungan dan telekomunikasi yang lebih baik.</li><li>2. Permintaan akan konektivitas yang cepat dan luas serta</li></ol>                              | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Keterbatasan aksesibilitas fisik dan konektivitas dapat menghambat pertumbuhan sektor perhubungan dan telekomunikasi.</li><li>2. Daerah yang sulit dijangkau atau kurangnya infrastruktur jaringan dapat menghambat</li></ol>                  |



| Misi                              | Sasaran Pokok   | Faktor Pendorong   | Faktor Penghambat  |
|-----------------------------------|---|--|--|
|                                   |   | layanan transportasi yang efisien menjadi faktor pendorong untuk berkembangnya sektor ini        | penyediaan layanan yang efektif.   |
|                                   | 3.6 Berkembangnya sektor pariwisata.  | Tingginya kebutuhan berwisata oleh masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur dan Kabupaten Sekitar | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Organisasi perangkat daerah yang membidangi tidak melakukan pendataan.</li><li>2. Organisasi perangkat daerah yang membidangi tidak melakukan pengembangan pariwisata baru.</li><li>3. Belum dilakukan pengkajian terkait pengembangan sektor pariwisata.</li></ol> |
| 4. Berkembangnya Sektor Pertanian | 4.1 Ditetapkannya kawasan budidaya pertanian rakyat yang potensial sehingga tidak dimanfaatkan untuk perkebunan besar.        | Telah mempunyai Perda yang mengatur.   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum tersosialisasi dengan baik dan masih tingginya kecenderungan untuk berpindah dari pertanian ke perkebunan sawit yang memiliki nilai ekonomis lebih baik.</li><li>2. Keterbatasan anggaran.</li></ol>  |
|                                   | 4.2 Terwujudnya Pertanian berbasis agribisnis untuk meningkatkan kesejahteraan para petani dan meningkatkan ketahanan pangan. | Sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mendukung untuk pengembangan.                      | Keterbatasan anggaran.   |
|                                   | 4.3 Pengembangan sumber daya manusia pertanian melalui penyuluhan dan pendidikan formal.                                      | Sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mendukung untuk pengembangan                       | Keterbatasan anggaran.   |



| Misi | Sasaran Pokok   | Faktor Pendorong   | Faktor Penghambat   |
|------|---|--|---|
|      | 4.4 Terjalannya kerja sama dengan berbagai institusi baik Perguruan Tinggi ataupun institusi lain untuk pengembangan teknologi pertanian yang sesuai dengan Kabupaten Kotawaringin Timur. | Sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mendukung untuk pengembangan   | Keterbatasan anggaran.  |
|      | 4.5 Menjalankan mekanisasi pertanian dan kemudahan dalam penyediaan sarana produksi.  | Sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mendukung untuk pengembangan.  | Keterbatasan anggaran.  |
|      | 4.6 Mengembangkan sektor perikanan dan kelautan di Kabupaten Kotawaringin Timur.  | Sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mendukung untuk pengembangan.  | Keterbatasan anggaran.  |
|      | 4.7 Mengembangkan agroindustri yang mendukung pertanian dan perkebunan rakyat   | Sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mendukung untuk pengembangan   | Keterbatasan anggaran.  |
|      | 4.8 Pengembangan komoditas unggulan daerah dan pelestarian plasma nutfah  | Sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mendukung untuk pengembangan   | Keterbatasan anggaran.  |
|      | 4.9 Program transmigrasi yang mendukung pengembangan pertanian di Kabupaten Kotawaringin Timur  | Program transmigrasi dapat mendukung diversifikasi pertanian di Kabupaten Kotawaringin Timur dengan memperkenalkan jenis tanaman baru atau teknik pertanian modern | Keterbatasan sumber daya, seperti lahan yang terbatas, air yang terbatas, atau sumber daya manusia yang kurang. Keterbatasan ini dapat mempengaruhi keberhasilan dan keberlanjutan program transmigrasi |



| Misi  | Sasaran Pokok  | Faktor Pendorong   | Faktor Penghambat   |
|---|--|--|---|
|   |  |  | serta pengembangan pertanian di Kabupaten Kotawaringin Timur.   |
| 5. Terwujudnya Kondisi Sosial Politik Yang Demokratis, Saling Tegang Rasa, Persatuan, dan Aman. | 5.1 Toleransi umat beragama yang tinggi, saling menghormati dan dapat hidup berdampingan.                                  | Komitmen bersama untuk saling toleransi dan tenggang rasa serta mempererat tali silaturahmi antar umat beragama.   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidakharmonisan hubungan antar umat beragama atau penganut kepercayaan.</li><li>2. Rawan munculnya konflik dan kegiatan terorisme atau kekerasan atas nama agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan yang salah/keliru.</li></ol> |
|   | 5.2 Terciptanya suasana aman baik di perkotaan ataupun di perdesan. Dikedepankannya musyawarah dalam penyelesaian masalah. | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Toleransi terhadap keberagaman sosial budaya.</li><li>2. Meningkatkan aktivitas kegiatan kemasyarakatan.</li></ol>  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menurunnya kebanggaan terhadap Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional.</li><li>2. Merosotnya rasa, paham, dan semangat kebangsaan dikalangan masyarakat.</li></ol>   |
|   | 5.3 Terlaksananya Pemilihan umum, pemilihan kepala daerah, dan kepala desa secara demokratis.                              | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perencanaan pelaksanaan pemilu yang efektif dan efisien</li><li>2. Sosialisasi peraturan pemilu secara intensif.</li></ol>  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pergeseran logistik pemilu.</li><li>2. Pelanggaran <i>Money Politic</i>.</li><li>3. Kondisi geografis.</li><li>4. Integritas penyelenggara.</li></ol>  |
|   | 5.4 Meningkatkan kuantitas dan kualitas profesionalisme polisi pamong praja.   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Komitmen pemimpin daerah cukup tinggi dalam menjaga ketentraman, dan ketertiban di lingkungan masyarakat dan daerah.</li><li>2. Komitmen anggota dalam pelaksanaan tugas.</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Terbatasnya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia anggota Satuan Polisi Pamong Praja.</li><li>2. Minimnya Pemahaman Perda dan Perkada oleh anggota Satpol PP.</li></ol>   |



| Misi  | Sasaran Pokok   | Faktor Pendorong   | Faktor Penghambat  |
|---|---|--|--|
|   |   | 3. Adanya kebersamaan dalam satu komando dalam pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan Trantibummas.   |  |
| 6. Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Fasilitas Sosial | 6.1 Meningkatkan kelas rumah sakit umum daerah menjadi kelas B dan membuka peluang berdirinya rumah sakit swasta di ibukota Kabupaten dan rumah sakit kelas D di ibukota kecamatan dan tumbuhnya puskesmas pembantu di tingkat lingkungan | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Diluncurkannya Program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur sehingga setiap sarana kesehatan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa membayar biaya pengobatan.</li><li>2. Untuk mencegah rentan terjadinya beberapa kasus penyakit menular, misalnya demam berdarah diadakan program CLTS (<i>Comunity Lead Total Sanitarian</i>) keseluruh Desa dan Kelurahan yang rawan demam berdarah.</li><li>3. Diadakannya kegiatan pengobatan khusus daerah terpencil.</li><li>4. Pelayanan gratis pemeriksaan ibu hamil dan persalinan melalui JAMPERSAL yang dibiayai oleh Pemerintah Daerah.</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Luasnya wilayah Kalimantan Tengah yang dihuni oleh penduduk yang relatif sedikit dan terpencar-pencar serta akses yang sulit dijangkau menyebabkan pelayanan kesehatan menjadi sulit.</li><li>2. Masih tingginya jumlah balita yang kurang gizi.</li><li>3. Sarana kesehatan belum mencukupi dan kondisinya yg sebagian kurang layak.</li><li>4. Tenaga kesehatan jumlah kurang dan tidak merata.</li><li>5. Masih tingginya angka kesakitan, kematian bayi dan ibu melahirkan.</li><li>6. Masih tingginya ancaman penyakit menular seperti TB Paru, Demam berdarah dan HIV/AIDS.</li></ol> |



| Misi | Sasaran Pokok  | Faktor Pendorong   | Faktor Penghambat  |
|------|--|--|--|
|      | 6.2 Bertambahnya tenaga media baik secara rasio pelayanan satu dokter melayani 500 penduduk dan terpenuhi jumlah dokter spesialis. | 1. Penambahan tenaga dokter umum dan dokter spesialis terutama untuk RSUD Parenggean dan RSUD Samuda.  | 1. Masih kekurangan dokter umum, apabila dilihat dari jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur saat ini.<br>2. Kekurangan dokter spesialis, karena pada saat ini untuk RSUD Parenggean dan RSUD Samuda belum mempunyai dokter spesialis.   |
|      | 6.3 Bertambahnya sekolah menengah umum dan sekolah kejuruan yang menyiapkan siswanya untuk bekerja.                                | 1. Pemerataan dan perluasan akses pelayanan pendidikan melalui penyediaan sarana dan prasarana hingga mencapai ke pelosok terutama untuk pendidikan dasar dan menengah untuk mencapai target Wajib Belajar Sembilan Tahun.<br>2. Penyebaran tenaga pendidik sampai pelosok.<br>3. Peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan melalui pembinaan dan pengembangan kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan melalui pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi. | 1. Minimnya peningkatan kualitas wajib belajar pendidikan dua belas tahun yang merata.<br>2. Minimnya peningkatan Akses, kualitas dan relevansi Pendidikan.<br>3. Minimnya peningkatan profesionalisme dan mutu tenaga pendidik serta penyebaran tenaga guru secara merata.<br>4. Minimnya peningkatan pelaksanaan program pendidikan gratis.<br>5. Minimnya peningkatan kualitas dan kuantitas sarana prasarana Pendidikan. |
|      | 6.4 Bertambahnya jumlah guru baik di tingkat SD, SMP atau SMA  |  |  |



| Misi   | Sasaran Pokok   | Faktor Pendorong  | Faktor Penghambat   |
|--|---|---|---|
|  | 6.5 Tercapainya wajib belajar sembilan tahun untuk anak-anak di Kabupaten Kotawaringin Timur.   |   | 6. Minimnya peningkatan efisiensi dan efektifitas manajemen pelayanan Pendidikan.<br>7. Belum optimal penguatan tata kelola Pendidikan.<br>8. Penurunan jumlah buta aksara belum signifikan.<br>9. Dukungan terhadap pengembangan pendidikan tinggi dalam pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas belum optimal. |
|  | 6.6 Berdirinya universitas di Kotawaringin Timur  | 1. Masyarakat Kotawaringin Timur dapat mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas.<br>2. Universitas akan menyediakan program-program pendidikan yang relevan dengan kebutuhan lokal, seperti program pertanian, kehutanan, atau pariwisata, sehingga masyarakat dapat memiliki keahlian yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah. | Pendirian universitas membutuhkan sumber daya yang cukup banyak dan besar, baik dalam hal dana, tenaga pengajar, infrastruktur, dan fasilitas pendukung lainnya.  |
| 7. Terwujudnya Masyarakat Beriman dan Bertaqwa | 7.1 Dilaksanakannya pendidikan agama sejak dini melalui sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. | Pendidikan agama sejak dini dapat membantu dalam pembentukan karakter dan moral yang kuat pada anak-anak.   | Pendekatan yang tidak memadai dalam pengajaran agama atau kurikulum yang kurang terstruktur dapat menjadi penghambat dalam efektivitas pendidikan agama sejak dini.   |



| Misi  | Sasaran Pokok  | Faktor Pendorong  | Faktor Penghambat  |
|---|--|---|--|
|   | 7.2 Terwujudnya kehidupan yang agamis  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kesadaran dan keyakinan individu terhadap pentingnya kehidupan yang agamis.</li><li>2. Pendidikan agama yang berkualitas dan komprehensif dapat menjadi faktor pendorong dalam menciptakan kehidupan yang agamis.</li></ol>  | Tekanan dari lingkungan yang tidak menghargai nilai-nilai agama, pergaulan yang tidak sehat, atau tuntutan yang bertentangan dengan ajaran agama dapat membuat individu sulit untuk menjalani kehidupan yang agamis. |
|   | 7.3 Berkembangnya peran masyarakat dalam pendidikan agama  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Masyarakat yang menyadari pentingnya pendidikan agama akan aktif terlibat dan mendukung upaya pendidikan agama di lingkungan mereka</li><li>2. Peran orang tua dan keluarga dalam pendidikan agama sangat penting.</li></ol> | Masyarakat tidak menganggap pendidikan agama sebagai prioritas atau kurang menyadari manfaatnya, mereka mungkin tidak aktif terlibat dalam pendidikan agama.   |
| 8. Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Sarana Prasarana Ekonomi. | 8.1 Terdapatnya jaringan jalan darat sebagai jalan kolektor yang menghubungkan tiap-tiap ibukota kecamatan dengan ibukota Kabupaten. | Koordinasi antar stakeholder yang berkaitan dengan Angkutan, Lalu Lintas dan Infrastruktur Jalan serta meningkatkan fungsi pengawasan dalam penegakan sesuai aturan yang berlaku.   | Kurang optimalnya penanganan jalan dan jembatan karena tidak sebandingnya cakupan obyek yang ditangani dengan ketersediaan dana.   |
|   | 8.2 Terdapatnya jalan lokal yang menghubungkan antar desa dan dengan ibukota kecamatan.  | Meningkatkan pembangunan serta Rehabilitasi dan pemeliharaan jembatan untuk membuka akses jalan ke pusat-pusat kegiatan dan daerah potensial terisolir.   | Kurang optimalnya penanganan jalan dan jembatan karena tidak sebandingnya cakupan obyek yang ditangani dengan ketersediaan dana.   |



| Misi | Sasaran Pokok   | Faktor Pendorong  | Faktor Penghambat   |
|------|---|---|---|
|      | 8.3 Membaiknya kondisi jalan diseluruh Kabupaten sehingga jumlah jalan yang rusak hanya 10%             | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Komitmen yang kuat dari pemerintah dalam memprioritaskan perbaikan kondisi jalan di seluruh wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur.</li><li>2. Perencanaan yang matang dalam pemeliharaan dan perbaikan jalan.</li></ol>   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Jumlah jalan yang rusak dapat melampaui anggaran yang tersedia, sehingga memerlukan pengalokasian anggaran yang lebih besar atau pencarian sumber pendanaan tambahan.</li><li>2. Kondisi geografis yang sulit.</li></ol> |
|      | 8.4 Terwujudnya kota Sampit sebagai kota transit bagi Kabupaten tetangga.                               | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Infrastruktur yang memadai memungkinkan kelancaran mobilitas orang dan barang antara Kota Sampit dan Kabupaten tetangga.</li><li>2. Kota Sampit terletak secara strategis di antara Kabupaten tetangga, baik secara geografis maupun dalam hal konektivitas transportasi, maka hal ini dapat mendorong Kota Sampit untuk menjadi kota transit.</li></ol> | Kurangnya jalan raya yang baik, kurangnya moda transportasi publik yang handal, atau kurangnya fasilitas pelabuhan atau bandara.  |
|      | 8.5 Mengembangkan fasilitas pasar dan kemudahan pemasaran yang mendorong kelancaran ekonomi masyarakat. | Merupakan salah satu penyumbang terbesar bagi Perekonomian (PDRB) Kabupaten Kotawaringin Timur.   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Keterbatasan anggaran.</li><li>2. Kurangnya kajian terkait kesesuaian lokasi pasar.</li></ol>  |
|      | 8.6 Menyediakan akses kredit modal bagi masyarakat dan memberantas praktik rentenir                     | Pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang memudahkan masyarakat untuk memperoleh kredit modal dengan suku bunga yang terjangkau dan persyaratan yang lebih mudah dipenuhi.  | Kurangnya aksesibilitas fisik atau kurangnya jaringan lembaga keuangan di daerah tertentu dapat menjadi penghambat bagi masyarakat untuk memperoleh kredit modal.   |



| Misi   | Sasaran Pokok  | Faktor Pendorong   | Faktor Penghambat   |
|--|--|--|---|
|  | 8.7 Difungsikannya Bandara Udara H. Asan di Kecamatan Baamang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. | Kebutuhan akan transportasi udara yang efisien dan cepat untuk kepentingan bisnis, pariwisata, atau mobilitas masyarakat secara umum dapat mendorong pemanfaatan bandara tersebut. | Pengembangan bandara membutuhkan investasi yang besar, termasuk pembangunan infrastruktur, fasilitas, dan peralatan pendukung. Jika anggaran terbatas, pengembangan bandara dapat tertunda atau tidak sepenuhnya terealisasi. |
| 9. Terwujudnya Peningkatan Pelayanan Sarana Dan Prasarana Permukiman | 9.1 Terjangkaunya pelayanan air bersih yang memiliki kualitas baik sampai ke perdesaan             | Kelembagaan dan Peraturan Perundangan, Pengembangan SPAM. Partisipasi masyarakat & dunia usaha.  | 1. Terbatasnya pendanaan.<br>2. Menurunnya kuantitas air baku.<br>3. Masyarakat kurang mampu.   |
|  | 9.2 Terjangkaunya pelayanan pengelolaan sampah ke setiap lingkungan hunian.                        | 1. Pemerataan dalam pelayanan persampahan.<br>2. Adanya Perda Persampahan yang baru.   | 1. Pelaksanaan pelayanan persampahan masih dilaksanakan dalam kota Sampit saja.<br>2. Belum ada Perda Persampahan yang baru, sedangkan Perda Persampahan yang ada sudah tidak relevan (Tahun 2007).                           |
|  | 9.3 Tersedianya instalasi pengolahan limbah di Kabupaten Kotawaringin Timur.                       | 1. Tersedianya lahan yang cukup untuk membuat <i>landfill</i> .<br>2. Tersedianya depo sampah di beberapa titik.<br>3. Tersedianya sarana pendukung lainnya.                       | 1. Kurangnya <i>landfill</i> baru.<br>2. Sarana dan prasarana kebersihan yang masih kurang.<br>3. Alat berat di TPA banyak yang rusak.  |
|  | 9.4 Terdapatnya drainase di setiap jalan sehingga tidak terjadi genangan air.                      | Partisipasi masyarakat untuk ikut membersihkan saluran drainase.   | Curah hujan yang cukup tinggi, Masyarakat tidak mau membersihkan saluran, Membuang sampah sembarangan.  |
|  | 9.5 Peningkatan pelayanan penyediaan listrik sampai ke   | 1. Dukungan Masyarakat Desa.   | 1. Kelistrikan sudah bukan kewenangan Kabupaten dan   |



| Misi  | Sasaran Pokok  | Faktor Pendorong   | Faktor Penghambat  |
|---|--|--|--|
|   | desa-desa yang mampu melayani selama 24 jam.                                       | 2. Kepala Daerah, dan Pemerintah Pusat.  | merupakan kewenangan Pusat/BUMN (PT. PLN).<br>2. Aksesibilitas, Konektivitas hingga Medan antar desa yang masih rendah menyebabkan terhambatnya untuk pelaksanaan,<br>3. Jalur Listrik sebagian besar melalui wilayah HGU Perkebunan Sawit dan diperlukan komunikasi tingkat lanjut.   |
| 10. Melakukan Pencegahan dan Penanganan Bencana | 10.1 Menurunnya tingkat resiko bencana alam kebakaran lahan, hutan, dan permukiman | 1. Adanya peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional yang telah mengatur tentang pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan bencana.<br>2. Dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program kegiatan.<br>3. Keberhasilan evakuasi bencana didukung adanya alat pelindung diri untuk Tim Reaksi Cepat yang melakukan asesment dan evakuasi korban.<br>4. Kesadaran masyarakat akan ancaman bencana semakin tinggi sehingga menuntut mereka untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menurunkan resiko bencana. | 1. Masih minimnya sarana dan prasarana aparatur untuk menunjang penyelenggaraan penanggulangan bencana.<br>2. Keterbatasan pengetahuan dan keterampilan aparatur dan masyarakat dalam penanggulangan bencana.<br>3. Masih minimnya pemahaman masyarakat terhadap tugas dan fungsi BPBD.<br>4. Koordinasi antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan bencana masih belum optimal.<br>5. Minimnya informasi tentang daerah rawan bencana dikarenakan belum adanya profil dan peta daerah rawan |



| Misi   | Sasaran Pokok  | Faktor Pendorong   | Faktor Penghambat   |
|--|--|--|---|
|  |  | 5. Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana melalui program pemerintah daerah dan pusat. | bencana sebagai acuan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.<br>6. Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komperhensif.<br>7. Keterbatasan jaringan informasi dan komunikasi yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat.<br>8. Keterbatasan alokasi pendanaan bagi rehabilitasi dan rekonstruksi yang bersumber dari pemerintah daerah |
| 11. Terwujudnya profesionalisme pegawai di lingkungan Pemerintah | 11.1 Meningkatnya Kemampuan pegawai negeri dalam pelayanan dan pelaksanaan tugas | Adanya komitmen pimpinan untuk mengembangkan kualitas sumber daya aparatur                             | 1. Terbatasnya alokasi kuota pengembangan kompetensi bagi ASN setiap tahunnya<br>2. Belum tersedianya data kebutuhan pengembangan kompetensi berdasarkan AKD  |



| Misi  | Sasaran Pokok  | Faktor Pendorong   | Faktor Penghambat  |
|---|--|--|--|
| Kabupaten Kotawaringin Timur.   | 11.2 Meningkatnya kapasitas pegawai negeri sipil dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.                              | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Keterlibatan semua stakeholders dalam tiap tahapan perencanaan</li><li>2. Aktualisasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik diantaranya SIPD, yang mulai terintegrasi dalam hal proses maupun data.</li></ol>   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi perencanaan pembangunan yang valid dan mutakhir.</li><li>2. Perencanaan pembangunan belum sepenuhnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya.</li></ol>  |
|   | 11.3 Meningkatnya kemampuan sumberdaya pegawai negeri dalam persaingan global.   | Adanya komitmen pimpinan untuk mengembangkan kualitas sumber daya aparatur.  | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Terbatasnya alokasi kuota pengembangan kompetensi bagi ASN setiap tahunnya.</li><li>2. Belum tersedianya data kebutuhan pengembangan kompetensi berdasarkan AKD.</li></ol>  |
| 12. Terwujudnya Efektifitas dan Efisiensi Pemerintahan di Kabupaten Kotawaringin Timur. | 12.1 Peningkatan anggaran pembangunan baik melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ataupun bagian dana perimbangan. | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Investasi dan bisnis yang berkembang akan menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan perusahaan, dan pada gilirannya meningkatkan kontribusi pajak dan retribusi terhadap pendapatan daerah.</li><li>2. Peningkatan dana perimbangan dari pemerintah pusat dapat membantu meningkatkan anggaran pembangunan daerah.</li></ol> | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Keterbatasan sumber daya, baik dalam hal sumber daya alam yang terbatas atau keterbatasan ekonomi.</li><li>2. Perubahan kebijakan yang tidak konsisten atau ketidakpastian dalam regulasi dapat mempengaruhi aktivitas bisnis dan investasi, sehingga berdampak pada potensi pendapatan daerah.</li></ol> |



| Misi | Sasaran Pokok  | Faktor Pendorong   | Faktor Penghambat  |
|------|--|--|--|
|      | 12.2 Terlaksananya anggaran berbasis kinerja yang menerapkan prinsip efisien, efektif, dan ekonomis.   | Prinsip efisien, efektif, dan ekonomis dalam penggunaan anggaran akan memastikan bahwa setiap pengeluaran memiliki tujuan yang jelas dan hasil yang terukur. | Penerapan anggaran berbasis kinerja yang efisien, efektif, dan ekonomis memerlukan pemahaman dan keterampilan yang memadai dari sumber daya manusia yang terlibat.   |
|      | 12.3 Peningkatkan koordinasi pembangunan dengan Kabupaten lain dan Provinsi Kalimantan Tengah untuk efektifitas pembangunan.                 | Menjalinkan komunikasi kerjasama antar daerah dan kepada pihak ketiga.   | Masih banyaknya sektor potensial di Kabupaten Kotawaringin Timur yang belum dikerjasamakan baik kepada antar daerah maupun kepada pihak ketiga.  |
|      | 12.4 Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam investasi melalui promosi dan pengembangan sarana prasarana serta kemudahan untuk investasi. | Pemerintah daerah mengidentifikasi potensi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di wilayahnya.  | Regulasi dan kebijakan yang berkaitan dengan investasi tidak konsisten atau tidak jelas, berdampak kepada investor enggan untuk berinvestasi, sehingga menghambat peran pemerintah daerah dalam menarik investasi. |

Sumber: BAPPEDALITBANG Provinsi Kalimantan Tengah, Rancangan Awal RPJP Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023

## 2.7 TREN DEMOGRAFI DAN KEBUTUHAN SARANA PRASARANA PELAYANAN PUBLIK

### 2.7.1 Proyeksi Penduduk

Perhitungan proyeksi penduduk Kabupaten Kalimantan Tengah merupakan gambaran perkiraan jumlah penduduk yang dilakukan oleh BPS Kabupaten Kotawaringin Timur. Data proyeksi ini merupakan informasi yang sangat dibutuhkan untuk memproyeksikan kebutuhan sarana dan prasarana dasar dan sarana pelayanan masyarakat. Berdasarkan proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Timur, diketahui bahwa pada tahun 2023 terdapat 443.359 Jiwa penduduk yang tinggal di Kabupaten Kotawaringin Timur, meningkat sebanyak 106.158 pada tahun 2045 menjadi 549.517 jiwa. Gambaran komposisi jumlah penduduk tahun 2025-2045 sebagaimana tabel berikut.

**Tabel 2.61 Proyeksi Jumlah Penduduk di Kabupaten Kotawaringin Timur**

| Jenis Kelamin | Penduduk Tahun 2023 | Proyeksi Penduduk (Jiwa) |                |                |                |                |
|---------------|---------------------|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|               |                     | 2025                     | 2029           | 2034           | 2039           | 2045           |
| Laki-laki     | 229.220             | 236.486                  | 247.885        | 257.527        | 266.155        | 274.166        |
| Perempuan     | 214.139             | 223.482                  | 238.388        | 251.618        | 263.847        | 275.351        |
| <b>Jumlah</b> | <b>443.359</b>      | <b>459.968</b>           | <b>486.272</b> | <b>509.146</b> | <b>530.002</b> | <b>549.517</b> |
| <b>Rasio</b>  | <b>107,04</b>       | <b>105,82</b>            | <b>103,98</b>  | <b>102,35</b>  | <b>100,87</b>  | <b>99,57</b>   |

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2024

Tingkat kepadatan penduduk di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur di tahun 2023 mencapai 37,63 Jiwa per Km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk tingkat kecamatan Kabupaten Kotawaringin Timur pada tahun 2045 paling tinggi berada di Kecamatan Mentawa Baru Ketapang yaitu sebesar 190,02 Jiwa per Ha<sup>2</sup>. Sedangkan kecamatan dengan kepadatan penduduk paling rendah berada di Kecamatan Bukit Santuai sebesar 6,08 Jiwa per Ha<sup>2</sup>.

**Tabel 2.62 Kepadatan Rata-rata Penduduk di Kabupaten  
Kotawaringin Timur**

| Kecamatan             | Luas (Km <sup>2</sup> ) | Proyeksi Kepadatan Penduduk (Jiwa/Ha) |              |              |             |             |
|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
|                       |                         | 2025                                  | 2029         | 2034         | 2039        | 2045        |
| Kota Besi             | 1.889,00                | 10,26                                 | 10,24        | 11,68        | 12,86       | 14,2        |
| Cempaga               | 1.253,00                | 18,42                                 | 18,38        | 20,44        | 22,52       | 24,86       |
| Mentaya Hulu          | 1.712,79                | 12,29                                 | 12,26        | 12,03        | 13,25       | 14,63       |
| Parenggean            | 493,15                  | 55,03                                 | 54,91        | 61,82        | 68,1        | 75,19       |
| Baamang               | 639                     | 117,81                                | 117,56       | 124,03       | 136,62      | 150,84      |
| Mentawa Baru Ketapang | 726                     | 144,52                                | 144,21       | 156,24       | 172,11      | 190,02      |
| Mentaya Hilir Utara   | 725                     | 26,92                                 | 26,86        | 25,01        | 27,55       | 30,41       |
| Mentaya Hilir Selatan | 318                     | 73,71                                 | 73,55        | 84,62        | 93,22       | 102,92      |
| Pulau Hanaut          | 620                     | 27,47                                 | 27,41        | 31,04        | 34,19       | 37,75       |
| Antang Kalang         | 1.579,00                | 8,67                                  | 8,65         | 8,97         | 9,88        | 10,91       |
| Teluk Sampit          | 610                     | 17,98                                 | 17,94        | 20,32        | 22,38       | 24,71       |
| Seranau               | 548                     | 20,36                                 | 20,32        | 23,43        | 25,8        | 28,49       |
| Cempaga Hulu          | 1.183,00                | 18,71                                 | 18,67        | 18,39        | 20,25       | 22,36       |
| Telawang              | 317                     | 67,83                                 | 67,68        | 56,07        | 61,76       | 68,18       |
| Bukit Santuai         | 1.636,00                | 6,76                                  | 6,75         | 5            | 5,51        | 6,08        |
| Tualan Hulu           | 1.090,85                | 7,3                                   | 7,28         | 7,72         | 8,5         | 9,39        |
| Telaga Antang         | 1.456,21                | 13,27                                 | 13,24        | 15,36        | 16,92       | 18,68       |
| <b>Total</b>          | <b>16.796,00</b>        | <b>38,08</b>                          | <b>37,99</b> | <b>40,13</b> | <b>44,2</b> | <b>48,8</b> |

Sumber: Kabupaten Kotawaringin Timur Dalam Angka Tahun 2023

Bonus demografi yang terjadi pada periode tahun 2025 – 2045 memberikan tantangan dan peluang yang perlu mendapatkan perhatian dalam kebijakan pembangunan jangka panjang. Adapun tantangan yang berkaitan dengan bonus demografi adalah sebagai berikut:

1. Masalah pengangguran dimana bonus demografi meningkatkan jumlah penduduk kelompok usia muda, Jika kelompok usia muda berpendidikan rendah, kurang keterampilan dan tidak tersedia lapangan pekerjaan yang cukup maka akan menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran kelompok usia muda yang dapat menimbulkan penyakit sosial dan kriminalitas;
2. Meningkatnya tekanan pada infrastruktur dan pelayanan publik, pertumbuhan jumlah penduduk usia muda akan menjadikan meningkatnya kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan baik formal maupun pendidikan non formal, kesehatan, transportasi dan perumahan dan pemukiman serta sarana rekreasi/ olahraga.
3. Tingginya permintaan pendidikan baik formal maupun pendidikan non formal, Jika kurang mencukupi maka akan menyebabkan

- kapasitas tenaga kerja usia muda kurang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja;
4. Kesenjangan pendidikan dengan pasar kerja, hal ini terjadi apabila lulusan sekolah dan mahasiswa tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, sehingga lowongan diisi oleh tenaga kerja dari luar daerah; dan
  5. Tantangan kesehatan, pertumbuhan penduduk kelompok usia muda menempatkan pada kebutuhan tentang sarana dan prasarana serta tenaga kesehatan dan mewujudkan generasi muda yang sehat dan memiliki produktivitas tinggi.

Sedangkan keuntungan dan kemanfaatan dengan meningkatnya penduduk usia muda, antara lain sebagai berikut:

1. Dividen demografi : jika pertumbuhan ekonomi mampu menyerap pertumbuhan angkatan kerja di pasar kerja maka akan terjadi keseimbangan neraca pasar kerja yang baik;
2. Inovasi dan kreativitas : penduduk usia muda cenderung lebih kreatif dan inovatif jika berpendidikan baik dan terampil;
3. Peningkatan konsumsi : penduduk usia muda yang besar jumlahnya menjadi pasar dari produk barang dan jasa yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengurangi pengangguran;
4. Kekuatan tenaga kerja produktif yang besar dari kelompok usia muda akan meningkatkan produktivitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi daerah dan potensi sosial lainnya;
5. Peningkatan pembangunan sosial : jumlah penduduk usia muda yang besar akan dapat meningkatkan pembangunan sosial, termasuk mengurangi kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan;
6. Besarnya jumlah kelompok usia produktif menjadi pasar dari produk barang dan jasa, terutama meningkatnya jumlah konsumsi dari kelompok usia muda yang besar, hal ini jika memiliki daya beli yang tinggi.

### **2.7.2 Proyeksi Kebutuhan Sarana Prasarana**

Proyeksi kebutuhan sarana prasarana meliputi proyeksi: rumah/tempat tinggal dan permukiman, air bersih, energi/listrik, persampahan, pendidikan dan kesehatan. Proyeksi tersebut berguna sebagai gambaran tantangan penyediaan sarana prasarana pada masa

depan, yang juga akan menjadi masukan untuk perumusan isu strategis.

### 2.7.2.1 Proyeksi Kebutuhan Hunian

Berdasarkan SNI 03-1733-2004 tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan di Perkotaan, untuk menentukan luas minimum rata-rata perpetakan tanah didasarkan pada faktor-faktor kehidupan manusia (kegiatan), faktor alam dan peraturan bangunan. Berdasarkan kegiatan yang terjadi didalam rumah hunian, yaitu; tidur (ruang tidur), masak, makan (dapur), mandi (kamar mandi), duduk (ruang duduk/ruang tamu), kebutuhan udara segar per orang dewasa per jam 16 - 24 m<sup>3</sup> dan per anak-anak per jam 8 - 12 m<sup>3</sup>, dengan pergantian udara dalam ruang sebanyak-banyaknya 2 kali per jam dan tinggi plafon rata-rata 2,5 m, maka luas lantai per orang bagi dewasa sebesar 9,6 m<sup>2</sup> dan anak sebesar 4,8 m<sup>2</sup>.

Saat ini di Kabupaten Kotawaringin Timur rata-rata 1 rumah tangga dihuni oleh 4 orang (2 orang tua + 2 orang anak). Dengan asumsi tersebut diketahui bahwa:

$$\text{Luas lantai utama} = (2 \times 9,6) + (1 \times 4,8) \text{ m}^2 = 28,8 \text{ m}^2$$

$$\text{Luas lantai pelayanan} = 50\% \times 24 \text{ m}^2 = 14,4 \text{ m}^2$$

$$\text{Total Luas Lantai} = 43,2 \text{ m}^2$$

Jika koefisien dasar bangunan 50%, maka luas kaveling minimum untuk keluarga dengan anggota 4 orang adalah 86,4 m<sup>2</sup>. Berdasarkan asumsi tersebut maka diketahui kebutuhan kavling hunian adalah sebagai berikut :

**Tabel 2.63 Proyeksi Kebutuhan Hunian Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025-2045**

| Uraian  | 2025       | 2029       | 2034       | 2039       | 2045       |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| Proyeksi Jumlah Penduduk  | 459.968    | 486.272    | 509.146    | 530.002    | 549.517    |
| Proyeksi Jumlah KK  | 148.484    | 179.745    | 214.328    | 255.554    | 304.684    |
| Kebutuhan Luas Kavling Minimum Per KK (m <sup>2</sup> )                 | 86,4       | 86,4       | 86,4       | 86,4       | 86,4       |
| Total kebutuhan luas Kavling minimum seluruh keluarga (m <sup>2</sup> ) | 12.829.018 | 15.529.968 | 18.517.939 | 22.079.866 | 26.324.698 |

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2024

Berdasarkan proyeksi yang dilakukan diketahui bahwa pada tahun 2025 kebutuhan luas kavling minimum untuk Kabupaten



Kotawaringin Timur adalah 12.829.018 m<sup>2</sup>. Jumlah tersebut meningkat menjadi 15.529.968 m<sup>2</sup> pada 2029, 18.517.939 m<sup>2</sup> pada 2034, dan 22.079.866 m<sup>2</sup> pada 2039. Adapun pada akhir tahun perencanaan akan meningkat menjadi 26.324.698 m<sup>2</sup>.

### **2.7.2.2 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih**

Terdapat beberapa skenario proyeksi air bersih yang dapat dilakukan. Proyeksi pertama adalah perbandingan dengan standar jumlah pemakaian air yang digunakan oleh UNESCO dimana 1 orang minimal dilayani 60 liter air bersih/hari. Adapun skenario proyeksi lainnya adalah standar Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum yang menyesuaikan pada jenis status perkotaan. Dengan skenario yang dibangun tersebut diketahui bahwa kebutuhan air bagi masyarakat Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagai berikut :



**Tabel 2.64 Proyeksi Kebutuhan Air Bersih**

| <b>Uraian</b>  | <b>2025</b> | <b>2029</b> | <b>2034</b> | <b>2039</b> | <b>2045</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Proyeksi Jumlah Penduduk   | 448.635     | 447.660     | 473.614     | 521.716     | 576.014     |
| Standar Kebutuhan Air UNESCO (Liter/Hari)  | 60          | 60          | 60          | 60          | 60          |
| Jumlah Kebutuhan Air (Liter/Hari)  | 26.918.100  | 26.859.600  | 28.416.840  | 31.302.960  | 34.560.840  |
| Standar Direktorat Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Untuk Kota Sedang (Liter/Hari) | 110         | 110         | 110         | 110         | 110         |
| Jumlah Kebutuhan Air (Liter/Hari)  | 49.349.850  | 49.242.600  | 52.097.540  | 57.388.760  | 63.361.540  |

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2024

### 2.7.2.3 Proyeksi Kebutuhan Ketanagalistrikan

Terdapat beberapa skenario proyeksi kebutuhan listrik yang dapat dilakukan. Salah satu pendekatan adalah menghitung proyeksi jumlah pelanggan listrik. Dengan menggunakan pendekatan tersebut diketahui bahwa proyeksi jumlah pelanggan listrik sebagai berikut :

**Tabel 2.65 Proyeksi Kebutuhan Listrik**

| <b>Uraian</b>                       | <b>2025</b> | <b>2029</b> | <b>2034</b> | <b>2039</b> | <b>2045</b> |
|-------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <i>Jumlah Pelanggan Listrik</i>     | 166.571     | 201.160     | 244.396     | 287.632     | 339.516     |
| <i>Rata-rata Daya Per Pelanggan</i> | 2.060,92 VA |

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2024

Melalui proyeksi tersebut diketahui bahwa pada Tahun 2025 terdapat potensi peningkatan jumlah pelanggan menjadi 166.571. Pada Tahun 2029 menjadi 201.160. Pelanggan Tahun 2034 menjadi 244.396, dan meningkat menjadi 287.632 pada Tahun 2039 dan 339.516 pada 2045.

### 2.7.2.4 Proyeksi Kebutuhan Persampahan

Berdasarkan hasil perhitungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, volume produksi sampah per orang per hari di Indonesia sebesar 0,68 kg/orang/hari. Berdasarkan volume produksi sampah per orang per hari tersebut dapat dihitung volume sampah seluruh penduduk setiap harinya, seperti terlihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.66 Proyeksi Kebutuhan Prasarana Persampahan**

| <b>Uraian</b>                                       | <b>2025</b> | <b>2029</b> | <b>2034</b> | <b>2039</b> | <b>2045</b> |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Proyeksi Jumlah Penduduk                            | 448.635     | 447.660     | 473.614     | 521.716     | 576.014     |
| Volume Produksi Sampah Per Orang Per Hari           | 0,68        | 0,68        | 0,68        | 0,68        | 0,68        |
| Produksi Sampah Seluruh Penduduk Per Hari (Kg/Hari) | 305.071,80  | 304.408,80  | 322.057,52  | 354.766,88  | 391.689,52  |
| Kebutuhan TPA                                       | 2           | 2           | 2           | 2           | 2           |

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2024



### 2.7.2.5 Proyeksi Kebutuhan Pelayanan Pendidikan

Dasar penyediaan sarana pendidikan adalah untuk melayani setiap unit administrasi pemerintahan baik yang informal maupun yang formal, dan bukan didasarkan semata-mata pada jumlah penduduk yang akan dilayani oleh sarana tersebut. Perencanaan sarana pendidikan harus didasarkan pada tujuan pendidikan yang akan dicapai dimana sarana pendidikan dan pembelajaran tersebut akan menyediakan ruang belajar yang memungkinkan siswa untuk dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta sikapnya secara optimal. Oleh karena itu dalam merencanakan sarana pendidikan harus memperhatikan: 1) Berapa jumlah anak yang memerlukan fasilitas ini pada area perencanaan; 2) Optimasi daya tampung dengan satu shift; 3) Efisiensi dan efektifitas kemungkinan pemakaian ruang belajar secara terpadu; 4) Pemakaian sarana dan prasarana pendukung; dan 5) Keserasian dan keselarasan dengan konteks setempat terutama dengan berbagai jenis sarana lingkungan lainnya. Sarana pendidikan yang diuraikan dalam standar ini hanya menyangkut bidang pendidikan yang bersifat formal/umum, yaitu meliputi tingkat Pendidikan anak usia dini (Taman Kanak-kanak/RA); tingkat dasar (SD/MI); dan tingkat menengah (SMP/MTs dan SMA/SMK/MA). Berikut ini disampaikan data Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan yang ada di Kabupaten kotawaringin Timur dari tahun 2025-2045 :



**Tabel 2.67 Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan Taman Kanak-kanak/Raudatul Athfal**

| No.          | Kecamatan             | Jumlah Murid  |               | Proyeksi Jumlah Murid TK/RA |               |               |               |               | Jumlah Sekolah Eksisting Tahun 2023 | Standar Pelayanan (Jiwa) | Proyeksi Kebutuhan TK/RA |            |            |            |            | Keterangan |
|--------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|              |                       | 2022          | 2023          | 2025                        | 2029          | 2034          | 2039          | 2045          |                                     |                          | 2025                     | 2029       | 2034       | 2039       | 2045       |            |
| 1            | Kota Besi             | 345           | 295           | 304                         | 323           | 347           | 374           | 409           | 11                                  | 60                       | 5                        | 5          | 6          | 6          | 7          | Terpenuhi  |
| 2            | Cempaga               | 526           | 502           | 517                         | 549           | 591           | 637           | 697           | 15                                  | 60                       | 9                        | 9          | 10         | 11         | 12         | Terpenuhi  |
| 3            | Mentaya Hulu          | 721           | 683           | 704                         | 747           | 805           | 867           | 948           | 20                                  | 60                       | 12                       | 12         | 13         | 14         | 16         | Terpenuhi  |
| 4            | Parenggean            | 1.191         | 1.227         | 1.264                       | 1.342         | 1.445         | 1.557         | 1.703         | 30                                  | 60                       | 21                       | 22         | 24         | 26         | 28         | Terpenuhi  |
| 5            | Baamang               | 864           | 1.036         | 1.067                       | 1.133         | 1.220         | 1.315         | 1.438         | 30                                  | 100                      | 11                       | 11         | 12         | 13         | 14         | Terpenuhi  |
| 6            | Mentawa Baru Ketapang | 2.673         | 2.551         | 2.628                       | 2.789         | 3.005         | 3.237         | 3.540         | 52                                  | 100                      | 26                       | 28         | 30         | 32         | 35         | Terpenuhi  |
| 7            | Mentaya Hilir Utara   | 537           | 550           | 567                         | 601           | 648           | 698           | 763           | 11                                  | 60                       | 9                        | 10         | 11         | 12         | 13         | Penambahan |
| 8            | Mentaya Hilir Selatan | 477           | 455           | 469                         | 498           | 536           | 577           | 631           | 16                                  | 60                       | 8                        | 8          | 9          | 10         | 11         | Terpenuhi  |
| 9            | Pulau Hanaut          | 214           | 238           | 245                         | 260           | 280           | 302           | 330           | 10                                  | 60                       | 4                        | 4          | 5          | 5          | 6          | Terpenuhi  |
| 10           | Antang Kalang         | 378           | 345           | 355                         | 377           | 406           | 438           | 479           | 7                                   | 60                       | 6                        | 6          | 7          | 7          | 8          | Penambahan |
| 11           | Teluk Sampit          | 148           | 113           | 116                         | 124           | 133           | 143           | 157           | 6                                   | 60                       | 2                        | 2          | 2          | 2          | 3          | Terpenuhi  |
| 12           | Seranau               | 58            | 42            | 43                          | 46            | 49            | 53            | 58            | 2                                   | 60                       | 1                        | 1          | 1          | 1          | 1          | Terpenuhi  |
| 13           | Cempaga Hulu          | 690           | 737           | 759                         | 806           | 868           | 935           | 1.023         | 13                                  | 60                       | 13                       | 13         | 14         | 16         | 17         | Penambahan |
| 14           | Telawang              | 850           | 738           | 760                         | 807           | 869           | 937           | 1.024         | 10                                  | 60                       | 13                       | 13         | 14         | 16         | 17         | Penambahan |
| 15           | Bukit Santuai         | 340           | 305           | 314                         | 334           | 359           | 387           | 423           | 9                                   | 60                       | 5                        | 6          | 6          | 6          | 7          | Terpenuhi  |
| 16           | Tualan Hulu           | 488           | 415           | 428                         | 454           | 489           | 527           | 576           | 13                                  | 60                       | 7                        | 8          | 8          | 9          | 10         | Terpenuhi  |
| 17           | Telaga Antang         | 625           | 674           | 694                         | 737           | 794           | 855           | 935           | 13                                  | 60                       | 12                       | 12         | 13         | 14         | 16         | Penambahan |
| <b>Total</b> |                       | <b>11.125</b> | <b>10.906</b> | <b>11.236</b>               | <b>11.925</b> | <b>12.847</b> | <b>13.840</b> | <b>15.133</b> |                                     |                          | <b>163</b>               | <b>173</b> | <b>186</b> | <b>200</b> | <b>219</b> |            |

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2024



**Tabel 2.68 Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah**

| No.          | Kecamatan             | Jumlah Murid  |               | Proyeksi Jumlah Murid SD/MI |               |               |               |               | Jumlah Sekolah Eksisting Tahun 2023 | Standar Pelayanan (Jiwa) | Proyeksi Kebutuhan SD/MI |            |            |            |            | Keterangan |
|--------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|              |                       | 2022          | 2023          | 2025                        | 2029          | 2034          | 2039          | 2045          |                                     |                          | 2025                     | 2029       | 2034       | 2039       | 2045       |            |
| 1            | Kota Besi             | 2.241         | 2.284         | 2.353                       | 2.497         | 2.690         | 2.898         | 3.169         | 22                                  | 168                      | 14                       | 15         | 16         | 17         | 19         | Terpenuhi  |
| 2            | Cempaga               | 2.690         | 2.705         | 2.787                       | 2.958         | 3.186         | 3.433         | 3.753         | 26                                  | 168                      | 17                       | 18         | 19         | 20         | 22         | Terpenuhi  |
| 3            | Mentaya Hulu          | 3.788         | 3.695         | 3.807                       | 4.040         | 4.353         | 4.689         | 5.127         | 35                                  | 168                      | 23                       | 24         | 26         | 28         | 31         | Terpenuhi  |
| 4            | Parenggean            | 4.232         | 4.353         | 4.485                       | 4.760         | 5.128         | 5.524         | 6.040         | 24                                  | 168                      | 27                       | 28         | 31         | 33         | 36         | Penambahan |
| 5            | Baamang               | 5.350         | 5.495         | 5.661                       | 6.008         | 6.473         | 6.973         | 7.625         | 28                                  | 420                      | 13                       | 14         | 15         | 17         | 18         | Terpenuhi  |
| 6            | Mentawa Baru Ketapang | 13.231        | 13.510        | 13.918                      | 14.772        | 15.914        | 17.144        | 18.746        | 51                                  | 420                      | 33                       | 35         | 38         | 41         | 45         | Terpenuhi  |
| 7            | Mentaya Hilir Utara   | 2.956         | 3.031         | 3.123                       | 3.314         | 3.570         | 3.846         | 4.206         | 17                                  | 168                      | 19                       | 20         | 21         | 23         | 25         | Penambahan |
| 8            | Mentaya Hilir Selatan | 2.326         | 2.340         | 2.411                       | 2.559         | 2.756         | 2.969         | 3.247         | 28                                  | 168                      | 14                       | 15         | 16         | 18         | 19         | Terpenuhi  |
| 9            | Pulau Hanaut          | 1.693         | 1.643         | 1.693                       | 1.797         | 1.935         | 2.085         | 2.280         | 24                                  | 168                      | 10                       | 11         | 12         | 12         | 14         | Terpenuhi  |
| 10           | Antang Kalang         | 2.373         | 2.446         | 2.520                       | 2.675         | 2.881         | 3.104         | 3.394         | 23                                  | 168                      | 15                       | 16         | 17         | 18         | 20         | Terpenuhi  |
| 11           | Teluk Sampit          | 1.300         | 1.293         | 1.332                       | 1.414         | 1.523         | 1.641         | 1.794         | 11                                  | 168                      | 8                        | 8          | 9          | 10         | 11         | Terpenuhi  |
| 12           | Seranau               | 1.075         | 1.042         | 1.073                       | 1.139         | 1.227         | 1.322         | 1.446         | 14                                  | 168                      | 6                        | 7          | 7          | 8          | 9          | Terpenuhi  |
| 13           | Cempaga Hulu          | 3.643         | 3.698         | 3.810                       | 4.044         | 4.356         | 4.693         | 5.131         | 27                                  | 168                      | 23                       | 24         | 26         | 28         | 31         | Penambahan |
| 14           | Telawang              | 3.822         | 4.021         | 4.143                       | 4.397         | 4.737         | 5.103         | 5.579         | 19                                  | 168                      | 25                       | 26         | 28         | 30         | 33         | Penambahan |
| 15           | Bukit Santuai         | 1.504         | 1.537         | 1.583                       | 1.681         | 1.811         | 1.950         | 2.133         | 18                                  | 168                      | 9                        | 10         | 11         | 12         | 13         | Terpenuhi  |
| 16           | Tualan Hulu           | 1.462         | 1.589         | 1.637                       | 1.737         | 1.872         | 2.016         | 2.205         | 17                                  | 168                      | 10                       | 10         | 11         | 12         | 13         | Terpenuhi  |
| 17           | Telaga Antang         | 2.666         | 2.729         | 2.811                       | 2.984         | 3.215         | 3.463         | 3.787         | 22                                  | 168                      | 17                       | 18         | 19         | 21         | 23         | Penambahan |
| <b>Total</b> |                       | <b>56.352</b> | <b>57.411</b> | <b>59.146</b>               | <b>62.776</b> | <b>67.627</b> | <b>72.854</b> | <b>79.661</b> |                                     |                          | <b>282</b>               | <b>299</b> | <b>323</b> | <b>348</b> | <b>380</b> |            |

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2024



**Tabel 2.69 Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah**

| No.          | Kecamatan             | Jumlah Murid  |               | Proyeksi Jumlah Murid SMP/MTS |               |               |               |               | Jumlah Sekolah Eksisting Tahun 2023 | Standar Pelayanan (Jiwa) | Proyeksi Kebutuhan SMP/MTS |            |            |            |            | Keterangan |
|--------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|              |                       | 2022          | 2023          | 2025                          | 2029          | 2034          | 2039          | 2045          |                                     |                          | 2025                       | 2029       | 2034       | 2039       | 2045       |            |
| 1            | Kota Besi             | 871           | 1.506         | 1.552                         | 1.647         | 1.774         | 1.911         | 2.090         | 9                                   | 192                      | 8                          | 9          | 9          | 10         | 11         | Penambahan |
| 2            | Cempaga               | 997           | 1.061         | 1.093                         | 1.160         | 1.250         | 1.346         | 1.472         | 5                                   | 192                      | 6                          | 6          | 7          | 7          | 8          | Penambahan |
| 3            | Mentaya Hulu          | 1.125         | 1.231         | 1.268                         | 1.346         | 1.450         | 1.562         | 1.708         | 10                                  | 192                      | 7                          | 7          | 8          | 8          | 9          | Terpenuhi  |
| 4            | Parenggean            | 1.917         | 2.630         | 2.709                         | 2.876         | 3.098         | 3.337         | 3.649         | 12                                  | 192                      | 14                         | 15         | 16         | 17         | 19         | Penambahan |
| 5            | Baamang               | 3.068         | 2.551         | 2.628                         | 2.789         | 3.005         | 3.237         | 3.540         | 8                                   | 576                      | 5                          | 5          | 5          | 6          | 6          | Terpenuhi  |
| 6            | Mentawa Baru Ketapang | 6.506         | 5.137         | 5.292                         | 5.617         | 6.051         | 6.519         | 7.128         | 15                                  | 576                      | 9                          | 10         | 11         | 11         | 12         | Terpenuhi  |
| 7            | Mentaya Hilir Utara   | 1.064         | 1.036         | 1.067                         | 1.133         | 1.220         | 1.315         | 1.438         | 6                                   | 192                      | 6                          | 6          | 6          | 7          | 7          | Penambahan |
| 8            | Mentaya Hilir Selatan | 1.300         | 599           | 617                           | 655           | 706           | 760           | 831           | 5                                   | 192                      | 3                          | 3          | 4          | 4          | 4          | Terpenuhi  |
| 9            | Pulau Hanaut          | 543           | 1.029         | 1.060                         | 1.125         | 1.212         | 1.306         | 1.428         | 9                                   | 192                      | 6                          | 6          | 6          | 7          | 7          | Terpenuhi  |
| 10           | Antang Kalang         | 704           | 773           | 796                           | 845           | 911           | 981           | 1.073         | 9                                   | 192                      | 4                          | 4          | 5          | 5          | 6          | Terpenuhi  |
| 11           | Teluk Sampit          | 405           | 397           | 409                           | 434           | 468           | 504           | 551           | 5                                   | 96                       | 4                          | 5          | 5          | 5          | 6          | Terpenuhi  |
| 12           | Seranau               | 535           | 981           | 1.011                         | 1.073         | 1.156         | 1.245         | 1.361         | 7                                   | 192                      | 5                          | 6          | 6          | 6          | 7          | Terpenuhi  |
| 13           | Cempaga Hulu          | 1.396         | 1.299         | 1.338                         | 1.420         | 1.530         | 1.648         | 1.802         | 7                                   | 192                      | 7                          | 7          | 8          | 9          | 9          | Penambahan |
| 14           | Telawang              | 1.231         | 1.309         | 1.349                         | 1.431         | 1.542         | 1.661         | 1.816         | 11                                  | 192                      | 7                          | 7          | 8          | 9          | 9          | Terpenuhi  |
| 15           | Bukit Santuai         | 501           | 504           | 519                           | 551           | 594           | 640           | 699           | 4                                   | 192                      | 3                          | 3          | 3          | 3          | 4          | Terpenuhi  |
| 16           | Tualan Hulu           | 237           | 278           | 286                           | 304           | 327           | 353           | 386           | 4                                   | 96                       | 3                          | 3          | 3          | 4          | 4          | Terpenuhi  |
| 17           | Telaga Antang         | 889           | 919           | 947                           | 1.005         | 1.083         | 1.166         | 1.275         | 7                                   | 192                      | 5                          | 5          | 6          | 6          | 7          | Terpenuhi  |
| <b>Total</b> |                       | <b>23.289</b> | <b>23.240</b> | <b>23.942</b>                 | <b>25.412</b> | <b>27.376</b> | <b>29.491</b> | <b>32.247</b> |                                     |                          | <b>101</b>                 | <b>107</b> | <b>115</b> | <b>124</b> | <b>136</b> |            |

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2024



**Tabel 2.70 Proyeksi Kebutuhan Sarana Pendidikan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah**

| No.          | Kecamatan             | Jumlah Murid  |               | Proyeksi Jumlah Murid SMA/SMK/MA |               |               |               |               | Jumlah Sekolah Eksisting Tahun 2023 | Standar Pelayanan (Jiwa) | Proyeksi Kebutuhan SMA/SMK/MA |           |           |           |           | Keterangan |
|--------------|-----------------------|---------------|---------------|----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
|              |                       | 2022          | 2023          | 2025                             | 2029          | 2034          | 2039          | 2045          |                                     |                          | 2025                          | 2029      | 2034      | 2039      | 2045      |            |
| 1            | Kota Besi             | 781           | 653           | 673                              | 714           | 769           | 829           | 906           | 2                                   | 324                      | 2                             | 2         | 2         | 3         | 3         | Penambahan |
| 2            | Cempaga               | 958           | 469           | 483                              | 513           | 552           | 595           | 651           | 2                                   | 324                      | 1                             | 2         | 2         | 2         | 2         | Terpenuhi  |
| 3            | Mentaya Hulu          | 1.026         | 744           | 766                              | 814           | 876           | 944           | 1.032         | 3                                   | 324                      | 2                             | 3         | 3         | 3         | 3         | Terpenuhi  |
| 4            | Parenggean            | 1.298         | 3.524         | 3.631                            | 3.853         | 4.151         | 4.472         | 4.890         | 7                                   | 324                      | 11                            | 12        | 13        | 14        | 15        | Penambahan |
| 5            | Baamang               | 3.905         | 2.455         | 2.529                            | 2.684         | 2.892         | 3.115         | 3.406         | 8                                   | 684                      | 4                             | 4         | 4         | 5         | 5         | Terpenuhi  |
| 6            | Mentawa Baru Ketapang | 4.298         | 3.189         | 3.285                            | 3.487         | 3.756         | 4.047         | 4.425         | 9                                   | 684                      | 5                             | 5         | 5         | 6         | 6         | Terpenuhi  |
| 7            | Mentaya Hilir Utara   | 1.335         | 1.378         | 1.420                            | 1.507         | 1.623         | 1.749         | 1.912         | 3                                   | 324                      | 4                             | 5         | 5         | 5         | 6         | Penambahan |
| 8            | Mentaya Hilir Selatan | 961           | 1.653         | 1.703                            | 1.807         | 1.947         | 2.098         | 2.294         | 6                                   | 324                      | 5                             | 6         | 6         | 6         | 7         | Penambahan |
| 9            | Pulau Hanaut          | 237           | 1.707         | 1.759                            | 1.867         | 2.011         | 2.166         | 2.369         | 4                                   | 324                      | 5                             | 6         | 6         | 7         | 7         | Penambahan |
| 10           | Antang Kalang         | 749           | 727           | 749                              | 795           | 856           | 923           | 1.009         | 2                                   | 324                      | 2                             | 2         | 3         | 3         | 3         | Penambahan |
| 11           | Teluk Sampit          | 127           | 414           | 427                              | 453           | 488           | 525           | 574           | 1                                   | 216                      | 2                             | 2         | 2         | 2         | 3         | Penambahan |
| 12           | Seranau               | 290           | 532           | 548                              | 582           | 627           | 675           | 738           | 3                                   | 324                      | 2                             | 2         | 2         | 2         | 2         | Terpenuhi  |
| 13           | Cempaga Hulu          | 652           | 279           | 287                              | 305           | 329           | 354           | 387           | 1                                   | 216                      | 1                             | 1         | 2         | 2         | 2         | Penambahan |
| 14           | Telawang              | 432           | 393           | 405                              | 430           | 463           | 499           | 545           | 3                                   | 216                      | 2                             | 2         | 2         | 2         | 3         | Terpenuhi  |
| 15           | Bukit Santuai         | 98            | 110           | 113                              | 120           | 130           | 140           | 153           | 1                                   | 216                      | 1                             | 1         | 1         | 1         | 1         | Terpenuhi  |
| 16           | Tualan Hulu           | 0             | 630           | 649                              | 689           | 742           | 799           | 874           | 2                                   | 216                      | 3                             | 3         | 3         | 4         | 4         | Penambahan |
| 17           | Telaga Antang         | 1.158         | 58            | 60                               | 63            | 68            | 74            | 80            | 1                                   | 216                      | 1                             | 1         | 1         | 1         | 1         | Terpenuhi  |
| <b>Total</b> |                       | <b>18.305</b> | <b>18.915</b> | <b>19.487</b>                    | <b>20.682</b> | <b>22.281</b> | <b>24.003</b> | <b>26.246</b> |                                     |                          | <b>54</b>                     | <b>58</b> | <b>62</b> | <b>67</b> | <b>73</b> |            |

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2024

Metode perhitungan proyeksi kebutuhan rombel dan prasarana sekolah sejalan dengan tren pertumbuhan jumlah penduduk. Sehingga diperoleh perkiraan jumlah rombel di Kabupaten Kotawaringin Timur kurun waktu 2025-2045 cenderung fluktuatif. Perhitungan proyeksi kebutuhan prasarana sarana pendidikan tersebut belum mempertimbangkan berbagai aspek seperti distribusi Pemerataan, kepadatan penduduk, radius akses ke layanan pendidikan, potensi siswa pada jenjang sebelumnya, penduduk usia sekolah dan kebijakan zonasi.

### 2.7.2.6 Proyeksi Kebutuhan Pelayanan Kesehatan

Kebutuhan pelayanan kesehatan bagi masyarakat merupakan salah satu keharusan yang perlu dicukupi oleh pemerintah daerah mengingat kesehatan merupakan salah satu kebutuhan utama masyarakat selain kebutuhan utama lain seperti pangan, pendidikan, sosial dan ekonomi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Timur, pada Buku Kotawaringin Timur dalam Angka Tahun 2024 bahwa tersedia 342 tempat tidur.

Menurut standar Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO) suatu wilayah idealnya memiliki satu tempat tidur pada fasilitas kesehatan untuk setiap 1.000 penduduk. Berdasarkan pada standard tersebut dapat dihitung kebutuhan tempat tidur fasilitas kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Timur adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.71 Proyeksi Kebutuhan Unit Tempat Tidur Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025-2045**

| Uraian                                     | 2025    | 2029    | 2034    | 2039    | 2045    |
|--|---------|---------|---------|---------|---------|
| Proyeksi Jumlah Penduduk                   | 448.635 | 447.660 | 473.614 | 521.716 | 576.014 |
| Standar Jumlah 1 Tempat Tidur              | 1000    | 1000    | 1000    | 1000    | 1000    |
| Kebutuhan Tempat Tidur Fasilitas Kesehatan | 449     | 448     | 474     | 522     | 576     |

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2024

Standar World Health Organization (WHO) rasio Puskesmas/Pustu diatur dengan standar 1:30.000 jumlah penduduk, di mana setiap kecamatan harus memiliki minimal satu Puskesmas.

Pada standar SNI 03-1733-2004 menetapkan rasio BKIS/Klinik Bersalin, rasio Apotik/Rumah Obat, dan rasio Tempat Praktek Dokter memiliki standar masing-masing 1:30.000, 1:30.000, dan 1:5.000 penduduk. Berdasarkan Permenkes 3 Tahun 2015 tentang Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan dan Berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat No 24 Tahun 2014 Tentang Standar Rasio Kebutuhan SDM Kesehatan Tahun 2014, 2019, 2025, menyebutkan bahwa proyeksi rasio kebutuhan SDM Kesehatan untuk setiap 100.000 penduduk adalah 12 Dokter spesialis, 50 dokter umum, 14 dokter gigi, 200 perawat, 130 bidan.

**Tabel 2.72 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025-2045**

| Uraian                              | Kondisi Tahun 2023 | 2025    | 2029    | 2034    | 2039    | 2045    |
|-------------------------------------|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Proyeksi Jumlah Penduduk            | 443.359            | 448.635 | 447.660 | 473.614 | 521.716 | 576.014 |
| <b>Proyeksi Fasilitas Kesehatan</b> |                    |         |         |         |         |         |
| Rumah Sakit                         | 3                  | 4       | 4       | 4       | 5       | 5       |
| Poliklinik                          | 28                 | 28      | 28      | 28      | 30      | 32      |
| Puskesmas                           | 21                 | 21      | 21      | 21      | 22      | 23      |
| Puskesmas Pembantu                  | 154                | 168     | 170     | 175     | 180     | 185     |
| Rumah Bersalin                      | 1                  | 15      | 15      | 16      | 17      | 19      |
| Apotek/Rumah Obat                   | 12                 | 15      | 15      | 16      | 17      | 19      |
| Tenaga Kebidanan                    | 464                | 583     | 582     | 616     | 678     | 749     |
| Dokter Umum                         | 85                 | 224     | 224     | 237     | 261     | 288     |
| Dokter Spesialis                    | 32                 | 54      | 54      | 57      | 63      | 69      |
| Dokter Gigi                         | 19                 | 63      | 63      | 66      | 73      | 81      |

Sumber: Hasil Analisa Tahun 2024

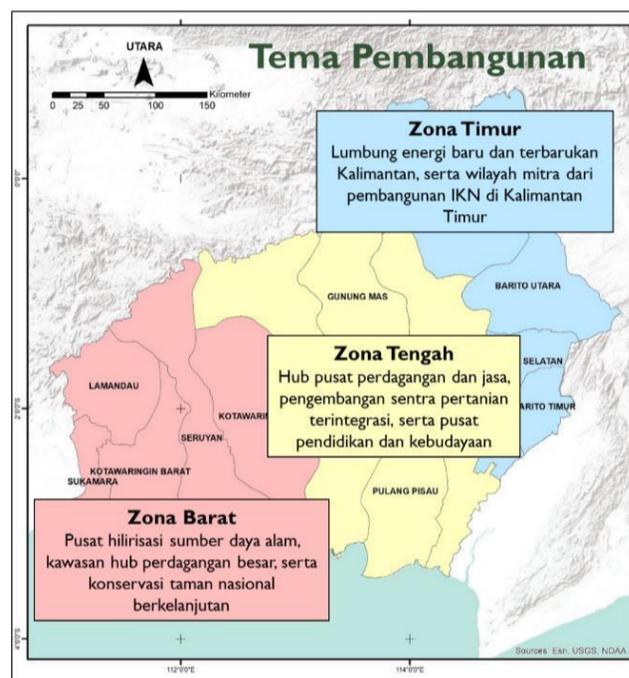
## 2.8 PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH

### 2.8.1 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah Provinsi

#### Kalimantan Tengah

Berdasarkan Kebijakan Kewilayahan RPJPD 2025-2045 Provinsi Kalimantan Tengah terdapat pembagian klaster pembangunan yang bertujuan untuk menciptakan pemerataan pembangunan di Kalimantan Tengah. Pembagian klaster pembangunan didasarkan pada kedekatan geografis wilayah serta

zona perencanaan. Zona Barat terdiri dari Klaster Pangkalan Bun dan Klaster Sampit. Zona Tengah terdiri dari Klaster Palangkaraya dan Klaster Kuala Kapuas. Zona Timur terdiri dari Klaster Buntok dan Klaster Muara Teweh. Masing-masing klaster memiliki pusat pertumbuhan utama yang disebut dengan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Dalam sistem perkotaan nasional, PKW berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau melayani beberapa kabupaten/kota yang artinya PKW memiliki daya jangkau pengaruh yang luas dibandingkan pusat kegiatan dibawahnya. Penetapan PKW pada masing- masing klaster sesuai dengan rincian PKW yang terdapat dalam RTRW Kalimantan Tengah. Peta klasterisasi wilayah di Kalimantan Tengah dapat dilihat pada gambar berikut:



**Gambar 2.70 Peta Pembagian Zona Wilayah di Kalimantan Tengah**

Sumber: Ranhir RPJPD Prov. Kalteng 2025-2045

Penetapan PKW dilakukan berdasarkan beberapa kriteria, diantaranya sebagai kawasan perkotaan yang menjadi simpul kegiatan ekspor-impor dalam mendukung Pusat Kegiatan Nasional (PKN); sebagai kawasan yang menjadi pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani provinsi atau beberapa kabupaten/kota; serta sebagai simpul transportasi yang melayani skala provinsi dan beberapa kabupaten.

**Tabel 2.73 Pembagian Zona dan Klaster di Kalimantan Tengah**

| ZONA       | KLASTER               | KABUPATEN          |
|------------|-----------------------|--------------------|
| Zona Barat | Klaster Pangkalan Bun | Kotawaringin Barat |
|            |                       | Sukamara           |

| ZONA        | KLASTER               | KABUPATEN                 |
|-------------|-----------------------|---------------------------|
|             | <b>Klaster Sampit</b> | Lamandau                  |
|             |                       | <b>Kotawaringin Timur</b> |
| Zona Tengah | Klaster Palangkaraya  | Seruyan                   |
|             |                       | Kota Palangkaraya         |
|             | Klaster Kuala Kapuas  | Katingan                  |
|             |                       | Gunung Mas                |
|             |                       | Kapuas                    |
| Zona Timur  | Klaster Buntok        | Pulang Pisau              |
|             |                       | Barito Selatan            |
|             | Klaster Muara Teweh   | Barito Timur              |
|             |                       | Murung Raya               |
|             |                       | Barito Utara              |

Sumber: Ranhir RPJPD Prov. Kalteng 2025-2045

Zona Barat Pembangunan Kalimantan Tengah tersusun dari dua klaster yakni klaster Pangkalan Bun dan Klaster Sampit. Tema utama pembangunan klaster ini yakni sebagai pusat hilirisasi sumber daya alam dan kawasan hub perdagangan besar serta konservasi taman nasional berkelanjutan. Daerah ini secara eksisting memiliki konsentrasi baik penduduk dan juga kontribusi PDRB yang paling tinggi namun belum secara maksimal dapat mengungkit potensi sumber daya ekonomi di Kalimantan Tengah.



**Gambar 2.71 Peta Pembagian Zona Wilayah Barat di Kalimantan Tengah**

Sumber: Ranhir RPJPD Prov. Kalteng 2025-2045

### 2.8.2 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah Klaster Sampit

Klaster ini terletak di Zona Barat yang terdiri dari Kabupaten Seruyan dan Kabupaten Kotawaringin Timur. Pusat dari kegiatan pada klaster ini terletak di PKW Sampit yang terletak di Kabupaten Kotawaringin Timur. Adapun Sasaran Program RTRW Provinsi



Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 di Kabupaten Kotawaringin Timur.



**Tabel 2.74 Sasaran Program RTRW Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 di Kabupaten Kotawaringin Timur**

| NO  | SASARAN PROGRAM  | LOKASI             | SUMBER PENDANAAN    | INSTANSI PELAKSANA                  | WAKTU PELAKSANAAN |                   |                    |                   |
|---|--|--------------------|---------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|   |  |                    |                     |                                     | I<br>(2015-2019)  | II<br>(2020-2025) | III<br>(2025-2030) | IV<br>(2030-2035) |
| <b>B. Pengembangan dan Peningkatan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)</b> |  |                    |                     |                                     |                   |                   |                    |                   |
| <b>B1 PKW Sampit</b>  |  |                    |                     |                                     |                   |                   |                    |                   |
| 1   | Membangun jaringan prasarana dan sarana berbasis sungai (waterfront city).   | Kotawaringin Timur | APBN &/ APBD Swasta | Dis PU, PDAM, Dis Budpar            | V                 | V                 |                    |                   |
| 2   | Mengembangkan agroindustri perkebunan terutama komoditas kelapa sawit, kelapa dalam, dan karet sebagai pendorong pertumbuhan wilayah dengan memanfaatkan keberadaan PKW Pangkalan Bun PKL Seruyan dan Kasongan.  | Kotawaringin Timur | APBN &/ APBD Swasta | Dis Bun, BLH                        | V                 | V                 | V                  | V                 |
| 3   | Mengembangkan pertanian tanaman pangan dan hortikultura dan perikanan tangkap sebagai pendorong pertumbuhan wilayah dengan memanfaatkan keberadaan PKW Pangkalan Bun, PKL Seruyan dan Kasongan   | Kotawaringin Timur | APBN &/ APBD Swasta | Dis Tanak, BLH, Dis Perikanan, DKPS | V                 | V                 | V                  | V                 |
| 4   | Mengembangkan pertambangan (batuan beku, bijih besi, kaolin, batubara, zircon) sebagai pendorong pertumbuhan wilayah dengan memanfaatkan keberadaan PKW Pangkalan Bun PKL Seruyan dan Kasongan   | Kotawaringin Timur | APBN &/ APBD Swasta | Dis Tamben, BLH                     | V                 | V                 | V                  | V                 |
| 5   | Meningkatkan aksesibilitas melalui peningkatan jaringan jalan arteri primer (Trans Kalimantan poros selatan) serta pembangunan jalan dari dan ke sentra produksi di PKW Sampit dan sekitarnya.   | Kotawaringin Timur | APBN &/ APBD        | Dis PU                              | V                 | V                 |                    |                   |
| 6   | Membangun stasiun kelas menengah sebagai simpul jaringan jalur kereta api (Tumbang Samba – Pelantaran – Sampit – Bagendang – Ujung Pandaran – Kuala Pembuang Kuala Kurun - Tumbang Samba - Sampit - Bagendang - Kuala Pembuang - Teluk Segintung ) untuk mengembangkan PKW Pangkalan Bun PKL Seruyan dan Kasongan. | Kotawaringin Timur | APBN &/ APBD Swasta | Dis Hub, Dis PU                     | V                 | V                 | V                  | V                 |
| 7   | Meningkatkan kapasitas, kualitas, dan keterpaduan pelayanan sistem infrastruktur perkotaan (jalan, persampahan, air bersih, limbah, drainase, RTH) berskala regional.  | Kotawaringin Timur | APBN &/ APBD Swasta | Dis PU, Dis Tata Kota               | V                 | V                 |                    |                   |



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2025-2045**



| NO | SASARAN PROGRAM   | LOKASI             | SUMBER PENDANAAN              | INSTANSI PELAKSANA         | WAKTU PELAKSANAAN |                   |                    |                   |
|----|---|--------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|    |   |                    |                               |                            | I<br>(2015-2019)  | II<br>(2020-2025) | III<br>(2025-2030) | IV<br>(2030-2035) |
| 8  | Pembangunan PLTU Sampit untuk melayani sistem perkotaan dan kawasan yang berada di sekitar PKW Sampit yang terintegrasi dengan sistem transmisi tenaga listrik Kalimantan Tengah. | Kotawaringin Timur | APBN &/ APBD Swasta           | PT.PLN(Persero)/ Distamben | V                 | V                 |                    |                   |
| 9  | Pembangunan Gardu Induk Sampit  | Kotawaringin Timur | APBN &/ APBD                  | PT.PLN(Persero)/ Distamben | V                 |                   |                    |                   |
| 10 | Menyiapkan dan menetapkan aturan pemintakatan (zoning regulation) untuk setiap alokasi ruang.   | Kotawaringin Timur | APBN &/ APBD                  | Dis PU                     | V                 |                   |                    |                   |
| 11 | Menyiapkan, membangun prasarana dan sarana dasar air minum, penyehatan lingkungan permukiman,   | Kotawaringin Timur | APBN &/ APBD                  | Dis PU, Dis Kes, BLH       | V                 | V                 |                    |                   |
| 12 | Pembangunan dan peningkatan prasarana dan sarana dasar perumahan dan permukiman serta penataan bangunan dan lingkungan perkotaan.   | Kotawaringin Timur | APBN &/ APBD Swasta           | Dis PU, Dis Kes            | V                 | V                 |                    |                   |
| 13 | Pengembangan Bandara H. Asan sebagai pendukung fungsi PKW Sampit, PKW Pangkalan Bun dan PKL Kasongan dan Seruyan  | Kotawaringin Timur | APBN &/ APBD                  | Dishub, Dis                | V                 | V                 | V                  |                   |
| 14 | Pengembangan pendidikan sebagai pendukung fungsi PKW Sampit dan mendorong pengembangan PKW Pangkalan Bun, PKL Kasongan dan Seruyan.   | Kotawaringin Timur | APBN &/ APBD                  | Dinas                      | V                 | V                 |                    |                   |
| 15 | Pengembangan terminal tipe B sebagai simpul jalan arteri primer jalan trans Kalimantan poros selatan  | Kotawaringin Timur | APBN &/ APBD                  | Dis Hub.                   | V                 | V                 |                    |                   |
| 16 | Pembangunan terminal barang sebagai simpul jalan arteri primer jalan trans Kalimantan poros selatan   | Kotawaringin Timur | APBN &/ APBD                  | Dis Hub.                   | V                 | V                 |                    |                   |
| 17 | Meningkatkan kualitas pelayanan jasa keuangan dan pemerintahan yang mendukung kegiatan ekspor-impor.  | Kotawaringin Timur | APBN &/ APBD Swasta           | Perbankan                  | V                 | V                 |                    |                   |
| 18 | Pemantapan dan pengembangan kawasan konservasi dan lindung.   | Kotawaringin Timur | APBN &/ APBD &/ swasta &/ BLN | Dinas Kehutanan            | V                 | V                 |                    |                   |
| 19 | Pengembangan potensi wisata alam dan wisata laut  | Kotawaringin Timur | APBN &/ APBD &/ swasta &/ BLN | Dis PU, Dishut, Dis        | V                 | V                 | V                  |                   |
| 20 | Pembangunan sistem mitigasi bencana alam terutama banjir dan kebakaran lahan dan hutan  | Kotawaringin Timur | APBDP, APBD                   | Badan Penanggulangan       | V                 | V                 |                    |                   |
| 21 | Peningkatan Pelabuhan Sampit dan Bagendang  | Kotawaringin Timur | APBN &/ APBD &/ swasta        | Dishub, Dis                | V                 | V                 |                    |                   |
| 22 | Pembangunan Pelabuhan baru di Ujung Pandaran  | Kotawaringin Timur | APBN &/ APBD                  | Kemenuh, Dishub            | V                 | V                 |                    |                   |



| NO  | SASARAN PROGRAM   | LOKASI   | SUMBER PENDANAAN        | INSTANSI PELAKSANA  | WAKTU PELAKSANAAN |                   |                    |                   |
|---|---|--|-------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|   |   |  |                         |                     | I<br>(2015-2019)  | II<br>(2020-2025) | III<br>(2025-2030) | IV<br>(2030-2035) |
| <b>D. Mendorong Perwujudan Sistem Transportasi Provinsi</b> |   |  |                         |                     |                   |                   |                    |                   |
| 1   | Peningkatan kapasitas jalan dan jembatan arteri primer Jalan Lintas Kalimantan poros Selatan ruas Batas Kalimantan Barat – Runtu – Sampit – Kasongan – Palangkaraya – Pulang Pisau – Kuala Kapuas – Batas Kalimantan Selatan (814 km); dan Jl. Adonis Samad-Palangkaraya (6 Km).    | Kapuas, Pulang Pisau, Palangkaraya, Katingan, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Lamandau                                   | APBN &/ APBD            | Kemen PU, Dis PU    | V                 | V                 | V                  | V                 |
| 2   | Peningkatan kapasitas jalan dan jembatan kolektor primer (K1); jalan Penghubung Antar Jalan Lintas Kalimantan, dan jalan Lainnya.   | Barito Utara, Murung Raya, Gunung Mas, Katingan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Lamandau, Barito Selatan, Barito Timur. | APBN &/ APBD            | Kemen PU, Dis PU    | V                 | V                 | V                  | V                 |
| 3   | Peningkatan kapasitas jalan dan jembatan kolektor primer K2; jalan Penghubung Antar Jalan Lintas Kalimantan, dan jalan Lainnya.   | Palangkaraya, Barito Selatan, Gunung Mas, Kotawaringin Timur, Kapuas, Lamandau, Seruyan, Kotawaringin Barat, Pulang Pisau        | APBN &/ APBD            | Dis PU              | V                 | V                 | V                  | V                 |
| 4   | Peningkatan kapasitas jalan dan jembatan kolektor primer K3.  | Tersebar di 13 Kabupaten dan 1 Kota  | APBN &/ APBD            | Dis PU              | V                 | V                 | V                  | V                 |
| 5   | Peningkatan struktur, kapasitas dan pemeliharaan jalan dan jembatan kolektor primer Jalan Strategis Nasional  | Tersebar di 13 Kabupaten dan 1 Kota  | APBN &/ APBP            | Kemen PU, Dis PU    | V                 | V                 | V                  | V                 |
| 6   | Pembangunan : 1) Terminal penumpang Tipe A di Palangkaraya, Ampah, Mua Layang, Puruk Cahu dan Kuala Kapuas. ra Teweh, Nanga Bulik dan Pangkalan Bun<br>2) Terminal penumpang Tipe B di Kota Sukamara, Sampit, Kuala Pembuang, Kasongan, Pulang Pisau, Kuala Kurun, Buntok, Tamiyang | Tersebar di 13 Kabupaten dan 1 Kota  | APBN &/ APBDP &/ Swasta | Kemen Hub, Dis Hub, | V                 | V                 | V                  | V                 |
| 7   | Pembangunan Terminal barang yaitu di Kumai, Sampit dan Kuala Kapuas.  | Tersebar di 3 Kabupaten  | APBN &/ APBDP &/ Swasta | Kemen Hub, Dis Hub, | V                 | V                 | V                  | V                 |



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2025-2045



| NO | SASARAN PROGRAM  | LOKASI  | SUMBER PENDANAAN        | INSTANSI PELAKSANA                    | WAKTU PELAKSANAAN |                   |                    |                   |
|----|--|---|-------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|    |  |   |                         |                                       | I<br>(2015-2019)  | II<br>(2020-2025) | III<br>(2025-2030) | IV<br>(2030-2035) |
| 8  | Pembangunan dan peningkatan Jembatan Timbang di :Anjir serapat Km 12 di Kapuas, Pasar Panas di Barito Timur, Simpang Runtu di Kotawaringin Barat, Sampit di Kotawaringin Timur, Simpang Kandui di Barito Utara, Bukit Liti di Pulang Pisau, Lamandau di Lamandau, ruas jalan Bahaur - Pulang Pisau di Pulang Pisau, ruas jalan Sampit - Kuala Pembuang.  | Tersebar di 13 Kabupaten dan 1 Kota                         | APBN &/ APBDP &/ Swasta | Kemen Hub, Dis Hub,                   | V                 | V                 | V                  | V                 |
| 9  | Peningkatan Jembatan Timbang : Anjir serapat Km 12 di Kapuas, Jembatan Timbang Pasar Panas di Barito Timur. Pembangunan Jembatan Timbang : Simpang Runtu di Kotawaringin Barat, Jembatan Timbang Sampit di Kotawaringin Timur, Jembatan Timbang Simpang Kandui di Barito Utara, Jembatan Timbang Bukit Liti di Pulang Pisau, Jembatan Timbang Lamandau di Lamandau, Jembatan Timbang ruas jalan Bahaur - Pulang Pisau di Pulang Pisau, Jembatan Timbang ruas jalan Sampit-Kuala Pembuang.  | Tersebar di 13 Kabupaten dan 1 Kota                         | APBN &/ APBDP &/ Swasta | Kemen Hub, Dis Hub,                   | V                 | V                 | V                  | V                 |
| 11 | Pembangunan Jalur kereta api 1) Puruk Cahu – Muara Teweh – Buntok – Mengkatip – Kuala Kapuas - Batanjung, 2) Puruk Cahu – Kuala Kurun – Rabambang – Palangkaraya – Pulang Pisau, 3) Rabambang – Tumbang Samba – Sampit – Kuala Pembuang – Teluk Segintung, 4) Tumbang Samba – Rantau Pulut – Nanga Bulik – Pangkalan Bun – Kumai. 1) Puruk Cahu - Bangkuang - Batanjung, 2) Puruk Cahu - Kuala Kurun - Palangkaraya - Pulang Pisau - Kuala Kapuas, 3) Kuala Kurun - Tumbang Samba - Sampit - Bagendang - Kuala Pembuang - Teluk Segintung, 4) Tumbang Samba - Rantau Pulut - Nanga Bulik - Pangkalan Bun - Kumai, 5) Kudangan - Nanga Bulik - Kumai<br>Pembangunan simpul-simpul utama jaringan jalur kereta api di PKN, PKW, dan PKL Kalimantan Tengah. | Tersebar di 13 Kabupaten dan 1 Kota                         |                         | APBN &/ APBD &/ Swasta                | V                 | V                 | V                  | V                 |
| 12 | Pembangunan simpul-simpul utama jaringan jalur kereta api di PKN, PKW, dan PKL Kalimantan Tengah.  | Tersebar di 13 Kabupaten dan 1 Kota                         | APBN &/APBD&/Swasta     | Dis Hub, Kemen Hub, PT. KAI, Bappenas | V                 | V                 | V                  | V                 |
| 13 | Pembangunan dan peningkatan kapasitas Pelabuhan Laut (PL) di Kalimantan Tengah: PL Kumai, PL Bun, PL Sukamara, PL Teluk Segintung, PL Batanjung, PL Sebuai,  | Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Katingan, Sukamara, | APBN &/ APBDP           | Kemen Hub, Dis Hub,                   | V                 | V                 |                    |                   |



| NO                                      | SASARAN PROGRAM  | LOKASI   | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA                            | WAKTU PELAKSANAAN |                   |                    |                   |
|---|--|--|------------------|---|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|   |  |  |                  |   | I<br>(2015-2019)  | II<br>(2020-2025) | III<br>(2025-2030) | IV<br>(2030-2035) |
|   | PL Ujung Pandaran, PL Pulau Damar dan PL Tanjung Perawan   | Seruyan, Kapuas, Pulang Pisau.   |                  |   |                   |                   |                    |                   |
| 14                                      | Pembangunan dan peningkatan kapasitas Dermaga Sungai di Kalimantan Tengah.   | Tersebar di 13 Kabupaten dan 1 Kota  | APBN &/ APBD     | Kemen Hub, Dis Hub                            | V                 | V                 | V                  | V                 |
| 16                                      | Pembangunan dan peningkatan Pengumpan: Haji Asan di Kab. Kotawaringin Timur, Bandara Kuala Pembuang di Kab. Seruyan, Bandara Tumbang Samba di Kab. Katingan, Bandara Kuala Kurun di Kab. Gunung Mas, Bandara Dirung di Kab. Murung Raya, Bandara Beringin di Kab. Barito Utara, Bandara Sanggu di Kab. Barito Selatan. | Kotawaringin Timur, Seruyan, Katingan, Gunung Mas, Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan.  | APBN &/ APBD     | Dis Hub                                       | V                 | V                 | V                  | V                 |
| 18                                      | Pembangunan simpul-simpul utama jaringan jalur kereta api di PKN, PKW, dan PKL Kalimantan Tengah.  | Tersebar di 13 Kabupaten dan 1 Kota  | APBN &/ APBDP &/ | Dis Hub, Kemen Hub, Swasta, PT. KAI, Bappenas | V                 | V                 | V                  | V                 |
| <b>E1 Konservasi Sumber Daya Air</b>    |  |  |                  |   |                   |                   |                    |                   |
| 2                                       | Pelestarian fungsi lingkungan sempadan sungai, waduk/ bendungan, mata air, dan daerah rawa serta sumber daya air lainnya   | di 13 Kabupaten dan 1 Kota   | APBN &/ APBD     | Dis PU, BLH, Dishut                           | V                 | V                 | V                  | V                 |
| 3                                       | Pelestarian fungsi lingkungan sempadan pantai dan hutan mangrove   | di 13 Kabupaten dan 1 Kota   | APBN &/ APBD     | Dis PU, BLH, Dishut, DKP                      | V                 | V                 | V                  | V                 |
| 4                                       | Pengendalian kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan atau penurunan kualitas sempadan Danau Sembuluh di Kabupaten Seruyan, Danau Malawen di Kab. Barito Selatan, dan Danau Pamait di Kab. Seruyan.  | s sempadan Danau Sembuluh di Kabupaten Seruyan, Danau Malawen di Kab. Barito Selatan, dan Danau Pamait di Kab. Seruyan. di 13 Kabupaten dan 1 Kota | APBN &/ APBD     | Dis PU, BLH, Dishut                           | V                 | V                 | V                  | V                 |
| 5                                       | Pengendalian kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan atau penurunan kualitas sempadan sungai, waduk/ bendungan, mata air, dan daerah rawa serta sumber daya air lainnya   | di 13 Kabupaten dan 1 Kota   | APBN &/ APBD     | Dis PU, BLH, Dishut                           | V                 | V                 | V                  | V                 |
| 6                                       | Pengendalian kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan atau penurunan kualitas sempadan pantai dan hutan mangrove   | di 13 Kabupaten dan 1 Kota   | APBN &/ APBD     | Dis PU, BLH, Dishut, DK                       | V                 | V                 | V                  | V                 |
| <b>E2 Pendayagunaan Sumber Daya Air</b> |  |  |                  |   |                   |                   |                    |                   |



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2025-2045



| NO | SASARAN PROGRAM  | LOKASI  | SUMBER PENDANAAN                              | INSTANSI PELAKSANA             | WAKTU PELAKSANAAN |                   |                    |                   |
|----|--|---|---|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|    |  |   |   |                                | I<br>(2015-2019)  | II<br>(2020-2025) | III<br>(2025-2030) | IV<br>(2030-2035) |
| 1  | Pembangunan dan Pengembangan jaringan irigasi pertanian basah (swah) akibat perkembangan dan pertumbuhan Kota - kota | Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau, Barito Timur, Katingan, Kotawaringin Timur, Seruyan.  | APBN &/ APBD                                  | Dis PU, Dis Tanak              | V                 | V                 | V                  | V                 |
| 2  | Pengembangan kawasan agroindustri yang melayani pengembangan jagung, Kedelai, Ubi Kayu                               | Kabupaten Kapuas, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Pulang Pisau  | APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota, Swasta DN/LN  | Dis Tanak, Dis PU              | V                 | V                 | V                  | V                 |
| 3  | Pengembangan kawasan agroindustri yang melayani pengembangan Padi  | Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau, Barito Timur, Katingan, Kotawaringin Timur, Seruyan,  | APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota, Swasta DN/LN  | Dis Tanak, Dis PU              | V                 | V                 | V                  | V                 |
| 4  | Pengembangan alur pelayanan transportasi sungai  | di 13 Kabupaten dan 1 Kota  | APBDP dan APBD Kab/ Kota                      | Dis PU, Dis Hub                | V                 | V                 | V                  | V                 |
| 5  | Pengembangan kawasan sektor pertanian tanaman pangan   | di 13 Kabupaten   | APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota, Swasta DN/LN. | Dis Tanak, Dis PU              | V                 | V                 | V                  | V                 |
| 8  | Pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan Daerah Irigasi  | Kotawaringin Barat, Lamandau, Kotawaringin Timur, Pulang Pisau, Barito Selatan, Barito Timur, Barito Utara, Murung Raya, Gunung Mas.                                      | APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota, Swasta DN/LN. | Dis Tanak, Dis PU              | V                 | V                 | V                  | V                 |
| 9  | Pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan Daerah Rawa   | Kabupaten Kapuas, Pulang Pisau, Barito Timur, Barito Selatan, Barito Utara, Murung Raya, Katingan, Kotawaringin Timur, Seruyan, Kotawaringin Barat, Lamandau dan Sukamara | APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota, Swasta DN/LN. | Dinas Pertanian dan Peternakan | V                 | V                 | V                  | V                 |



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2025-2045



| NO   | SASARAN PROGRAM   | LOKASI  | SUMBER PENDANAAN                             | INSTANSI PELAKSANA                | WAKTU PELAKSANAAN |                   |                    |                   |
|--|---|---|--|-----------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|  |   |   |  |                                   | I<br>(2015-2019)  | II<br>(2020-2025) | III<br>(2025-2030) | IV<br>(2030-2035) |
| 11   | Membangun jaringan prasarana dan sarana berbasis sungai (waterfront city)   | di 13 Kabupaten dan 1 Kota  | APBN, APBD Prov, APBD Kab/Kota, Swasta DN/LN | Dis PU, PDAM, Dis Budpar, Dis Hub | V                 | V                 | V                  | V                 |
| <b>E3 Perencanaan Pengendalian Daya Rusak Air</b>      |   |   |  |                                   |                   |                   |                    |                   |
| 1  | Penanganan Terpadu Daerah Aliran Sungai (DAS) Kritis  | di 13 Kabupaten dan 1 Kota  | APBN & /APBD/& BLN                           | Dis PU, Dis Hut, BLH              | V                 | V                 |                    |                   |
| 2  | Pembangunan dan peningkatan waduk/bendung   | di 13 Kabupaten dan 1 Kota  | APBN &/APBP/ & BLN                           | Dis PU                            | V                 | V                 |                    |                   |
| <b>F. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Lainnya</b> |   |   |  |                                   |                   |                   |                    |                   |
| 1  | Pembangunan sistem interkoneksi jaringan data informasi dari tingkat provinsi sampai ke tingkat desa                | di 13 Kabupaten dan 1 Kota  | APBN &/APBDP &/ BLN                          | Dis Hub                           | V                 | V                 | V                  |                   |
| 2  | Pembangunan PLTU di mulut tambang batubara  | di Kabupaten Pulang Pisau, Sampit, Pangkalan Bun, Buntok, Tamiang Layang, Gunung Mas, Katingan, Puruk Cahu  | APBN &/APBDP &/Swasta &/ BLN                 | PLN, Dis Tamben                   | V                 | V                 | V                  |                   |
| 5  | Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Minihidro (PLTM) dan Mikrohidro (PLTMH)                                       | di Kabupaten Gunung Mas, Kapuas dan Seruyan   | APBN &/APBD &/ Swasta &/BLN                  | PLN, Dis Tamben                   | V                 | V                 |                    |                   |
| 6  | Pembangunan Pembangkit Listrik Bayu/Angin (PLTB)  | di Kabupaten Sukamara, Seruyan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, dan Katingan.   | APBN &/APBD                                  | PLN, Dis Tamben                   | V                 | V                 | V                  | V                 |
| 7  | Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di desa-desa terpencil yang sulit dijangkau jaringan listrik PLN | di Kabupaten Sukamara, Seruyan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Katingan, Pulang Pisau, Kapuas, Barito Timur, Barito selatan, Barito Utara, Gunung Mas, Murung Raya | APBN &/APBD                                  | PLN, Dis Tamben                   | V                 | V                 | V                  | V                 |
| 8  | Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi terestrial yang melintasi ibukota provinsi dan kabupaten/kota           | di Kabupaten Sukamara, Seruyan, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Katingan, Pulang Pisau, Kapuas, Barito  | APBN &/APBD                                  | Telkom                            | V                 | V                 | V                  | V                 |



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2025-2045



| NO  | SASARAN PROGRAM   | LOKASI   | SUMBER PENDANAAN              | INSTANSI PELAKSANA          | WAKTU PELAKSANAAN |                   |                    |                   |
|---|---|--|-------------------------------|-----------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|   |   |  |                               |                             | I<br>(2015-2019)  | II<br>(2020-2025) | III<br>(2025-2030) | IV<br>(2030-2035) |
|   |   | Timur, Barito selatan, Barito Utara, Gunung Mas, Murung Raya.  |                               |                             |                   |                   |                    |                   |
| 10  | Penyediaan jaringan komunikasi Telepon Pedesaan (tambahan Desa Berdering) dan tambahan Internet Kecamatan.  | 323 Desa dan 11 Kecamatan di Prov. Kalteng   | APBN / APBD / SWASTA          | BTIP Ditjen Postel, Dis Hub | V                 | V                 | V                  |                   |
| 11  | Pembangunan Sistem Interkoneksi dan Jaringan Transmisi Tegangan Menengah 150 KV P.Raya - Kasongan - Sampit; Sampit-Pangkalan Bun; Muara Teweh -Buntok - P.Raya; Kasongan - Kuala Kurun; Pangkalan Bun- Nanga Bulik. | di Kabupaten Katingan, Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Murung Raya, Barito Utara, Barito Selatan Palangkaraya, Gunung Mas, Lamandau. | APBN                          | PLN, Dis Tamben             |                   | V                 | V                  | V                 |
| 1   | Mengembangkan pengelolaan kawasan lindung   | di 13 Kabupaten dan 1 Kota   | APBN &/ APBD &/ APBD Kab/kota | Dishut, Kemenhut            | V                 | V                 | V                  | V                 |
| 2   | Rehabilitasi dan pemantapan kawasan hutan lindung   | di 13 Kabupaten dan 1 Kota   | APBN &/ APBD &/ APBD Kab/kota | Dishut, Kemenhut            | V                 | V                 | V                  | V                 |
| 3   | Pengamanan hutan dan pengendalian kebakaran hutan   | Kapuas, Pulang Pisau, Katingan, Kotawaringin Timur, Sukamara, Kotawaringin Barat, Seruyan, Barito Selatan.                                   | APBN &/ APBDP &/ APBDK        | Dishut, BLH                 | V                 | V                 | V                  | V                 |
| <b>A2 Pengembangan Pengelolaan Kawasan Konservasi</b>                               |   |  |                               |                             |                   |                   |                    |                   |
| 1   | Cagar Alam Bukit Sapat Hawung   |  | APBN &/ APBD                  | Dishut, Kemenhut            | V                 | V                 | V                  | V                 |
| 2   | Cagar Alam Pararawen I dan II   |  | APBN &/ APBD                  | Dishut, Kemenhut            | V                 | V                 | V                  | V                 |
| 3   | Cagar Alam Bukit Tangkiling   |  | APBN &/ APBD                  | Dishut, Kemenhut            | V                 | V                 | V                  | V                 |
| 4   | Suaka Margasatwa Sungai Lamandau  |  | APBN &/ APBD                  | Dishut, Kemenhut            | V                 | V                 | V                  | V                 |
| 5   | Taman Nasional Tanjung Puting   |  | APBN &/ APBD                  | Dishut, Kemenhut            | V                 | V                 | V                  | V                 |
| 6   | Taman Nasional Bukit Baka-Bukit Raya  |  | APBN &/ APBD                  | Dishut, Kemenhut            | V                 | V                 | V                  | V                 |
| 7   | Taman Nasional Sebangau   |  | APBN &/ APBD                  | Dishut, Kemenhut            | V                 | V                 | V                  | V                 |
| 8   | Taman Nasional Gunung Lumut-Lampeong  |  | APBN &/ APBD                  | Dishut, Kemenhut            | V                 | V                 | V                  | V                 |
| 9   | Taman Hutan Raya Kalimantan Tengah  |  | APBN &/ APBD                  | Dishut, Kemenhut            | V                 | V                 | V                  | V                 |
| 10  | Taman Hutan Raya Lapak Jaru   |  | APBN &/ APBD                  | Dishut, Kemenhut            | V                 | V                 | V                  | V                 |
| 11  | Taman Buru  |  | APBN &/ APBD                  | Dishut, Kemenhut            | V                 | V                 | V                  | V                 |
| <b>A3 Rehabilitasi hutan dan peningkatan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS)</b> |   |  |                               |                             |                   |                   |                    |                   |
| 1   | DAS Barito  |  | APBN &/ APBD                  | Dis. PU/Dishut.             | V                 | V                 |                    |                   |
| 2   | DAS Kahayan   |  | APBN &/ APBD                  | Dis. PU/Dishut.             | V                 | V                 |                    |                   |



| NO   | SASARAN PROGRAM  | LOKASI   | SUMBER PENDANAAN       | INSTANSI PELAKSANA             | WAKTU PELAKSANAAN |                   |                    |                   |
|--|--|--|------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|  |  |  |                        |                                | I<br>(2015-2019)  | II<br>(2020-2025) | III<br>(2025-2030) | IV<br>(2030-2035) |
| 3  | DAS Mentaya  |  | APBN &/ APBD           | Dis. PU/Dishut.                | V                 | V                 |                    |                   |
| 4  | DAS Seruyan  |  | APBN &/ APBD           | Dis. PU/Dishut.                | V                 | V                 |                    |                   |
| 5  | DAS Kapuas   |  | APBN &/ APBD           | Dis. PU/Dishut.                | V                 | V                 |                    |                   |
| 6  | DAS Katingan   |  | APBN &/ APBD           | Dis. PU/Dishut.                | V                 | V                 |                    |                   |
| 7  | DAS Sebangau   |  | APBN &/ APBD           | Dis. PU/Dishut.                | V                 | V                 |                    |                   |
| 9  | DAS Kumai  |  | APBN &/ APBD           | Dis. PU/Dishut.                | V                 | V                 |                    |                   |
| 10   | DAS Lamandau   |  | APBN &/ APBD           | Dis. PU/Dishut.                | V                 | V                 |                    |                   |
| 11   | DAS Arut   |  | APBN &/ APBD           | Dis. PU/Dishut.                | V                 | V                 |                    |                   |
| 12   | DAS Jelai  |  | APBN &/ APBD           | Dis. PU/Dishut.                | V                 | V                 |                    |                   |
| <b>B. Perwujudan Pengembangan Kawasan Budi Daya</b>                    |  |  |                        |                                |                   |                   |                    |                   |
| <b>B1 Pengembangan Kawasan Andalan Sektor Kehutanan</b>                |  |  |                        |                                |                   |                   |                    |                   |
| 1  | Revitalisasi pemanfaatan hasil hutan kayu dan industri kehutanan                               | Kadal Sampit dsk, Kadal Pangkalan Bun dsk, Kadal Palangkaraya dsk, Kadal Kuala Kapuas dsk, Kadal Buntok dsk, Kadal Muara Teweh dsk | APBN &/ APBD &/ Swasta | Dis Hut, Dis Perindag          | V                 | V                 | V                  | V                 |
| 2  | Pengembangan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu dan jasa lingkungan                            | Kadal Sampit dsk, Kadal Pangkalan Bun dsk, Kadal Palangkaraya dsk, Kadal Kuala Kapuas dsk, Kadal Buntok dsk, Kadal Muara Teweh dsk | APBN &/ APBD &/ Swasta | Dis Hut, Dis Perindag, Dis Par | V                 | V                 | V                  | V                 |
| 3  | Pengamanan hutan dan kebakaran hutan   | Tersebar di 13 Kab. Dan 1 Kota   | APBN &/ APBD           | Dis Hut, BLH                   | V                 | V                 | V                  | V                 |
| 4  | Pemberdayaan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan                                  | Tersebar di 13 Kab. Dan 1 Kota   | APBN &/ APBD           | Dis Hut                        | V                 | V                 | V                  | V                 |
| <b>B2 Pengembangan Kawasan Andalan Sektor Pertanian dan Perkebunan</b> |  |  |                        |                                |                   |                   |                    |                   |
| 1  | Pengembangan Kawasan andalan sektor pertanian tanaman pangan (padi, palawija, dan buah-buahan) | Kadal Sampit dsk, Kadal Pangkalan Bun dsk, Kadal Palangkaraya dsk, Kadal Kuala Kapuas dsk, Kadal Buntok dsk, Kadal Muara Teweh dsk | APBN &/ APBD &/ Swasta | Dis Tanak                      | V                 | V                 | V                  | V                 |



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2025-2045



| NO  | SASARAN PROGRAM   | LOKASI   | SUMBER PENDANAAN       | INSTANSI PELAKSANA | WAKTU PELAKSANAAN |                   |                    |                   |
|---|---|--|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|   |   |  |                        |                    | I<br>(2015-2019)  | II<br>(2020-2025) | III<br>(2025-2030) | IV<br>(2030-2035) |
| 2   | Pengembangan Kawasan andalan sektor perkebunan kelapa sawit   | Kadal Sampit dsk, Kadal Pangkalan Bun dsk, Kadal Kuala Kapuas dsk.   | APBN &/ APBD &/ Swasta | Dis Bun            | V                 | V                 | V                  | V                 |
| <b>B3 Pengembangan Kawasan Andalan untuk Sektor Perikanan dan Kelautan</b>  |   |  |                        |                    |                   |                   |                    |                   |
| 1   | Pengembangan Kawasan Andalan sektor perikanan kelautan di laut/pantai Selatan   | Kadal Sampit dsk dan Kadal Pangkalan Bun dsk, Kadal Kuala Kapuas dsk, dan Kadal Laut Seruyan.                                      | APBN &/ APBD &/ Swasta | Dinas Perikanan    | V                 | V                 | V                  | V                 |
| 2   | Pengembangan Kawasan Andalan sektor perikanan perairan darat (sungai, danau)  | Kadal Sampit dsk, Kadal Pangkalan Bun dsk, Kadal Palangkaraya dsk, Kadal Kuala Kapuas dsk, Kadal Buntok dsk, Kadal Muara Teweh dsk | APBN &/ APBD &/ Swasta | Dinas Perikanan    | V                 | V                 | V                  | V                 |
| <b>B4 Pengembangan Kawasan Andalan untuk sektor ekonomi perdagangan dan jasa</b>  |   |  |                        |                    |                   |                   |                    |                   |
| 4   | Mengembangkan outlet Bandar Udara, Pelabuhan laut dilengkapi fasilitas bongkar muat untuk mendukung komoditas perkebunan, perikanan, pertambangan dan lainnya | Kadal Sampit dsk, Kadal Pangkalan Bun dsk, Kadal Palangkaraya dsk, Kadal Kuala Kapuas dsk, Kadal Muara Teweh dsk                   | APBN & APBD            | Dis Hub, Dis PU    | V                 | V                 |                    |                   |
| 1   | Pengembangan kawasan andalan untuk pertambangan (batubara, emas, bijih besi dan zircon)   | Kadal Sampit dsk, Kadal Pangkalan Bun dsk, Kadal Palangkaraya dsk, Kadal Kuala Kapuas dsk, Kadal Buntok dsk, Kadal Muara Teweh dsk | APBN & APBD            | Dis Tamben, BLH    | V                 | V                 | V                  | V                 |
| <b>C. Perwujudan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi</b>  |   |  |                        |                    |                   |                   |                    |                   |
| <b>C2 Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) dari Sudut Pandang Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi</b> |   |  |                        |                    |                   |                   |                    |                   |
| 2   | Rehabilitasi dan pengembangan kawasan pertanian berkelanjutan yang dipaduselaraskan dengan pengembangan irigasi teknis  | Kapuas, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Pulang Pisau, dan Barito Timur;  | APBN & APBD            | Dis Tanak, Dis PU  | V                 | V                 | V                  | V                 |
| 5   | Rehabilitasi dan pengembangan Kawasan perkebunan (kelapa sawit, kelapa dalam, karet, lada dan kakao)  | Lamandau, Sukamara, Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur,  | APBN & APBD            | Dis Bun            | V                 | V                 | V                  | V                 |



| NO  | SASARAN PROGRAM   | LOKASI   | SUMBER PENDANAAN | INSTANSI PELAKSANA                     | WAKTU PELAKSANAAN |                   |                    |                   |
|---|---|--|------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|   |   |  |                  |  | I<br>(2015-2019)  | II<br>(2020-2025) | III<br>(2025-2030) | IV<br>(2030-2035) |
|   |   | Seruyan, Katingan, Gunung Mas, dan Barito Utara;   |                  |  |                   |                   |                    |                   |
| 6   | Rehabilitasi dan pengembangan Kawasan terpadu Industri, pelabuhan, petikemas dan pergudangan, serta Simpul transportasi darat, laut dan udara (KSP Pangkalan Bun – Kumai, KSP Sampit - Bagendang, dan KSP Batanjung-Kapuas          | Kotawaringin Barat, di Kotawaringin Timur, di Kapuas   | APBN & APBD      | Dis PU, Dis Perindag, Dis Hub, Dis Bun | V                 | V                 | V                  | V                 |
| 7   | Rehabilitasi dan pengembangan Kawasan strategis ekonomi sektor unggulan agropolitan.  | Kotawaringin Barat, Kapuas, Barito Timur, Sukamara, Seruyan, Katingan, Kotawaringin Timur, Pulang Pisau. | APBN & APBD      | Dis Tanak, Disbun,                     | V                 | V                 | V                  | V                 |
| <b>C2 Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi dari Sudut Pandang Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup</b>             |   |  |                  |  |                   |                   |                    |                   |
| 1   | Rehabilitasi dan pengembangan Kawasan Strategis Ekosistem Nasional di Kalimantan Tengah (Kawasan Ekosistem Air Hitam, Dome Gambut, dan Kawasan Gambut Tebal. Kawasan Ekosistem Pantai (mangrove), Kawasan Ekosistem Gambut, Kawasan | Kapuas, Barito Selatan, dan di sepanjang jalur pantai selatan  | APBN &/ APBD     | Dis PU, Dis Hut.                       | V                 | V                 | V                  | V                 |
| 2   | Rehabilitasi dan pengembangan Daerah Aliran Sungai (DAS), (DAS Barito, DAS Kapuas, DAS Kahayan, DAS Katingan, DAS Seruyan, dan DAS Mentaya, DAS Jelai, dan DAS Jemaras)   | di 13 Kabupaten dan 1 Kota   | APBN &/ APBD     | Dis PU, Dis Hut.                       | V                 | V                 | V                  | V                 |
| <b>C3 Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi dari Sudut Pandang Kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi</b> |   |  |                  |  |                   |                   |                    |                   |
| 1   | Rehabilitasi dan pengembangan kawasan berpotensi pengembangan sumber daya perikanan di Kawasan Andalan Laut Seruyan.  | Seruyan, Katingan, Kotawaringin Barat, dan sekitarnya.   | APBN &/ APBD     | Dis Kelautan & Perikanan               |                   |                   |                    |                   |
| <b>C4 Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi dari Sudut Pandang Kepentingan Sosial Budaya</b>                                       |   |  |                  |  |                   |                   |                    |                   |
| 3   | Rehabilitasi dan Pengembangan Kawasan Strategis Sekitar Kawasan Adat Masyarakat   | tersebar di seluruh kabupaten/kota   | APBN &/ APBD     |  |                   |                   | V                  | V                 |

Sumber: Rancir RPJPD Prov. Kalteng 2025-2045

## **2.8.3 Rencana Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur**

### **2.8.3.1 Tujuan Penataan Ruang**

Tujuan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024-2044 adalah untuk **”Mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang mandiri berbasis pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan, sebagai simpul transportasi regional, nyaman, berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kelestarian sumberdaya alam”** dengan kebijakan penataan ruang Kabupaten Kotawaringin Timur tahun 2024-2044 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan akses pelayanan perkotaan dalam skala nasional dan sistem pusat pelayanan kota yang merata dan berhirarki;
2. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara;
3. Pengoptimalan lahan budidaya untuk mendukung pengembangan sektor pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan jasa;
4. Pengembangan pelayanan transportasi demi terwujudnya simpul transportasi regional; dan
5. Pengembangan kawasan budi daya dengan memperhatikan kualitas lingkungan berbasis daya dukung dan daya tampungnya serta kelestarian sumberdaya alam.

Meskipun Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki keunggulan komparatif, beberapa kendala perlu diatasi, seperti fluktuasi ketersediaan bahan baku, kurangnya diversifikasi produk pertanian, dan keterbatasan tenaga kerja terdidik. Peningkatan daya saing daerah dapat diwujudkan dengan memanfaatkan kebijakan/regulasi inovasi, mengoptimalkan potensi sektor unggulan, dan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat. Fokus utama pada kebijakan pengembangan struktur ruang adalah pengembangan sistem pusat pelayanan yang mengintegrasikan pusat pelayanan perkotaan dan perdesaan di seluruh wilayah Kabupaten. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana wilayah secara terpadu, mendukung posisi strategis Kabupaten di bagian tengah Provinsi Kalimantan Tengah. Kebijakan rencana pola ruang Kabupaten Kotawaringin Timur dapat dilihat pada **Tabel 2.75**.

**Tabel 2.75 Rencana Pola Ruang Kabupaten Kotawaringin Timur**

| Pola Ruang                  | Kawasan                         | Sub Kawasan   | Kode Kawasan | Luas (Ha)         |
|-----------------------------|---------------------------------|---|--------------|-------------------|
| Kawasan Budi Daya           | Kawasan Hutan Produksi          | Kawasan Hutan Produksi Terbatas   | HPT          | 180329.37         |
|                             |                                 | Kawasan Hutan Produksi Terbatas/Kawasan Permukiman Perdesaan              | HPT          | 1584.08           |
|                             |                                 | Kawasan Hutan Produksi Tetap  | HP           | 426490.27         |
|                             |                                 | Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Hortikultura                         | HP           | 192.37            |
|                             |                                 | Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Perikanan Budi Daya                  | HP           | 700.67            |
|                             |                                 | Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Permukiman Perdesaan                 | HP           | 706.26            |
|                             |                                 | Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Permukiman Perkotaan                 | HP           | 421.42            |
|                             |                                 | Kawasan Hutan Produksi Tetap/Kawasan Tanaman Pangan                       | HP           | 10104.67          |
|                             |                                 | Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi                              | HPK          | 253946.54         |
|                             |                                 | Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Perikanan Budidaya   | HPK          | 981.73            |
|                             |                                 | Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Permukiman Perdesaan | HPK          | 2136.05           |
|                             |                                 | Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Permukiman Perkotaan | HPK          | 45.24             |
|                             |                                 | Kawasan Hutan Produksi yang dapat Dikonversi/Kawasan Tanaman Pangan       | HPK          | 2146.40           |
|                             | Kawasan Perikanan               | Kawasan Perikanan Budi Daya   | IK-2         | 2824.34           |
|                             | Kawasan Permukiman              | Kawasan Permukiman Perdesaan  | PD           | 58444.11          |
|                             |                                 | Kawasan Permukiman Perkotaan  | PK           | 29955.28          |
|                             | Kawasan Pertahanan dan Keamanan | Kawasan Pertahanan dan Keamanan   | HK           | 73.36             |
|                             | Kawasan Pertanian               | Kawasan Hortikultura  | P-2          | 1039.90           |
|                             |                                 | Kawasan Perkebunan  | P-3          | 533802.09         |
|                             |                                 | Kawasan Tanaman Pangan  | P-1          | 15296.83          |
| Kawasan Peruntukan Industri | Kawasan Peruntukan Industri     | KPI   | 4499.87      |                   |
| <b>Kawasan Budidaya</b>     |                                 |   |              | <b>1525720.86</b> |
| Kawasan Lindung             | Badan Air                       | Badan Air   | BA           | 12043.67          |
|                             | Kawasan Ekosistem Mangrove      | Kawasan Ekosistem Mangrove  | EM           | 130.27            |



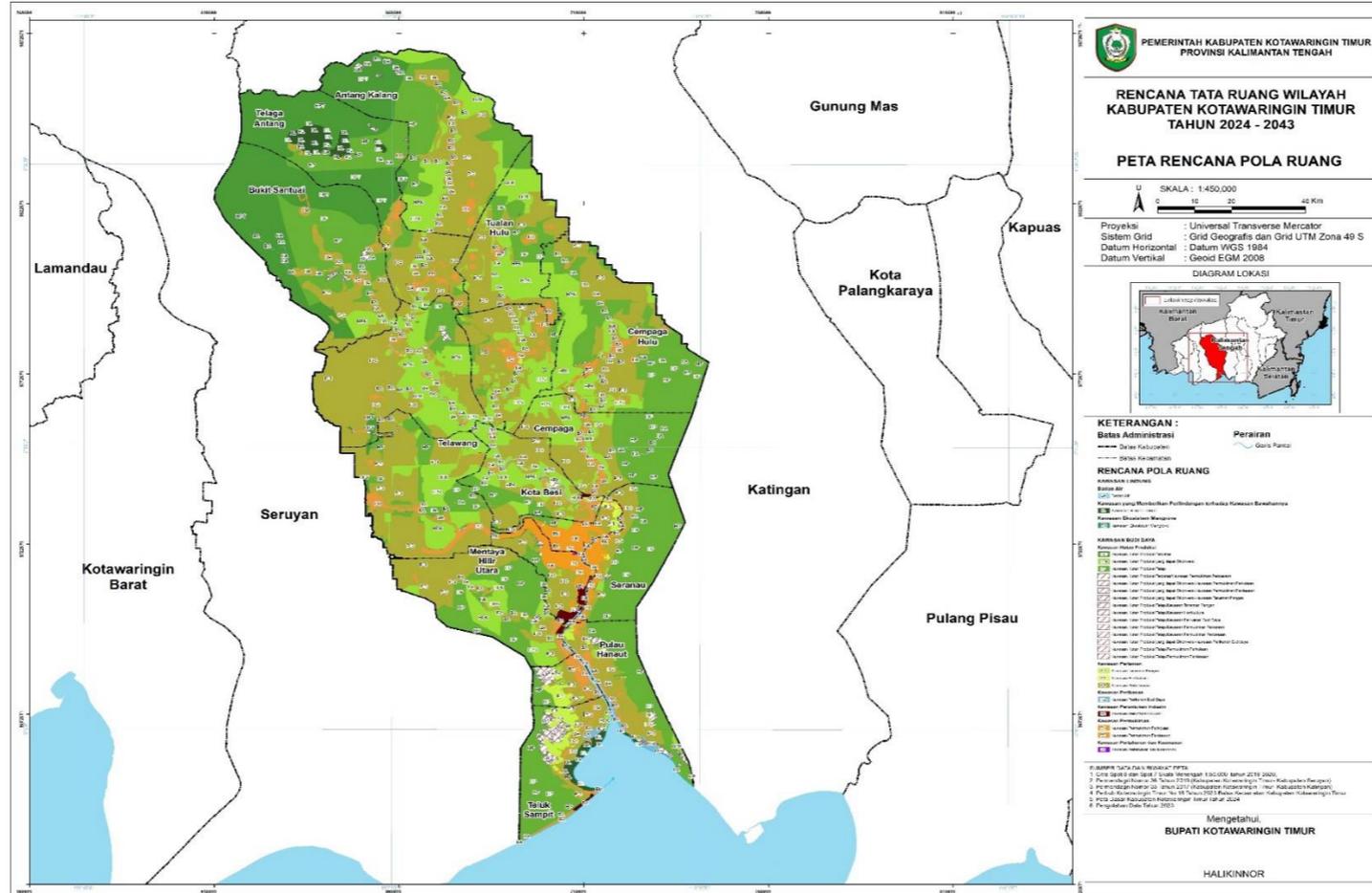
| Pola Ruang                                     | Kawasan  | Sub Kawasan           | Kode Kawasan | Luas (Ha)         |
|--|--|-----------------------|--------------|-------------------|
|  | Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya | Kawasan Hutan Lindung | HL           | 16487.53          |
| <b>Kawasan Lindung</b>                         |  |                       |              | <b>28661.47</b>   |
| <b>Pola Ruang Kabupaten Kotawaringin Timur</b> |  |                       |              | <b>1554382.33</b> |

Sumber: Materi Teknis RTRW Kab. Kotim 2024-2044

Berdasarkan tabel diatas, rencana pola ruang Kabupaten Kotawaringin Timur terdiri dari rencana pola ruang kawasan lindung Kabupaten Kotawaringin Timur adalah 28661.47 atau 1,84 % dari total rencana pola ruang, sedangkan rencana pola ruang kawasan budidaya Kabupaten Kotawaringin Timur adalah 1525720.86 ha atau sekitar 98,16 % dari total rencana pola ruang.



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJD)  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2025-2045



**Gambar 2.72 Peta Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024-2043**

Sumber: Materi Teknis RTRW Kab. Kotim 2024-2044

### **2.8.3.2 Rencana Sistem Permukiman**

#### **A. Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)**

Berdasarkan PP No 26 tahun 2008, Kota Sampit dalam sistem perkotaan nasional ditetapkan sebagai PKW dengan kategori revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan, dengan tahapan pengembangan/peningkatan fungsi. Jenjang kedua ialah Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Ditetapkan empat PKW untuk berfungsi sebagai simpul-simpul primer yang terdesentralisasi dalam wilayah Kalimantan Tengah secara keseluruhan, yakni; Sampit sebagai simpul primer untuk Sektor Tengah-Selatan wilayah. Pusat kegiatan wilayah perkotaan sampit terdiri dari wilayah administrasi Kecamatan Baamang, Mentawa Baru Ketapang dan Kecamatan Seranau. PKW Perkotaan Sampit memiliki peranan sebagai :

1. Pusat distribusi-koleksi regional-nasional
2. Pusat transportasi laut (umum) regional-nasional
3. Pintu sekunder transportasi udara regional-nasional
4. Pusat jasa transportasi darat dan sungai regional
5. Pusat jasa keuangan dan pariwisata regional
6. Pusat pemerintahan daerah otonomi kabupaten
7. Pusat pendidikan tinggi dan pelayanan kesehatan regional
8. Pusat permukiman perkotaan

#### **B. Pusat Kegiatan Lokal (PKL)**

Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yakni sebagai simpul sekunder dalam sektor wilayah. Ibukota kabupaten yang tidak merupakan PKW ditetapkan menjadi PKL Maka simpul ini juga bersifat primer dalam wilayah kabupatennya. PKL yang direncanakan untuk menunjang PKW Perkotaan Sampit terdiri dari :

1. PKL Samuda di Kecamatan Mentaya Hilir Selatan
2. PKL Simpang Sebabi di Kecamatan Telawang, dan
3. PKL Parenggean di Kecamatan Parenggean

Fungsi pusat kegiatan lokal di Kabupaten Kotawaringin Timur terdiri dari :

1. Pusat jasa transportasi lokal dan bagi kecamatan-kecamatan di sekitarnya yang menjadi wilayah pengaruhnya
2. Pusat perdagangan dan jasa maupun koleksi-distribusi hasil-hasil pertanian dan perkebunan lokal dan bagi kecamatan-kecamatan di sekitarnya yang menjadi wilayah pengaruhnya

3. Pusat pemerintahan kecamatan
4. Pusat fasilitas pelayanan kesehatan lokal dan bagi kecamatan-kecamatan di sekitarnya yang menjadi wilayah pengaruhnya
5. Pusat pelayanan pendidikan lokal dan bagi kecamatan-kecamatan di sekitarnya yang menjadi wilayah pengaruhnya

**C. Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)**

Pusat Pelayanan Kawasan (PPK), untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau ibukota Kecamatan atau beberapa desa/kelurahan, meliputi :

1. Bagendang, di Kecamatan Mentaya Hilir Utara
2. Ujung Pandaran, di Kecamatan Teluk Sampit
3. Bapinang, di Kecamatan Teluk Sampit
4. Kota Besi, di Kecamatan Kota Besi
5. Cempaka Mulia, di Kecamatan Cempaga
6. Pundu, di Kecamatan Cempaga Hulu
7. Tumbang Penyahuan, di Kecamatan Bukit Sentuai
8. Tumbang Kalang, di Kecamatan Antang Kalang
9. Kuala Kuayan, di Kecamatan Mentaya Hulu
10. Tumbang Mangkup, di Kecamatan Telaga Antang dan
11. Luwuk Sampun di Kecamatan Tualan Hulu.

Fungsi Pusat Pelayanan Kawasan di Kabupaten Kotawaringin Timur terdiri dari :

1. pusat pemerintahan kecamatan
2. pusat perdagangan dan jasa maupun koleksi-distribusi hasil-hasil pertanian dan perkebunan skala kecamatan
3. pusat jasa transportasi darat dan sungai skala kecamatan
4. pusat fasilitas pelayanan kesehatan skala kecamatan
5. pusat pelayanan pendidikan skala kecamatan

**D. Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL)**

Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) meliputi :

1. Desa Gunung Makmur di Kecamatan Antang Kalang,
2. Desa Beringin Agung di Kecamatan Telaga Antang
3. Desa Tumbang Sangai di Kecamatan Telaga Antang
4. Desa Lempuyang di Kecamatan Teluk Sampit,
5. Desa Tangar di Kecamatan Mentaya Hulu,
6. Desa Ramban di Kecamatan Mentaya Hilir Utara,
7. Desa Tumbang Batu di Kecamatan Bukit Santuai,
8. Desa Pelantaran di Kecamatan Cempaga Hulu .

Fungsi pusat pelayanan lingkungan sebagai :

- a. Pusat pemerintahan skala desa
- b. Pusat perdagangan dan jasa maupun koleksi-distribusi hasil-hasil pertanian dan perkebunan skala desa dan bagi desa-desa di sekitarnya yang menjadi wilayah pengaruhnya
- c. Pusat jasa transportasi darat dan sungai skala desa dan bagi desa-desa di sekitarnya yang menjadi wilayah pengaruhnya
- d. Pusat fasilitas pelayanan kesehatan skala desa dan bagi desa-desa di sekitarnya yang menjadi wilayah pengaruhnya
- e. Pusat pelayanan pendidikan skala desa dan bagi desa-desa di sekitarnya yang menjadi wilayah pengaruhnya

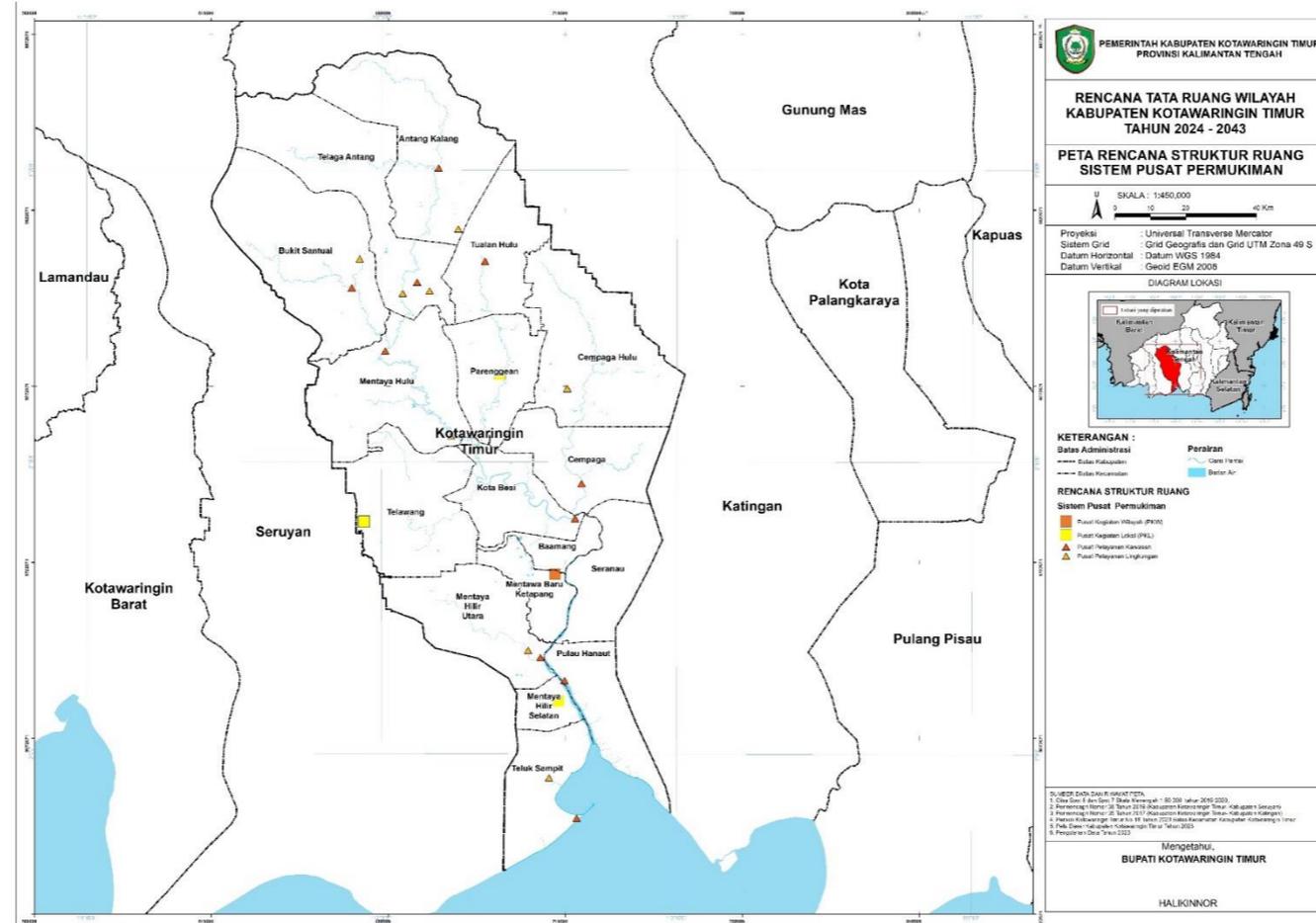
**Tabel 2.76 Sistem Pusat Permukiman**

| Sistem Pusat Perkotaan           | Lokasi Pusat                       | Kecamatan             |
|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)     | Kota Sampit                        | Baamang               |
|                                  |                                    | Mentawa Baru Ketapang |
|                                  |                                    | Seranau               |
| Pusat Kegiatan Lokal (PKL)       | Ibukota Kec. Mentaya Hilir Selatan | Mentaya Hilir Selatan |
|                                  | Ibukota Kec. Parenggean            | Parenggean            |
|                                  | Ibukota Kec. Telawang              | Telawang              |
| Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)    | Ibukota Kec Tualan Hulu            | Tualan Hulu           |
|                                  | Ibukota Kec. Antang Kalang         | Antang Kalang         |
|                                  | Ibukota Kec. Bukit Santuai         | Bukit Santuai         |
|                                  | Ibukota Kec. Cempaga               | Cempaga               |
|                                  | Ibukota Kec. Cempaga Hulu          | Cempaga Hulu          |
|                                  | Ibukota Kec. Kota Besi             | Kota Besi             |
|                                  | Ibukota Kec. Mentaya Hilir Utara   | Mentaya Hilir Utara   |
|                                  | Ibukota Kec. Mentaya Hulu          | Mentaya Hulu          |
|                                  | Ibukota Kec. Pulau Hanaut          | Pulau Hanaut          |
|                                  | Ibukota Kec. Telaga Antang         | Telaga Antang         |
|                                  | Ibukota Kec. Teluk Sampit          | Teluk Sampit          |
| Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) | Desa Beringin Agung                | Telaga Antang         |
|                                  | Desa Gunung Makmur                 | Antang Kalang         |
|                                  | Desa Lampuyang                     | Teluk Sampit          |
|                                  | Desa Pelantaran                    | Cempaga Hulu          |
|                                  | Desa Ramban                        | Mentaya Hilir Utara   |
|                                  | Desa Tangar                        | Mentaya Hulu          |
|                                  | Desa Tumbang Batu                  | Bukit Santuai         |
|                                  | Desa Tumbang Sangai                | Telaga Antang         |

Sumber: Materi Teknis RTRW Kab. Kotim 2024-2044, Hasil Pengolahan 2024.



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJD)  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2025-2045



Gambar 2.73 Peta Rencana Struktur Ruang Sistem Pusat Permukiman di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024-2043

Sumber: Materi Teknis RTRW Kab. Kotim 2024-2044



### 2.8.3.3 Rencana Kawasan Strategis

Penetapan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi memiliki beberapa kriteria yaitu:

1. Memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh;
2. Memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi kota;
3. Memiliki potensi ekspor;
4. Memiliki pusat kegiatan yang mempunyai pengaruh terhadap sektor dan pengembangan wilayah;
5. Didukung jaringan prasarana dan fasilitas penunjang kegiatan ekonomi;
6. Ditetapkan untuk mempercepat pertumbuhan kawasan tertinggal;
7. Ditetapkan untuk mempertahankan tingkat produksi sumber energi dalam rangka mewujudkan ketahanan energi;
8. Memiliki pusat kegiatan pengelolaan, pengolahan, dan distribusi bahan baku menjadi bahan jadi;
9. Kegiatan ekonomi yang memanfaatkan teknologi tinggi;
10. Memiliki fungsi untuk mempertahankan pangan tingkat produksi pangan dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan. Kawasan strategis ini dapat ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan (kp2b);
11. Memiliki pusat pengembangan produk unggulan; dan/atau
12. Memiliki pusat kegiatan perdagangan dan jasa

Berdasarkan kriteria diatas maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 (tiga) kawasan strategis kabupaten kotawaringin timur yang dilihat dari sudut pandang kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu:

1. Kawasan Cempaga Hulu

Kawasan cempaga hulu diproyeksikan akan berkembang sebagai pusat pengembangan industri smelter yang saat ini sudah didukung dengan ketersediaan sumber listrik pada layanan GI Sudah.



**Gambar 2.74 Bahan Baku Smelter Bauksit di Cempaga Hulu**

*Sumber: Materi Teknis RTRW Kab. Kotim 2024-2044*

2. Kawasan Peruntukan Industri Bagendang

Merupakan pusat kegiatan industri yang memiliki kegiatan koleksi dan distribusi hasil kegiatan industri.



**Gambar 2.75 Kondisi KI Bagendang**

*Sumber: Materi Teknis RTRW Kab. Kotim 2024-2044*

3. Kawasan Perkotaan Sampit

Merupakan pusat strategis dari sisi penyediaan layanan sarana pelayanan dan utilitas dan memberikan peranan sebagai PKW di Provinsi Kalimantan Tengah

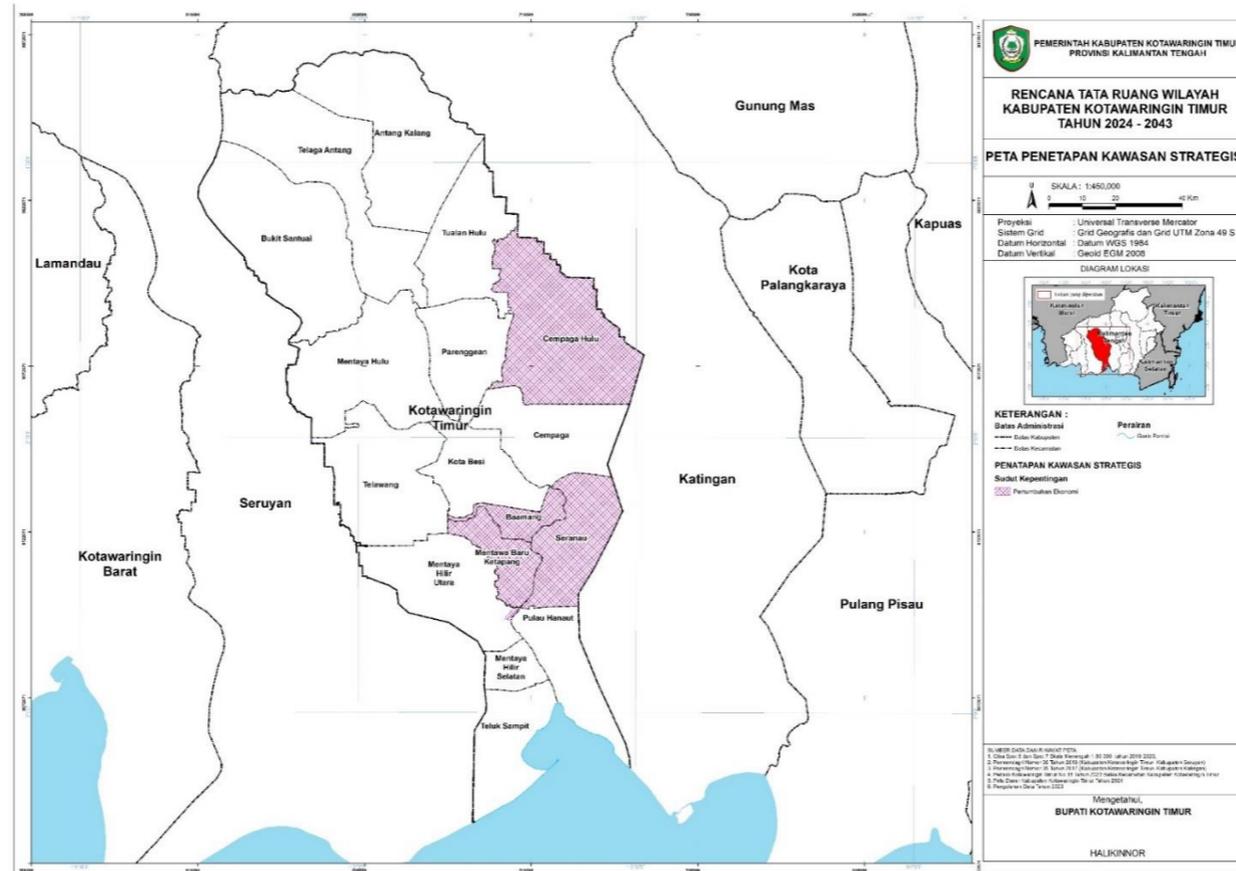


**Gambar 2.76 Perkotaan Sampit Sebagai PKW Di Provinsi Kalimantan Tengah**

*Sumber: Materi Teknis RTRW Kab. Kotim 2024-2044*



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2025-2045



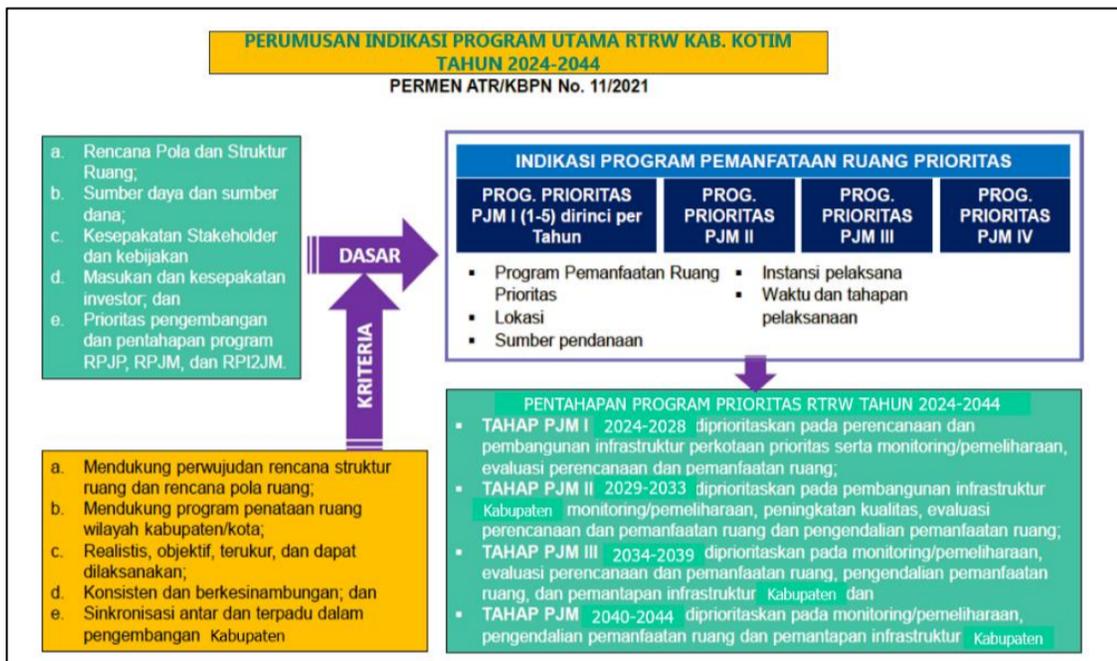
**Gambar 2.77** Peta Kawasan Strategis di Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2024-2043

Sumber: Materi Teknis RTRW Kab. Kotim 2024-2044



### 2.8.3.4 Indikasi Program Pemanfaatan Ruang

Dalam rangka menyusun kebijakan pengembangan wilayah tidak lepas dari pertimbangan perumusan indikasi program pemanfaatan ruang, hal ini bertujuan agar kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah, lembaga, dan/atau masyarakat dapat terkoordinasi untuk mencapai tujuan dan sasaran sesuai dengan prosedur, alokasi anggaran, dan waktu pelaksanaan yang telah ditetapkan.



**Gambar 2.78 Perumusan Indikasi Program Utama RTRW Kotawaringin Timur Tahun 2024-2044**

Sumber: Materi Teknis RTRW Kab. Kotim 2024-2044

## 2.9 BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) merupakan komponen penting dalam strategi pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur. Dalam Rancangan Teknokratik RPJMD 2025-2029, BUMD diposisikan sebagai penggerak ekonomi daerah dan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). Analisis terhadap kondisi existing BUMD menunjukkan perlunya peningkatan kinerja dan optimalisasi peran. Untuk itu, arah kebijakan difokuskan pada penguatan tata kelola, peningkatan profesionalisme manajemen, dan diversifikasi usaha. Program prioritas meliputi restrukturisasi BUMD yang kurang produktif, pengembangan BUMD baru di sektor potensial, serta peningkatan kapasitas SDM. Target yang ditetapkan mencakup pertumbuhan aset, peningkatan laba, dan kontribusi terhadap PAD. Strategi implementasi melibatkan penguatan regulasi, peningkatan investasi, dan pengembangan kemitraan strategis. Dengan pendekatan ini, diharapkan BUMD dapat berkontribusi lebih signifikan terhadap pembangunan dan



kesejahteraan masyarakat Kotawaringin Timur dalam periode 2025-2029.

## **BAB III**

### **PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS**

#### **3.1 PERMASALAHAN**

Permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Kotawaringin Timur diperoleh melalui identifikasi masalah berdasarkan hasil eksisting pada setiap bidang. Permasalahan timbul sebagai akibat dari belum optimalnya pemanfaatan kekuatan dan peluang yang dimiliki daerah, belum diantisipasi kelemahan dan ancaman yang dihadapi daerah. Selama proses pembangunan, terdapat capaian-capaian yang belum optimal ataupun belum sesuai target yang ditetapkan, sehingga diharapkan hasil rumusan permasalahan berikut dapat ditindaklanjuti dalam pembangunan kedepannya.

##### **3.1.1 Bidang Ekonomi**

Kabupaten Kotawaringin Timur menghadapi beberapa tantangan ekonomi dalam perencanaan pembangunan jangka panjang 2025-2045. Permasalahan utama meliputi rendahnya laju pertumbuhan sektor industri pengolahan dan kontribusi sektor konstruksi terhadap PDRB dibandingkan dengan tingkat provinsi. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap permasalahan ini antara lain investasi pemerintah yang belum optimal untuk industrialisasi, keterbatasan APBD, ketergantungan tinggi terhadap APBN, rendahnya PAD, dan belum optimalnya pemanfaatan komoditi unggulan daerah. Potensi isu strategis ke depan mencakup tertinggalnya sektor industri pengolahan, stagnasi pembangunan infrastruktur, ketergantungan fiskal berkelanjutan, risiko tidak tercapainya target pertumbuhan ekonomi jangka panjang, ketidakmerataan pembangunan antar wilayah, dan tantangan dalam mengoptimalkan potensi komoditi unggulan daerah. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan strategi komprehensif yang mencakup peningkatan investasi di sektor prioritas, penguatan kemandirian fiskal dan optimalisasi potensi komoditi unggulan guna meningkatkan daya saing ekonomi dan mencapai pertumbuhan berkelanjutan dalam jangka panjang.



Secara umum, Kabupaten Kotawaringin Timur menghadapi tantangan signifikan dalam aspek ekonomi, terutama terkait pengembangan sektor industri pengolahan dan konstruksi. Ketergantungan fiskal yang tinggi, terbatasnya PAD, dan belum optimalnya pemanfaatan sumber daya lokal menjadi faktor-faktor kunci yang perlu diatasi. Untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang 2025-2045, diperlukan strategi komprehensif yang mencakup peningkatan investasi di sektor-sektor prioritas, penguatan kemandirian fiskal dan optimalisasi potensi komoditi unggulan. Dengan demikian, diharapkan Kabupaten Kotawaringin Timur dapat meningkatkan daya saing ekonominya dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

### **3.1.2 Bidang Sosial**

Kabupaten Kotawaringin Timur menghadapi beberapa tantangan signifikan dalam bidang sosial yang perlu diperhatikan dalam perencanaan pembangunan jangka panjang 2025-2045. Permasalahan utama meliputi laju pertumbuhan penduduk yang lebih rendah dibandingkan Provinsi Kalimantan Tengah, jumlah penduduk miskin dan keluarga pra sejahtera tertinggi se-Provinsi Kalimantan Tengah, serta Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yang masih lebih rendah dibanding provinsi. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan ekonomi yang signifikan dan belum optimalnya pemanfaatan potensi sumber daya manusia dalam aktivitas ekonomi daerah.

Akar permasalahan sosial tersebut beragam, mencakup kesadaran masyarakat dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang belum optimal, penyediaan fasilitas dan SDM kesehatan yang belum memadai, serta investasi pemerintah pada sektor kesehatan yang terkendala keterbatasan APBD. Tingginya tingkat pengangguran terbuka, ketergantungan lapangan pekerjaan pada sektor pemerintahan dan perusahaan besar, serta dominansi sektor informal dalam penyerapan tenaga kerja juga menjadi faktor penting. Perkembangan sektor

UMKM yang signifikan namun belum memberikan manfaat optimal akibat keterbatasan kemampuan pengelolaan usaha para pelaku UMKM turut berkontribusi pada kompleksitas permasalahan sosial.

Menghadapi tantangan ini, Kabupaten Kotawaringin Timur perlu mengembangkan strategi komprehensif yang meliputi peningkatan kualitas dan akses layanan kesehatan, pengembangan sumber daya manusia, diversifikasi lapangan kerja, penguatan sektor UMKM, serta optimalisasi program pengentasan kemiskinan. Fokus pada pengembangan kualitas sumber daya manusia, penciptaan lapangan kerja yang inklusif, dan penguatan perlindungan sosial menjadi kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial di masa mendatang.

### **3.1.3 Bidang Tata Kelola**

Kabupaten Kotawaringin Timur menghadapi beberapa tantangan signifikan dalam bidang tata kelola yang memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan pembangunan jangka panjang. Permasalahan-permasalahan ini mencakup berbagai aspek, termasuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang saling terkait dan mempengaruhi kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan.

Dalam sektor pendidikan, terdapat beberapa isu krusial yang perlu ditangani. Akses pendidikan yang terbatas di daerah terpencil menjadi kendala utama, diperparah dengan kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Keterbatasan akses ke sarana dan prasarana pendidikan juga menjadi hambatan signifikan. Faktor ekonomi keluarga seringkali menjadi penghalang bagi anak-anak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Selain itu, jarak sekolah yang sulit diakses di beberapa wilayah serta kurangnya motivasi belajar di kalangan siswa turut berkontribusi pada rendahnya tingkat partisipasi dan kualitas pendidikan di daerah ini.

Permasalahan di bidang kesehatan juga memerlukan perhatian serius. Kurangnya pengetahuan ibu tentang gizi,



kemiskinan, dan keterbatasan akses pangan bergizi menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi status kesehatan masyarakat, terutama ibu dan anak. Pelayanan kesehatan ibu dan anak yang belum optimal serta sanitasi lingkungan yang buruk turut memperburuk kondisi kesehatan masyarakat. Terbatasnya akses layanan kesehatan di beberapa wilayah juga menjadi tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara menyeluruh.

Ketimpangan pembangunan antar wilayah menjadi isu strategis yang mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat. Hal ini tercermin dari rendahnya kualitas pendidikan dan terbatasnya akses layanan kesehatan di beberapa daerah. Perbedaan tingkat pembangunan ini dapat memicu kesenjangan sosial dan ekonomi yang lebih luas jika tidak ditangani secara tepat.

Permasalahan sanitasi juga menjadi fokus penting dalam tata kelola Kabupaten Kotawaringin Timur. Infrastruktur sanitasi yang terbatas di kabupaten menjadi tantangan utama dalam mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih. Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi memperburuk situasi ini. Selain itu, lemahnya penegakan regulasi sanitasi turut berkontribusi pada buruknya kondisi sanitasi di beberapa wilayah.

Menghadapi kompleksitas permasalahan ini, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi dalam tata kelola Kabupaten Kotawaringin Timur. Strategi yang holistik meliputi peningkatan akses dan kualitas pendidikan, perbaikan layanan kesehatan, pengembangan infrastruktur yang merata, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap sanitasi dan kesehatan lingkungan. Dengan demikian, diharapkan Kabupaten Kotawaringin Timur dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya secara menyeluruh dan mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dalam jangka panjang.

### 3.1.4 Bidang Ketahanan dan Ekologi

Kabupaten Kotawaringin Timur menghadapi tantangan serius dalam bidang ketahanan ekologi. Permasalahan pokok yang diidentifikasi adalah tingginya risiko bencana di wilayah ini. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor yang saling terkait dan memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan pembangunan jangka panjang.

Salah satu akar permasalahan yang signifikan adalah masih luasnya wilayah yang terdampak banjir. Kondisi ini tidak hanya mengancam keselamatan penduduk, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi yang besar. Banjir yang terjadi secara berulang dapat merusak infrastruktur, mengganggu aktivitas ekonomi, dan menurunkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, penanganan masalah banjir menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan ketahanan ekologi daerah.

Permasalahan lain yang tidak kalah pentingnya adalah masih luasnya wilayah yang mengalami kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran ini tidak hanya merusak ekosistem dan keanekaragaman hayati, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan emisi gas rumah kaca dan pencemaran udara. Dampak negatif dari kebakaran hutan dan lahan ini dapat meluas hingga ke daerah sekitar, bahkan lintas batas negara. Pengendalian dan pencegahan kebakaran hutan dan lahan menjadi tantangan besar yang perlu ditangani secara komprehensif.

Selain itu, Kabupaten Kotawaringin Timur juga menghadapi masalah kekeringan di sebagian wilayahnya. Masih luasnya wilayah yang terdampak rawan kekeringan menimbulkan kekhawatiran terhadap ketersediaan air bersih dan produktivitas pertanian. Kekeringan dapat mengancam ketahanan pangan, mengurangi pendapatan petani, dan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Mengingat kompleksitas permasalahan ini, diperlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi dalam menangani isu-isu ketahanan ekologi di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Strategi adaptasi dan mitigasi bencana, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan, serta perlindungan dan rehabilitasi hutan perlu menjadi bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang daerah. Dengan demikian, diharapkan Kabupaten Kotawaringin Timur dapat meningkatkan ketahanan ekologisnya dan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan berkelanjutan bagi masyarakatnya di masa depan.

## **3.2 ISU STRATEGIS**

### **3.2.1 Tren Pembangunan Global**

Merujuk pada dokumen RPJPN 2025-2045 terdapat 10 megatren global yang akan dihadapi menuju 2045. Megatren ini memiliki 2 sisi yang harus dikelola, yang pertama adalah potensi keamjuan bagi kondisi sosial dan ekonomi global, namun pada sisi lainnya merupakan disrupsi. Berikut adalah 10 megatren tersebut :

1). Demografi Global

Perkembangan demografi global merupakan faktor penting yang mempengaruhi perkembangan ekonomi dan sosial dunia. Terdapat beberapa isu penting terkait demografi global yaitu laju pertumbuhan penduduk dunia yang cenderung semakin melambat, perubahan kualitas keluarga akibat pergeseran demografi skala mikro, serta kecenderungan peningkatan konsentrasi penduduk dunia pada kawasan Asia dan Afrika.

2). Geopolitik dan Geoekonomi

Dinamika geopolitik global ke depan akan menjadi tantangan bagi setiap negara, termasuk Indonesia. Peningkatan kewaspadaan global akibat konflik, persaingan geopolitik, kontestasi geopolitik, serta krisis di berbagai sektor merupakan beberapa tantangan terkait dinamika geopolitik global. Adapun peningkatan dominasi nilai *output* negara berkembang, sektor komoditas yang tidak lagi menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi negara berkembang, perkembangan institusi ekonomi sebagai sumber pertumbuhan negara berkembang, potensi perkembangan teknologi dan ekonomi dari negara berkembang,

serta potensi secara umum perekonomian global pada tahun 2050 yang meningkat 3 kali lipat dibanding tahun 2015 merupakan beberapa isu terkait geo ekonomi.

### 3). Perkembangan Teknologi

Kecepatan perubahan teknologi telah menimbulkan disrupsi teknologi di berbagai kehidupan masyarakat. Keperluan peningkatan kesiapan yang adaptif dari masyarakat terkait teknologi, akselerasi disrupsi teknologi di berbagai sektor akibat pandemi, pengaruh teknologi terhadap sektor manufaktur, pengaruh perkembangan teknologi terhadap sektor pendidikan, potensi perubahan jenis pekerjaan akibat tergantikan oleh teknologi, percepatan adaptasi sektor ekonomi terhadap teknologi, pemanfaatan teknologi dalam pemerintahan, serta pemanfaatan teknologi untuk perumusan kebijakan merupakan beberapa isu terkait perkembangan teknologi.

### 4). Urbanisasi Dunia

Urbanisasi berdampak pada peningkatan jumlah penduduk perkotaan dan ukuran kota. Tekanan penduduk dan pembangunan perkotaan di negara *emerging economies* yang tidak memadai dan kurang terencana dapat memperburuk pelayanan masyarakat dan kegiatan ekonomi secara menyeluruh. Pada sisi lain perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang cepat dapat memacu inovasi kawasan perkotaan dalam menyelesaikan masalah

### 5). Konstelasi Perdagangan Global

Terdapat beberapa isu terkait perdagangan global diantaranya adalah pergeseran peningkatan peranan negara berkembang dalam ekonomi global yang mendorong perdagangan internasional berpusat dikawasan Asia-Afrika, kolaborasi produksi bersama internasional dan rantai pasok global semakin kuat dan terdiversifikasi, dampak kecepatan perubahan teknologi dan digital terhadap perdagangan internasional, serta perkembangan *hub* perdagangan strategis sebagai produk kerja sama kawasan.

6). Tata Kelola Keuangan Global

Potensi pergeseran dan perubahan struktur ekonomi dan demografi pada masa depan akan sangat mempengaruhi desain kebijakan fiskal global dan nasional. Terdapat beberapa isu terkait tata kelola keuangan global yaitu tren penggunaan *central bank digital currency* yang semakin meningkat serta disrupsi akibat perkembangan teknologi dan digital terhadap industri jasa keuangan.

7). Pertumbuhan Kelas Menengah

Jumlah kelas menengah dunia pada tahun 2045 diprediksi akan mencapai 8,8 miliar atau lebih dari 90% populasi dunia. Proporsi kelas menengah yang semakin meningkat akan mendorong penciptaan jenis dan lapangan pekerjaan baru serta kebutuhan konsumsi dan gaya hidup yang lebih beragam

8). Persaingan Sumber Daya Alam

Kelangkaan dan persaingan untuk mengakses sumber daya alam (energi, air, dan pangan) di tingkat global diproyeksikan akan meningkat pada masa mendatang akibat dari pertumbuhan jumlah penduduk, semakin beragam kegiatan yang dilakukan, serta peningkatan kebutuhan sumber daya alam.

9). Perubahan Iklim

Perubahan iklim, kerusakan lingkungan dan polusi serta kehilangan keanekaragaman hayati secara global akan berlangsung terus dan tidak dapat dihindari. Hal ini menyebabkan pada masa depan tantangan utamanya adalah bagaimana mempercepat implementasi pertumbuhan ekonomi hijau dan rendah karbon dalam kerangka kebijakan yang efektif. Selain itu pemanfaatan energi baru dan terbarukan juga perlu didorong

10). Pemanfaatan Luar Angkasa

Pada masa depan tren eksplorasi luar angkasa akan semakin meningkat, sejalan dengan meningkatnya perekonomian antariksa secara global.

### 3.2.2 Isu Pembangunan Nasional

Merujuk pada dokumen RPJPN 2025-2045 terdapat beberapa isu pembangunan nasional yang saat ini dihadapi oleh Indonesia dan berpotensi mempengaruhi pembangunan hingga tahun 2045. Berikut adalah isu pembangunan tersebut:

**Tabel 3.1 Isu Strategis Nasional**

| No | Isu Pembangunan Nasional           | Tantangan Pembangunan  |
|----|------------------------------------|--|
| 1. | Produktivitas Rendah               | Rendahnya tingkat produktivitas di tengah persaingan global yang semakin meningkat<br>• Produktivitas tenaga kerja Indonesia selama kurun waktu 2010-2022 masih relatif tertinggal   |
| 2. | IPTEKIN dan Riset Lemah            | a. Lemahnya kapasitas Ilmu pengetahuan, teknologi dan inovasi (IPTEKIN)<br>b. Kuantitas dan kualitas SDM peneliti belum memadai  |
| 3. | Deindustrialisasi Dini             | Deindustrialisasi dini dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah  |
| 4. | Pariwisata dibawah Potensinya      | Belum optimalnya pemanfaatan potensi pariwisata  |
| 5. | Ekonomi laut belum optimal         | Belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi lau   |
| 6. | Kontribusi UMKM dan Koperasi Kecil | Rendahnya kontribusi UMKM dan koperasi pada penciptaan nilai tambah ekonomi  |
| 7. | Integrasi domestik terbatas        | Belum optimalnya integrasi ekonomi domestic sehingga keterkaitan ekonomi antar wilayah masih relatif terbatas<br>Rendahnya peran perkotaan di Indonesia terhadap pertumbuhan ekonomi |
| 8. | Kualitas SDM yang makin rendah     | Kualitas pendidikan yang masih rendah.<br>• Tantangan dalam jaminan sosial meliputi belum meratanya akses untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, masih                               |
|    |                                    | rendahnya pemahaman manfaat jaminan sosial yang tercermin  |

| No  | Isu Pembangunan Nasional        | Tantangan Pembangunan  |
|-----|---------------------------------|--|
|     |                                 | dari kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja informal, dan tingkat kepatuhan pembayaran iuran jaminan sosial masih rendah.  |
| 9.  | Kemiskinan                      | ada bidang sosial, untuk mencapai tingkat kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang, tantangan yang dihadapi utamanya dikarenakan akses dan kualitas yang belum merata di sektor kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial.  |
| 10. | Kesenjangan Jawa dan Luar Jawa  | <p>a. Ketimpangan antar jawa dan luar jawa masih cukup tinggi</p> <p>b. Pembangunan infrastruktur telah meningkat dengan pesat diberbagai wilayah di Indonesia tetapi masih jauh di bawah kebutuhannya</p> <p>c. Dalam konektivitas domestik dan global, tantangan utama yang dihadapi adalah konektivitas laut dan penyeberangan serta konektivitas udara yang menjadi tulang punggung angkutan barang dan penumpang antar pulau belum optimal.</p> |
| 11. | Pembangunan belum berkelanjutan | <p>Pembangunan belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan</p> <p>b. Pencemaran dan kerusakan lingkungan masih menjadi tantangan untuk mencapai ekonomi hijau</p> <p>c. Ketahanan ekologi menghadapi tingginya laju kehilangan dan rendahnya pemanfaatan keanekaragaman hayati yang berkelanjutan.</p>   |

| No  | Isu Pembangunan Nasional               | Tantangan Pembangunan  |
|-----|--|--|
|     |  | <p>d. Tantangan pembangunan energi utamanya peningkatan akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah, masih rendahnya penggunaan energi terbarukan, dan masih rendahnya efisiensi energi.</p>   |
| 12. | Tata Kelola pemerintahan belum optimal | <p>a. Regulasi yang berlebih (<i>hyper regulation</i>) dan kualitas regulasi yang rendah telah menyebabkan terjadinya tumpang tindih dan disharmoni regulasi, baik di pusat maupun daerah.</p> <p>b. Kelembagaan instansi publik masih dicirikan dengan struktur yang terfragmentasi dan tidak efektif.</p> <p>c. Proses bisnis dan tata kelola urusan pemerintahan masih terfragmentasi dan tidak adaptif.</p> <p>d. Belum terimplementasinya manajemen talenta secara merata di seluruh K/L/D.</p> <p>e. ASN berada dalam posisi yang rentan terhadap intervensi politik di dalam birokrasi, khususnya di pemerintah daerah.</p> <p>f. Belum meratanya kualitas pelayanan publik.</p> <p>g. Kualitas pelayanan dan proses pembangunan di bidang-bidang strategis belum memenuhi harapan masyarakat.</p> <p>h. Prinsip keterbukaan pemerintah belum sepenuhnya terarusutamakan dalam pelaksanaan pembangunan.</p> <p>i. Stabilitas ekonomi makro Indonesia saat ini</p> |

| No  | Isu Pembangunan Nasional                  | Tantangan Pembangunan   |
|-----|---|---|
|     |   | <p>cukup solid di tengah ketidakpastian global. Namun tantangan kedepan adalah perlunya kebijakan fiskal dan moneter yang propertumbuhan.</p> <p>j. Dalam hal kaidah pelaksanaan, masih dihadapi tantangan seperti belum efektifnya upaya menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, konsistensi antara perencanaan pembangunan nasional, Kementerian/Lembaga, daerah serta konsistensi pencapaian sasaran jangka panjang.</p> <p>k. Kapasitas pembiayaan untuk memenuhi percepatan dan peningkatan kebutuhan pembangunan dari sektor publik pusat dan daerah, serta non publik masih terbatas.</p> |
| 13. | Infrastruktur dan Literasi Digital Rendah | <p>a. Ditengah kecepatan perkembangan teknologi digital, infrastruktur dan literasi digital masih rendah</p> <p>b. Transformasi digital di tingkat pemerintahan masih dihadapkan oleh berbagai tantangan mendasar</p>   |
| 14. | Kapasitas dan penegakan hukum masih lemah | <p>a. Sistem hukum belum mampu sepenuhnya mewujudkan kepastian hukum dan penegakan hukum yang berkeadilan</p> <p>b. Permasalahan terkait integritas masih terjadi pada partai politik</p> <p>c. Partisipasi masyarakat sipil dalam pembangunan dan demokratisasi belum optimal.</p> <p>d. Dari aspek politik, tantangan yang dihadapi</p>   |

| No | Isu Pembangunan Nasional | Tantangan Pembangunan  |
|----|--------------------------|--|
|    |                          | terutama adalah demokrasi masih terbatas pada hal-hal prosedural seperti teknis ke-pemiluan-an dan hubungan formal kelembagaan<br>e. Keamanan Nasional menghadapi kompleksitas ancaman dan gangguan serta meningkatnya isu geopolitik Kawasan, terutama di perbatasan.<br>f. Terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam hal ketahanan sosial budaya dan ekologi, di antaranya Pancasila belum sepenuhnya diimplementasikan ke dalam norma dan praktik kehidupan, karakter dan jati diri bangsa menghadapi peningkatan ancaman negatif budaya global, kearifan lokal dan nilai budaya belum dioptimalkan sebagai modal dasar pembangunan masyarakat. |

Sumber Dokumen RPJPN 2025-2045

### 3.2.3 Isu Pembangunan Provinsi

Isu pembangunan jangka panjang Provinsi Kalimantan Tengah diuraikan sebagai berikut :

1. Peningkatan valuasi nilai ekspor yang dipengaruhi oleh produk dan kesadaran pelaku usaha, Belum optimalnya hilirisasi produk dan kualitas SDM, Terbatasnya diversifikasi bahan pangan dan pengetahuan masyarakat tentang kualitas pangan serta sulitnya akses logistik, Mata Pencaharian Utama Masyarakat, Potensi Ekonomi Melalui Keragaman Budaya Kalimantan Tengah, Potensi Ekonomi Melalui Wisata Alam, dan Potensi Ekonomi Melalui Kuliner Tradisional



2. Penurunan angka Penduduk Tumbuh Seimbang sehingga berpengaruh terhadap laju pertumbuhan penduduk, Program Keluarga Berencana, Masalah kemiskinan daerah, Belum optimalnya penanganan masalah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka
3. Belum optimalnya nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), Nilai Indeks Literasi Membaca masih pada kategori sedang, angka harapan hidup (AHH) Kalimantan Tengah yang masih berada dibawah rata-rata nasional, Prevalensi stunting masih tinggi, ketersediaan fasilitas kesehatan beserta tenaga kesehatan belum menjangkau seluruh wilayah, Ketidakmerataan akses pendidikan, Belum optimalnya kepesertaan JKN, Menurunnya nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), Pemenuhan hak-hak politik masyarakat yang belum optimal, Kesadaran terhadap keamanan dan kenyamanan lingkungan yang masih rendah
4. Belum optimal pemanfaatan potensi sumber daya terbarukan, Tantangan pemenuhan ketahanan energi, Tantangan pemenuhan air minum layak, aman, dan berkelanjutan, belum terlayani jaringan irigasi

#### **3.2.4 Isu Pembangunan Perwilayahan**

1. Pengembangan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Provinsi Kalimantan Tengah sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Kalimantan Timur diharapkan dapat menjadi daerah mitra bagi IKN. Lebih lanjut, Kalimantan Tengah juga harus mampu menerima *spillover effect* dari pembangunan IKN melalui penyiapan konektivitas antar wilayah yang baik, penyiapan tenaga kerja lokal, dan penyediaan sumber daya alam.



Gambar 3.1 Rencana Daerah Daerah Otonomi Baru (DOB)

#### Pulau Kalimantan

2. Pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) sebagai pemekaran Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Kotawaringin Timur wilayah utara. Sebagai provinsi terluas di Indonesia manajemen pembangunan menjadi tantangan yang besar bagi Kalimantan Tengah. Jauhnya akses antar pusat kegiatan dan sedikitnya jumlah penduduk membuat akselerasi pembangunan menjadi cukup berat untuk dilakukan. Urgensi pemekaran yaitu :
  - a. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
  - b. Mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat;
  - c. Mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
  - d. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan;
  - e. Meningkatkan daya saing nasional dan daerah;
  - f. Memelihara adat, tradisi dan budaya daerah.

Oleh karena hal tersebut, isu mengenai pemekaran



wilayah provinsi menjadi isu yang menjadi perhatian beberapa pemangku kepentingan di Provinsi Kalimantan Tengah. Zonasi pembangunan saat ini yang menjadikan tiga zona utama merupakan cikal bakal provinsi baru yang akan terbentuk. Penyusunan RPJPD ini perlu memperhatikan kemungkinan perkembangan isu ini untuk menunjang kebersinambungan Pembangunan. Provinsi Kotawaringin yang terdiri dari Kabupaten Kotawaringin Timur, Kotawaringin Barat, Seruyan, Lamandau, dan Sukamara.

3. Rencana pembentukan Kabupaten/Kotamadya baru di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur yang mencakup 12 Kecamatan yaitu :
  - a. Kabupaten Kotawaringin Utara  
Kabupaten Kotawaringin Utara akan dimekarkan dari Kabupaten Kotawaringin Timur. Wilayah ini mencakup enam kecamatan yaitu Kecamatan Parenggean, Antang Kalang, Telaga Antang, Tualan Hulu, Mentaya Hulu dan Bukit Santuai dengan ibu kota yang direncanakan di Parenggean.
  - b. Kota Sampit  
Kota Sampit adalah calon kotamadya baru yang akan dimekarkan dari Kabupaten Kotawaringin Timur. Saat ini, Kota Sampit baru terdiri dari dua kecamatan yaitu Kecamatan Mentawa Baru Ketapang dan Baamang.
  - c. Kabupaten Kotawaringin Selatan  
Calon Kabupaten Kotawaringin Selatan akan dimekarkan dari Kabupaten Kotawaringin Timur. Wilayah ini mencakup empat kecamatan yaitu Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, Mentaya Hilir Utara, Teluk Sampit dan Pulau Hanaut dengan ibu kota di Samuda.



### 3.2.5 Isu Strategis Daerah

#### 3.2.5.1 Ketidakmampuan dalam Membangun Kemandirian Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan

Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki potensi besar untuk menjadi kawasan ekonomi yang maju dan sejahtera. Namun saat ini, dalam Membangun Kemandirian Ekonomi masih terhambat oleh beberapa faktor, di antaranya :

- **Investasi pemerintah yang belum optimal:** Investasi pemerintah dalam infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan tata kelola untuk tujuan industrialisasi masih belum mencapai tingkat yang optimal. Hal ini dikarenakan keterbatasan APBD, di mana fokus pembangunan harus menyentuh seluruh sektor.
- **Ketergantungan APBD terhadap APBN yang tinggi:** Persentase PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang masih rendah menunjukkan ketergantungan Kotim yang besar terhadap APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Hal ini membatasi kemampuan Kotim untuk mendanai program-program transformasi ekonominya sendiri.
- **Pembangunan sektor/komoditi unggulan belum optimal:** Meskipun Kotim memiliki beberapa sektor dan komoditi unggulan, seperti perkebunan kelapa sawit, perikanan, dan pariwisata, namun pembangunannya belum memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.
- **Jumlah wisatawan yang masih rendah:** Jumlah wisatawan domestik dan mancanegara yang berkunjung ke Kotim masih tergolong rendah. Hal ini menunjukkan bahwa potensi pariwisata Kotim belum dimanfaatkan secara maksimal.
- **Terbatasnya APBD dan kurangnya investasi swasta:** Keterbatasan APBD dan kurangnya investasi swasta menjadi kendala utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan pekerjaan di Kotim.

- **Belum optimalnya hilirisasi industri:**

Beberapa permasalahan yang terdapat di wilayah Kabupaten Kotawaringin Timur antara lain kurangnya nilai tambah produk, terbatasnya teknologi produksi, dan terbatasnya suplai SDM terampil berdampak pada produktivitas kinerja serta hasil produk industri. Kendala dalam meningkatkan hilirisasi produk lokal juga dapat menghambat nilai tambah ekonomi daerah dan menciptakan ketergantungan pada produk impor. Sementara itu, rendahnya kualitas SDM industri dapat membatasi inovasi dan produktivitas. Oleh karena itu, perlu investasi dalam pelatihan dan pembinaan, peningkatan infrastruktur, dan dukungan kebijakan yang mendorong investasi sektor industri. Upaya ini akan berkontribusi pada diversifikasi ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Kotawaringin Timur.

**Menuju Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan** Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan mewujudkan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Kotim, diperlukan beberapa langkah strategis, di antaranya :

- **Meningkatkan investasi pemerintah:** Pemerintah perlu meningkatkan investasi dalam infrastruktur, pengembangan sumber daya manusia, dan tata kelola untuk mendukung industrialisasi dan pengembangan sektor-sektor unggulan.
- **Meningkatkan PAD:** Upaya untuk meningkatkan PAD perlu dilakukan melalui diversifikasi sumber pendapatan, peningkatan efisiensi pemungutan pajak, dan pengembangan sektor-sektor yang memiliki potensi ekonomi tinggi.
- **Meningkatkan daya saing sektor/komoditi unggulan:** Perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan daya saing sektor/komoditi unggulan Kotim, seperti dengan

meningkatkan kualitas produk, diversifikasi produk, dan pengembangan pasar.

- **Mengembangkan pariwisata:** Perlu dilakukan upaya untuk mengembangkan pariwisata di Kotim, seperti dengan meningkatkan infrastruktur wisata, promosi wisata, dan pengembangan produk-produk wisata yang menarik.
- **Menarik investasi swasta:** Perlu dilakukan upaya untuk menarik investasi swasta ke Kotim, dengan menciptakan iklim investasi yang kondusif dan memberikan insentif bagi investor.

### **3.2.5.2 Perubahan Sosial di Kabupaten Kotawaringin Timur: Menuju Masyarakat Sehat, Sejahtera dan Mandiri**

Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki potensi besar untuk menjadi daerah yang maju dan sejahtera, tidak hanya secara ekonomi, tapi juga secara sosial. Namun, saat ini, Kotim masih dihadapkan pada beberapa tantangan dalam bidang sosial, seperti:

- **Kesadaran dan akses terhadap pelayanan kesehatan yang belum optimal:** Masih banyak masyarakat yang belum memiliki kesadaran untuk menjaga kesehatan dan belum memiliki akses yang mudah terhadap pelayanan kesehatan yang berkualitas.
- **Penyediaan fasilitas dan SDM kesehatan yang belum optimal:** Fasilitas kesehatan di Kotim masih belum memadai dan jumlah tenaga kesehatan masih belum mencukupi untuk melayani seluruh kebutuhan masyarakat.
- **Tingkat pengangguran terbuka yang tinggi:** Banyak masyarakat yang masih belum memiliki pekerjaan, sehingga menyebabkan kemiskinan dan kesenjangan sosial.
- **Ketergantungan pada sektor pemerintahan dan perusahaan:** Lapangan pekerjaan di Kotim masih



didominasi oleh sektor pemerintahan dan perusahaan, sehingga membuka peluang eksploitasi dan upah rendah.

- **Kemampuan pengelolaan usaha UMKM yang belum optimal:** Meskipun perkembangan sektor UMKM di Kotim cukup signifikan, banyak pelaku UMKM yang belum memiliki kemampuan pengelolaan usaha yang baik, sehingga menghambat pertumbuhan usaha mereka.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut dan mewujudkan transformasi sosial di Kotim, diperlukan beberapa strategi utama:

### 1. Meningkatkan Kesadaran dan Akses terhadap Pelayanan Kesehatan:

- **Melakukan edukasi kesehatan:** Meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan dan cara-cara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas.
- **Memperluas akses pelayanan kesehatan:** Membangun fasilitas kesehatan di daerah-daerah terpencil dan meningkatkan jumlah tenaga kesehatan yang profesional.
- **Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan:** Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di semua fasilitas kesehatan, baik di tingkat puskesmas, rumah sakit, maupun klinik swasta.

### 2. Meningkatkan Peluang Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat:

- **Mengembangkan sektor-sektor ekonomi kreatif:** Mendukung pengembangan sektor ekonomi kreatif yang memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru.
- **Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan:** Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja.

- **Mempermudah akses permodalan:** Mempermudah akses permodalan bagi pelaku usaha UMKM untuk mengembangkan usahanya.

### **3. Meningkatkan Kemampuan Pengelolaan Usaha UMKM:**

- **Melakukan pelatihan dan pendampingan:** Melakukan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku UMKM tentang cara-cara mengelola usaha dengan baik, seperti manajemen keuangan, pemasaran, dan produksi.
- **Membangun jaringan antar pelaku UMKM:** Membangun jaringan antar pelaku UMKM untuk saling berbagi informasi dan pengalaman.
- **Mempermudah akses pasar:** Membantu pelaku UMKM untuk memasarkan produk mereka ke pasar yang lebih luas.

### **4. Membangun Masyarakat yang Sejahtera dan Mandiri:**

- **Memperkuat program jaring pengaman sosial:** Memperkuat program jaring pengaman sosial untuk membantu masyarakat miskin dan pra sejahtera.
- **Meningkatkan kualitas hidup masyarakat:** Meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan menyediakan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur yang memadai.
- **Membangun budaya gotong royong dan kepedulian sosial:** Membangun budaya gotong royong dan kepedulian sosial untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan masyarakat.

#### **3.2.5.3 Kebutuhan Peningkatan Kompetensi SDM, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan di Kabupaten Kotawaringin Timur: Menuju Pemerintahan yang Efektif, Berkeadilan, dan Berkelanjutan**

Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki potensi besar untuk menjadi daerah yang maju dan sejahtera. Kekayaan

sumber daya alam, budaya yang unik, dan letak geografis yang strategis menjadi modal utama untuk mewujudkan Peningkatan Kompetensi SDM, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Namun, saat ini, Kotim masih dihadapkan pada beberapa permasalahan tata kelola yang perlu diatasi, seperti:

### **1. Ketimpangan Akses Pendidikan:**

- **Akses pendidikan yang terbatas di daerah terpencil:** Banyak anak-anak di daerah terpencil yang tidak memiliki akses terhadap pendidikan yang berkualitas, sehingga tertinggal dalam hal pengetahuan dan keterampilan.
- **Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan: Masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anak mereka.**
- **Keterbatasan akses ke sarana prasarana Pendidikan: Ketersediaan sekolah dan guru yang memadai di daerah terpencil masih sangat terbatas.**

### **2. Persoalan Kesehatan Masyarakat:**

- **Kurangnya pengetahuan ibu tentang gizi:** Banyak ibu yang belum memiliki pengetahuan yang cukup tentang gizi anak, sehingga berakibat pada stunting dan kekurangan gizi pada anak-anak.
- **Kemiskinan dan keterbatasan akses pangan bergizi:** Kemiskinan dan keterbatasan akses terhadap pangan bergizi merupakan faktor utama yang menyebabkan stunting dan kekurangan gizi pada anak-anak.
- **Pelayanan kesehatan ibu dan anak belum optimal:** Pelayanan kesehatan ibu dan anak di Kotim masih belum optimal, sehingga banyak ibu dan anak yang tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.

- **Sanitasi lingkungan yang buruk:** Sanitasi lingkungan yang buruk dapat menyebabkan berbagai penyakit, terutama pada anak-anak.

### 3. Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah:

- **Rendahnya kualitas pendidikan:** Kualitas pendidikan di Kotim masih belum merata, dengan sekolah-sekolah di daerah terpencil yang memiliki kualitas yang lebih rendah.
- **Terbatasnya akses layanan kesehatan:** Akses terhadap layanan kesehatan di Kotim masih belum merata, dengan daerah terpencil yang memiliki akses yang lebih terbatas.
- **Ketimpangan pembangunan antar wilayah:** Pembangunan di Kotim masih belum merata, dengan daerah perkotaan yang lebih maju dibandingkan dengan daerah pedesaan.

### 4. Persoalan Sanitasi:

- **Infrastruktur sanitasi yang terbatas:** Infrastruktur sanitasi di Kotim masih belum memadai, dengan banyak rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap air bersih dan sanitasi yang layak.
- **Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi:** Masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya sanitasi bagi kesehatan, sehingga tidak menjaga kebersihan lingkungan mereka.
- **Lemahnya penegakan regulasi sanitasi:** Penegakan regulasi sanitasi di Kotim masih lemah, sehingga banyak masyarakat yang melanggar aturan tentang sanitasi.

Meskipun terdapat berbagai tantangan, Kotim memiliki peluang besar untuk melakukan Peningkatan Kompetensi SDM, Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan yang signifikan dengan fokus pada beberapa strategi utama:



## 1. Meningkatkan Akses Pendidikan:

- **Membangun sekolah-sekolah baru di daerah terpencil:** Membangun sekolah-sekolah baru di daerah terpencil untuk meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak di daerah tersebut.
- **Meningkatkan kualitas guru dan tenaga pendidik:** Meningkatkan kualitas guru dan tenaga pendidik untuk memberikan pendidikan yang berkualitas bagi semua anak di Kotim.
- **Memberikan beasiswa bagi pelajar berprestasi dan kurang mampu:** Memberikan beasiswa bagi pelajar berprestasi dan kurang mampu untuk membantu mereka menyelesaikan pendidikan mereka.

## 2. Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat:

- **Melakukan edukasi tentang gizi dan kesehatan ibu dan anak:** Melakukan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya gizi dan kesehatan ibu dan anak untuk mencegah stunting dan kekurangan gizi pada anak-anak.
- **Meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan:** Meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan di daerah terpencil untuk memastikan semua masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang memadai.
- **Membangun infrastruktur sanitasi yang memadai:** Membangun infrastruktur sanitasi yang memadai untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan mencegah penyakit.

## 3. Mempersempit Kesenjangan Pembangunan Antar Wilayah:

- **Meningkatkan alokasi anggaran untuk daerah terpencil:** Meningkatkan alokasi anggaran untuk daerah terpencil untuk mempercepat pembangunan di daerah tersebut.
- **Mengembangkan program-program khusus untuk daerah terpencil:** Mengembangkan program-program

khusus untuk daerah terpencil untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di daerah tersebut.

- **Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan:** Melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk memastikan pembangunan yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

#### **3.2.5.4 Perubahan Kualitas Lingkungan dan Iklim di Kabupaten Kotawaringin Timur: Menuju Masa Depan yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan**

Kabupaten Kotawaringin Timur memiliki kekayaan alam yang luar biasa, namun juga dihadapkan pada berbagai tantangan ekologis yang kompleks. Banjir, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, dan keterbatasan akses terhadap energi menjadi hambatan utama dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan.

##### **Tantangan Ekologis:**

- **Banjir:** Luasnya wilayah yang terdampak banjir menyebabkan degradasi lahan, pencemaran air, dan hilangnya keanekaragaman hayati.
- **Kebakaran Hutan dan Lahan:** Kebakaran hutan dan lahan yang sering terjadi menyebabkan emisi gas rumah kaca, hilangnya habitat flora dan fauna, dan kerusakan kualitas udara.
- **Kekeringan:** Kekeringan di beberapa wilayah Kotim menyebabkan kerusakan lahan pertanian, kesulitan air bersih, dan penurunan ketahanan pangan.
- **Keterbatasan Akses Energi:** Ketidaktersediaan dan pemerataan listrik di beberapa wilayah menghambat pengolahan limbah dan pemanfaatan energi terbarukan.

##### **Dampak Negatif:**

- **Kerusakan Ekosistem:** Degradasi lahan, pencemaran air, dan hilangnya keanekaragaman hayati akibat banjir dan



kebakaran hutan dan lahan mengganggu keseimbangan ekosistem.

- **Perubahan Iklim:** Emisi gas rumah kaca akibat kebakaran hutan dan lahan berkontribusi terhadap perubahan iklim global.
- **Krisis Air Bersih:** Kekeringan dan kerusakan infrastruktur air menyebabkan krisis air bersih yang berakibat pada kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan..
- **Rendahnya Kualitas Hidup:** Kehidupan masyarakat di wilayah yang terdampak kerusakan lingkungan dan keterbatasan akses energi memiliki kualitas hidup yang lebih rendah.

#### **Peluang Transformasi:**

- **Pengembangan Sistem Pemantauan dan Peringatan Dini:** Membangun sistem pemantauan dan peringatan dini untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya bencana alam.
- **Pengelolaan Hutan dan Lahan yang Berkelanjutan:** Menerapkan kebijakan pengelolaan hutan dan lahan yang berkelanjutan untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan dan menjaga kelestarian hutan.
- **Pengelolaan Air yang Berkelanjutan:** Membangun infrastruktur air seperti bendungan, embung, dan sumur bor untuk mengatasi kekeringan dan meningkatkan akses terhadap air bersih.
- **Pengembangan Energi Terbarukan:** Mengembangkan energi terbarukan seperti energi surya dan energi angin untuk memenuhi kebutuhan energi di wilayah yang terpencil.

#### **Strategi Transformasi:**

- **Peningkatan Kapasitas Pemerintah:** Memperkuat kapasitas pemerintah dalam pengelolaan sumber daya alam, pencegahan bencana alam, dan pengembangan energi terbarukan.



- **Partisipasi Masyarakat:** Melibatkan masyarakat dalam upaya pelestarian lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, dan pengembangan energi terbarukan.
- **Kerjasama Antar Sektor:** Melakukan kerjasama antar sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dalam mengatasi berbagai tantangan ekologis di Kotim.
- **Penyelarasan Kebijakan:** Menyelaraskan kebijakan di tingkat daerah, provinsi, dan nasional untuk mendukung transformasi ekologi yang efektif.

Perubahan Kualitas Lingkungan dan Iklim di Kotim membutuhkan komitmen dan kerjasama dari semua pihak. Dengan mengatasi berbagai tantangan ekologis dan mengembangkan strategi yang efektif, Kotim dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan ramah lingkungan yang bermanfaat bagi masyarakat dan generasi mendatang.

## BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

### 4.1 VISI DAERAH

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Visi RPJPD adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun. Visi RPJPD harus dapat menunjukkan gambaran masa depan yang ideal bagi masyarakat/daerah dan merupakan suatu pernyataan umum yang menjadi dasar/basis bagi semua elemen atau semua pelaku (stakeholders) dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah. Visi RPJPD menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai.

Visi RPJPD memiliki beberapa kriteria, yaitu: (1) menggambarkan arah yang jelas tentang kondisi masa depan yang ingin dicapai dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang (*clarity of direction*); (2) menjawab permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang perlu diselesaikan dalam jangka panjang; (3) menjelaskan/mengakomodasikan kekuatan dan peluang serta keunikan “kompetitif” yang dimiliki daerah dalam jangka panjang; dan (4) menggambarkan nilai-nilai kunci (*core values*) yang perlu dilaksanakan. Perumusan pokok-pokok visi dilakukan dengan mencari inti (kalimat) berdasarkan masalah utama ke dalam satudua kata dengan menghilangkan berbagai kata dan atribut yang bukan inti dari perwujudan visi dimaksud.

#### 4.1.1. RUMUSAN VISI DAERAH

Visi daerah dalam RPJPD disimpulkan sebagai upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui peningkatan dan Pemerataan pendapatan masyarakat,

kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah serta kualitas lingkungan hidup dengan mempertimbangkan kondisi daerah dan berbagai proyeksi yang disusun secara logis sampai Tahun 2045. Perumusan visi daerah dalam rancangan RPJPD Kabupaten Kotawaringin Timur dilakukan melalui tahapan Konsultasi Publik RPJPD dengan memperhatikan RPJPN tahun 2025-2045 dan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025-2045, Serta Rekomendasi Visi KLHS RPJPD Kabupaten Kotawaringin Timur dan Tujuan Penataan Ruang RTRW Kabupaten Kotawaringin Timur. Berikut terlampir rumusan visi berdasarkan permasalahan pokok.

**Tabel 4.1 Rumusan Pernyataan Visi Kabupaten Kotawaringin Timur 2045**

| No. | Permasalahan Pokok  | Pokok Visi                             | Pernyataan Visi |
|-----|---|--|-----------------|
| 1   | Laju pertumbuhan sektor industri pengolahan terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Timur lebih rendah dari laju pertumbuhan sektor industri pengolahan terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Tengah   | Peningkatan Pendapatan per kapita      | SEJAHTERA       |
| 2   | Rendahnya kontribusi sektor penyediaan akomodasi, makanan dan minuman terhadap PDRB kab. Kotim dibandingkan kontribusi sektor penyediaan akomodasi, makanan dan minuman yang memberikan kontribusi terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Tengah |  |                 |
| 3   | Laju pertumbuhan sektor konstruksi terhadap PDRB Kabupaten Kotawaringin Timur lebih rendah dari laju pertumbuhan sektor konstruksi terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Tengah   |  |                 |
| 4   | Laju Pertumbuhan Penduduk yang lebih kecil daripada Provinsi Kalimantan Tengah  | Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan | BERMARTABAT     |
| 5   | Jumlah penduduk miskin tertinggi se Provinsi Kalimantan Tengah  |  |                 |
| 6   | Jumlah keluarga pra sejahtera tertinggi se Provinsi Kalimantan Tengah   |  |                 |
| 7   | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) masih lebih rendah dibanding Provinsi Kalimantan Tengah   |  |                 |



| No. | Permasalahan Pokok  | Pokok Visi  | Pernyataan Visi |
|-----|---|---|-----------------|
| 8   | Rata-rata lama sekolah Kabupaten Kotawaringin Timur lebih rendah dari rata-rata lama sekolah Provinsi Kalimantan Tengah   | Kepemimpinan Berintegritas dan Peningkatan daya saing sumber daya manusia | MAJU            |
| 9   | Angka Partisipasi sekolah lebih rendah daripada Provinsi Kalimantan Tengah  |   |                 |
| 10  | Jumlah bayi gizi kurang tertinggi   |   |                 |
| 11  | Salah satu kabupaten dengan pertumbuhan IPM terendah di Kalimantan Tengah   |   |                 |
| 12  | Fasilitas buang air besar Kabupaten Kotawaringin Timur lebih rendah dari persentase rumah tangga yang memiliki fasilitas buang air besar Provinsi Kalimantan Tengah |   |                 |
| 13  | Tingginya Resiko bencana  | Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) menuju <i>Net Zero Emission</i>      | BERKELANJUTAN   |
| 14  | Masih terdapat desa yang belum teraliri listrik   |   |                 |

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2024



Sumber : Hasil Analisa Tahun 2024

**Gambar 4.1 Rumusan Visi Kabupaten Kotawaringin Tahun 2025-2045 Berdasarkan Isu Strategis**

Penjelasan visi Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2045 sebagaimana pada tabel berikut.

**Tabel 4.2 Penjelasan Visi Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025-2045**

| Pernyataan Visi     | Visi      | Penjelasan  |
|---------------------|-----------|---|
| Kotim Unggul 2045 : | SEJAHTERA | Kolaborasi peningkatan sarana prasarana untuk pertumbuhan |



| Pernyataan Visi  | Visi          | Penjelasan  |
|--|---------------|---|
| <b>“Kotawaringin Timur Unggul yang Sejahtera, Bermartabat, Maju dan Berkelanjutan”</b> |               | ekonomi, pertanian, industri dan jasa (Habaring Hurung Miar dan Maju)   |
|  | BERMATABAT    | Kolaborasi meningkatkan harkat dan martabat daerah dengan pengentasan kemiskinan dan kesenjangan (Habaring Hurung Manggantang Utus)   |
|  | MAJU          | Kolaborasi peningkatan sumber daya manusia yang berdaya saing, inovatif dan adaptif dalam menghadapi berbagai dinamika perkembangan baik regional, nasional, maupun internasional untuk mencapai kemajuan daerah (Habaring Hurung Ambet Kasanang) |
|  | BERKELANJUTAN | Perwujudan Kotim Unggul di Skala Regional dalam Kerangka Indonesia Emas 2045 (Habaring Hurung Membangun Lewu)   |

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2024

Pada proses penyusunan visi, dokumen RPJPD Kabupaten Kotawaringin Timur juga perlu mempedomani visi dokumen perencanaan vertikal yaitu RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi. Berikut adalah integrasi visi RPJPD Kabupaten Kabupaten Kotawaringin Timur dengan RPJPD Provinsi dan RPJP Nasional.

**Tabel 4.3 Penyelarasan Visi RPJPD Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Visi RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah dan Visi RPJP Nasional**

| Visi RPJPN Tahun 2025-2045  | Visi RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045                                 | Visi RPJPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025-2045                      |
|---|---|--|
| INDONESIA EMAS 2045;<br>NEGARA KESATUAN<br>REPUBLIK INDONESIA<br>BERSATU, BERDAULAT,<br>MAJU, DAN BERKELANJUTAN | KALIMANTAN TENGAH<br>TANGGUH 2045;<br>BERMARTABAT, BERKAH,<br>MAJU, DAN BERKELANJUTAN | KOTIM UNGGUL 2045 :<br>SEJAHTERA,<br>BERMARTABAT, MAJU, DAN<br>BERKELANJUTAN |

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2024

**Tabel 4.4 Padanan Visi RPJPD Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Visi RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah dan Visi RPJP Nasional**

| NASIONAL<br>"Indonesia Emas 2045" | PROVINSI<br>"Kalteng Tangguh 2045" | KABUPATEN<br>"Kotim Unggul 2045" |
|-----------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|
| BERSATU                           | MAJU                               | SEJAHTERA                        |
| BERDAULAT                         | BERMARTABAT                        | BERMARTABAT                      |
| MAJU                              | BERMARTABAT, BERKAH                | MAJU                             |
| BERKELANJUTAN                     | BERKELANJUTAN                      | BERKELANJUTAN                    |

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2024

**Tabel 4.5 Padanan Visi RPJPD Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025-2045 dengan Visi Rekomendasi KLHS dan Tujuan RTRW Kabupaten Kotawaringin Timur**

| KLHS RPJPD Tahun 2025-2045       |   | Visi RPJPD 2025-2045 | Tujuan RTRW Tahun 2024-2044   |
|----------------------------------|---|----------------------|---|
| Tema                             | Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis Berdasarkan Prioritas  |                      |   |
| Ekonomi                          | Swasembada pangan dan ketersediaan kebutuhan pokok  | SEJAHTERA            | "Mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang mandiri berbasis pertanian, industri pengolahan, dan perdagangan, sebagai simpul transportasi regional, nyaman, berkelanjutan dengan tetap mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta kelestarian sumberdaya alam" |
|                                  | Pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, fasilitas umum, dan prasarana-sarana untuk mengurangi ketimpangan wilayah |                      |   |
|                                  | Peningkatan aksesibilitas wilayah skala lokal dan Pembangunan simpul transportasi regional-nasional-internasional     |                      |   |
|                                  | Industrialisasi potensi komoditi lokal berorientasi ekspor  |                      |   |
|                                  | Pembangunan wisata budaya dan wisata buatan di perkotaan dan perdesaan  |                      |   |
|                                  | Peningkatan jumlah penduduk bekerja dan pendapatan masyarakat   |                      |   |
| Sosial dan Hukum dan Tata Kelola | Peningkatan angka harapan lama sekolah dan tingkat partisipasi murni  | BERMARTABAT, MAJU    |   |
|                                  | Pengentasan penyakit masyarakat   |                      |   |
|                                  | Pengentasan kemiskinan  |                      |   |
|                                  | Peningkatan angka harapan hidup   |                      |   |
|                                  | Peningkatan tingkat kebahagiaan masyarakat  |                      |   |

| KLHS RPJPD Tahun 2025-2045 |   | Visi RPJPD 2025-2045 | Tujuan RTRW Tahun 2024-2044 |
|----------------------------|---|----------------------|-----------------------------|
| Tema                       | Isu Pembangunan Berkelanjutan Paling Strategis Berdasarkan Prioritas                    |                      |                             |
|                            | Perwujudan tata kelola pemerintahan berintegritas                                       |                      |                             |
| Lingkungan                 | Peningkatan kapasitas daya dukung lingkungan hidup untuk pembangunan                    | BERKELANJUTAN        |                             |
|                            | Mitigasi dan penanggulangan resiko bencana banjir, abrasi dan kebakaran hutan dan lahan |                      |                             |
|                            | Peningkatan kualitas dan kuantitas air  |                      |                             |
|                            | Perlindungan keanekaragaman hayati  |                      |                             |
|                            | Mitigasi dan penanggulangan resiko perubahan iklim                                      |                      |                             |
|                            | Pengelolaan persampahan, sanitasi, dan limbah perkotaan dan perdesaan                   |                      |                             |
|                            | Pengelolaan potensi pariwisata alam dan wisata budaya berbasis wisata alam              |                      |                             |

Sumber: KLHS RPJPD Kab. Kotim Tahun 2025-2045, RTRW Kab. Kotim Tahun 2024-2044

#### 4.1.2. SASARAN UTAMA VISI

Pencapaian Visi Kabupaten Kotawaringin Timur Unggul yang Sejahtera, Bermartabat, Maju dan Berkelanjutan pada Tahun 2045 tercermin dalam Sasaran Utama Visi sebagai berikut:

##### 1) Peningkatan Pendapatan Per kapita

Peningkatan pendapatan perkapita merupakan salah satu indikator utama dalam mewujudkan visi Kabupaten Kotawaringin Timur Unggul 2045, untuk mendukung sasaran utama visi ini didorong melalui indikator PDRB Per Kapita Harga Berlaku, Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan, Kontribusi PDRB Industri Pengolahan dan Pertumbuhan Ekonomi.

##### 2) Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur berkomitmen dalam penurunan kemiskinan dan mengurangi ketimpangan sosial untuk mewujudkan sasaran utama visi Kotim Unggul Tahun 2045 melalui indikator Tingkat Kemiskinan, Indeks Rasio Gini dan Kontribusi PDRB ADHB Kabupaten terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Tengah.

##### 3) Kepemimpinan Berintegritas

Kepemimpinan berintegritas merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing dan pengaruh di dunia internasional dari Sasaran Visi Nasional dan Provinsi Kalimantan Tengah yang diukur dengan indikator Skor *Monitoring Centre for Prevention* dari KPK.

#### 4) Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sebagai upaya mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045, peningkatan daya saing sumber daya manusia didorong dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia secara merata melalui peningkatan akses dan kualitas pendidikan, kesehatan, serta pemanfaatan teknologi dan inovasi. Indikator untuk mengukur sasaran ini adalah Indeks Modal Manusia dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

#### 5) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

Pembangunan berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045 dilaksanakan melalui upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup yang diukur dengan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca dan Indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

**Tabel 4.6 Sasaran Utama Visi, Indikator dan Target Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025-2045**

| Sasaran Visi                                 | Indikator   | Target 2025 | Periode I 2025-2029 | Periode II 2030-2034 | Periode III 2035-2039 | Periode IV 2040-2045 |
|--|---|-------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| Peningkatan Pendapatan Per Kapita            | PDRB Per Kapita Harga Berlaku (Juta Rupiah)               | 91,45       | 112,31              | 138,39               | 164,46                | 195,75               |
|  | Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan (%)                  | 1,14        | 1,48                | 1,82                 | 2,16                  | 2,50                 |
|  | Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)                   | 22,38       | 23,66               | 24,94                | 26,22                 | 27,50                |
|  | Pertumbuhan Ekonomi (%)                                   | 4,68        | 5,07                | 5,56                 | 6,05                  | 6,64                 |
| Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang | Tingkat Kemiskinan (%)                                    | 4,84        | 4,38                | 3,92                 | 3,46                  | 3                    |
|  | Rasio Gini (Indeks)                                       | 0,340       | 0,323               | 0,306                | 0,289                 | 0,272                |
|  | Kontribusi PDRB ADHB Kabupaten terhadap PDRB Provinsi (%) | 16,00       | 16,75               | 17,5                 | 18,25                 | 19,00                |
| Kepemimpinan Berintegritas                   | Skor Monitoring Centre for Prevention (%)                 | 84          | 87                  | 90                   | 92                    | 95                   |
| Peningkatan kualitas sumber daya manusia     | Indeks Modal Manusia                                      | 0,55        | 0,59                | 0,63                 | 0,66                  | 0,7                  |
|  | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)                          | 74,35       | 76,26               | 78,18                | 80,09                 | 82                   |



|                                       |   |       |       |       |       |       |
|---------------------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Peningkatan kualitas lingkungan hidup | Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (%) | 25,00 | 41,00 | 54,00 | 67,00 | 80    |
|                                       | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup              | 70,99 | 72,00 | 73,26 | 74,52 | 76,04 |

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2024



**Tabel 4.7 Penyelarasan Sasaran Visi RPJPD Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Sasaran Visi RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah dan Sasaran Visi RPJP Nasional**

| No. | RPJPN 2025-2045  |                                |             |             | RPJPD PROV. KALTENG 2025-2045                |   |             |             | RPJPD KAB. KOTAWARINGIN TIMUR 2025-2045      |   |             |             |
|-----|--|--------------------------------|-------------|-------------|--|---|-------------|-------------|--|---|-------------|-------------|
|     | Sasaran Visi   | Indikator                      | Target 2025 | Target 2045 | Sasaran Visi                                 | Indikator   | Target 2025 | Target 2045 | Sasaran Visi                                 | Indikator   | Target 2025 | Target 2045 |
| 1   | Pendapatan per kapita setara negara maju                   | GNI Per Kapita (USD)           | 5.500-5.520 | 30.300      | Peningkatan Pendapatan per kapita            | PDRB Per Kapita (Rp Juta)                                   | 82,7        | 629,75      | Peningkatan Pendapatan Per Kapita            | PDRB Per Kapita Harga Berlaku (Juta Rupiah)               | 91,45       | 195,75      |
|     |  | Kontribusi PDB Maritim (%)     | 8,1         | 15,0        |  | Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)                        | 22,78       | 40,58       |  | Kontribusi PDRB Sub Sektor Perikanan (%)                  | 1,14        | 2,50        |
|     |  | Kontribusi PDB Manufaktur (%)  | 20,8        | 28,0        |  | Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)                     | 15,76       | 26,75       |  | Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)                   | 22,38       | 27,50       |
|     |  |                                |             |             |  | Pertumbuhan Ekonomi (%)                                     | 5,6         | 6,64        |  | Pertumbuhan Ekonomi (%)                                   | 4,68        | 6,64        |
| 2   | Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang               | Tingkat Kemiskinan (%)         | 7,0–8,0     | 0,5–0,8     | Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang | Tingkat Kemiskinan (%)                                      | 4,61        | 0,58        | Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang | Tingkat Kemiskinan (%)                                    | 4,84        | 3           |
|     |  | Rasio Gini (indeks)            | 0,379–0,382 | 0,290-0,320 |  | Rasio Gini (Indeks)   | 0,315       | 0,249       |  | Rasio Gini (Indeks)                                       | 0,340       | 0,272       |
|     |  | Kontribusi PDRB KTI (%)        | 21,4        | 28,5        |  | Kontribusi PDRB Provinsi (%)                                | 1,02        | 1,47        |  | Kontribusi PDRB ADHB Kabupaten terhadap PDRB Provinsi (%) | 16,00       | 19,00       |
| 3   | Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat | Global Power Index (peringkat) | 34          | 15          | Kepemimpinan Berintegritas                   | Rata-Rata Wilayah Skor Monitoring Centre for Prevention (%) | 84          | 95          | Kepemimpinan Berintegritas                   | Skor Monitoring Centre for Prevention (%)                 | 84          | 95          |



| No. | RPJPN 2025-2045  |                                    |             |             | RPJPD PROV. KALTENG 2025-2045                                  |   |             |             | RPJPD KAB. KOTAWARINGIN TIMUR 2025-2045  |   |             |             |
|-----|--|------------------------------------|-------------|-------------|--|---|-------------|-------------|--|---|-------------|-------------|
|     | Sasaran Visi   | Indikator                          | Target 2025 | Target 2045 | Sasaran Visi   | Indikator                                     | Target 2025 | Target 2045 | Sasaran Visi                             | Indikator                                     | Target 2025 | Target 2045 |
| 4   | Daya saing sumber daya manusia meningkat                     | Indeks Modal Manusia (indeks)      | 0,56        | 0,73        | Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia                     | Indeks Modal Manusia                          | 0,54        | 0,70        | Peningkatan kualitas sumber daya manusia | Indeks Modal Manusia                          | 0,55        | 0,7         |
|     |  |                                    |             |             |  |   |             |             |  | Indeks Pembangunan Manusia (IPM)              | 74,35       | 82          |
| 5   | Intensitas emisi GRK menurun menuju <i>net zero emission</i> | Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) | 38,6        | 93,5        | Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca Menuju <i>Net Zero Emission</i> | Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (%) | 76          | 100         | Peningkatan kualitas lingkungan hidup    | Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (%) | 25,00       | 80          |
|     |  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup   | 76,49       | 83,00       |  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah       | 76,34       | 82,65       |  | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup              | 70,59       | 80          |

Sumber: RPJPN 2025-2045, RPJPD Kalteng 2025-2045, dan Hasil Analisa Tahun 2024

## 4.2 MISI DAERAH

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi sampai dengan Tahun 2045. Rumusan misi yang baik membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi dalam dokumen perencanaan dikembangkan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah.

Upaya pencapaian Visi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur Unggul yang Sejahtera, Bermartabat, Maju dan Berkelanjutan pada Tahun 2045 dilakukan dengan mewujudkan 8 (delapan) Misi pembangunan yang telah diselaraskan dengan misi RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah dan RPJPN yang dijabarkan sebagai berikut:

**Tabel 4.8 Penyelarasan Sasaran Misi RPJPD Kabupaten Kotawaringin Timur dengan Sasaran Misi RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah dan Sasaran Misi RPJP Nasional**

| No. | RPJPN 2025-2045                    |  | Misi RPJPD Prov. Kalteng 2025-2045  | Misi RPJPD Kab. Kotim 2025-2045   |
|-----|------------------------------------|--|---|---|
|     | Kelompok Agenda/Misi               | Agenda/Misi  |   |   |
| 1   | Transformasi Indonesia             | Transformasi Sosial  | Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun SDM yang sehat, unggul, berdaya saing dan adaptif                  | Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun SDM yang sehat, unggul, berdaya saing dan adaptif                  |
| 2   |                                    | Transformasi Ekonomi                                       | Mewujudkan transformasi ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi berwawasan lingkungan dan berdaya saing global        | Mewujudkan transformasi ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan  |
| 3   |                                    | Transformasi Tata Kelola                                   | Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan  | Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan adaptif  |
| 4   | Landasan Transformasi              | Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia     | Mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah                     | Mewujudkan keamanan daerah, kepemimpinan demokratis dan stabilitas ekonomi  |
| 5   |                                    | Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi                        | Mewujudkan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi  | Mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi   |
| 6   | Kerangka Implementasi Transformasi | Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan        | Mewujudkan pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan  | Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan  |
| 7   |                                    | Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | Mewujudkan penyediaan infrastruktur melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar yang ramah lingkungan | Mewujudkan penyediaan infrastruktur melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar yang ramah lingkungan |
| 8   |                                    | Kesinambungan Pembangunan                                  | Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah antar periode   | Mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan  |

Sumber: RPJPN 2025-2045, RPJPD Kalteng 2025-2045, dan Hasil Analisa Tahun 2024

### **Misi 1 . Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun SDM yang sehat, unggul, berdaya saing dan adaptif**

Untuk dapat mewujudkan transformasi sosial dalam membangun SDM yang sehat, unggul, berdaya saing dan adaptif maka arah pembangunan dilaksanakan dengan pendekatan yang holistik dengan tetap mempertimbangkan aspek humanisme. Transformasi difokuskan pada upaya untuk menghilangkan hambatan yang dapat mencegah masyarakat untuk berkembang, khususnya pada upaya dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta kemampuan literasi dan pemanfaatan teknologi informasi sebagai landasan atau pijakan dalam upaya beradaptasi pada setiap revolusi industri atau perkembangan zaman yang akan terjadi dalam 20 tahun ke depan

### **Misi 2 . Mewujudkan transformasi ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan**

Sektor ekonomi dilandaskan pada upaya untuk mewujudkan ekonomi yang kuat, berdaya saing dan berkelanjutan. Iklim usaha yang kondusif, infrastruktur dan kebijakan perekonomian yang didasarkan pada konsep ekonomi hijau dapat diselenggarakan dengan optimal, sehingga setiap pelaku ekonomi dapat berkembang dengan lebih mudah dan cepat.

### **Misi 3 . Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan adaptif**

Mewujudkan pemerintahan daerah yang inovatif dan adaptif membutuhkan komitmen yang kuat dari segenap unsur Pemerintah Daerah, serta dukungan dari masyarakat. Tuntutan agar birokrasi menjadi lebih dinamis dan mampu beradaptasi cepat terhadap perubahan yang terjadi dengan tetap menjaga integritasnya. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.

### **Misi 4 . Mewujudkan keamanan daerah, kepemimpinan demokratis dan stabilitas ekonomi**

Dalam mewujudkan keamanan daerah, kepemimpinan demokratis dan stabilitas ekonomi, diperlukan komitmen dalam penegakan hukum yang berkeadilan sehingga dapat menghadirkan keamanan daerah stabilitas ekonomi dan demokrasi yang substansial.



### **Misi 5 . Mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi**

Ketahanan sosial, budaya dan ekologi dapat terwujud dengan meningkatkan kerukunan umat beragama, kekayaan kebudayaan daerah, peningkatan kualitas keluarga, kesetaraan gender, hingga peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan pangan dan air dalam rangka ketahanan bencana dan perubahan iklim.

### **Misi 6 . Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan**

Untuk mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan dalam Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2045 Unggul, maka fokus utama diarahkan pada pemerataan infrastruktur, pengembangan ekonomi lokal dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

### **Misi 7. Mewujudkan penyediaan infrastruktur melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar yang ramah lingkungan**

Pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi salah satu prasyarat penting dalam peningkatan perekonomian daerah, serta menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung upaya transformasi.

### **Misi 8. Mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan**

Dalam rangka perwujudan visi pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2045 Unggul agar tercapai maka diperlukan implementasi pembangunan yang berkesinambungan. Kesenambungan pembangunan sampai dengan tahun 2045 didukung dengan kaidah pelaksanaan yang efektif dan pembiayaan pembangunan yang memadai.

## BAB V ARAH KEBIJAKAN DAN SASARAN POKOK

### 5.1 ARAH KEBIJAKAN

Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah pada dasarnya merupakan fokus kebijakan lima tahunan yang memberi panduan pencapaian indikator kinerja sasaran pokok. Dengan kata lain arah kebijakan adalah prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai target sasaran pokok tahapan lima tahunan RPJPD. Arah kebijakan pembangunan harus dapat memberi panduan kapan indikator kinerja sasaran pokok harus dicapai dari empat kemungkinan tahapan yang ada.



**Gambar 5.1 Periodisasi Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur**

#### 1. Periode I (2025-2029) : Penguatan Fondasi Transformasi

Periode ini merupakan penguatan pada pondasi yang akan menjadi penopang upaya transformasi pembangunan di Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Kolaborasi peningkatan sarana prasarana untuk pertumbuhan ekonomi, pertanian, industri dan jasa (Habaring Miar dan Maju).

#### 2. Periode II (2030-2034) : Pengembangan Transformasi

Setelah pondasi pembangunan tersusun dengan baik maka tahap selanjutnya adalah melaju. Pada periode ini upaya transformasi mulai gencar digalakkan melalui peningkatan harkat dan martabat daerah dengan pengentasan kemiskinan dan kesenjangan (Habaring Hurung Manggantang Utus).

#### 3. Periode III (2035-2039) : Ekspansi Transformasi Pembangunan

Pada periode ini upaya transformatif terus dilanjutkan dan dikembangkan. Proses pada periode ini peningkatan sumber daya



manusia yang berdaya saing, inovatif dan adaptif dalam menghadapi berbagai dinamika perkembangan baik regional, nasional, maupun internasional untuk mencapai kemajuan daerah (Habaring Hurung Ambet Kasanang).

#### **4. Periode IV (2040-2045) : Perwujudan Kotim Unggul dan Berdaya Saing dalam Kerangka Indonesia Emas 2045**

Periode terakhir dari RPJPD ditandai dengan proses-proses pembangunan yang sudah berkelanjutan. Semua sektor telah maju dan berkembang. Pada periode ini taraf pembangunan diharapkan mampu mewujudkan Kotim Unggul dan berdaya saing di Skala Regional dalam Kerangka Indonesia Emas 2045 (Habaring Hurung Mamangun Lewu).



**Tabel 5.1 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025-2045**

| VISI   | MISI  | Arah Kebijakan  |  |  |   |
|--|---|---|--|--|---|
|  |   | Periode I 2025-2029   | Periode II 2030-2034   | Periode III 2035-2039  | Periode IV 2040-2045  |
|  |   | Penguatan Fondasi Transformasi  | Pengembangan Transformasi  | Ekspansi Transformasi Pembangunan  | Perwujudan Kotim Unggul dan Berdaya Saing   |
| <b>“Kotawaringin Timur Unggul 2045 yang Sejahtera, Bermartabat, Maju, dan Berkelanjutan”</b> | Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun SDM yang sehat, unggul, berdaya saing dan adaptif                  | Pemenuhan pelayanan dasar serta peningkatan kualitas SDM  | Percepatan Pembangunan SDM berkualitas   | Penguatan pembangunan SDM berkualitas dan merata   | Terwujudnya SDM Kabupaten Kotim yang Unggul   |
|  | Mewujudkan transformasi ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan  | Penciptaan nilai tambah perekonomian Kotim  | Percepatan integrasi perekonomian Kotim  | Penguatan perekonomian Kotim yang merata   | Terwujudnya Ekonomi Kabupaten Kotim yang Unggul dan Berkelanjutan   |
|  | Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan adaptif  | Penguatan kapasitas aparatur pemerintahan berbasis ekosistem digital  | Percepatan penyelenggaraan pemerintahan berbasis ekosistem digital   | Penguatan regulasi penyelenggaraan pemerintahan berbasis ekosistem digital   | Terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis digital yang berkualitas  |
|  | Mewujudkan keamanan daerah, kepemimpinan demokratis dan stabilitas ekonomi  | Penyelenggaraan stabilitas keamanan daerah dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi  | Penyelenggaraan stabilitas keamanan daerah dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi   | Penguatan stabilitas keamanan daerah dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi   | Perwujudan stabilitas keamanan daerah dan stabilitas ekonomi  |
|  | Mewujudkan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi  | Penerapan nilai - nilai masyarakat berbudaya  | Penerapan nilai - nilai masyarakat berbudaya   | Pelibatan semua pihak dalam peningkatan nilai-nilai masyarakat berbudaya   | Masyarakat yang partisipatif dalam menjaga nilai-nilai budaya   |
|  | Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan  | Penyediaan aksesibilitas dan konektivitas sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas, dengan menerapkan pelaksanaan konservasi dan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan untuk pembangunan yang berkesinambungan | Percepatan Peningkatan konektivitas sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas dan berkelanjutan, dengan Peningkatan pelaksanaan konservasi & pengendalian terhadap pencemaran lingkungan untuk pembangunan yang berkesinambungan | Pemerataan akses sarana dan prasarana pelayanan dasar yang berkualitas dan berkelanjutan, serta Pelaksanaan pengembangan wilayah berbasis lingkungan untuk pembangunan yang berkesinambungan | Pemantapan akses dan kualitas sarana prasarana pelayanan dasar yang berkualitas dan berkelanjutan, Perwujudan wilayah berkelanjutan dan berwawasan lingkungan dan terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan |
|  | Mewujudkan penyediaan infrastruktur melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar yang ramah lingkungan |   |  |  |   |
|  | Mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan  |   |  |  |   |

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2024

**Tabel 5.2 Arah Kebijakan Pembangunan Klaster Sampit**

| No. | Aspek               | Arah Kebijakan   |
|-----|---------------------|--|
| 1   | Transformasi Sosial | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat.</li> <li>2. Penuntasan stunting dan percepatan eliminasi malaria melalui pendekatan integrasi multisektor.</li> <li>3. Pemenuhan tenaga kesehatan yang berkelanjutan didukung peningkatan produksi dan kompetensinya.</li> <li>4. Pemerataan akses pelayanan kesehatan berkualitas disertai inovasi pelayanan berbasis kewilayahan dan teknologi.</li> <li>5. Percepatan wajib belajar 9 tahun dan pendidikan anak usia dini (PAUD).</li> <li>6. Pemerataan kualitas antar satuan pendidikan untuk memastikan lulusan dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.</li> <li>7. Peningkatan kualitas dan kompetensi tenaga pendidik yang modern dan adaptif.</li> <li>8. Percepatan peningkatan partisipasi pendidikan tinggi dan pengembangan maupun kerjasama dengan perguruan tinggi yang sesuai klaster ekonomi potensial masa depan melalui kemitraan bersama perguruan tinggi global.</li> <li>9. Pengentasan kemiskinan ekstrem melalui perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok marginal.</li> <li>10. Pemanfaatan dan pemutakhiran rutin data registrasi sosial ekonomi (regsosek) untuk program pusat maupun daerah dan desa agar tepat sasaran.</li> <li>11. Perencanaan, penganggaran melalui APBD dan APBDES, serta komitmen daerah yang lebih berpihak untuk program perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi, terutama melalui pemenuhan SPM sosial.</li> <li>12. Pengembangan perlindungan sosial adaptif bagi seluruh masyarakat terutama kelompok rentan, terutama untuk daerah yang menghadapi risiko bencana dan perubahan iklim, melalui antara lain upaya pro aktif mendukung perluasan cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi usia pekerja, pengembangan perlindungan sosial daerah yang responsif, integrasi program perlindungan sosial daerah dengan program pemberdayaan ekonomi, program ketenagakerjaan, pencegahan dan penanggulangan bencana, serta program terkait perubahan iklim.</li> <li>13. Memastikan lingkungan yang inklusif, termasuk perlindungan sosial, kegiatan ekonomi, infrastruktur, dan pemenuhan hak bagi penduduk lansia (terutama di wilayah dengan penuaan penduduk yang lebih cepat - setidaknya 10% penduduk adalah lansia) dan penyandang disabilitas.</li> <li>14. Mendorong pemenuhan dan akses penduduk terhadap perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi yang terintegrasi, komprehensif, dan memiliki cakupan yang inklusif.</li> <li>15. Perluasan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya bagi pekerja bukan penerima upah dan rentan, dan perlindungan pensiun bagi lansia miskin dan tidak mampu.</li> <li>16. Peningkatan akses rumah layak huni dan terjangkau sesuai dengan karakteristik wilayah</li> <li>17. Peningkatan kolaborasi antar pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan perumahan</li> <li>18. Pengembangan teknologi dan kualitas sumber daya konstruksi dalam rangka penegakan standar keandalan bangunan.</li> <li>19. Peningkatan akses pendidikan vokasi dalam menyediakan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman, terutama di bidang pertanian, perkebunan, dan industri pengolahan, serta keterkaitan dengan dudi yang dikembangkan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi melalui skema <i>education to employment</i>.</li> <li>20. Peningkatan akses pendidikan, terutama untuk daerah yang masih belum terjangkau termasuk pengembangan sistem pembelajaran jarak jauh melalui pemanfaatan Tik yang menjangkau seluruh wilayah.</li> </ol> |



| No. | Aspek                    | Arah Kebijakan  |
|-----|--------------------------|---|
| 2   | Transformasi Ekonomi     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembangunan dan pengembangan Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai daerah mitra untuk mendukung Ibu Kota Nusantara sebagai <i>super hub</i> ekonomi yang menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing.</li><li>2. Pengembangan pusat-pusat industri di berbagai wilayah Kalimantan melalui (i) hilirisasi komoditi unggulan Kalimantan (kelapa sawit, batu bara, migas, dan hasil hutan), dan (ii) berbasis teknologi tinggi dan berkelanjutan seperti industri oleochemicals, petrochemicals, industri farmasi maju, industri kendaraan listrik dan bioteknologi.</li><li>3. Pengembangan kawasan sentra produksi pangan terpadu, modern, dan berkelanjutan termasuk food estate untuk pemenuhan konsumsi pangan dan gizi, penguatan cadangan pangan nasional, dan peningkatan kesejahteraan petani.</li><li>4. Pengembangan industri hijau dan basis sektor ekonomi baru bernilai tambah tinggi dan berkelanjutan didukung dengan berbagai pengembangan inovasi.</li><li>5. Pengembangan destinasi wisata potensial, antara lain penetapan destinasi super prioritas seperti Derawan dan sekitarnya, pengembangan <i>eco-tourism</i> kelas dunia berbasis aset alam (termasuk menjadi <i>global geopark</i>) dengan pelibatan mitra lokal untuk meningkatkan nilai tambah pariwisata dan penyerapan tenaga kerja seperti ekowisata kelas dunia yang berbasis aset alam, wisata kebugaran dengan identitas khas wilayah, serta destinasi MICE dan perkotaan.</li><li>6. Pembangunan dan pengembangan Ibu Kota Nusantara bersama daerah mitra sebagai <i>super hub</i> ekonomi yang menggerakkan aktivitas ekonomi maju dan berdaya saing.</li><li>7. Penyediaan tenaga kerja dengan talenta terampil dan berpengalaman antara lain melalui <i>up-skilling</i> dan <i>re-skilling</i> sesuai kebutuhan kegiatan ekonomi masa depan yang dikembangkan melalui skema <i>education to employment</i>.</li><li>8. Pembangunan perkotaan yang cerdas, hijau, dan berkelanjutan.</li><li>9. Peningkatan fasilitas pendukung transformasi digital melalui upaya meningkatkan literasi digital bagi masyarakat, menciptakan keamanan informasi dan <i>cyber</i> serta kemampuan SDM digital atau digital <i>skill</i> (antara lain melalui pelatihan talenta digital dasar, menengah, dan tinggi, serta kepemimpinan digital).</li><li>10. Industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis dan kelembagaan, serta adopsi teknologi.</li><li>11. Peningkatan keterkaitan UMKM pada rantai nilai industri nasional, melalui peningkatan akses ke sumber daya produktif (termasuk pembiayaan dan pemasaran), penerapan teknologi, dan kemitraan usaha.</li><li>12. Peningkatan produktivitas BUMD.</li><li>13. Penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau di kawasan strategis, khususnya untuk pekerja.</li><li>14. Kemudahan perizinan dalam proses penyediaan perumahan.</li><li>15. Optimalisasi dengan fokus pada penerapan Energi Baru Terbarukan (EBT).</li><li>16. Pembangunan ekosistem digital yang perlu dilakukan dalam rangka transformasi digital melalui penuntasan dan penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) melalui upaya memperluas jaringan <i>broadband</i> hingga menjangkau ke seluruh pelosok.</li></ol> |
| 3   | Transformasi Tata Kelola | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Penguatan regulasi, termasuk proses pra regulasi yang memadai di daerah.</li><li>2. Peningkatan keterlibatan masyarakat adat dalam forum perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.</li><li>3. Peningkatan respons terhadap laporan pelayanan publik masyarakat.</li><li>4. Pengembangan <i>smart government</i> serta penguatan kapasitas aparatur daerah dan lembaga dalam hal manajemen data dan keamanan informasi, kapasitas digital SDM ASN, dan pengelolaan aset daerah.</li><li>5. Percepatan digitalisasi layanan publik dan pelaksanaan audit SPBE untuk penguatan aspek pemerintahan digital.</li><li>6. Peningkatan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui pendidikan anti korupsi, transparansi proses perencanaan, penganggaran, dan pengadaan jasa-jasa, serta transparansi layanan perizinan berbasis digital.</li><li>7. Pengawasan proses pengembangan karier, promosi mutasi ASN dan manajemen kinerja dengan pemanfaatan teknologi informasi.</li><li>8. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.</li><li>9. Penguatan integritas partai politik.</li></ol>   |

| No. | Aspek  | Arah Kebijakan   |
|-----|--|--|
| 4   | Keamanan Daerah Tangguh, Demokrasi Substansial dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan keamanan untuk mengurangi tingkat kriminalitas, khususnya pidana narkoba/psikotropika dan pencurian.</li> <li>2. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui Intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), pemanfaatan pembiayaan alternatif antara lain KPBU, CSR, dana jasa ekosistem, peningkatan kualitas belanja daerah untuk mendukung potensi komoditas unggulan, optimalisasi pemanfaatan Transfer ke Daerah (TKD), sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan Prioritas Nasional.</li> <li>3. Penguatan pengendalian inflasi daerah.</li> <li>4. Optimalisasi ruang dialog untuk penyelesaian konflik sosial.</li> </ol>   |
| 5   | Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan pendidikan yang berbasis kerukunan antar etnis dan agama.</li> <li>2. Peningkatan pengakuan dan penghormatan terhadap lembaga-lembaga adat dan hak ulayat masyarakat.</li> <li>3. Perlindungan masyarakat lokal dan promosi budaya melalui pengembangan area pusat budaya sebagai destinasi wisata bernilai ekonomi tinggi.</li> <li>4. Pengintegrasian nilai-nilai luhur budaya dan kearifan lokal dalam aktivitas sosial dan pembentukan karakter, terutama pada generasi muda.</li> <li>5. Penyediaan ruang publik yang inklusif sebagai sarana masyarakat untuk berinteraksi dan berbudaya.</li> <li>6. Pengembangan diversifikasi pangan.</li> <li>7. Rehabilitasi hutan dan penghambatan laju deforestasi melalui pengembangan hasil hutan bukan kayu (HHBK).</li> <li>8. Pelestarian bentang alam (sungai, gunung, bukit, rawa, gambut, Hutan Kerangas, Hutan Hujan Tropis, dll) yang dapat membentuk identitas wilayah, serta perlindungan keanekaragaman hayati dan penguatan ekosistem lingkungan berbasis kearifan lokal.</li> <li>9. Penguatan upaya mempertahankan ekosistem alami berupa hutan daratan dan bakau serta luasan hutan sebagai tempat wilayah jelajah satwa (home range) dan konektivitas spesies yang dilindungi, seperti Orang Utan Borneo, Bekantan, Rangkong Papan Kalimantan.</li> <li>10. Pengembangan kawasan perkotaan, termasuk Wilayah Metropolitan, yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis karakter wilayah dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung.</li> <li>11. Peningkatan mitigasi struktural dan nonstruktural dalam penanggulangan bencana, termasuk adaptasi perubahan iklim.</li> <li>12. Pengembangan solusi berbasis alam (<i>natural based solution</i>) untuk pengendalian bencana, seperti banjir dan kebakaran hutan.</li> <li>13. Peningkatan ketangguhan, sistem peringatan dini, kesiapsiagaan, dan respons terhadap bencana.</li> <li>14. Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.</li> <li>15. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.</li> <li>16. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang Pembangunan.</li> <li>17. Penguatan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam Pembangunan.</li> <li>18. Pembangunan irigasi baru terutama pada sawah tadah hujan eksisting dan area dengan kategori lahan sesuai sepenuhnya.</li> <li>19. Pengembangan area yang didedikasikan sebagai retarding basin.</li> <li>20. Pengembangan <i>check dam</i> sebagai pengendali aliran sedimen untuk menjaga fungsi sungai sebagai alur pelayaran dan sumber pengairan persawahan.</li> <li>21. Ketahanan energi dengan pendekatan terpadu FEW Nexus.</li> <li>22. Reformasi pengelolaan sampah terintegrasi dari hulu ke hilir.</li> <li>23. Melestarikan budaya dan tradisi, pengembangan potensi lokal dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan</li> </ol> |
| 6   | Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan                                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penguatan kerja sama dengan daerah lainnya dalam pengelolaan wilayah berbasis kesatuan ekologi/ekosistem di Wilayah Kalimantan.</li> <li>2. Penuntasan RDTR Kabupaten/Kota dan kawasan strategis.</li> <li>3. Peningkatan pelaksanaan reforma agraria.</li> </ol>  |

| No. | Aspek  | Arah Kebijakan  |
|-----|--|---|
| 7   | Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan pelabuhan-pelabuhan secara terpadu dan pembangunan pelabuhan utama untuk mendukung pengembangan kawasan ekonomi strategis daerah.</li> <li>2. Pengembangan Bandara H. HASAN SAMPIT di Kabupaten Kotawaringin Timur, secara bertahap, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan pengembangan wilayah.</li> <li>3. Penyiapan dukungan teknis dalam pembangunan jalan trans Kalimantan serta pembangunan dan peningkatan jalan daerah sebagai bagian transportasi multimoda untuk menjangkau seluruh wilayah.</li> <li>4. Pengembangan angkutan sungai danau dan penyeberangan untuk distribusi logistik serta akses ke simpul utama transportasi.</li> <li>5. Optimalisasi sistem angkutan umum massal terintegrasi di perkotaan.</li> <li>6. Pemenuhan akses air minum aman serta sanitasi aman, berkelanjutan, dan inklusif sesuai karakteristik daerah.</li> <li>7. Penyediaan air siap minum melalui jaringan perpipaan dan akses sanitasi melalui sistem terpusat di wilayah perkotaan.</li> <li>8. Tersedianya lembaga pelaksana penyelenggara air minum di Kabupaten Kotawaringin Timur yang berkinerja baik dan optimal.</li> <li>9. Pelaksanaan pengawasan kualitas air minum di Kabupaten Kotawaringin Timur.</li> <li>10. Pengembangan pengetahuan dan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman sesuai karakteristik daerah.</li> <li>11. Optimalisasi sumber daya air dan pengembangan teknologi yang efektif dan efisien dalam pemenuhan akses air minum aman terutama untuk daerah kepulauan dan rawan air.</li> <li>12. Pengelolaan sumber daya air berkelanjutan bertumpu pada pengembangan teknologi yang efektif dan efisien, serta pembangunan sistem dan infrastruktur sumber daya air yang dapat beradaptasi dengan iklim, antara lain dengan mempertimbangkan pertumbuhan kota masa depan dalam upaya pemenuhan akses air minum aman serta mendukung pengurangan risiko bencana.</li> <li>13. Pengelolaan sampah terpadu untuk mencapai minimasi residu melalui pengumpulan dan pemilahan sejak dari sumber dan seluruh sampah terangkut dan terolah di fasilitas pengolahan sampah (minimal sepertiganya melalui daur ulang).</li> <li>14. Eliminasi praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di seluruh rumah tangga melalui pemicuan perubahan perilaku masyarakat yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana rantai layanan sanitasi yang aman.</li> <li>15. Optimalisasi lahan untuk penyediaan hunian vertikal (sewa dan milik) yang terpadu dengan layanan dasar permukiman, termasuk sistem transportasi publik.</li> <li>16. Penanganan permukiman kumuh melalui pemugaran komprehensif, peremajaan kota secara inklusif, serta permukiman kembali untuk mewujudkan kota tanpa permukiman kumuh di Kabupaten Kotawaringin Timur.</li> <li>17. Penerapan bauran pendanaan dalam meningkatkan akses pembiayaan perumahan masyarakat untuk memperoleh hunian layak, aman, terjangkau, dan berkelanjutan.</li> <li>18. Fasilitasi penyediaan akses perumahan layak dan terjangkau untuk daerah afirmasi.</li> </ol> |
| 8   | Kesinambungan Pembangunan                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sinkronisasi substansi dan periodisasi dokumen perencanaan pusat dan daerah.</li> <li>2. Sinkronisasi periodisasi RPJPD dan RTRW Provinsi.</li> <li>3. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional.</li> <li>4. Perkuatan pengendalian pembangunan, melalui penerapan manajemen risiko.</li> <li>5. Peningkatan sistem elektronik terpadu dan tata kelola data Pembangunan.</li> <li>6. Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan <i>blended finance</i>.</li> </ol>   |

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2024

## 5.2 SASARAN POKOK

Sasaran Pokok adalah gambaran rincian kinerja daerah yang menggambarkan pencapaian pembangunan sebagai upaya perwujudan visi daerah. Sasaran pokok merupakan kinerja yang merefleksikan aspek kesejahteraan, aspek daya saing, dan aspek

pelayanan umum pada setiap tahapan dengan menggunakan indikator- indikator yang bersifat progresif. Sasaran pokok 5 (lima) tahunan (per periode RPJMD) merupakan target berdasarkan arah kebijakan pembangunan pada setiap periode lima tahunan yang ditentukan berdasarkan penahapan pembangunan. Sasaran pokok pembangunan dirinci berdasarkan prioritas masing-masing misi pada setiap tahapan pembangunan. Perumusan sasaran pokok dilakukan dalam tahapan lima tahunan secara lebih definitif, berdasarkan arah kebijakan pembangunan dan telah mempedomani sasaran pokok dan arah pembangunan RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah.

**Tabel 5.3 Perumusan Sasaran Pokok Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025-2045**

| No.                           | RPJPN 2025-2045   | RPJPD Prov. Kalteng 2025-2045  |   | RPJPD Kab. Kotim 2025-2045   |   |
|-------------------------------|---|--|---|--|---|
|                               | Transformasi/<br>Misi   | Misi   | Sasaran Pokok   | Misi   | Sasaran Pokok   |
| <b>TRANSFORMASI INDONESIA</b> |   |  |   |  |   |
| 1                             | <b>Transformasi Sosial</b>                                    | Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun SDM yang sehat, unggul, berdaya saing dan adaptif           | Terwujudnya Kesehatan untuk Semua   | Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun SDM yang sehat, unggul, berdaya saing dan adaptif | Terwujudnya Kesehatan untuk Semua                                     |
|                               |   |  | Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata                                    |  | Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata                        |
|                               |   |  | Terwujudnya Perlindungan Sosial yang Adaptif                                      |  | Terwujudnya Perlindungan Sosial yang Adaptif                          |
| 2                             | <b>Transformasi Ekonomi</b>                                   | Mewujudkan transformasi ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi berwawasan lingkungan dan berdaya saing global | Terwujudnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi                             | Mewujudkan transformasi ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan                             | Terwujudnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi                 |
|                               |   |  | Terwujudnya Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru                                      |  | Terwujudnya Penerapan Ekonomi Hijau                                   |
|                               |   |  | Terwujudnya Transformasi Digital  |  | Terwujudnya Transformasi Digital                                      |
|                               |   |  | Terwujudnya Integrasi Ekonomi Domestik dan Global                                 |  | Terwujudnya Integrasi Ekonomi Domestik dan Global                     |
|                               |   |  | Terwujudnya Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi             |  | Terwujudnya Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi |
| 3                             | <b>Transformasi Tata Kelola</b>                               | Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan   | Terwujudnya Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegrasi dan Adaptif                | Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan adaptif                       | Terwujudnya Tata Kelola yang Inovatif dan Adaptif                     |
| <b>LANDASAN TRANSFORMASI</b>  |   |  |   |  |   |
| 4                             | <b>Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia</b> | Mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi daerah                    | Terwujudnya Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh, dan Demokrasi Substansial | Mewujudkan keamanan daerah, kepemimpinan demokratis dan stabilitas ekonomi                       | Terwujudnya Hukum Berkeadilan dan Keamanan Daerah Tangguh             |



| No.                                       | RPJPN 2025-2045   | RPJPD Prov. Kalteng 2025-2045   |  | RPJPD Kab. Kotim 2025-2045  |  |
|---|---|---|--|---|--|
|   | Transformasi/<br>Misi   | Misi  | Sasaran Pokok  | Misi  | Sasaran Pokok  |
|   |   |   | Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah                                  |   | Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah                                  |
|   |   |   | Terwujudnya Birokrasi Ideal  |   | Terwujudnya Birokrasi Ideal  |
| 5   | <b>Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi</b>                        | Mewujudkan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi  | Terwujudnya Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju                         | Mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi   | Terwujudnya Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju                         |
|   |   |   | Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif |   | Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif |
|   |   |   | Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas dan Pusat Konservasi Internasional  |   | Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas dan Pusat Konservasi Internasional  |
|   |   |   | Terwujudnya Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan                  |   | Terwujudnya Berketahanan Air dan Kemandirian Pangan                          |
|   |   |   | Terwujudnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim                  |   | Terwujudnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim                  |
| <b>KERANGKA IMPLEMENTASI TRANSFORMASI</b> |   |   |  |   |  |
|   | <b>Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan</b>        | Mewujudkan pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan  |  | Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan  |  |
|   | <b>Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan</b> | Mewujudkan penyediaan infrastruktur melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar yang ramah lingkungan |  | Mewujudkan penyediaan infrastruktur melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar yang ramah lingkungan |  |
|   | <b>Kesinambungan Pembangunan</b>                                  | Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah antar periode   |  | Mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan  |  |

Sumber : RPJPN 2025-2045 dan RPJPD PROVINSI KAL-TENG 2025-2045 dan Hasil Analisa Tahun 2024

**Tabel 5.4 Sasaran Pokok Kabupaten Kotawaringin Timur  
Tahun 2025-2045**

| No.   | Sasaran Pokok                                  | Arah Pembangunan / Indikator Utama Pembangunan   | Target      |             |
|---|--|--|-------------|-------------|
|   |  |  | Target 2025 | Target 2045 |
| <b>TRANSFORMASI SOSIAL</b>  |  |  |             |             |
| 1   | Terwujudnya Kesehatan untuk Semua              | KU.1 Kesehatan untuk Semua   |             |             |
|   |  | Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)   | 69,8        | 79          |
|   |  | Kesehatan Ibu dan Anak:  |             |             |
|   |  | Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)   | 121         | 16          |
|   |  | Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)                                      | 19,1        | 5           |
|   |  | Penanganan Tuberkulosis:   |             |             |
|   |  | b. Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis ( <i>treatment coverage</i> ) (%)                    | 53,85       | 100         |
|   |  | c. Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis ( <i>treatment success rate</i> ) (%)                        | 80,15       | 100         |
|   |  | Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)   | 99,5        | 99,5        |
| 2   | Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata | KU. 2 Peningkatan Kualitas Pendidikan yang Merata  |             |             |
|   |  | Hasil pembelajaran   |             |             |
|   |  | Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: |             |             |
|   |  | i) Literasi Membaca  | 30          | 70,61       |
|   |  | ii) Numerasi   | 16,94       | 62,5        |
|   |  | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat   | 74,27       | 93          |
|   |  | Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)  | 8,25        | 12          |
|   |  | Harapan lama sekolah (tahun)   | 12,44       | 14,43       |
|   |  | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)                       | 6,975       | 10          |
| Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) | 25,585   | 75   |             |             |
| 3   | Terwujudnya Perlindungan Sosial yang Adaptif   | KU. 3 Perlindungan Sosial yang Adaptif   |             |             |
|   |  | Tingkat Kemiskinan (%)   | 6,405       | 0,580       |



| No.                         | Sasaran Pokok   | Arah Pembangunan / Indikator Utama Pembangunan  | Target      |             |
|-----------------------------|---|---|-------------|-------------|
|                             |   |   | Target 2025 | Target 2045 |
|                             |   | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten  | 43,97       | 94,06       |
|                             |   | Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)  | 41,495      | 85          |
| <b>TRANSFORMASI EKONOMI</b> |   |   |             |             |
| 4                           | Terwujudnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi | KU. 4 Inovasi Peningkatan produktivitas ekonomi daerah  |             |             |
|                             |   | Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)  | 27,06       | 35          |
|                             |   | Pengembangan Pariwisata   |             |             |
|                             |   | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*  | 1,18        | 3           |
|                             |   | Jumlah Tamu Wisatawan Domestik dan Mancanegara (Ribu Orang)*  | 300         | 500         |
|                             |   | Indeks Daya Saing Daerah  | 3,00        | 4,00        |
|                             |   | Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD  |             |             |
|                             |   | Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian terhadap Seluruh UKM pada Level Kabupaten/Kota | 11,68       | 17,55       |
|                             |   | Rasio Kewirausahaan Daerah (%)  | 2,54        | 8           |
|                             |   | Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)   | 0,010       | 0,048       |
|                             |   | Return on Aset (ROA) BUMD (%)   | 1,89        | 5,22        |
|                             |   | Tingkat Pengangguran Terbuka (%)  | 4,19        | 2,6         |
|                             |   | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)  | 42,88       | 60          |
|                             |   | Tingkat penguasaan IPTEK  |             |             |
| Indeks Kapabilitas Inovasi  | 2,6   | 4,3   |             |             |
| 5                           | Terwujudnya Penerapan Ekonomi Hijau                   | KU. 5 Penerapan Ekonomi Hijau   |             |             |
|                             |   | Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau Daerah  |             |             |
|                             |   | Indeks Ekonomi Hijau Daerah   | 80,88       | 93,30       |
| 6                           | Terwujudnya Transformasi Digital                      | KU. 6 Transformasi Digital  |             |             |
|                             |   | Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki akses internet (%)  | 96,22       | 100         |
| 7                           | Terwujudnya Integrasi Ekonomi Domestik dan Global     | KU. 7 Integrasi ekonomi domestik dan global   |             |             |
|                             |   | Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Tingkat Kabupaten   | 12          | 9           |



| No.  | Sasaran Pokok   | Arah Pembangunan / Indikator Utama Pembangunan                                      | Target      |             |
|--|---|---|-------------|-------------|
|  |   |   | Target 2025 | Target 2045 |
|  |   | Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)  | 38,07       | 35          |
|  |   | Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)   | 16,95       | 60          |
| 8  | Terwujudnya Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi | KU. 8 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru                |             |             |
|  |   | Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan                                     |             |             |
|  |   | Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)            | 51,18       | 100         |
|  |   | Persentase Desa Mandiri (%)   | 42,86       | 54,17       |
| <b>TRANSFORMASI TATA KELOLA</b>  |   |   |             |             |
| 9  | Terwujudnya Tata Kelola yang Inovatif dan Adaptif                     | KU. 9 Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Adaptif                            |             |             |
|  |   | Indeks Reformasi Hukum  | 70          | 90          |
|  |   | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik                                      | 2,51        | 5           |
|  |   | Indeks Pelayanan Publik   | 2,5         | 5           |
|  |   | Skor MCP (Monitoring Center for Prevention)   | 75          | 92          |
| <b>KEAMANAN DAERAH TANGGUH, DEMOKRASI SUBSTANSIAL, DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH</b> |   |   |             |             |
| 10   | Terwujudnya Hukum Berkeadilan dan Keamanan Daerah Tangguh             | KU. 10 Penegakan Hukum yang Berkeadilan dan Keamanan Daerah                         |             |             |
|  |   | Persentase capaian pelaksanaan aksi HAM   | 75          | 95          |
|  |   | Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%) | 69,59       | 86,97       |
|  |   | Indeks Demokrasi Kabupaten  | 70          | 85          |
| 11   | Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah                           | KU. 11 Stabilitas Ekonomi Makro Daerah  |             |             |
|  |   | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)  | 0,8         | 1,1         |
|  |   | Tingkat Inflasi (%)   | 2,56        | 3,1         |
|  |   | Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan   |             |             |
|  |   | Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)  | 23,19       | 62,9        |
|  |   | Total Kredit/PDRB (%)   | 21,8        | 60,6        |



| No.  | Sasaran Pokok  | Arah Pembangunan / Indikator Utama Pembangunan  | Target      |             |
|--|--|---|-------------|-------------|
|  |  |   | Target 2025 | Target 2045 |
|  |  | Inklusi Keuangan (%)  | 75          | 95          |
| 12   | Terwujudnya Birokrasi Ideal  | KU. 12 Birokrasi Ideal  |             |             |
|  |  | Indeks Reformasi Birokrasi  | 65          | 91          |
|  |  | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)                        | 71          | 92          |
| <b>KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI</b>                                   |  |   |             |             |
| 13   | Terwujudnya Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju                         | KU. 13 Peningkatan kerukunan umat beragama dan kebudayaan daerah                        |             |             |
|  |  | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)   | 58,53       | 71,44       |
|  |  | Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)   | 80,4        | 88,03       |
| 14   | Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif | KU. 14 Peningkatan kualitas keluarga, pemuda, dan kesetaraan gender                     |             |             |
|  |  | i-Bangga  | 70          | 91          |
|  |  | Indeks Ketimpangan Gender (IKG)   | 0,49        | 0,23        |
| 15   | Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas dan Pusat Konservasi Internasional  | KU. 15 Peningkatan kualitas lingkungan hidup  |             |             |
|  |  | Indeks Kualitas Tutupan Lahan   | 72,33       | 73,72       |
|  |  | Kualitas Lingkungan Hidup   |             |             |
|  |  | Indeks kualitas lingkungan hidup  | 70,99       | 76,04       |
|  |  | Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)   | 13,89       | 50          |
|  |  | Pengelolaan Sampah  |             |             |
|  |  | - Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)                            | 24,92       | 80          |
| - Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)* | 37,76  | 100   |             |             |
| 16   | Terwujudnya Berketahanan Air dan Kemandirian Pangan                          | KU. 16 Peningkatan kemandirian pangan dan air   |             |             |
|  |  | Ketahanan air dan pangan  |             |             |
|  |  | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan ( <i>Prevalence of Undernourishment</i> ) (%) | 11,67       | 2,5         |
|  |  | Ketahanan air   |             |             |
|  |  | Kapasitas Air Baku (m3/detik)*  | 1,52        | 3,73        |
|  |  | Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)                      | 35,34       | 100         |
| 17   | Terwujudnya Resiliensi Terhadap  | KU. 17 Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim                         |             |             |

| No. | Sasaran Pokok               | Arah Pembangunan / Indikator Utama Pembangunan | Target      |             |
|-----|-----------------------------|--|-------------|-------------|
|     |                             |  | Target 2025 | Target 2045 |
|     | Bencana dan Perubahan Iklim | Indeks Risiko Bencana (IRB)*                   | 138,74      | 100,7       |
|     |                             | Persentase Penurunan Emisi GRK (%)             | 25          | 80          |

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2024

### 5.2.1 Arah Pembangunan Daerah

Arah Pembangunan Daerah merupakan strategi daerah dalam mencapai tujuan pembangunan daerah dan berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang Nasional dan Provinsi yang sesuai dengan karakteristik dan potensi Kabupaten Kotawaringin Timur. Adapun penyelarasan arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Kotawaringin Timur sebagaimana tabel berikut:

**Tabel 5.5 Penyeragaman arah Pembangunan RPJPD Kabupaten Kotawaringin Timur**

| No.                           | RPJPN 2025-2045   |  | RPJPD Prov. Kalteng 2025-2045  |   | RPJPD Kab. Kotim 2025-2045   |  |
|-------------------------------|---|--|--|---|--|--|
|                               | Transformasi  | Arah Pembangunan   | Misi   | Arah Pembangunan  | Misi   | Arah Pembangunan   |
| <b>TRANSFORMASI INDONESIA</b> |   |  |  |   |  |  |
| 1                             | <b>Transformasi Sosial</b>                                    | IE1. Kesehatan untuk Semua   | Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun SDM yang sehat, unggul, berdaya saing dan adaptif           | KT1. Kesehatan untuk Semua  | Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun SDM yang sehat, unggul, berdaya saing dan adaptif | KU.1 Kesehatan untuk Semua                                       |
|                               |   | IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata  |  | KT2. Pendidikan Berkualitas dan Merata                                      |  | KU.2 Peningkatan Kualitas Pendidikan yang Merata                 |
|                               |   | IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif  |  | KT3. Perlindungan Sosial yang Adaptif                                       |  | KU.3 Perlindungan Sosial yang Adaptif                            |
| 2                             | <b>Transformasi Ekonomi</b>                                   | IE 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi                                | Mewujudkan transformasi ekonomi melalui pertumbuhan ekonomi berwawasan lingkungan dan berdaya saing global | KT4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi                              | Mewujudkan transformasi ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan                             | KU. 4 Inovasi produktivitas ekonomi daerah                       |
|                               |   | IE 5. Penerapan Ekonomi Hijau  |  | KT5. Penerapan Ekonomi Hijau  |  | KU. 5 Penerapan Ekonomi Hijau                                    |
|                               |   | IE 6. Transformasi Digital   |  | KT6. Transformasi Digital   |  | KU. 6 Transformasi Digital                                       |
|                               |   | IE 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global                                    |  | KT7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global                                  |  | KU. 7 Integrasi ekonomi domestik dan global                      |
|                               |   | IE 8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi                |  | KT8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi              |  | KU. 8 Perkotaan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru |
| 3                             | <b>Transformasi Tata Kelola</b>                               | IE 9. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif                  | Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan   | KT9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif                | Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan adaptif                       | KU. 9 Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Adaptif         |
| <b>LANDASAN TRANSFORMASI</b>  |   |  |  |   |  |  |
| 4                             | <b>Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia</b> | IE 10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial | Mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah              | KT10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh, dan Demokrasi Substansial | Mewujudkan keamanan daerah, kepemimpinan demokratis dan stabilitas ekonomi                       | KU. 10 Penegakan Hukum yang Berkeadilan dan Keamanan Daerah      |
|                               |   | IE 11. Stabilitas Ekonomi Makro  |  | KT11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah                                       |  | KU. 11 Stabilitas Ekonomi Makro Daerah                           |
|                               |   | IE 12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan             |  | KT12. Birokrasi Ideal   |  | KU. 12 Birokrasi Ideal   |
| 5                             | <b>Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi</b>                    | IE 13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju                                | Mewujudkan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi   | KT13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju                              | Mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi  | KU. 13 Peningkatan kerukunan umat beragama dan kebudayaan daerah |

| No.                                       | RPJPN 2025-2045   |   | RPJPD Prov. Kalteng 2025-2045   |   | RPJPD Kab. Kotim 2025-2045  |   |
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | Transformasi  | Arah Pembangunan  | Misi  | Arah Pembangunan  | Misi  | Arah Pembangunan  |
|   |   | IE 14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif |   | KT14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif |   | KU. 14 Peningkatan kualitas keluarga, pemuda, dan kesetaraan gender |
|   |   | IE 15. Lingkungan Hidup Berkualitas                                     |   | KT15. Lingkungan Hidup Berkualitas dan Pusat Konservasi Internasional |   | KU. 15 Peningkatan kualitas lingkungan hidup                        |
|   |   | IE 16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan                 |   | KT16. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan                 |   | KU. 16 Peningkatan kemandirian pangan, dan air                      |
|   |   | IE 17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim                  |   | KT.17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim                |   | KU. 17 Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim     |
| <b>KERANGKA IMPLEMENTASI TRANSFORMASI</b> |   |   |   |   |   |   |
|   | <b>Pembangunan Kewilayahan yang Merata dan Berkeadilan</b>        |   | Mewujudkan pembangunan wilayah yang merata dan berkeadilan  |   | Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan  |   |
|   | <b>Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan</b> |   | Mewujudkan penyediaan infrastruktur melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar yang ramah lingkungan |   | Mewujudkan penyediaan infrastruktur melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar yang ramah lingkungan |   |
|   | <b>Kesinambungan Pembangunan</b>                                  |   | Mewujudkan kesinambungan pembangunan daerah antarperiode  |   | Mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan  |   |

Sumber : RPJPN 2025-2045 dan RPJPD PROVINSI KAL-TENG 2025-2045 dan Hasil Analisa Tahun 2024

### 5.2.2 Indikator Utama Pembangunan Daerah

Indikator Utama Pembangunan Daerah merupakan alat ukur untuk melihat pencapaian dari tujuan pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur serta kontribusi terhadap tujuan pembangunan nasional dan provinsi jangka panjang.



**Tabel 5.6 Penyeragaman Indikator Utama Pembangunan Daerah RPJPD Kabupaten Kotawaringin Timur**

| No                         | Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan Nasional                 | RPJPN 2025-2045 |             | No  | Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan Provinsi                 | RPJPD 2025-2045 |             | No   | Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur | RPJPD 2025-2045 |             |
|----------------------------|---|-----------------|-------------|---|---|-----------------|-------------|--|---|-----------------|-------------|
|                            |   | Target RPJPN    |             |   |   | Target RPJPD    |             |  |   | Target RPJPD    |             |
|                            |   | Target 2025     | Target 2045 |   |   | Target 2025     | Target 2045 |  |   | Target 2025     | Target 2045 |
| <b>TRANSFORMASI SOSIAL</b> |   |                 |             | <b>TRANSFORMASI SOSIAL</b>  |   |                 |             | <b>TRANSFORMASI SOSIAL</b>   |   |                 |             |
|                            | <b>IE1. Kesehatan untuk Semua</b>                                     |                 |             |   | <b>KT1. Kesehatan untuk Semua</b>                                     |                 |             |  | <b>KU.1 Kesehatan untuk Semua</b>   |                 |             |
| 1                          | Usia Harapan Hidup (tahun)  | 74,4            | 80          | 1   | Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)                                      | 73,65           | 79,09       | 1  | Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)  | 69,8            | 79          |
| 2                          | Kesehatan Ibu dan Anak  |                 |             | 2   | Kesehatan Ibu dan Anak:   |                 |             | 2  | Kesehatan Ibu dan Anak:   |                 |             |
| a.                         | Angka kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)                      | 122             | 16          | a.  | Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)                      | 190             | 16          | a.   | Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)                          | 121             | 16          |
| b.                         | Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) | 18,8            | 5,0         | b.  | Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) | 20,6            | 5,5         | b.   | Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)     | 19,1            | 5           |
| 3                          | Insidensi Turberkolis (per 100.000 penduduk)                          | 272             | 76          | 3   | Penanganan Tuberkulosis:  |                 |             | 3  | Penanganan Tuberkulosis:  |                 |             |
| a.                         |   |                 |             | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis ( <i>treatment coverage</i> ) (%)* | 66  | 95              | a.          | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis ( <i>treatment coverage</i> ) (%) | 53,85   | 100             |             |
| b.                         |   |                 |             | Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis ( <i>treatment success rate</i> ) (%)*     | 87,37   | 98              | b.          | Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis ( <i>treatment success rate</i> ) (%)     | 80,15   | 100             |             |
|                            |   |                 |             |   |   |                 |             |  |   |                 |             |



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2025-2045



| No | Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan Nasional | RPJPN 2025-2045 |             | No | Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan Provinsi   | RPJPD 2025-2045 |             | No | Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur                                  | RPJPD 2025-2045 |             |
|----|---|-----------------|-------------|----|---|-----------------|-------------|----|--|-----------------|-------------|
|    |   | Target RPJPN    |             |    |   | Target RPJPD    |             |    |  | Target RPJPD    |             |
|    |   | Target 2025     | Target 2045 |    |   | Target 2025     | Target 2045 |    |  | Target 2025     | Target 2045 |
| 4  | Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan Nasional (%)    | 98,0            | 99,5        | 4  | Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)  | 99,5            | 99,5        | 4  | Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)   | 99,5            | 99,5        |
|    | <b>IE2. Pendidikan Berkualitas yang Merata</b>        |                 |             |    | <b>KT2. Pendidikan Berkualitas dan Merata</b>   |                 |             |    | <b>KU. 2 Peningkatan Kualitas Pendidikan yang Merata</b>   |                 |             |
| 5  | Hasil pembelajaran                                    |                 |             | 5  | Hasil pembelajaran  |                 |             | 5  | Hasil pembelajaran   |                 |             |
| a. | Rata-rata nilai PISA                                  |                 |             | a. | Persentase kabupaten/kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*:    |                 |             | a. |  |                 |             |
|    | a-i Membaca   | 396             | 485         |    | a-i Literasi Membaca  | 14,29           | 64,29       |    |  |                 |             |
|    | a-ii Matematika                                       | 404             | 490         |    | a-ii Numerasi   | 7,14            | 64,29       |    |  |                 |             |
|    | a-iii Sains   | 416             | 487         |    | Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk*: |                 |             |    | Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: |                 |             |
|    |   |                 |             |    | a-iii Literasi Membaca  | 39,69           | 69,61       |    | a-i Literasi Membaca   | 30              | 70,61       |
|    |   |                 |             |    | a-iv Numerasi   | 27,22           | 59,62       |    | a-ii Numerasi  | 16,94           | 62,5        |
|    |   |                 |             |    | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat  | 74,27           | 93          |    | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat   | 74,27           | 93          |



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2025-2045



| No | Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan Nasional  | RPJPN 2025-2045 |             | No | Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan Provinsi   | RPJPD 2025-2045 |             | No | Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur                                     | RPJPD 2025-2045 |             |
|----|--|-----------------|-------------|----|---|-----------------|-------------|----|---|-----------------|-------------|
|    |  | Target RPJPN    |             |    |   | Target RPJPD    |             |    |   | Target RPJPD    |             |
|    |  | Target 2025     | Target 2045 |    |   | Target 2025     | Target 2045 |    |   | Target 2025     | Target 2045 |
| b. | Rata-rata nilai asesmen nasional   |                 |             | b. |   |                 |             | b. |   |                 |             |
|    | b-i Literasi membaca   | 62,89           | 75,73       |    |   |                 |             |    |   |                 |             |
|    | b-ii Numerasi  | 54,36           | 68,72       |    |   |                 |             |    |   |                 |             |
| c. | Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)  | 9,33            | 12,0        | c. | Rata-Rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)   | 9,41            | 11,95       | c. | Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)   | 8,25            | 12          |
| d. | Harapan lama sekolah   | 13,32           | 14,81       | d. | Harapan lama sekolah (tahun)  | 13,01           | 14,4        | d. | Harapan lama sekolah (tahun)  | 12,44           | 14,43       |
| 6  | Angka partisipasi kasar (APK) Pendidikan tinggi (%)  | 33,94           | 60,00       | 6  | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)                          | 11,23           | 13,10       | 6  | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)                          | 6,975           | 10          |
| 7  | Presentasi pekerjaan lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja dibidang keahlian menengah tinggi (%) | 66,78           | 75,00       | 7  | Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) | 72,82           | 85          | 7  | Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) | 25,585          | 75          |
|    | <b>IE3. Perlindungan Sosial yang Adaptif</b>   |                 |             |    | <b>KT3. Perlindungan Sosial yang Adaptif</b>  |                 |             |    | <b>KU. 3 Perlindungan Sosial yang Adaptif</b>   |                 |             |
| 8  | Tingkat kemiskinan (%)   | 7,0-8,0         | 0,5-0,8     | 8  | Tingkat Kemiskinan (%)  | 4,61            | 0,58        | 8  | Tingkat Kemiskinan (%)  | 6,405           | 0,580       |
| 9  | Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan (%)   | 43,19           | 99,5        | 9  | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)   | 43,97           | 94,06       | 9  | Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten  | 43,97           | 94,06       |



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2025-2045



| No                          | Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan Nasional          | RPJPN 2025-2045 |             | No                          | Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan Provinsi              | RPJPD 2025-2045 |             | No                          | Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur | RPJPD 2025-2045 |             |
|-----------------------------|--|-----------------|-------------|-----------------------------|--|-----------------|-------------|-----------------------------|---|-----------------|-------------|
|                             |  | Target RPJPN    |             |                             |  | Target RPJPD    |             |                             |   | Target RPJPD    |             |
|                             |  | Target 2025     | Target 2045 |                             |  | Target 2025     | Target 2045 |                             |   | Target 2025     | Target 2045 |
| 10                          | Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal (%) | 22,0            | 60,0        | 10                          | Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)     | 40              | 80          | 10                          | Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)            | 41,495          | 85          |
| <b>TRANSFORMASI EKONOMI</b> |  |                 |             | <b>TRANSFORMASI EKONOMI</b> |  |                 |             | <b>TRANSFORMASI EKONOMI</b> |   |                 |             |
|                             | <b>IE 4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi</b>         |                 |             |                             | <b>KT4. Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi</b>              |                 |             |                             | <b>KU. 4 Inovasi Peningkatan produktivitas ekonomi daerah</b>             |                 |             |
| 11                          | Rasio PDB industri pengolahan (%)                              |                 |             | 11                          | Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)                                 | 15,76           | 27,00       | 11                          | Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)  | 27,06           | 35          |
| a.                          | Rasio PDB Industri Pengolahan (%)                              | 20,8            | 28,0        | a.                          |  |                 |             | a.                          |   |                 |             |
| b.                          | Pertumbuhan PDB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)         | 3,2-3,4         | 3,3-4,2     | b.                          |  |                 |             | b.                          |   |                 |             |
| 12                          | Pengembangan Pariwisata  |                 |             | 12                          | Pengembangan Pariwisata  |                 |             | 12                          | Pengembangan Pariwisata   |                 |             |
| a.                          | Rasio PDB Pariwisata (%)                                       | 4,6             | 8,0         | a                           | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*               | 1,94            | 3,29        | a                           | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*                      | 1,18            | 3           |
| b.                          | Devisa Pariwisata (Milliar US Dollar)                          | 22,10           | 100         | b                           | Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Hotel Berbintang) (Ribu Orang)* | 5,47            | 13,68       | b                           | Jumlah Tamu Wisatawan Domestik dan Mancanegara (Ribu Orang)*              | 300             | 500         |
| 13                          | Proporsi PDB Ekonomi Kreatif (%)                               | 7,92            | 11,0        | 13                          | Indeks Daya Saing Daerah   | 3,13            | 4,7         | 13                          | Indeks Daya Saing Daerah  | 3,00            | 4,00        |
| 14                          | Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMN                             |                 |             | 14                          | Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD                                 |                 |             | 14                          | Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD  |                 |             |



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2025-2045



| No | Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan Nasional | RPJPN 2025-2045 |             | No | Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan Provinsi                              | RPJPD 2025-2045 |             | No | Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur                                 | RPJPD 2025-2045 |             |
|----|---|-----------------|-------------|----|--|-----------------|-------------|----|---|-----------------|-------------|
|    |   | Target RPJPN    |             |    |  | Target RPJPD    |             |    |   | Target RPJPD    |             |
|    |   | Target 2025     | Target 2045 |    |  | Target 2025     | Target 2045 |    |   | Target 2025     | Target 2045 |
| a. | Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah (%)          | 1,44            | 5,0         | a. | a-i Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian pada Level Provinsi (%) | 15,19           | 18,98       | a. | a-i Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian terhadap Seluruh UKM pada Level Kabupaten/Kota | 11,68           | 17,55       |
|    |   |                 |             |    | a-ii Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah pada Level Provinsi (%)           | 1,90            | 4,10        |    | a-ii  |                 |             |
| b. | Rasio kewirausahaan (%)                               | 3,14            | 8,0         | b. | Rasio Kewirausahaan Daerah (%)   | 3,33            | 8,71        | b. | Rasio Kewirausahaan Daerah (%)  | 2,54            | 8           |
| c. | Rasio volume usaha koperasi terhadap PDB (%)          | 1,1             | 5,0         | c. | Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)                                      | 1,62            | 3,61        | c. | Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)   | 0,010           | 0,048       |
| d. | <i>Return of Asset (ROA) BUMN (%)</i>                 | 3,4             | 5,6         | d. | <i>Return on Aset (ROA) BUMD (%)*</i>  | 1,89            | 5,22        | d. | <i>Return on Aset (ROA) BUMD (%)*</i>   | 1,89            | 5,22        |
| 15 | Penciptaan lapangan kerja yang baik                   |                 |             | 15 | Penciptaan lapangan kerja yang baik  |                 |             | 15 | Penciptaan lapangan kerja yang baik   |                 |             |
| a. | Tingkat Pengangguran terbuka                          | 4,50-5,00       | 4,00        | a. | Tingkat Pengangguran Terbuka (%)   | 3,91            | 1,8         | a. | Tingkat Pengangguran Terbuka (%)  | 4,19            | 2,6         |
| b. | Proporsi penciptaan lapangan kerja formal             | 35              | 80          | b. | Proporsi penciptaan angkatan lapangan kerja formal                                 | 52              | 90          | b. |   |                 |             |
| 16 | Tingkat partisipasi Angkatan kerja perempuan (%)      | 56,30           | 70,0        | 16 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)                                   | 52,03           | 66          | 16 | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)  | 42,88           | 60          |
| 17 | Tingkat penguasaan IPTEK                              |                 |             | 17 | Indeks Kapabilitas Inovasi   | 2,59            | 4,61        | 17 | Indeks Kapabilitas Inovasi  | 2,6             | 4,3         |



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2025-2045



| No | Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan Nasional  | RPJPN 2025-2045 |             | No | Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan Provinsi     | RPJPD 2025-2045 |             | No | Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur | RPJPD 2025-2045 |             |
|----|--|-----------------|-------------|----|---|-----------------|-------------|----|---|-----------------|-------------|
|    |  | Target RPJPN    |             |    |   | Target RPJPD    |             |    |   | Target RPJPD    |             |
|    |  | Target 2025     | Target 2045 |    |   | Target 2025     | Target 2045 |    |   | Target 2025     | Target 2045 |
| a. | Pengeluaran iptek dan inovasi (% PDB)                  | 0,30            | 2,2-2,3     | a. |   |                 |             | a. |   |                 |             |
| b. | Peringkat Index Inovasi Global (peringkat)             | 60              | 30 besar    | b. |   |                 |             | b. |   |                 |             |
|    | <b>IE 5. Penerapan Ekonomi Hijau</b>                   |                 |             |    | <b>KT5. Penerapan Ekonomi Hijau</b>                       |                 |             |    | <b>KU. 5 Penerapan Ekonomi Hijau</b>                                      |                 |             |
| 18 | Tingkat penerapan ekonomi hijau                        |                 |             | 18 | Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau Daerah                    |                 |             | 18 | Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau Daerah                                    |                 |             |
| a. | Indeks ekonomi hijau (%)                               | 70,80           | 90,65       | a. | Indeks Ekonomi Hijau Daerah                               | 80,88           | 93,30       | a. | Indeks Ekonomi Hijau Daerah   | 80,88           | 93,30       |
| b. | Porsi EBT dalam bauran energi primer (%)               | 20              | 70          | b. | Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (%)                  | 17              | 78,62       | b. |   |                 |             |
|    | <b>IE 6. Transformasi Digital</b>                      |                 |             |    | <b>KT6. Transformasi Digital</b>                          |                 |             |    | <b>KU. 6 Transformasi Digital</b>   |                 |             |
| 19 | Indeks daya saing digital ditingkat global (peringkat) | 43              | 20 besar    | 19 | a. Indeks Pembangunan Teknologi informasi dan Komunikasi* | 5,8             | 7,5         | 19 | a. Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki akses internet (%)             | 96,22           | 100         |
|    |  |                 |             |    | b. Indeks Literasi Digital                                | 3,7             | 4,6         |    | b.  |                 |             |
|    | <b>IE 7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global</b>     |                 |             |    | <b>KT7. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global</b>         |                 |             |    | <b>KU. 7 Integrasi ekonomi domestik dan global</b>                        |                 |             |
| 20 | Biaya logistik (% PDB)                                 | 13,5            | 8,0         | 20 | Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi*    | 4,28            | 3,35        | 20 | Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Tingkat Kabupaten                     | 12              | 9           |
| 21 | Pembentukan modal tetap bruto (% PDB)                  | 30,1-30,2       | 27,2        | 21 | Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)                    | 38,5            | 39          | 21 | Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)                                    | 38,07           | 35          |



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2025-2045



| No                              | Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan Nasional                    | RPJPN 2025-2045 |             | No                              | Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan Provinsi                    | RPJPD 2025-2045 |             | No                              | Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur   | RPJPD 2025-2045 |             |
|---------------------------------|--|-----------------|-------------|---------------------------------|--|-----------------|-------------|---------------------------------|---|-----------------|-------------|
|                                 |  | Target RPJPN    |             |                                 |  | Target RPJPD    |             |                                 |   | Target RPJPD    |             |
|                                 |  | Target 2025     | Target 2045 |                                 |  | Target 2025     | Target 2045 |                                 |   | Target 2025     | Target 2045 |
| 22                              | Ekspor barang dan jasa (% PDB)   | 21,0-21,6       | 40,0        | 22                              | Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)  | 45,6            | 51,33       | 22                              | Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)   | 16,95           | 60          |
|                                 | <b>IE 8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi</b>   |                 |             |                                 | <b>KT8. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi</b>    |                 |             |                                 | <b>KU. 8 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru</b> |                 |             |
| 23                              | Kota dan Desa maju, inklusif, dan berkelanjutan                          |                 |             | 23                              | Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan                          |                 |             | 23                              | Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan                             |                 |             |
| a.                              | Proporsi kontribusi PDRB wilayah metropolitan terhadap nasional (%)      | 43,34           | 48,92       | a.                              |  |                 |             | a.                              |   |                 |             |
| b.                              | Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan (%) | 67,00           | 100         | b.                              | Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%) | 64,53           | 100         | b.                              | Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)    | 51,18           | 100         |
| c.                              | Persentase Desa Mandiri (%)  | 4,00            | 16,25       | c.                              | Persentase Desa Mandiri (%)  | 1,61            | 13,41       | c.                              | Persentase Desa Mandiri (%)   | 42,86           | 54,17       |
| <b>TRANSFORMASI TATA KELOLA</b> |  |                 |             | <b>TRANSFORMASI TATA KELOLA</b> |  |                 |             | <b>TRANSFORMASI TATA KELOLA</b> |   |                 |             |
|                                 | <b>IE 9. Regulasi dan Tata kelola yang Berintegritas dan Adaptif</b>     |                 |             |                                 | <b>KT9. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif</b>      |                 |             |                                 | <b>KU. 9 Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Adaptif</b>             |                 |             |
| 24                              | Indeks materi hukum  | 0,51            | 0,71        | 24                              | Indeks Reformasi Hukum   | 70              | 100         | 24                              | Indeks Reformasi Hukum  | 70              | 90          |
| 25                              | Indeks system pemerintahan berbasis elektronik                           | 3,12            | 5,0         | 25                              | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik                           | 2,9             | 5           | 25                              | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik                              | 2,51            | 5           |
| 26                              | Indeks pelayanan publik  | 3,68            | 5,0         | 26                              | Indeks Pelayanan Publik  | 2,5             | 5           | 26                              | Indeks Pelayanan Publik   | 2,5             | 5           |



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2025-2045



| No   | Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan Nasional                                 | RPJPN 2025-2045   |                 | No   | Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan Provinsi                               | RPJPD 2025-2045 |             | No   | Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur           | RPJPD 2025-2045 |             |
|--|---|-------------------|-----------------|--|---|-----------------|-------------|--|---|-----------------|-------------|
|  |   | Target RPJPN      |                 |  |   | Target RPJPD    |             |  |   | Target RPJPD    |             |
|  |   | Target 2025       | Target 2045     |  |   | Target 2025     | Target 2045 |  |   | Target 2025     | Target 2045 |
| 27   | Anti Korupsi  |                   |                 | 27   | Indeks Integritas Nasional  | 69,54           | 83,77       | 27   | Skor MCP (Monitoring Center for Prevention)   | 75              | 92          |
| a.   | Indeks integritas nasional  | 74,52             | 96,98           | a.   |   |                 |             | a.   |   |                 |             |
| b.   | Indeks persepsi korupsi   | 38                | 60              | b.   |   |                 |             | b.   |   |                 |             |
| <b>SUPREMASI HUKUM, STABILITAS, DAN KEPEMIMPINAN INDONESIA</b> |   |                   |                 | <b>KEAMANAN DAERAH TANGGUH, DEMOKRASI SUBSTANSIAL, DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH</b> |   |                 |             | <b>KEAMANAN DAERAH TANGGUH, DEMOKRASI SUBSTANSIAL, DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH</b> |   |                 |             |
|  | <b>IE 10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, dan Demokrasi Substansial</b> |                   |                 |  | <b>KT10. Hukum Berkeadilan, Keamanan Daerah Tangguh, dan Demokrasi Substansial</b>  |                 |             |  | <b>KU. 10 Penegakan Hukum yang Berkeadilan dan Keamanan Daerah</b>                  |                 |             |
| 28   | Indeks pembangunan hukum  | 0,69              | 0,89            | 28   | Persentase capaian pelaksanaan aksi HAM   | 60              | 80          | 28   | Persentase capaian pelaksanaan aksi HAM   | 75              | 95          |
| 29   | Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%)   | 67,5              | 80,0            | 29   | Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%) | 69,59           | 86,97       | 29   | Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%) | 69,59           | 86,97       |
| 30   | Indeks demokrasi Indonesia  | Sedang<br>(60-80) | Tinggi<br>(>80) | 30   | Indeks Demokrasi Indonesia  | 70              | 85          | 30   | Indeks Demokrasi Kabupaten  | 70              | 85          |



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2025-2045



| No | Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan Nasional                     | RPJPN 2025-2045 |             | No | Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan Provinsi               | RPJPD 2025-2045 |               | No | Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur | RPJPD 2025-2045 |             |
|----|---|-----------------|-------------|----|---|-----------------|---------------|----|---|-----------------|-------------|
|    |   | Target RPJPN    |             |    |   | Target RPJPD    |               |    |   | Target RPJPD    |             |
|    |   | Target 2025     | Target 2045 |    |   | Target 2025     | Target 2045   |    |   | Target 2025     | Target 2045 |
|    | <b>IE 11. Stabilitas Ekonomi Makro</b>                                    |                 |             |    | <b>KT11. Stabilitas Ekonomi Makro Daerah</b>                        |                 |               |    | <b>KU. 11 Stabilitas Ekonomi Makro Daerah</b>                             |                 |             |
| 31 | Rasio penerimaan perpajakan terhadap PDB (%)                              | 10,70-11,20     | 18,0-20,0   | 31 | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)                                | 1,62            | 1,1           | 31 | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)                                      | 0,8             | 1,1         |
| 32 | Tingkat inflasi (%)   | 2,5 + 1         | 2,0 + 1     | 32 | Tingkat Inflasi (%)   | 3,7             | 3,1           | 32 | Tingkat Inflasi (%)   | 2,56            | 3,1         |
| 33 | Pendalaman/Intermediasi sektor keuangan                                   |                 |             | 33 | Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan                             |                 |               | 33 | Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan                                   |                 |             |
| a. | Aset perbankan/PDB (%)  | 66,9            | 200         | a. | Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) *                                  | 23,19           | 62,9          | a. | Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)  | 23,19           | 62,9        |
| b. | Aset dana pensiun/PDB (%)   | 8,0             | 60          | b. | Aset Dana Pensiun/PDRB (%)  | 0,05            | 1,56          | b. |   |                 |             |
| c. | Aset asuransi/PDB (%)   | 9,1             | 20          | c. |   |                 |               | c. |   |                 |             |
| d. | Kapitalisasi pasar modal/PDB (%)  | 57,8            | 120         | d. | Nilai Transaksi Saham Per Provinsi Berupa Nilai Rata-rata Tahunan*  | 5.388.734,85    | 48.213.830,84 | d. |   |                 |             |
| e. | Total kredit/PDB (%)  | 37,8            | 80-90       | e. | Total Kredit/PDRB (%)   | 21,8            | 60,6          | e. | Total Kredit/PDRB (%)   | 21,8            | 60,6        |
| 34 | Inklusi keuangan (%)  | 91              | 98          | 34 | Inklusi Keuangan (%)  | 87,74           | 98,36         | 34 | Inklusi Keuangan (%)  | 75              | 95          |
|    | <b>IE 12. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan</b> |                 |             |    | <b>KT12. Birokrasi Ideal</b>  |                 |               |    | <b>KU. 12 Birokrasi Ideal</b>   |                 |             |
| 35 | Asia Power Index ( <i>Diplomatic Influencer</i> )                         | 61,54           | 75,0-80,0   | 35 | Indeks Reformasi Birokrasi  | 65              | 91            | 35 | Indeks Reformasi Birokrasi  | 65              | 91          |
| 36 | Asia Power Index ( <i>Military Capability</i> )                           | 16              | 45,0        | 36 | a. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) | 71              | 92            | 36 | a. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)       | 71              | 92          |



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2025-2045



| No   | Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan Nasional                          | RPJPN 2025-2045 |             | No | Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan Provinsi                        | RPJPD 2025-2045 |             | No | Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur  | RPJPD 2025-2045                            |             |  |
|--|--|-----------------|-------------|----|--|-----------------|-------------|----|--|--|-------------|--|
|  |  | Target RPJPN    |             |    |  | Target RPJPD    |             |    |  | Target RPJPD                               |             |  |
|  |  | Target 2025     | Target 2045 |    |  | Target 2025     | Target 2045 |    |  | Target 2025                                | Target 2045 |  |
|  |  |                 |             |    | b. Nilai Maturitas SPIP  | 3,16            | 4,20        |    | b.   |  |             |  |
| <b>KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI</b> |  |                 |             |    | <b>KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI</b>                                   |                 |             |    |  | <b>KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI</b> |             |  |
|  | <b>IE 13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju</b>                         |                 |             |    | <b>KT13. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju</b>                        |                 |             |    | <b>KU. 13 Peningkatan kerukunan umat beragama dan kebudayaan daerah</b>    |  |             |  |
| 37   | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)  | 58,39           | 68,15       | 37 | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)  | 62,13           | 71,75       | 37 | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)  | 58,53                                      | 71,44       |  |
| 38   | Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)  | 76,77           | 84,20       | 38 | Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)  | 80,4            | 87,52       | 38 | Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)                                      | 80,4                                       | 88,03       |  |
|  | <b>IE 14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif</b> |                 |             |    | <b>KT14. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender dan Masyarakat Inklusif</b> |                 |             |    | <b>KU. 14 Peningkatan kualitas keluarga, pemuda, dan kesetaraan gender</b> |  |             |  |
| 39   | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga   | 70,29           | 80          | 39 | Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga   | 66,05           | 70,77       | 39 | i-Bangga   | 70   | 91          |  |
| 40   | Indeks Ketimpangan Gender (IKG)  | 0,425           | 015         | 40 | Indeks Ketimpangan Gender (IKG)  | 0,516           | 0,266       | 40 | Indeks Ketimpangan Gender (IKG)  | 0,49                                       | 0,23        |  |
|  | <b>IE 15. Lingkungan Hidup Berkualitas</b>                                     |                 |             |    | <b>KT15. Lingkungan Hidup Berkualitas dan Pusat Konservasi Internasional</b> |                 |             |    | <b>KU. 15 Peningkatan kualitas lingkungan hidup</b>                        |  |             |  |
| 41   | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati                                       | 0,44            | 0,75        | 41 | Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati                                     | 0,557           | 0,667       | 41 | Indeks Kualitas Tutupan Lahan  | 72,33                                      | 73,72       |  |
| 42   | Kualitas Lingkungan Hidup  |                 |             | 42 | Kualitas Lingkungan Hidup  |                 |             | 42 | Kualitas Lingkungan Hidup  |  |             |  |



**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2025-2045**



| No | Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan Nasional           | RPJPN 2025-2045        |                        | No  | Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan Provinsi        | RPJPD 2025-2045 |             | No  | Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur | RPJPD 2025-2045 |             |
|----|---|------------------------|------------------------|---|--|-----------------|-------------|---|---|-----------------|-------------|
|    |   | Target RPJPN           |                        |   |  | Target RPJPD    |             |   |   | Target RPJPD    |             |
|    |   | Target 2025            | Target 2045            |   |  | Target 2025     | Target 2045 |   |   | Target 2025     | Target 2045 |
| a. | Indeks kualitas lingkungan hidup                                |                        |                        | a   | Indeks kualitas lingkungan hidup                             | 76,34           | 82,65       | a   | Indeks kualitas lingkungan hidup  | 70,99           | 76,04       |
|    | a-i Indek kualitas udara (IKU)                                  | 78,53                  | 87,05                  |   | a-i  |                 |             |   | a-i   |                 |             |
|    | a-ii Indek kualitas air (IKA)                                   | 72,02                  | 77,50                  |   | a-ii   |                 |             |   | a-ii  |                 |             |
|    | a-iii Indek kualitas lahan (IKL)                                | 77,97                  | 79,74                  |   | a-iii  |                 |             |   | a-iii   |                 |             |
|    | a-iv Indek kualitas air laut (IKAL)                             | 81,02                  | 88,77                  |   | a-iv   |                 |             |   | a-iv  |                 |             |
| b. | Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)                     | 12,5                   | 70                     | b   | Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)                  | 11,6            | 50          | b   | Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%)                               | 13,89           | 50          |
| c. | Timbulan sampah terolah difasilitasi pengolahan sampah (%)      | 24 (16% terdaur ulang) | 90 (35% terdaur ulang) | c.  | Pengelolaan Sampah   |                 |             | c.  | Pengelolaan Sampah  |                 |             |
|    |   |                        |                        | c-i Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)                  | 7  | 85              |             | c-i Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)                  | 24,92   | 80              |             |
|    |   |                        |                        | c-ii Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)* | 38   | 100             |             | c-ii Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)* | 37,76   | 100             |             |
|    | <b>IE 16. Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan</b>  |                        |                        |   | <b>KT16. Berketahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan</b> |                 |             |   | <b>KU. 16 Peningkatan kemandirian pangan dan air</b>                      |                 |             |
| 43 | Ketahanan energi, air, dan kemandirian menuju kedaulatan pangan |                        |                        | 43  | Ketahanan energi, air, dan pangan                            |                 |             | 43  | Ketahanan air dan pangan  |                 |             |



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2025-2045



| No | Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan Nasional                      | RPJPN 2025-2045 |             | No | Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan Provinsi                                   | RPJPD 2025-2045 |             | No | Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Timur               | RPJPD 2025-2045 |             |
|----|--|-----------------|-------------|----|---|-----------------|-------------|----|---|-----------------|-------------|
|    |  | Target RPJPN    |             |    |   | Target RPJPD    |             |    |   | Target RPJPD    |             |
|    |  | Target 2025     | Target 2045 |    |   | Target 2025     | Target 2045 |    |   | Target 2025     | Target 2045 |
| a. | Ketahanan Energi   |                 |             | a. | Ketahanan Energi  |                 |             | a. |   |                 |             |
|    | a-i Indeks ketahanan energi  | 6,77            | 8,24        |    | a-i Konsumsi Listrik per Kapita (kWh)*  | 718             | 2.225       |    | a-i   |                 |             |
|    |  |                 |             |    | a-ii Intensitas Energi Primer (SBM/Rp milyar)*  | 183             | 110         |    | a-ii  |                 |             |
| b. | Prevalensi ketidak cukupan pangan (%)                                      | 7,21            | 0,77        | b. | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan ( <i>Prevalence of Undernourishment</i> ) (%) | 8,50            | 2,64        | b. | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan ( <i>Prevalence of Undernourishment</i> ) (%) | 11,67           | 2,5         |
| c. | Ketahanan air  |                 |             | c. | Ketahanan Air   |                 |             | c. | Ketahanan air   |                 |             |
|    | c-i Kapasitas tampungan air per kapita (m3/kapita)                         | 65,18           | 200         |    | c-i Kapasitas Air Baku (m3/detik)*  | 1,52            | 3,73        |    | c-i Kapasitas Air Baku (m3/detik)*  | 1,52            | 3,73        |
|    | c-ii Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%)    | 39,20           | 100         |    | c-ii Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)                 | 35,34           | 100         |    | c-ii Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)                 | 35,34           | 100         |
|    | <b>IE 17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim</b>              |                 |             |    | <b>KT.17. Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim</b>                           |                 |             |    | <b>KU. 17 Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim</b>                  |                 |             |
| 44 | Proporsi kerugian ekonomi langsung akibat bencana relatif terhadap PDB (%) | 0,137           | 0,11        | 44 | Indeks Risiko Bencana (IRB)*  | 94,85           | 80,77       | 44 | Indeks Risiko Bencana (IRB)*  | 138,74          | 100,7       |
| 45 | Presentasi penurunan emisi GRK (%)   |                 |             | 45 | Persentase Penurunan Emisi GRK (%)  |                 |             | 45 | Persentase Penurunan Emisi GRK (%)  | 25              | 80          |
| a. | Kumulatif  | 28,12           | 51,51       | a. | Kumulatif   | 27,61           | 64,32       | a. |   |                 |             |
| b. | Tahunan  | 32,65           | 80,89       | b. | Tahunan   | 47,87           | 100         | b. |   |                 |             |

Sumber : RPJPN 2025-2045 dan RPJPD PROVINSI KAL-TENG 2025-2045 dan Hasil Analisa Tahun 2024





**Tabel 5.7 Indikator Utama Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur**

| No   | MISI   | SASARAN POKOK   | Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan Kabupaten/Kota  | TARGET RPJPD 2025-2045 |             |             |             |             |
|--|--|---|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  |  |   |  | Target 2025            | Target 2029 | Target 2034 | Target 2039 | Target 2045 |
| <b>TRANSFORMASI SOSIAL</b>                                     |  |   |  |                        |             |             |             |             |
| 1  | Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun SDM yang sehat, unggul, berdaya saing dan adaptif | Terwujudnya Kesehatan untuk Semua   | <b>KU.1 Kesehatan untuk Semua</b>  |                        |             |             |             |             |
|  |  |   | Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun)   | 69,8                   | 72,5        | 75,2        | 77,9        | 79          |
|  |  |   | Kesehatan Ibu dan Anak:  |                        |             |             |             |             |
|  |  |   | Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)   | 121                    | 100         | 70          | 50          | 16          |
|  |  |   | Prevalensi <i>Stunting</i> (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)                                      | 19,1                   | 15          | 11          | 7           | 5           |
|  |  |   | Penanganan Tuberkulosis:   |                        |             |             |             |             |
|  |  |   | Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis ( <i>treatment coverage</i> ) (%)                       | 53,85                  | 65          | 75          | 90          | 100         |
|  |  | Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis ( <i>treatment success rate</i> ) (%)                              | 80,15  | 85                     | 90          | 95          | 100         |             |
|  |  | Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (%)  | 99,5   | 99,5                   | 99,5        | 99,5        | 99,5        |             |
|  |  | Terwujudnya Pendidikan Berkualitas yang Merata  | <b>KU. 2 Peningkatan Kualitas Pendidikan yang Merata</b>   |                        |             |             |             |             |
|  |  |   | Hasil pembelajaran   |                        |             |             |             |             |
|  |  |   | Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk: |                        |             |             |             |             |
|  |  |   | i) Literasi Membaca  | 30                     | 38,12       | 48,27       | 60,45       | 70,61       |
|  |  |   | ii) Numerasi   | 16,94                  | 26,05       | 37,44       | 51,11       | 62,5        |
|  |  |   | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat   | 74,27                  | 78,02       | 82,7        | 88,32       | 93          |
|  |  |   | Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun (tahun)  | 8,25                   | 9           | 9,94        | 11,06       | 12          |
|  |  |   | Harapan lama sekolah (tahun)   | 12,44                  | 12,84       | 13,33       | 13,93       | 14,43       |
|  |  | Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)                          | 6,975  | 7,33                   | 7,98        | 8,25        | 10          |             |
|  |  | Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) | 25,585   | 37,93                  | 50,29       | 62,64       | 75          |             |
|  |  | Terwujudnya Perlindungan Sosial yang Adaptif  | <b>KU. 3 Perlindungan Sosial yang Adaptif</b>  |                        |             |             |             |             |
|  |  |   | Tingkat Kemiskinan (%)   | 6,405                  | 4,949       | 3,493       | 2,036       | 0,580       |
| Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten   | 43,97  |   | 53,37  | 64,78                  | 78,63       | 94,06       |             |             |
| Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%) | 41,495   |   | 49,8   | 59,78                  | 71,75       | 85          |             |             |



| No  | MISI  | SASARAN POKOK   | Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan Kabupaten/Kota   | TARGET RPJPD 2025-2045 |             |             |             |             |
|---|---|---|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|   |   |   |   | Target 2025            | Target 2029 | Target 2034 | Target 2039 | Target 2045 |
| <b>TRANSFORMASI EKONOMI</b>   |   |   |   |                        |             |             |             |             |
| 2   | Mewujudkan transformasi ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan        | Terwujudnya Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi | <b>KU. 4 Inovasi Peningkatan produktivitas ekonomi daerah</b>   |                        |             |             |             |             |
|   |   |   | Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)  | 27,06                  | 28,64       | 30,63       | 32,61       | 35          |
|   |   |   | Pengembangan Pariwisata   |                        |             |             |             |             |
|   |   |   | Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)*  | 1,18                   | 1,48        | 1,955       | 2,43        | 3           |
|   |   |   | Jumlah Tamu Wisatawan Domestik dan Mancanegara (Ribu Orang)*  | 300                    | 340         | 390         | 440         | 500         |
|   |   |   | Indeks Daya Saing Daerah  | 3,00                   | 3,20        | 3,45        | 3,70        | 4,00        |
|   |   |   | Produktivitas UMKM, Koperasi, BUMD  |                        |             |             |             |             |
|   |   |   | Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah Non Pertanian terhadap Seluruh UKM pada Level Kabupaten/Kota | 11,68                  | 12,85       | 14,32       | 15,78       | 17,55       |
|   |   |   | Rasio Kewirausahaan Daerah (%)  | 2,54                   | 3,63        | 5           | 6,36        | 8           |
|   |   |   | Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)   | 0,010                  | 0,017       | 0,027       | 0,036       | 0,048       |
|   |   |   | Return on Aset (ROA) BUMD (%)*  | 1,89                   | 2,72        | 3,55        | 4,39        | 5,22        |
|   |   |   | Tingkat Pengangguran Terbuka (%)  | 4,19                   | 3,72        | 3,31        | 2,94        | 2,6         |
|   |   | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)      | 42,88   | 46,67                  | 50,79       | 55,28       | 60          |             |
|   |   | Indeks Kapabilitas Inovasi                            | 2,6   | 2,94                   | 3,37        | 3,79        | 4,3         |             |
|   |   | Terwujudnya Penerapan Ekonomi Hijau                   | <b>KU. 5 Penerapan Ekonomi Hijau</b>  |                        |             |             |             |             |
|   |   |   | Tingkat Penerapan Ekonomi Hijau Daerah  |                        |             |             |             |             |
|   |   | Terwujudnya Transformasi Digital                      | Indeks Ekonomi Hijau Daerah   | 80,88                  | 84          | 89          | 92          | 93,30       |
|   |   |   | <b>KU. 6 Transformasi Digital</b>   |                        |             |             |             |             |
|   |   | Terwujudnya Integrasi Ekonomi Domestik dan Global     | Persentase Desa/Kelurahan yang memiliki akses internet (%)  | 96,22                  | 100         | 100         | 100         | 100         |
|   |   |   | <b>KU. 7 Integrasi ekonomi domestik dan global</b>  |                        |             |             |             |             |
| Koefisien Variasi Harga Antar Waktu Tingkat Kabupaten                 | 12  |   | 11,4  | 10,65                  | 9,9         | 9           |             |             |
| Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)                                | 38,07   |   | 37,45   | 36,68                  | 35,92       | 35          |             |             |
| Terwujudnya Perkotaan dan Perdesaan Sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi | Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)   | 16,95   | 25,56   | 36,32                  | 47,09       | 60          |             |             |
|   | <b>KU. 8 Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru</b> |   |   |                        |             |             |             |             |
|   | Kota dan Desa Maju, Inklusif, dan Berkelanjutan                             |   |   |                        |             |             |             |             |
|   | Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan (%)    | 51,18   | 70  | 80                     | 90          | 100         |             |             |
| Persentase Desa Mandiri (%)   | 42,86   | 45,24   | 48,21   | 51,19                  | 54,17       |             |             |             |
| <b>TRANSFORMASI TATA KELOLA</b>                                       |   |   |   |                        |             |             |             |             |
| 3   | Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan                            | Terwujudnya Tata Kelola yang Inovatif dan Adaptif     | <b>KU. 9 Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Adaptif</b>                                       |                        |             |             |             |             |
|   |   |   | Indeks Reformasi Hukum  | 70                     | 75          | 80          | 85          | 90          |
|   |   |   | Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik  | 2,51                   | 3,5         | 4           | 4,5         | 5           |
|   |   |   | Indeks Pelayanan Publik   | 2,5                    | 3,75        | 4,38        | 4,45        | 5           |
|   |   |   | Skor MCP (Monitoring Center for Prevention)   | 75                     | 80          | 85          | 90          | 92          |



| No   | MISI<br><br>yang inovatif<br>dan adaptif                                   | SASARAN POKOK  | Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan<br>Kabupaten/Kota                      | TARGET RPJPD 2025-2045                      |                               |                |                |                |       |    |
|--|--|--|---|---|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|-------|----|
|  |  |  |   | Target<br>2025                              | Target<br>2029                | Target<br>2034 | Target<br>2039 | Target<br>2045 |       |    |
| <b>KEAMANAN DAERAH TANGGUH, DEMOKRASI SUBSTANSIAL, DAN STABILITAS EKONOMI MAKRO DAERAH</b> |  |  |   |   |                               |                |                |                |       |    |
| 4  | Mewujudkan keamanan daerah, kepemimpinan demokratis dan stabilitas ekonomi | Terwujudnya Hukum Berkeadilan dan Keamanan Daerah Tangguh                    | <b>KU. 10 Penegakan Hukum yang Berkeadilan dan Keamanan Daerah</b>                  |   |                               |                |                |                |       |    |
|  |  |  | Persentase capaian pelaksanaan aksi HAM   | 75  | 80                            | 85             | 90             | 95             |       |    |
|  |  |  | Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%) | 69,59                                       | 75                            | 80             | 85             | 86,97          |       |    |
|  |  |  | Indeks Demokrasi Kabupaten  | 70  | 75                            | 81             | 83             | 85             |       |    |
|  |  | Terwujudnya Stabilitas Ekonomi Makro Daerah                                  | <b>KU. 11 Stabilitas Ekonomi Makro Daerah</b>                                       |   |                               |                |                |                |       |    |
|  |  |  | Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)  | 0,8   | 0,85                          | 0,9            | 1              | 1,1            |       |    |
|  |  |  | Tingkat Inflasi (%)   | 2,56  | 2,69                          | 2,83           | 2,96           | 3,1            |       |    |
|  |  |  | Pendalaman/Intermediasi Sektor Keuangan   |   |                               |                |                |                |       |    |
|  |  |  | Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)  | 23,19                                       | 33,12                         | 43,04          | 52,97          | 62,9           |       |    |
|  |  | Terwujudnya Birokrasi Ideal  | Total Kredit/PDRB (%)   |   | 21,8                          | 31,5           | 41,2           | 50,9           | 60,6  |    |
|  |  |  |   | Inklusi Keuangan (%)                        |                               | 75             | 80             | 85             | 90    | 95 |
|  |  |  |   |   | <b>KU. 12 Birokrasi Ideal</b> |                |                |                |       |    |
| Indeks Reformasi Birokrasi   |  | 65   | 80,05   | 80,75                                       | 85                            | 91             |                |                |       |    |
|  | Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP)           | 71   | 72,05   | 75  | 85                            | 92             |                |                |       |    |
| <b>KETAHANAN SOSIAL BUDAYA DAN EKOLOGI</b>   |  |  |   |   |                               |                |                |                |       |    |
| 5  | Mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi                            | Terwujudnya Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju                         | <b>KU. 13 Peningkatan kerukunan umat beragama dan kebudayaan daerah</b>             |   |                               |                |                |                |       |    |
|  |  |  | Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)   | 58,53                                       | 61,11                         | 64,3           | 67,57          | 71,44          |       |    |
|  |  |  | Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)   | 80,4  | 82,3                          | 84,2           | 86,5           | 88,03          |       |    |
|  |  | Terwujudnya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif | <b>KU. 14 Peningkatan kualitas keluarga, pemuda, dan kesetaraan gender</b>          | i-Bangga                                    | 70                            | 75             | 80             | 85             | 91    |    |
|  |  |  |   | Indeks Ketimpangan Gender (IKG)             | 0,49                          | 0,41           | 0,37           | 0,28           | 0,23  |    |
|  |  | Terwujudnya Lingkungan Hidup Berkualitas dan Pusat Konservasi Internasional  | <b>KU. 15 Peningkatan kualitas lingkungan hidup</b>                                 | Indeks Kualitas Tutupan Lahan               | 72,33                         | 72,60          | 72,95          | 73,30          | 73,72 |    |
|  |  |  |   | Kualitas Lingkungan Hidup                   |                               |                |                |                |       |    |
|  |  |  |   | Indeks kualitas lingkungan hidup            | 70,99                         | 72,00          | 73,26          | 74,52          | 76,04 |    |
|  |  |  |   | Rumah tangga dengan akses sanitasi aman (%) | 13,89                         | 20             | 30             | 40             | 50    |    |
|  |  |  |   | Pengelolaan Sampah                          |                               |                |                |                |       |    |
|  |  | Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)                   | 24,92   | 38,69                                       | 52,46                         | 66,23          | 80             |                |       |    |



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD)  
KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR TAHUN 2025-2045



| No | MISI | SASARAN POKOK  | Arah Pembangunan/Indikator Utama Pembangunan Kabupaten/Kota                             | TARGET RPJPD 2025-2045 |             |             |             |             |
|----|------|--|---|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|    |      |  |   | Target 2025            | Target 2029 | Target 2034 | Target 2039 | Target 2045 |
|    |      |  | Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)*              | 37,76                  | 53,32       | 68,88       | 84,44       | 100         |
|    |      | <b>Terwujudnya Berketahanan Air dan Kemandirian Pangan</b>         | <b>KU. 16 Peningkatan kemandirian pangan dan air</b>                                    |                        |             |             |             |             |
|    |      |  | Ketahanan air dan pangan  |                        |             |             |             |             |
|    |      |  | Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan ( <i>Prevalence of Undernourishment</i> ) (%) | 11,67                  | 9,84        | 7,54        | 5,25        | 2,5         |
|    |      |  | Ketahanan air   |                        |             |             |             |             |
|    |      |  | Kapasitas Air Baku (m3/detik)*  | 1,52                   | 2           | 2,6         | 3,2         | 3,73        |
|    |      |  | Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (%)                      | 35,34                  | 49          | 64          | 84          | 100         |
|    |      | <b>Terwujudnya Resiliensi Terhadap Bencana dan Perubahan Iklim</b> | <b>KU. 17 Peningkatan ketahanan bencana daerah dan perubahan iklim</b>                  |                        |             |             |             |             |
|    |      |  | Indeks Risiko Bencana (IRB)*  | 138,74                 | 131,8       | 125,21      | 118,95      | 100,7       |
|    |      |  | Persentase Penurunan Emisi GRK (%)  | 25                     | 41          | 54          | 67          | 80          |

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2024

## BAB VI PENUTUP

### 6.1 KAIDAH PELAKSANAAN

Kaidah pelaksanaan menjadi penting untuk memastikan seluruh arah kebijakan dan sasaran pembangunan dapat tercapai dan terlaksana. Beberapa kaidah pelaksanaan memuat substansi mulai dari pelaksanaan rencana turunan, serta melaksanakan monitoring dan evaluasi, serta proses peninjauan kembali. Beberapa skema yang dimaksud dalam kaidah pelaksanaan ini termuat sebagai berikut:

1. **Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan:** RPJPD Kabupaten Kotawaringin Timur 2025-2045 akan menjadi acuan utama dalam penyusunan dokumen perencanaan turunan seperti RPJMD dan RKPD. Proses trilateral meeting antara Bapperida, BKAD, dan PD sektoral akan dilaksanakan secara rutin untuk memastikan keselarasan antara perencanaan dan penganggaran. Hal ini akan memastikan bahwa alokasi anggaran dalam APBD setiap tahunnya sejalan dengan visi dan misi jangka panjang daerah.
2. **Sistem Insentif:** Sistem insentif akan diterapkan untuk mendorong pencapaian target pembangunan. Insentif dapat berupa penghargaan atau alokasi anggaran tambahan bagi PD yang berhasil mencapai atau melampaui target kinerja yang ditetapkan dalam RPJPD. Sistem ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan kinerja aparatur dalam melaksanakan program-program pembangunan.
3. **Kerangka Pengendalian:** Monitoring akan dilakukan secara rutin setiap tahun untuk memantau pencapaian target tahunan. Evaluasi dan peninjauan kembali akan dilaksanakan setiap 5 tahun untuk menilai pencapaian target pembangunan jangka menengah dan mengidentifikasi kebutuhan penyesuaian RPJPD. Manajemen risiko pembangunan daerah dan nasional akan diintegrasikan dalam proses pengendalian dan evaluasi untuk mengantisipasi potensi hambatan dalam pencapaian sasaran pembangunan.

4. Mekanisme Perubahan: RPJPD dapat ditinjau kembali dan/atau diubah apabila terjadi perubahan signifikan pada kondisi nasional, perubahan kebijakan nasional yang berdampak pada strategi pembangunan daerah, atau hasil evaluasi menunjukkan kebutuhan penyesuaian substansial. Proses perubahan akan melibatkan partisipasi publik dan harus mendapat persetujuan DPRD.
5. Komunikasi Publik: Strategi komunikasi publik akan dikembangkan untuk menyebarluaskan informasi tentang RPJPD dan capaian pembangunannya. Ini mencakup publikasi rutin melalui berbagai media, forum diskusi publik, dan pelaporan tahunan yang mudah diakses masyarakat. Tujuannya adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah.

## **6.2 KAJIDAH PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN**

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ini dapat dilaksanakan dengan dukungan sumber pembiayaan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, dalam memetakan sumber pembiayaan tersebut, diperlukan kaidah pembiayaan pembangunan yang dapat disebutkan dibawah ini:

1. Peningkatan Kapasitas Pembiayaan Sektor Publik dan Non Publik: Untuk sektor publik, akan dilakukan optimalisasi pendapatan asli daerah, peningkatan efisiensi pengelolaan keuangan daerah, dan pengembangan skema pembiayaan inovatif. Sumber pembiayaan pembangunan dalam melaksanakan program dan kegiatan dalam dokumen ini bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan sumber-sumber lain yang sah. Bagian kaidah pembiayaan pembangunan harus turut disertakan di dalam substansi yang tercantum di dalam RPJMD yang akan disusun sebagai penjabaran lima tahunan dari dokumen RPJPD ini. Sementara untuk sektor non publik, fokus akan diberikan pada fasilitasi akses pembiayaan bagi UMKM, pengembangan ekosistem



investasi yang kondusif, dan penguatan kemitraan dengan lembaga filantropi dan CSR perusahaan.

2. Manajemen Investasi: Manajemen investasi akan ditingkatkan melalui penyusunan rencana investasi jangka panjang, pembentukan unit khusus pengelola investasi daerah, pengembangan sistem informasi investasi terintegrasi, dan peningkatan kapasitas SDM dalam manajemen investasi. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset dan investasi pemerintah daerah, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan jangka Panjang.

Demikian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2025-2045 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai acuan dalam menyusun perencanaan lima tahunan dan tahunan.

ditetapkan di Sampit

tanggal 30 Agustus 2024

**BUPATI KOTAWARINGIN TIMUR,**



**H. ALIKINOR**